VISI • KOLABORASI • KEBERLANJUTAN

Transformasi Pembangunan NTB *Bermatabat*

Mewujudkan NTB yang Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing melalui Transformasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan.



GAGASAN & SOLUSI
UNTUK NTB YANG LEBIH BAIK

Dr Ikhwan HS.,SE., MM.,M.Si

PEMIKIR • AKADEMISI • PRAKTISI

Transformasi Pembangunan NTB Bermatabat

Dr Ikhwan HS.,SE.,MM.,M.Si

Transformasi Pembangunan NTB Bermatabat
© Dr Ikhwan HS.,SE., MM.,M.Si , 2026

Penulis : Dr Ikhwan HS.,SE., MM.,M.Si
Design Layout : Hartanto,S.IP.

ISBN : 978-634-96388-5-2
Penerbitan I : Agustus., 2026
Halaman : iii + 370 halaman
Ukuran : 14 x 21 cm

Penerbitkan Pertama kali oleh :
LPMI (Lembaga Pembangunan Masyarakat Indonesia)
Senen Raya Nomor 10, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia.
Email : admin@lpmiinstitute.eu.org
Website: https://lpmiinstitute.web.id

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Dilarang memperbanyak atau memindahkan, sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apa-pun, secara elektronik maupun mekanis,termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Pembangunan daerah sejatinya bukan sekadar proses meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, melainkan upaya memuliakan manusia dan menegakkan martabat kolektif masyarakatnya. ***Tranformasi Pembangunan NTB Bermartabat*** disusun sebagai kerangka pemikiran dan visi masa depan Nusa Tenggara Barat yang menekankan pada kata kunci "martabat" sebagai arah sekaligus tujuan pembangunan. Hal ini berangkat dari keyakinan bahwa Nusa Tenggara Barat (NTB) harus tumbuh dengan pijakan pada identitasnya sendiri, yakni pada nilai budaya, kekuatan sosial, dan cita-cita bersama masyarakatnya.

Seperti uraian dalam pembahasan buku ini, secara filosofis memandang bahwa pembangunan ditegaskan sebagai proses yang harus berpusat pada manusia (antropologis). Sehingga martabat bukan dimaknai secara abstrak, melainkan sebagai kondisi nyata ketika masyarakat memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan ruang partisipasi sosial yang adil. Pembangunan yang bermartabat menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Selanjutnya, pembahasan dalam buku ini juga menelusuri akar historis dan kultural masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya pada budaya Sasak, Samawa, dan Mbojo yang sejak lama menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong. Budaya tidak diposisikan sebagai simbol seremonial, tetapi

sebagai etika sosial yang hidup dan relevan. Gotong royong dipahami sebagai energi kolektif yang mampu memperkuat kohesi sosial sekaligus menjadi fondasi kebijakan publik yang inklusif.

Adapun dalam kerangka pandang ekonomi yang ditawarkan menempatkan prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagai dasar penguatan ekonomi rakyat. Koperasi, usaha mikro, dan inisiatif lokal dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperluas distribusi kesejahteraan. Transformasi struktural ekonomi menjadi tema penting berikutnya: bagaimana Nusa Tenggara Barat bergerak dari ketergantungan pada sektor primer menuju hilirisasi, peningkatan nilai tambah, dan penguatan sektor produktif yang lebih berkelanjutan.

Pembahasan tentang kemiskinan diarahkan pada pendekatan multidimensional. Kemiskinan tidak hanya dilihat sebagai kekurangan pendapatan, tetapi juga sebagai keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan kesempatan hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, strategi yang ditawarkan menekankan integrasi kebijakan menghubungkan pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi lokal dalam satu sistem yang saling menopang.

Dalam konteks tata kelola, buku ini juga menggarisbawahi pentingnya pemerintahan yang inovatif, adaptif, dan berorientasi hasil. Pemerintah daerah diposisikan sebagai penggerak perubahan, katalisator kolaborasi, sekaligus penjaga kepentingan publik. Transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat.

Adapun dimensi pembangunan manusia menjadi inti dari keseluruhan gagasan. Bahwasannya pendidikan yang relevan, layanan kesehatan yang merata, serta penguatan karakter dan spiritualitas ditempatkan sebagai fondasi jangka panjang. Pembangunan tidak boleh hanya melahirkan pertumbuhan, tetapi juga generasi yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Buku ini juga memetakan adanya tantangan global yang saat ini dan akan berlangsung, khususnya tentang disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan dinamika ekonomi dunia yang diharuskan menuntut kesiapan dan ketahanan daerah. NTB harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Diversifikasi ekonomi, penguatan kapasitas lokal, dan pembangunan berkelanjutan menjadi kunci menghadapi masa depan.

Maka **Transformasi Pembangunan NTB Bermartabat** yang diuraikan dalam buku ini, bukan sekadar konsep normatif, melainkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan setiap langkah pembangunan senantiasa berpihak pada kemuliaan manusia dan kekuatan kebersamaan.

Semoga buku ini menjadi sumbangan pemikiran yang memperkaya dialog publik dan menggerakkan aksi nyata menuju Nusa Tenggara Barat yang maju, adil, dan benar-benar bermartabat.

Jakarta, 1 Juli 2026

Dr Ikhwan HS.,SE., MM.,M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....I

BAB I TENTANG NTB BERMARTABAT.....1

1.1 MAKNA BERMARTABAT.....4
1.2 PILAR KEMAJUAN NTB.....12
1.2.1. Inovasi.....12
1.2.2. Kreativitas.....15
1.2.3. Berdaya Saing.....17
1.2.4. Transformasi Digital.....19
1.2.5. Politik yang Beradab dan Visioner.....23
1.2.6. Spiritual Leadership.....29
1.3 BUDAYA SEBAGAI LANDASAN MARTABAT.....33

BAB II TRANSFORMASI PEMBANGUNAN NTB.....37

2.1 POTRET EKONOMI NTB SAAT INI.....39
2.2 TRANSFORMASI EKONOMI: KOMODITAS KE NILAI TAMBAH.....43

BAB III PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH.....47

3.1. STRATEGI PENINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI DAERAH.....49
3.2. INVESTASI BERBASIS NILAI TAMBAH DAN KETERLIBATAN LOKAL. .54
3.2.1. Hilirisasi dan Penguatan Rantai Nilai Lokal.....55
3.2.2. Keterlibatan Lokal dan Kemitraan Inklusif.....58
3.2.3.Transfer Teknologi dan Penguatan SDM.....63
3.2.4. Keberlanjutan Lingkungan dan Ekonomi Hijau.....66
3.3. TATA KELOLA DAN PENGAWASAN INVESTASI DAERAH.....69

BAB IV PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA.....72

4.1. PENGERTIAN SUMBER DAYA MANUSIA.....74
4.2. DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA.....76
4.2.1. Dimensi Biologi.....79
4.2.2. Dimensi Kecerdasan.....83
4.2.3. Dimensi Spiritual.....86

4.3. Kesehatan dan Disabilitas.....89
4.3.1. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat.....93
4.3.2. Meningkatkan Asupan Gizi.....96
4.3.3. NTB Pro Disabiltas.....103
4.3.4. Asuransi dan Layanan Kesehatan.....106
4.4. Meningkatkan Mutu Pendidikan.....109
4.5. Toleransi dan Pembangunan Spiritual.....115

BAB V MEMBANGUN DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM BISNIS DAERAH.....118

5.1. Ekosistem Bisnis Berbasis Martabat dan Budaya Lokal.....118
5.2. Infrastruktur, Inovasi, dan Hilirisasi Nilai Tambah.....121
5.2.1. Infrastruktur untuk Pengungkit Produktivitas.....122
5.2.2. Inovasi Teknologi dan Inkubasi Bisnis Daerah.....125
5.2.3. Strategi Hilirisasi dan Rantai Nilai Terintegrasi.....126
5.3. Kolaborasi Multipihak dan Transformasi Kewirausahaan.....129
5.3.1. Pemerintah sebagai Orkestrator Ekosistem.....130
5.3.2. Perguruan Tinggi sebagai Sumber Inovasi.....132
5.3.3. Dunia Usaha sebagai Penggerak Utama.....135

BAB VI PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL.....138

6.1. Strategi peningkatan PDRB.....140
6.2. Diversifikasi PAD daerah.....144
6.3. peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat.....149

BAB VII ENTREPRENEURSHIP GOVERMENT.....153

7.1. Dari Administratif ke Produktif.....153
7.2. Pilar Entrepreneurship Government.....160
7.3. Koperasi sebagai Mesin Kesejahteraan.....169
7.4. Sektor Prioritas Entrepreneurial Government.....172

BAB VIII MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA.....179

8.1. Gambaran Umum Ketenagakerjaan di NTB.....179
8.2. Struktur Lapangan Kerja Berdasarkan Sektor.....185
8.2.1. Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.....190

8.2.2. Industri Pengolahan.....193
8.2.3. Pariwisata dan Jasa.....195
8.2.4. Pertambangan.....198
8.3. TANTANGAN KETENAGAKERJAAN DI NTB.....200
8.3.1. Pendidikan dan Keterampilan.....201
8.3.2. Urbanisasi dan Migrasi.....203
8.4. PROYEKSI KEBUTUHAN LAPANGAN KERJA.....208
8.5. STRATEGI TERSTRUKTUR PENCIPTAAN KERJA.....212

BAB IX MENINGKATKAN PRODUKSI PERTANIAN.....226

9.1 PERTANIAN DAN TANTANGAN PERUBAHAN IKLIM.....228
9.2 LEMBAGA PENELITIAN SEBAGAI PILAR INOVASI.....232
9.2.1. Pembangunan Pusat Penelitian Pertanian Terpadu.....234
9.2.2. Beasiswa Keilmuan Bioteknologi dan Sains Pertanian Adaptif..236
9.2.3. Kompetisi Inovasi sebagai Instrumen Hilirisasi Riset Pertanian.....239
9.3 PERTANIAN ADAPTIF.....241
9.4.TATA KELOLA PERTANIAN BERBASIS RISET.....245

BAB X SUMBER DAYA ALAM DAN PERTAMBANGAN.....248

10.1 TATA KELOLA LINGKUNGAN.....249
10.2 SDA SEBAGAI AMANAH PEMBANGUNAN.....265
10.3 PERTAMBANGAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL.....269
10.4 TATA KELOLA SDA MENUJU PEMBANGUNAN HIJAU.....276

BAB XI MENGATASI KEMISKINAN.....282

11.1. DINAMIKA KEMISKINAN DI NTB.....284
11.2. KEMISKINAN STRUKTURAL DAN FAKTOR PENYEBAB.....289
11.3. PENINGKATAN PENDAPATAN BERBASIS PRODUKTIVITAS.....299
11.4. PERLINDUNGAN SOSIAL YANG TEPAT SASARAN.....303
11.5. PEMBERDAYAAN PERDESAAN.....306
11.6. DIMENSI MULTIDIMENSIONAL KEMISKINAN.....310

BAB XII BUDAYA POLITIK BERMARTABAT.....313

12.1 FONDASI BUDAYA POLITIK BERMARTABAT.....313
12.2 POLITIK BERBASIS KEARIFAN LOKAL.....319

12.3 KEPEMIMPINAN BERMARTABAT.....321
12.3.1 Kerangka Teoretik Kepemimpinan.....321
12.3.2 Kepemimpinan sebagai Amanah.....323
12.3.3 Kepemimpinan dalam Perspektif Pancasila.....328
12.3.4 Tantangan Kepemimpinan di Era Modern.....330
12.4 PARTISIPASI POLITIK WARGA.....333
12.5 POLITIK BERADAB MENUJU INDONESIA EMAS 2045.....338

BAB XIII KEGOTONGROYONGAN PILAR SOSIAL.....341

BAB XIV MELINDUNGI BUDAYA DAN IDENTITAS DAERAH 348

14.1 BUDAYA SEBAGAI BENTENG IDENTITAS DI ERA PERUBAHAN.....348
14.2 BUDAYA DALAM ERA KONTEMPORER.....351
14.3 PERLINDUNGAN BUDAYA.....354
14.4 STRATEGI MELINDUNGI BUDAYA DI ERA AI.....358
14.5 PERAN KREATIVITAS DALAM PRODUKSI DATA BUDAYA.....365

DAFTAR PUSTAKA.....370

BAB I TENTANG NTB BERMARTABAT

Kemajuan tanpa budaya akan kehilangan arah, budaya tanpa kemajuan akan kehilangan daya.

Bila kita berbicara "pembangunan" sering diartikan dalam pandangan sempit yakni sebagai sebuah pertumbuhan ekonomi dan kemajuan infrastruktur, dimana indikator keberhasilannya diukur melalui angka, seperti PDRB, investasi, ekspor, dan peningkatan aset fisik. Artinya pandangan ini secara serta merta meminggirkan manusia sebagai aspek inti dalam pembangunan, hal ini seperti kritik yang dilakukan oleh seorang ekonom dan filsuf dari India Amartya Sen dalam *Development as Freedom* (1999: 18) yang menegaskan bahwa pembangunan sejati adalah proses memperluas kemampuan manusia untuk hidup yang lebih bermakna dan bermartabat, bukan sekadar memperluas kekayaan material.

Adapun, Robert Chambers melihat pembangunan melalui pendekatan *endogenous development* yakni sebuah pendekatan pembangunan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya, potensi, dan kekuatan internal suatu wilayah atau negara, seperti sumber daya manusia, budaya, pengetahuan lokal, dan lembaga. Robert Chambers dalam karyanya yang berjudul *Rural Development: Putting the Last First* (1983 :32–33) melihat bahwa

pembangunan seringkali gagal bukan karena adanya niat buruk, akan tetapi akibat bias pembangunan, hal ini dikarenakan menempatkan posisi manusia sebagai suatu objek, bukan subjek pembangunan, artinya bahwa pembangunan yang sukses berangkat dari nilai, tradisi, dan aspirasi masyarakat sendiri.

Hal senada juga disampaikan oleh Ki Hadjar Dewantara (1935) yang menegaskan bahwa pendidikan dan pembangunan harus berpijak pada kebudayaan bangsa sendiri. Karena pada dasarnya budaya adalah "buah budi manusia" yang memberi arah moral bagi peradaban. Sementara Soedjatmoko, dalam Dimensi Manusia dalam Pembangunan (1983), menyebut bahwa modernisasi tanpa moral adalah kehampaan. Pembangunan yang meniru Barat tanpa nilai akan kehilangan jati diri bangsa.

Maka dari itu, pembangunan suatu daerah, sesungguhnya tidak mungkin dilepaskan dari karakter, nilai, dan budaya yang hidup di tengah masyarakatnya. Artinya bahwa budaya sering kali menjadi landasan spiritual dan moral dari seluruh proses pembangunan (contoh: rumah adat, tempat ibadah). Karena itu, visi pembangunan yang sejati harus selalu berakar pada jati diri budaya daerah, agar memiliki arah yang selaras dengan kehidupan dan kesadaran masyarakat setempat.

Jika pembangunan dijalankan dengan mengabaikan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal, maka yang terjadi bukan kemajuan, melainkan mal-konstruksi sosial dan moral. Pembangunan semacam itu mungkin akan tampak berhasil secara fisik, tetapi sesungguhnya merusak tatanan nilai yang menopang kehidupan masyarakat. Hal tersebut mungkin bisa melahirkan kota yang megah namun kehilangan rasa kebersamaan, hilangnya budaya kegotongroyongan, hingga

terciptanya pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan sosial, dan menumbuhkan infrastruktur tanpa menumbuhkan manusia. Arah pembangunan yang terlepas dari budayanya ibarat pohon yang tercerabut dari akarnya, walaupun tumbuh cepat, tetapi rapuh dan mudah tumbang.

Sebaliknya, apabila pembangunan dilakukan dalam harmoni dengan budaya setempat, maka setiap kebijakan, program, dan inovasi akan memiliki makna yang lebih dalam dan berkelanjutan. Pembangunan seperti ini tidak hanya menciptakan kemajuan material, tetapi juga menguatkan identitas, rasa memiliki, dan kebanggaan kolektif masyarakat. Dimana dapat pembangunan macam ini dapat menyatukan kemajuan ekonomi dengan keluhuran moral, dan menjadikan budaya sebagai sumber inspirasi, bukan hambatan bagi kemajuan.

Dari pemahaman tersebut, jelas bahwa pembangunan di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak dapat didasarkan semata pada asas keuntungan atau proyek, melainkan harus berpijak pada asas kesesuaian budaya dan kearifan lokal. Kita perlu paham bahwa NTB bukan sekadar wilayah administratif, tetapi ruang peradaban yang memiliki jiwa, bahasa, dan nilai. Artinya setiap kebijakan publik, investasi, dan inovasi di NTB harus mencerminkan nilai hidup masyarakatnya, seperti: nilai yang menghormati alam, menegakkan adab, memuliakan manusia. Pembangunan yang berpihak pada budaya akan melahirkan kemajuan yang manusiawi, sedangkan pembangunan yang menyingkirkan budaya hanya akan menciptakan kemajuan tanpa arah dan kemakmuran tanpa makna.

Dengan demikian, budaya harus dipandang bukan sebagai pelengkap pembangunan, melainkan sebagai kompas moral dan sumber legitimasi sosial bagi setiap arah kebijakan daerah. Pembangunan yang berakar pada budaya adalah pembangunan yang memiliki memori, identitas, dan arah jangka panjang. Dimana tidak hanya menyesuaikan diri dengan zaman, tetapi juga membimbing zaman agar tetap beradab/bermartabat. Maka pembangunan NTB bermartabat hanya akan lahir/muncul ketika kemajuan ekonomi berjalan seiring dengan keluhuran budaya, ketika inovasi tumbuh di atas nilai, dan ketika proyek besar dijalankan dengan penghormatan terhadap kehidupan sosial dan spiritual masyarakatnya. Itulah hakikat pembangunan yang sesungguhnya, pembangunan yang tidak hanya membangun daerah secara fisik, akan tetapi juga memuliakan manusia yang tinggal di dalamnya.

1.1 Makna Bermartabat

Kata "Martabat" bukan sekadar ungkapan yang indah diucapkan dalam pidato atau semboyan moral, melainkan fondasi dari sebuah peradaban. Kata martabat (dalam bahasa inggris: *dignity*) berasal dari bahasa Latin "*dignitas*", yang berarti nilai, kehormatan, dan kelayakan seseorang untuk dihormati.

Konsep martabat sesungguhnya bukan konsep modern. Dalam tradisi filsafat Barat, martabat dipahami sebagai nilai intrinsik manusia yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh keadaan apa pun. Pada zaman Romawi Kuno, Cicero (106–43 SM) bahwa martabat manusia melekat dalam kodratnya sebagai makhluk berakal budi, artinya bahwa ke-khas-an manusia yang memiliki akal/intelektual inilah dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, yang menjadikan manusia memiliki martabat.

Sementara itu, menurut Immanuel Kant (1724–1804) dalam *Groundwork for the Metaphysics of Morals* (1785) bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki martabat, hal ini karena manusia adalah makhluk rasional yang dapat berpikir dan menentukan arah hidupnya sendiri.

> Manusia dan bahkan setiap makhluk rasional hidup sebagai tujuan dalam dirinya, bukan sekedar alat yang dipakai untuk keinginan tertentu, ia harus dipandang sebagai tujuan dalam semua tindakannya, baik yang diarahkan untuk dirinya maupun untuk orang lain.

Pada abad ke-18 konsep martabat manusia dirumuskan sebagai basis utama dalam konsep mengenai hak-hak asasi manusia (HAM) sebagai validitas universal yang menjamin mengenai kebebasan, keadilan, dan nilai moral inti bagi semua orang. Itu berarti, HAM berlaku kapan saja, di mana saja dan bagi setiap individu tanpa pengecualian. Secara logis tuntutan validitas seperti ini hanya mungkin dipikirkan jika HAM dipahami secara formal-abstrak dan dilucuti dari segala substansi dan rumusan-rumusan konkret. Inilah kekhasan konsep moral masyarakat modern. Hal yang sama berlaku juga pandangan modern tentang hukum kodrat seperti tercermin dalam pergeseran paradigma dari nilai-nilai keutamaan etis menuju norma-norma formal deontologis (Madung, 2012).

> *Recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world*

Sementara itu, menurut seorang filsuf dan sosiolog dari Jerman Jurgen Habermas, martabat manusia terkait erat dengan konsep rasionalitas komunikatif dan etika diskursus, yang menempatkan martabat sebagai dasar hukum dan moral yang

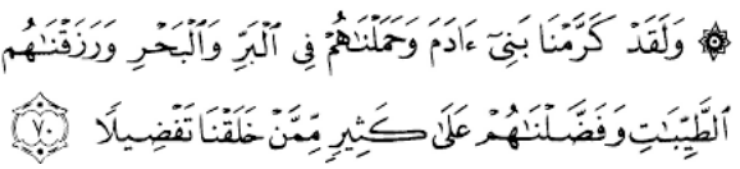
harus dijamin melalui konsensus bebas dari paksaan dalam ruang publik. Martabat manusia bukanlah status yang absolut dari seorang individu seperti pada pandangan Kant, melainkan sesuatu yang baru dapat terealisasi dan dijamin melalui pengakuan dan partisipasi setara dalam dialog rasional di masyarakat.

> Jika dalam konsep hukum kodrat klasik norma-norma hukum dan moral secara substansial berorientasi pada konsep hidup baik atau keutamaan etis warga, maka hukum formal modern dibebaskan dari katalog kewajiban tatanan hidup material, entah itu kewajiban suku atau kota. Hukum formal melegitimasi adanya sebuah ranah kebebasan individual yang netral, di dalamnya setiap individu secara egoistis dapat mengejar keuntungan-keuntungan pribadi. Hukum formal pada prinsipnya merupakan hukum kebebasan, karena ia harus mengizinkan semua tindakan yang secara eksplisit tidak dilarang berdasarkan kriteria-kriteria perilaku eksternal. Hobbes sudah merumuskan secara jelas bahwa izin yang tidak langsung ini mengungkapkan kebebasan menurut undang-undang formal. Dan Locke mendefinisikan tujuan undang-undang tersebut sebagai penguasaan atas hak milik privat yang juga mencakup hak hidup dan kebebasan (Habermas, 1982 :90)

Dalam tradisi Timur, termasuk dalam pandangan budaya dan spiritual Nusantara, martabat dipahami tidak hanya sebagai hak individu, tetapi sebagai harmoni antara manusia, masyarakat, dan alam. Adapun dalam falsafah Pancasila, terutama sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sangatlah jelas bahwa martabat manusia menjadi dasar moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan dan

peradaban lahir dari kesadaran akan nilai manusia yang setara dan saling menghormati.

Filosofi ini sejalan dengan pandangan Islam tentang *karāmah al-insān*, yang mengartikan bahwa setiap manusia diciptakan Allah dengan kemuliaan.



Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna (QS. Al-Isra: 70).

Dalam QS. Al-Isra' 70, setidaknya ada beberapa tafsir, antara lain: Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menekankan bahwa kemuliaan manusia berasal dari kehendak Allah. Bukan karena jasadnya, tetapi karena akal dan rohaninya. Inilah yang menjadikan manusia khalifah di bumi. Sementara, dalam tafsir Al-Maraghi bahwa martabat adalah sebagai anugerah Tuhan, dimana manusia dimuliakan dengan akal dan kemampuan berpikir, dengan postur dan kemampuan menguasai alam, dan oleh karena itu layak diberi tanggung jawab (Kurniawan & Pulungan, 2025).

Artinya dalam tradisi Islam mengenal dua lapis martabat, yakni bawaan (*inherent*) dan diperoleh (*acquired*). Martabat bawaan adalah bentuk penghargaan universal dari Tuhan yang melekat pada setiap manusia sebagai ciptaan-Nya. Ini berarti,

setiap manusia (apa pun agama, ras, atau status sosialnya) memiliki kemuliaan eksistensial karena berasal dari Tuhan yang sama. Adapun Martabat yang diperoleh akibat muncul dari perjuangan spiritual dan etika dalam menghindari kejahatan dan menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai Qur'an (Afzali, 2010).

Bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat, martabat bukanlah konsep baru yang datang dari ruang akademik atau dokumen hukum modern. Ia telah hidup jauh sebelum istilah itu dikenal secara teoretis. Martabat telah berakar dalam kesadaran kolektif, bahasa, adat, dan perilaku sosial masyarakat NTB yang menjadi pedoman hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia tidak diajarkan lewat wacana, tetapi dihayati dalam tindakan sehari-hari, seperti cara menyapa, menolong, bersikap sopan, dan menjaga nama baik keluarga serta komunitas.

Dalam konteks ini, martabat tidak dipahami sekadar sebagai "hak untuk dihormati", melainkan sebagai tanggung jawab moral untuk menghormati. Bukan semata milik pribadi, tetapi bagian dari kehormatan sosial yang melekat pada seluruh komunitas. Bagi masyarakat NTB, menjaga martabat berarti menjaga keseimbangan antara diri, sesama, dan alam, antara hak dan kewajiban, antara kebebasan dan adab (ciri khas budaya dan falsafah timur, yang mengedepankan harmoni manusia-alam-sang pencipta).

Dalam budaya Sasak, dikenal prinsip luhur *paeq saling jaga*, saling hormat sebuah pandangan hidup yang menegaskan bahwa harga diri seseorang tidak dapat dipisahkan dari cara ia memperlakukan orang lain. Martabat bukan milik individu yang

berdiri sendiri, melainkan hasil dari hubungan yang saling menjaga dan menghormati.

Falsafah ini mengandung pesan sosial yang dalam, bahwa kemuliaan tidak bisa diraih dengan menjatuhkan orang lain, dan kehormatan sejati hanya lahir dari kemampuan untuk menahan diri, menjaga tutur kata, serta menegakkan keadilan dalam relasi sosial.

Dalam keseharian masyarakat Sasak, *paeq saling jaga* tidak berhenti pada hubungan antar individu, tetapi juga mencakup tanggung jawab kolektif untuk menjaga harmoni komunitas dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, *paeq saling jaga* adalah bentuk nyata dari etika martabat yang hidup di mana penghormatan terhadap manusia sejalan dengan penghormatan terhadap alam dan kehidupan itu sendiri.

Dalam tradisi Samawa, nilai martabat termanifestasi dalam falsafah *tutu, tau, tame* yang secara sederhana berarti tahu diri, tahu batas, dan tahu tempat.

Namun makna sebenarnya jauh lebih mendalam, dimana falsafah ini mengajarkan bahwa martabat manusia lahir dari kesadaran diri, tanggung jawab moral, dan sikap beradab dalam bertindak.

Tutu berarti memahami siapa diri kita, yakni mengenali kemampuan, posisi, dan batasan tanpa kesombongan.

Tau berarti menghormati norma sosial dan hukum moral masyarakat.

Tame berarti mampu menempatkan diri dengan tepat, menjaga kehormatan pribadi dan keluarga di hadapan publik.

Dalam sistem nilai Samawa, martabat bukan sesuatu yang diwariskan oleh garis keturunan atau harta benda, akan tetapi diperoleh melalui perilaku yang beradab dan kesadaran untuk hidup dalam harmoni. Menegaskan bahwa kebebasan individu harus selalu disertai rasa tanggung jawab sosial. Dengan demikian, *tutu, tau, tame* bukan sekadar ajaran moral, tetapi konsep etika sosial yang menyatukan kebebasan dan keadaban.

Dalam budaya Mbojo (Bima), falsafah *adabu dou Mbojo* menjadi inti dari sistem moral masyarakat. Kata *adabu* berarti tata krama, kesopanan, dan integritas batin. Sementara *dou Mbojo* merujuk pada manusia Bima itu sendiri. Dengan demikian, *adabu dou Mbojo* dapat dimaknai sebagai "manusia Bima yang beradab."

Falsafah ini menegaskan bahwa kehormatan seseorang tidak diukur dari harta atau kedudukan, akan tetapi dari kejujuran, kesantunan, dan kemampuan menjaga ucapan serta tindakan. Orang Bima meyakini bahwa kehilangan harta bukanlah aib, tetapi kehilangan adab adalah kehancuran.

Martabat adalah sebuah cermin dari batin yang bersih dan perbuatan yang lurus. Selain itu, falsafah *adabu dou Mbojo* juga menanamkan tanggung jawab sosial, bahwa setiap perbuatan seseorang mencerminkan keluarga dan komunitasnya.

Dengan demikian, menjaga martabat pribadi berarti menjaga nama baik bersama. Inilah bentuk *collective dignity* yang menjadi ciri khas masyarakat Bima bahwa kehormatan adalah urusan bersama, bukan semata urusan diri.

Falsafah yang tidak kalah pentingnya adalah *Nggahi Rawi Pahu* yang mengajarkan kejujuran dalam kata dan tindakan.

Falsafah ini menegaskan mengenai etika dan prinsip tutur, yang menekankan bahwa martabat manusia bergantung pada kejujuran antara ucapan dan tindakan. Hal ini dapat dimaknai sebagai sebuah etika integritas sosial. Artinya, kejujuran bukan pilihan pribadi, tetapi kewajiban moral universal. Jika seseorang yang melanggar janjinya, kehilangan bukan hanya kepercayaan orang lain, tetapi juga harga dirinya sendiri. Ketika kata dikhianati, kepercayaan runtuh, dan bersama itu runtuh pula martabat.

Sehingga dengan pemahaman tersebutlah merupakan manifestasi lokal dari prinsip *universal human dignity* (martabat manusia), menegaskan bahwa **martabat bukanlah hak yang dituntut, tetapi nilai yang dijaga**. Bukan hanya milik individu, tetapi tanggung jawab sosial yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat NTB telah lama hidup dalam etika martabat, di mana kehormatan diri, kehormatan keluarga, dan kehormatan sosial menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Martabat tidak berhenti pada tataran simbolik, tetapi menjadi suatu "sistem nilai hidup" ,*world view* yang mengatur cara berbicara, berpakaian, bermusyawarah, hingga cara berinteraksi dengan alam.

Dapat disimpulkan bahwa martabat pada dasarnya adalah inti nilai yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki harga diri yang tidak bisa diukur dengan harta, pangkat, atau kedudukan. Martabat adalah pengakuan bahwa manusia, apa pun latar sosial dan ekonominya, memiliki nilai yang melekat sejak lahir yakni nilai yang tidak dapat dicabut oleh keadaan, tidak dapat ditawar oleh kepentingan, dan tidak dapat digantikan oleh kemajuan material semata.

1.2 Pilar Kemajuan NTB

1.2.1. Inovasi

Inovasi merupakan napas utama dari kemajuan. Secara etimologis, kata "inovasi" berasal dari bahasa Latin *innovare*, yang berakar dari kata in yang berarti "ke dalam" dan *novus* yang berarti "baru". Secara harfiah, inovasi dimaknai sebagai "membuat sesuatu menjadi baru kembali" (*to make new again*). Makna ini menunjukkan bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru dari nol, melainkan juga memperbarui, menyegarkan, dan meningkatkan sesuatu yang telah ada agar menjadi lebih relevan, efektif, dan bermakna.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), inovasi didefinisikan sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal baru; pembaharuan. Definisi ini menegaskan bahwa inovasi adalah sebuah proses, bukan sekadar hasil akhir. Ia menuntut keberanian berpikir, kemampuan membaca perubahan, serta kesadaran untuk meninggalkan cara lama yang tidak lagi efektif.

Dalam pandangan Islam, inovasi sendiri bukanlah sesuatu yang asing atau bertentangan, namun justru hal ini merupakan semangat pembaruan (*tajdīd*) dan penggalian pemikiran baru (*ijtihād*) merupakan bagian dari ruh Islam itu sendiri. Artinya inovasi merupakan manifestasi dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi.

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ
فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

"Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi dan meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu." (QS. Al-An'ām: 165)

Ayat tersebut mengandung pesan bahwa manusia diberi kebebasan berpikir dan berkreasi sebagai ujian moral dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, inovasi dalam Islam adalah bentuk *amal shāliḥ* (amal kebaikan) apabila dilakukan dengan niat memakmurkan bumi dan menegakkan keadilan.

Sementara itu, dalam pendangan barat, makna inovasi yang dijelaskan oleh Joseph Schumpeter (1883–1950), dalam karyanya *The Theory of Economic Development* (1934: 65–66) sebagai *creative destruction*, yakni proses menggantikan cara-cara lama dengan cara-cara baru guna membuka ruang bagi sistem yang lebih efisien, produktif, dan bernilai. Dalam pandangan Schumpeter, kemajuan tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari keberanian untuk merombak kebiasaan yang telah usang.

Artinya dalam konteks ini, inovasi tidak boleh dimaknai semata-mata hanya sebagai mekanisme ekonomi atau teknologi. Inovasi harus dipahami sebagai transformasi cara berpikir dan cara mengelola kehidupan sosial. Inovasi yang hanya mengejar efisiensi ekonomi tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan budaya lokal berpotensi menciptakan ketimpangan baru serta mereduksi martabat manusia.

Maka di sinilah letak pentingnya inovasi yang berakar pada nilai. Inovasi harus berangkat dari realitas sosial masyarakat, dari potensi alam dan lingkungan yang dimiliki, serta dari kearifan lokal yang sejak lama menjadi penyangga kehidupan bersama. Dengan landasan tersebut, inovasi tidak hadir sebagai sesuatu yang asing atau bahkan meminggirkan masyarakat, melainkan

tampil sebagai instrumen pemberdayaan yang memperkuat kapasitas dan martabat warga. Pendekatan ini selaras dengan filosofi *Nggahi Rawi Pahu* dalam budaya Mbojo yang menegaskan keselarasan antara kata dan tindakan, antara gagasan dan tanggung jawab moral. Demikian pula dengan filosofi budaya Sasak *paeq saling jaga*, yang mengajarkan semangat kebersamaan, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai inilah yang dapat menjadi fondasi kuat bagi pengembangan inovasi sosial (*social innovation*) yakni inovasi yang tidak hanya menciptakan kebaruan saja, tetapi juga menumbuhkan keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan sosial

Hal ini senada yang dikemukakan oleh Amartya Sen, bahwa **kemajuan sejati bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, melainkan dari meningkatnya kapabilitas manusia.** Artinya hal ini dimaknai sebagai kemampuan masyarakat untuk menentukan pilihan hidup yang bernilai dan bermartabat. Oleh karena itu, inovasi yang dibutuhkan NTB adalah inovasi yang memperluas kesempatan, membuka akses, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Secara kontekstual, NTB memiliki ruang inovasi yang sangat luas. Misalnya : di sektor pertanian membutuhkan inovasi teknologi yang adaptif terhadap kondisi lahan kering dan perubahan iklim; di sektor kelautan memerlukan inovasi dalam upaya pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan; di sektor pariwisata membutuhkan inovasi berbasis budaya dan ekologi, dimana hal ini bukan hanya sekadar eksploitasi destinasi.; demikian pula pemerintahan daerah memerlukan inovasi dalam tata kelola yang baik, pelayanan publik, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

1.2.2. Kreativitas

Kreativitas pada dasarnya merupakan sumber daya batin yang memungkinkan manusia melampaui kebiasaan, rutinitas, dan pola lama menuju kemungkinan-kemungkinan baru. Jika inovasi berbicara tentang penerapan kebaruan, maka kreativitas adalah daya cipta yang melahirkannya. Dengan kata lain, kreativitas adalah hulu, sementara inovasi adalah hilir dari proses kemajuan.

Secara etimologis, kata kreativitas berasal dari bahasa Latin *creare* berarti "mencipta", "membentuk", atau "melahirkan". Dalam pengertian ini, kreativitas tidak semata-mata berkaitan dengan seni atau estetika, tetapi mencakup kemampuan berpikir alternatif, memecahkan persoalan dengan cara yang tidak lazim, serta merangkai makna baru dari realitas yang ada. Adapun Guilford (1950) mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan berpikir divergen, yakni kemampuan menghasilkan banyak kemungkinan jawaban dari satu persoalan.

Sementara dalam perspektif pembangunan, kreativitas memiliki posisi strategis karena ia tumbuh dari kedekatan manusia dengan konteks sosial-budayanya. Artinya masyarakat yang kreatif bukanlah masyarakat yang meniru secara pasif, melainkan masyarakat yang mampu mengolah pengaruh luar menjadi sesuatu yang khas dan bermakna bagi dirinya. Oleh karena itu, kreativitas selalu melekat pada dimensi identitas dan martabat.

Dalam konteks NTB, kreativitas sejatinya telah lama hidup dalam praktik budaya masyarakat. Pada masyarakat Sasak, kreativitas tercermin dalam kemampuan mengolah alam menjadi ruang hidup yang harmonis, mulai dari sistem pertanian

tradisional, arsitektur rumah adat, hingga ekspresi seni dan bahasa.

Pada masyarakat Samawa, kreativitas tumbuh dari prinsip *tutu, tau, tame*, yang menekankan kesadaran diri, pengetahuan, dan adab. Kreativitas di sini tidak dilepaskan dari etika; setiap ciptaan harus membawa manfaat dan tidak merusak tatanan sosial. Sementara itu, dalam budaya Mbojo, semangat *Nggahi Rawi Pahu* menuntut agar setiap gagasan kreatif memiliki tanggung jawab moral: apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan harus selaras.

Artinya bahwa kreativitas yang berakar pada nilai-nilai budaya tersebut melahirkan apa yang disebut sebagai *creative dignity* yakni daya cipta yang tidak sekadar mengejar kebaruan atau keuntungan ekonomi, tetapi menjaga kehormatan manusia dan komunitasnya. Inilah pembeda antara kreativitas yang membangun peradaban dan kreativitas yang justru melahirkan kekosongan makna.

Dalam perspektif filsafat Timur dan Islam, kreativitas juga dipandang sebagai amanah. Diman manusia diposisikan sebagai khalifah di bumi yang berarti memiliki tanggung jawab untuk mengelola, bukan untuk mengeksploitasi. Kreativitas, dengan demikian, adalah kemampuan mengolah potensi ciptaan Tuhan secara bijaksana untuk kemaslahatan bersama.

Oleh karena itu, dengan kreativitas yang berakar pada budaya dan martabat, setidaknya Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak hanya menjadi daerah yang maju secara teknis, tetapi juga matang secara peradaban.

1.2.3. Berdaya Saing

Berdaya saing merupakan kemampuan suatu daerah, institusi, maupun masyarakat untuk bertahan, tumbuh, dan unggul dalam dinamika perubahan yang kompetitif, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global.

Secara etimologis, istilah daya saing / kompetitif (Bahasa inggris: *competitiveness*) berakar dari bahasa Latin *competere* yang berarti "berusaha bersama" atau "bertemu dalam satu arena"[1]. Makna ini menegaskan bahwa daya saing pada dasarnya bukan sekadar pertarungan *zero-sum*, melainkan proses penempatan diri secara layak dan bermakna dalam suatu sistem bersama. Daya saing, dengan demikian, adalah soal kapabilitas, bukan sekadar agresivitas.

Dalam literatur ekonomi pembangunan, Michael Porter (1990) mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah berkelanjutan melalui produktivitas. Dengan kata lain, daya saing tidak semata ditentukan oleh kelimpahan sumber daya alam, tetapi oleh kualitas manusia, institusi, inovasi, dan tata kelola. Maka dengan itu, daya saing yang dangkal hanya menghasilkan pertumbuhan semu. Sebaliknya, daya saing yang bermartabat melahirkan ketahanan ekonomi, kemandirian sosial, dan keadilan antar generasi. Singkatnya daerah yang kaya sumber daya namun miskin kapasitas manusia dan kelembagaan pada akhirnya akan kehilangan daya saingnya.

Dalam kerangka tersebut, daya saing sejatinya adalah hasil dari proses panjang pembangunan manusia dan kelembagaan, bukan sekadar *output* ekonomi jangka pendek. Produktivitas yang dimaksud Porter tidak berdiri di ruang hampa, melainkan

bertumbuh dari ekosistem sosial yang sehat: pendidikan yang bermutu, etos kerja yang kuat, kepastian hukum, serta kepercayaan publik terhadap institusi. Tanpa fondasi ini, keunggulan ekonomi hanya bersifat sementara dan rapuh.

Lebih jauh, pengalaman banyak daerah menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam tanpa penguatan kapasitas manusia justru menciptakan paradoks pembangunan. Kekayaan alam yang melimpah sering berujung pada ketergantungan, konflik, dan ketimpangan apabila tidak dikelola dengan visi jangka panjang. Fenomena ini dikenal sebagai *resource curse*, di mana daerah kaya sumber daya justru tertinggal dalam kualitas hidup masyarakatnya. Oleh sebab itu, daya saing yang bertumpu pada ekstraksi semata tidak hanya tidak berkelanjutan, tetapi juga berpotensi merendahkan martabat manusia dan lingkungan.

Dalam konteks NTB, daya saing yang bermartabat harus dimaknai sebagai kemampuan daerah untuk mengolah potensi lokal menjadi nilai tambah yang adil dan inklusif. Pertanian, kelautan, pariwisata, dan ekonomi kreatif tidak cukup digenjot dari sisi volume produksi, tetapi harus ditingkatkan dari sisi pengetahuan, teknologi, desain, narasi budaya, serta akses pasar yang berkeadilan. Di sinilah daya saing bertemu dengan kearifan lokal: nilai kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab sosial menjadi modal tak kasat mata yang menentukan keberlanjutan.

Dengan demikian, daya saing tidak boleh dilepaskan dari dimensi etika yang berkaitan dengan kemartabatan. Artinya bahwa keunggulan ekonomi sering kali mengorbankan manusia, meminggirkan komunitas lokal, atau merusak lingkungan pada hakikatnya adalah kegagalan pembangunan. Sebaliknya, ketika

daya saing dibangun di atas kualitas manusia, integritas institusi, dan keberlanjutan ekologi, maka ia akan menjadi kekuatan yang tidak hanya membuat NTB mampu bersaing, tetapi juga berdiri tegak dengan harga diri sebagai daerah yang maju, adil, dan beradab.

1.2.4. Transformasi Digital

Saat ini kita hidup dalam zaman pergolakan teknologi paling radikal dalam sejarah umat manusia. Jika revolusi industri pertama mengubah tenaga otot menjadi mesin uap, dan revolusi industri kedua menghadirkan listrik serta produksi massal, maka gelombang teknologi saat ini, sering disebut Revolusi Industri 4.0 dan kini bergerak menuju *Society 5.0* mengubah cara manusia berpikir, mengambil keputusan, dan mengelola kehidupan sosial. Perubahan ini berlangsung cepat, simultan, dan menembus batas geografis maupun institusional.

Fakta menunjukkan bahwa teknologi telah mendisrupsi hampir seluruh sektor kehidupan manusia, terutama dalam bidang ekonomi dan dunia kerja. Perubahan ini tidak lagi bersifat gradual, melainkan struktural dan masif. Laporan The Future of Jobs Report 2023 yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) mencatat bahwa hingga tahun 2027 sekitar 23 persen dari seluruh jenis pekerjaan global akan mengalami perubahan signifikan akibat adopsi teknologi digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan. Dalam periode yang sama, diperkirakan 83 juta pekerjaan lama akan hilang, sementara 69 juta pekerjaan baru akan tercipta, menghasilkan dinamika besar dalam struktur ketenagakerjaan dunia (WEF, 2023a).

Angka-angka ini menegaskan satu hal penting, bahwa teknologi memang menghilangkan pekerjaan tertentu, namun

pada saat yang sama menciptakan jenis pekerjaan baru yang menuntut keterampilan berbeda. Oleh karena itu, yang tersingkir bukanlah manusia sebagai subjek pembangunan, melainkan ketertinggalan kompetensi dan ketidakmampuan beradaptasi. WEF juga mencatat bahwa 44 persen keterampilan kerja yang ada saat ini akan berubah dalam lima tahun ke depan, menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan menjadi faktor penentu daya saing individu maupun daerah (WEF,2023b)

Disrupsi teknologi juga tampak jelas dalam model bisnis dan sistem ekonomi. Perdagangan daring (*e-commerce*) setidaknya telah menggeser pasar konvensional (offline/fisik), sementara itu sistem pembayaran digital secara bertahap menggeser uang tunai. Adapun survei global WEF menunjukkan bahwa sekitar 75 % perusahaan telah mengadopsi perdagangan digital, dan lebih 86 % perusahaan berencana mengintegrasikan platform digital sebagai bagian inti dari operasional bisnis mereka (WEF, 2023c). Hal ini menegaskan bahwa ekonomi digital bukan lagi sektor tambahan, melainkan telah menjadi arsitektur utama perekonomian modern.

Sementara itu, Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*/IMF) memperkirakan sekitar 40 % pekerjaan global terpapar langsung oleh perkembangan kecerdasan buatan, terutama pekerjaan yang bersifat rutin, administratif, dan repetitif (IMF,2024). Tugas-tugas seperti entri data, pengolahan dokumen, layanan pelanggan berbasis skrip, hingga pembukuan manual kini semakin banyak digantikan oleh *robotic process automation, chatbot*, dan sistem berbasis AI. Namun pada saat yang sama, pekerjaan yang membutuhkan empati, kreativitas, kepemimpinan, serta penilaian etis justru semakin bernilai dan tidak mudah tergantikan oleh mesin.

Realitas inilah setidaknya menunjukkan bahwa disrupsi teknologi bukan sekadar fenomena teknis, melainkan pergeseran peradaban kerja. Daerah, institusi, dan masyarakat yang gagal merespons perubahan ini berujung menghadapi risiko stagnasi ekonomi, meningkatnya jumlah pengangguran struktural, serta melemahnya daya saing. Sebaliknya, wilayah yang mampu mengadopsi teknologi secara cerdas dan beretika akan memiliki peluang besar untuk melakukan lompatan kemajuan.

Dalam sektor pemerintahan, disrupsi teknologi menantang birokrasi tradisional. Masyarakat kini menuntut layanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis data, setara dengan layanan sektor swasta digital. Daerah yang gagal bertransformasi menghadapi risiko penurunan kepercayaan publik, inefisiensi anggaran, serta meningkatnya jarak antara pemerintah dan warga. Fakta ini menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan bukan lagi inovasi tambahan, melainkan prasyarat legitimasi tata kelola modern.

Di bidang pendidikan, teknologi telah mengubah pola belajar secara fundamental. Pembelajaran daring, sumber pengetahuan terbuka (*open source*), dan kecerdasan buatan (AI) pendidikan membuat akses ilmu tidak lagi eksklusif pada ruang kelas formal. Pandemi COVID-19 menjadi bukti nyata bahwa sistem pendidikan yang tidak adaptif terhadap teknologi akan lumpuh dalam situasi krisis. Daerah yang tidak menyiapkan infrastruktur dan literasi digital berisiko menciptakan generasi yang tertinggal secara struktural.

Sementara, disektor pertanian dan perdesaan juga tidak luput dari disrupsi. Teknologi pertanian presisi, sistem informasi cuaca, hingga pemasaran digital telah nyata meningkatkan

produktivitas dan pendapatan petani di berbagai belahan dunia. Petani yang terhubung dengan teknologi mampu mengambil keputusan berbasis data, sementara yang tertinggal teknologi menghadapi kerentanan harga dan iklim. Ini membuktikan bahwa teknologi bukan musuh tradisi, melainkan alat penguat keberlanjutan jika digunakan dengan benar.

Lebih jauh, disrupsi teknologi juga membawa konsekuensi sosial dan etis. Meningkatnya arus informasi tanpa filter melahirkan hoaks, polarisasi sosial, dan krisis kepercayaan. Data pribadi menjadi komoditas, sementara algoritma mulai memengaruhi pilihan manusia. Tanpa literasi dan etika digital, teknologi dapat mereduksi manusia menjadi sekadar objek statistik. Oleh karena itu, tantangan sesungguhnya bukan sekadar mengadopsi teknologi, tetapi mengendalikan arah penggunaannya.

Dalam konteks ini, adopsi teknologi bukan lagi pilihan kebijakan, melainkan keniscayaan sejarah. Menolak transformasi digital sama artinya dengan menerima ketertinggalan struktural. Namun menerima teknologi tanpa kesiapan nilai dan kapasitas juga berisiko menciptakan ketimpangan baru. Karena itu, daerah dituntut untuk bersikap adaptif sekaligus reflektif: cepat merespons perubahan, tetapi teguh dalam nilai.

Bagi NTB, pergolakan teknologi harus dibaca sebagai momentum strategis untuk melompat, bukan sekadar mengejar ketertinggalan. Teknologi memungkinkan daerah dengan keterbatasan geografis untuk menembus pasar global, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memperkuat ekonomi lokal. Namun manfaat ini hanya akan terwujud jika

transformasi digital diarahkan untuk memperkuat manusia sebagai subjek utama perubahan.

Dengan demikian, adopsi teknologi adalah keniscayaan, tetapi arah transformasi adalah pilihan moral dan politik. Dalam konteks ini bahwa teknologi harus ditempatkan sebagai sarana untuk memuliakan manusia, memperluas keadilan, dan menjaga keberlanjutan. Inilah esensi transformasi digital yang tidak sekadar modern, tetapi juga beradab.

1.2.5. Politik yang Beradab dan Visioner

Politik pada hakikatnya merupakan instrumen rasional manusia untuk mengelola kehidupan bersama secara adil dan bermakna, yang erat kaitannya dengan "cara menyelesaikan masalah". Adapun dalam tradisi filsafat klasik, politik tidak pernah dipisahkan dari etika. Seorang filsuf dari Yunani kuno Aristoteles (384-322 SM) menempatkan politik sebagai *the master science* yang bertujuan mencapai *eudaimonia*, yaitu kehidupan baik yang hanya mungkin terwujud melalui tata kelola kolektif yang adil dan bermoral (Aristotle,1998). Oleh karena itu, politik yang beradab pada dasarnya bukanlah konsep normatif yang abstrak, melainkan sebuah prasyarat peradaban.

Namun, dalam konteks modern, telah terjadi degradasi makna politik, ketika politik direduksi menjadi sekadar arena perebutan kekuasaan, kompetisi elektoral, dan bahkan kalkulasi kepentingan jangka pendek. Padahal, dalam filsafat moral yang diutarakan oleh Immanuel Kant (1724-1804), bahwa kekuasaan hanya memiliki legitimasi sejauh ia dijalankan dengan prinsip menghormati martabat manusia sebagai tujuan, bukan sebagai alat (Kant, 1997). Artinya politik yang beradab adalah menolak

segala bentuk-bentuk manipulasi, eksploitasi identitas, dan juga instrumentalisasi rakyat demi kepentingan kekuasaan semata.

Menurut Max Weber dalam konsep *ethics of responsibility* (1965) pada dasarnya politik yang beradab juga mensyaratkan integritas moral antara nilai, wacana, dan tindakan. Weber menegaskan bahwa aktor politik harus bertanggung jawab bukan hanya pada niat baik, tetapi juga pada konsekuensi objektif dari kebijakan yang diambil. Sehingga dalam kerangka ini, kebijakan publik tidak boleh sekadar populis, akan tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, etis, dan historis.

Dimensi kedua yang tak terpisahkan adalah visi jangka panjang. Politik visioner berpijak pada kesadaran bahwa kebijakan hari ini membentuk struktur sosial, ekonomi, dan ekologis masa depan. Menurut Edmund Burke dalam *Reflections on the Revolution in France* (1999) menekankan bahwa masyarakat adalah kontrak moral antara mereka yang telah wafat (leluhur), yang hidup saat ini, dan yang belum lahir. Dengan demikian, politik visioner adalah politik yang berpikir lintas generasi (*intergenerational thinking*), bukan politik yang terjebak dalam siklus elektoral lima tahunan.

Prinsip ini diperkuat dalam teori keadilan antar generasi (*intergenerational justice*), yang menegaskan bahwa generasi kini memiliki kewajiban moral untuk tidak mewariskan kerusakan struktural kepada generasi berikutnya (Rawls, 1971). Oleh sebab itu, kebijakan yang mengorbankan lingkungan, pendidikan, atau tata kelola demi keuntungan jangka pendek pada hakikatnya merupakan bentuk ketidakadilan struktural. Paradigma inilah

kemudian dikenal luas sebagai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Adapun definisi paling otoritatif mengenai pembangunan berkelanjutan dirumuskan oleh World Commission on Environment and Development dalam laporan monumental *Our Common Future* (1987), yang lebih dikenal sebagai Brundtland Report. Laporan ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai "*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*" (WCED, 1987). Definisi ini menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada kepentingan generasi kini, tetapi harus memperhitungkan hak, peluang, dan kualitas hidup generasi mendatang.

Brundtland Report menempatkan keberlanjutan sebagai sintesis dari tiga pilar utama, yakni pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ketiga pilar tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan saling menentukan. Pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan keadilan sosial akan melahirkan ketimpangan dan konflik, sementara pembangunan yang mengorbankan lingkungan pada akhirnya akan menghancurkan basis kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, keberlanjutan menuntut perubahan paradigma: dari eksploitasi menuju pengelolaan, dari konsumsi jangka pendek menuju tanggung jawab jangka panjang.

Dalam konteks politik dan kebijakan publik, pembangunan berkelanjutan ini mengharuskan hadirnya politik yang beradab dan visioner, yakni sebuah politik yang mampu menahan "godaan" keuntungan instan demi kepentingan jangka panjang masyarakat. Kebijakan publik tidak lagi diukur semata dari

popularitas atau dampak elektoralnya, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut menjaga keseimbangan antar generasi, memperkuat kapasitas manusia, dan melindungi sumber daya alam sebagai warisan bersama.

Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan bukanlah konsep teknokratis belaka, melainkan komitmen etis dan moral. Ia menuntut keberanian untuk berpikir melampaui siklus kekuasaan, melampaui kepentingan kelompok, dan melampaui batas waktu politik. Dan inilah esensi dari pembangunan bermartabat: pembangunan yang memuliakan manusia hari ini, sekaligus menjaga masa depan generasi yang akan datang.

Dalam tradisi Islam, praktik politik yang berlandaskan etika, keadilan, dan visi jangka panjang telah dicontohkan secara nyata oleh Rasulullah Muhammad S.A.W.. Politik, dalam pengertian kenabian, bukanlah instrumen perebutan kekuasaan, melainkan amanah untuk mengelola kehidupan bersama secara adil dan bermartabat. Salah satu contoh paling fundamental adalah Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*), yang oleh banyak ilmuwan politik modern disebut sebagai salah satu konstitusi tertulis pertama di dunia. Piagam ini menunjukkan visi politik Rasulullah Muhammad S.A.W. yang melampaui kepentingan kelompok dan zaman. Ia mengatur hubungan antara berbagai suku, agama, dan komunitas secara inklusif, menegaskan prinsip keadilan, perlindungan hak minoritas, supremasi hukum, serta tanggung jawab kolektif dalam menjaga ketertiban sosial (Hamidullah, 1968). Dalam konteks ini, politik dijalankan sebagai mekanisme penyelesaian masalah sosial, bukan dominasi satu kelompok atas kelompok lain.

Praktik politik Rasulullah Muhammad S.A.W. merupakan sebuah mencerminkan prinsip keadilan antar generasi. Dalam banyak riwayat, Rasulullah menegaskan larangan eksploitasi sumber daya secara berlebihan, termasuk larangan merusak lingkungan, menyia-nyiakan air, serta melarang mengganggu keseimbangan alam, bahkan dalam kondisi perang. Hal ini menunjukkan bahwa visi masa depan kenabian tidak berhenti pada keberhasilan jangka pendek, tetapi berorientasi pada keberlangsungan kehidupan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad S.A.W. bersabda, "Jika kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit tanaman, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya" (HR. Ahmad). Hadis ini sering dipahami sebagai simbol tanggung jawab moral lintas waktu dan generasi.

Lebih jauh, Rasulullah Muhammad S.A.W. menempatkan integritas moral sebagai fondasi kepemimpinan politik. Beliau dikenal dengan gelar *al-Amīn* (yang terpercaya), jauh sebelum menjadi pemimpin politik. Ini menegaskan bahwa legitimasi politik dalam perspektif Islam tidak bertumpu pada kekuasaan formal, melainkan pada kepercayaan publik, kejujuran, dan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Prinsip ini sejalan dengan nilai *Nggahi Rawi Pahu* dalam budaya Mbojo, yang menekankan kesatuan kata dan perbuatan sebagai dasar kehormatan.

Dalam pengelolaan kekuasaan, Rasulullah Muhammad S.A.W. juga mempraktikkan prinsip musyawarah (*shūrā*), sebagaimana tercermin dalam berbagai keputusan strategis, termasuk dalam urusan perang, ekonomi, dan tata sosial. Musyawarah bukan sekadar prosedur, melainkan mekanisme

etis untuk memastikan bahwa kebijakan publik tidak lahir dari kehendak sepihak, tetapi dari pertimbangan rasional dan kolektif. Prinsip ini memiliki resonansi kuat dengan budaya Sasak yang menjunjung tinggi kebersamaan dan mufakat, serta nilai Samawa yang menekankan tanggung jawab sosial dan keselarasan komunitas.

Dengan demikian, praktik politik yang dipraktikan oleh Rasulullah memperlihatkan bahwa politik yang beradab dan visioner adalah politik yang berpijak pada nilai moral, berpandangan jauh ke depan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Politik semacam ini menolak pragmatisme sempit dan kekerasan simbolik, serta menempatkan kekuasaan sebagai sarana untuk menjaga martabat manusia dan keberlanjutan kehidupan.

Sementara, dalam konteks Nusa Tenggara Barat, gagasan politik yang beradab dan visioner menemukan relevansinya melalui nilai-nilai budaya lokal yang telah lama hidup dan menjadi penyangga kohesi sosial masyarakat Sasak, Samawa, dan Mbojo. Budaya lokal bukan sekadar identitas simbolik, melainkan sumber etika politik yang kaya dan kontekstual.

Pada masyarakat Sasak, nilai *besiru* dan *reme* merupakan mencerminkan pandangan bahwa kekuasaan dan keputusan publik harus dibangun melalui partisipasi kolektif dan tanggung jawab bersama (Harnish, 2012). Politik dalam perspektif Sasak bukanlah dominasi satu pihak, melainkan proses mencapai kesepakatan demi keseimbangan sosial. Prinsip ini selaras dengan gagasan demokrasi deliberatif yang menempatkan dialog rasional sebagai inti legitimasi politik. Dalam budaya Samawa mengenal falsafah *sabalong samalewa*, bermakna keseimbangan

antara hak dan kewajiban, antara individu dan komunitas, serta antara manusia dan alam. Sehingga nilai ini mengajarkan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan haruslah dijalankan secara proporsional dan adil. Adapun dalam budaya Mbojo, filosofi *Nggahi Rawi Pahu* setidaknya menjadi fondasi etika kepemimpinan. Nilai ini menegaskan bahwa legitimasi politik tidak lahir dari retorika, melainkan dari konsistensi moral dan keteladanan nyata. Dalam perspektif ini, politik yang beradab adalah politik yang dapat dipercaya, karena pemimpinnya menjadikan janji sebagai komitmen moral, bukan sekadar alat kampanye.

Dengan demikian, politik yang beradab dan visioner dalam konteks Nusa Tenggara Barat harus dimaknai sebagai politik yang mengintegrasikan etika universal dengan kearifan lokal, serta memadukan rasionalitas kebijakan dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat. Politik tidak lagi diposisikan sebagai ruang konflik semata, tetapi sebagai wahana kolektif untuk merancang masa depan yang bermartabat.

Pada akhirnya, politik yang beradab dan visioner adalah politik yang menjadikan kekuasaan sebagai amanah peradaban. Ia bekerja bukan hanya untuk kemenangan hari ini, tetapi untuk memastikan bahwa generasi mendatang mewarisi masyarakat yang adil, berdaya guna, dan berkeadaban. Dalam kerangka pembangunan NTB, paradigma ini menjadi fondasi moral sekaligus strategis bagi terwujudnya NTB yang benar-benar bermartabat, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan.

1.2.6. Spiritual Leadership

Kepemimpinan pada dasarnya tidak hanya dipersoalan struktur, kewenangan, dan kecakapan manajerial, tetapi juga

persoalan nilai, makna, dan orientasi batin. Dalam diskursus kepemimpinan modern, semakin disadari bahwa krisis utama organisasi baik pemerintahan maupun swasta, banyak organisasi runtuh bukan karena kekurangan sumber daya, akan tetapi karena kehilangan arah moral. Di sinilah spiritual leadership menemukan relevansinya sebagai pendekatan kepemimpinan yang mengintegrasikan dimensi batin, etika, dan tanggung jawab moral ke dalam praktik kepemimpinan. Di titik inilah spiritual leadership hadir sebagai pendekatan yang menjembatani antara efektivitas organisasi dan integritas etis.

Spiritual leadership berpijak pada asumsi dasar bahwa manusia bukan hanya makhluk rasional dan ekonomis, tetapi juga makhluk bermakna (*meaning-seeking beings*). Oleh karena itu, kepemimpinan yang hanya mengandalkan instruksi, insentif material, dan kontrol struktural cenderung menghasilkan kepatuhan semu, bukan komitmen sejati. Sebaliknya, kepemimpinan yang mengintegrasikan nilai spiritual mampu membangkitkan motivasi intrinsik, yaitu dorongan untuk bekerja karena kesadaran, tanggung jawab, dan makna pengabdian.

Sehingga spiritual leadership disini dapat dimaknai sebagai kepemimpinan yang berangkat/berdasar dari/pada kesadaran spiritual bahwa kekuasaan adalah amanah, jabatan adalah tanggung jawab, dan keputusan publik memiliki konsekuensi moral jangka panjang. Sehingga kepemimpinan jenis ini tidak memisahkan antara profesionalisme dan moralitas, antara efektivitas dan etika. Sebaliknya, ia memandang bahwa kinerja terbaik justru lahir dari integritas terdalam seorang pemimpin

Adapun penelitian-penelitian mutakhir dalam bidang kepemimpinan dan manajemen organisasi menunjukkan bahwa

spiritual leadership berkontribusi signifikan terhadap kesehatan organisasi (*organizational health*). Fakta menunjukkan organisasi yang dipimpin dengan pendekatan spiritual cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, komunikasi yang lebih terbuka, serta iklim kerja yang lebih manusiawi. Kondisi ini secara empiris berkorelasi dengan peningkatan kinerja, penurunan konflik destruktif, dan penguatan kohesi sosial di dalam organisasi.

Sementara dalam konteks birokrasi publik, spiritual leadership memainkan peran yang semakin krusial. Birokrasi tidak hanya dituntut efisien, tetapi juga adil, transparan, dan berorientasi pelayanan. Berbagai studi menunjukkan bahwa pemimpin publik yang menampilkan keteladanan moral, konsistensi antara ucapan dan tindakan, serta orientasi pada kemaslahatan umum mampu menumbuhkan *public service motivation* di kalangan aparatur. Aparatur yang bekerja di bawah kepemimpinan semacam ini tidak semata menjalankan tugas administratif, tetapi memaknai pekerjaannya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Dari perspektif kesejahteraan kerja, spiritual leadership juga terbukti meningkatkan *employee well-being*. Lingkungan kerja yang dipimpin secara spiritual memberikan rasa aman psikologis, penghargaan terhadap martabat individu, serta ruang bagi pertumbuhan personal. Hal ini sangat penting, karena kesejahteraan psikologis aparatur berhubungan langsung dengan kualitas pengambilan keputusan, etika kerja, dan pelayanan publik. Dengan kata lain, organisasi yang sehat secara spiritual cenderung lebih sehat secara kinerja.

Lebih jauh, hal ini berkontribusi pada pembentukan budaya organisasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dalam kerangka teoretis, Fry (2003) menempatkan spiritual leadership sebagai model kepemimpinan yang mengintegrasikan visi bermakna, harapan dan keyakinan (*hope/faith*), serta cinta altruistik (*altruistic love*). Model ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang efektif bukan hanya soal kecerdasan strategis, tetapi juga kecerdasan moral dan spiritual. Visi memberi arah, harapan memberi daya tahan, dan cinta altruistik memberi dasar etika dalam relasi kekuasaan.

Sementara itu H.S. Ikhwan dalam karyanya Spiritual Management: Teori, Konsep, dan Penelitian (2023) mengajukan spiritual management sebagai pendekatan manajemen alternatif–komplementer terhadap manajemen modern yang terlalu menekankan rasionalitas instrumental. Ikhwan menegaskan bahwa krisis organisasi kontemporer bukan semata krisis sistem, melainkan krisis makna, nilai, dan orientasi etis.

Pendekatan ini memberikan bukti bahwa manajemen modern yang hanya berorientasi pada efisiensi berisiko terjebak dehumanisasi, sementara spiritual leadership mengembalikan manusia sebagai pusat sistem organisasi. Dengan demikian, keputusan manajerial tidak hanya diuji dari sisi efektivitas, tetapi juga dari sisi etika dan dampak sosialnya.

Jika dikontekstualisasikan dengan NTB, bahwa spiritual leadership menemukan landasan sosiokultural yang sangat kuat. Budaya Sasak menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Tradisi Samawa mengajarkan tanggung jawab moral pemimpin terhadap komunitasnya. Sementara budaya Mbojo menempatkan *adabu dou Mbojo* dan

nggahi rawi pahu sebagai tolok ukur kehormatan dan legitimasi kepemimpinan. Nilai-nilai inilah yang menunjukkan bahwa spiritual leadership telah lama menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat NTB sejak lama, meskipun belum selalu terartikulasikan dalam kerangka kebijakan modern.

1.3 Budaya sebagai Landasan Martabat

Budaya merupakan fondasi terdalam dari martabat suatu masyarakat. Ia bukan sekadar ekspresi tradisi, kesenian, atau ritual adat, melainkan cara hidup yang memberi makna, arah, dan batas etis bagi tindakan manusia. Melalui budaya, manusia belajar tentang apa yang pantas dan tidak pantas, mulia dan tercela, layak dan tidak layak. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang martabat suatu daerah, pembicaraan tersebut pada hakikatnya adalah pembicaraan tentang kebudayaan yang hidup dan dihayati oleh masyarakatnya.

Dalam perspektif antropologi dan filsafat sosial, budaya dipahami sebagai sistem nilai yang membentuk kesadaran kolektif. Edward B. Tylor menyebut budaya sebagai keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kebiasaan manusia sebagai anggota masyarakat. Definisi ini menegaskan bahwa budaya tidak berada di pinggiran pembangunan, melainkan berada di jantung kehidupan sosial. Pembangunan yang mengabaikan budaya berarti mengabaikan struktur makna yang menopang kehidupan masyarakat itu sendiri.

Martabat tidak tumbuh di ruang kosong. Ia tumbuh dari pengakuan sosial terhadap nilai-nilai yang dianggap luhur oleh suatu komunitas. Ketika nilai-nilai tersebut dihormati dan dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan publik,

masyarakat merasa diakui, dihargai, dan dilibatkan. Sebaliknya, ketika pembangunan berjalan dengan logika yang asing dari budaya setempat, martabat kolektif akan tergerus, meskipun indikator ekonomi tampak meningkat. Inilah yang sering disebut sebagai kemajuan tanpa jiwa.

Dalam filsafat modern, Jürgen Habermas menekankan bahwa kehidupan sosial yang sehat tidak hanya ditopang oleh rasionalitas instrumental yakni rasionalitas yang mengejar efisiensi dan hasil, tetapi juga oleh rasionalitas komunikatif, yaitu kesepahaman yang dibangun melalui nilai, norma, dan dialog. Budaya merupakan medium utama rasionalitas komunikatif tersebut. Tanpa budaya, pembangunan akan jatuh pada teknokrasi kering yang kehilangan legitimasi sosial.

Dalam konteks pembangunan daerah, budaya berfungsi sebagai kompas moral dan sosial. Ia memberi batas agar kekuasaan tidak sewenang-wenang, ekonomi tidak eksploitatif, dan teknologi tidak mendehumanisasi. Budaya memastikan bahwa kemajuan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap manusia dan alam. Oleh karena itu, budaya bukanlah penghambat modernisasi, melainkan penyangga agar modernisasi tidak berubah menjadi perusakan sosial.

Bagi Nusa Tenggara Barat, budaya merupakan sumber utama martabat masyarakat. Tradisi Sasak, Samawa, dan Mbojo telah lama membentuk etika hidup yang menekankan kehormatan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan dengan alam. Nilai-nilai ini bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi modal peradaban yang relevan untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan.

Pada masyarakat Sasak, nilai paeq saling jaga dan besiru menegaskan bahwa martabat individu tidak dapat dipisahkan dari martabat komunitas. Kehormatan seseorang terletak pada kemampuannya menjaga relasi sosial, menghormati sesama, dan berkontribusi bagi kepentingan bersama. Nilai ini menciptakan solidaritas sosial yang kuat dan menjadi fondasi etis bagi kehidupan bermasyarakat.

Dalam budaya Samawa, falsafah sabalong samalewa mengajarkan prinsip keseimbangan dan kepantasan. Kepemimpinan, kekuasaan, dan kekayaan harus dijalankan secara proporsional dan bertanggung jawab. Nilai ini mengandung pesan bahwa kemajuan yang melampaui batas etis justru akan merusak kehormatan dan keberlanjutan komunitas.

Sementara itu, budaya Mbojo menempatkan adabu dou Mbojo dan nggahi rawi pahu sebagai inti martabat manusia. Adab, kejujuran, dan keselarasan antara ucapan dan perbuatan menjadi tolok ukur utama kehormatan seseorang. Dalam perspektif ini, kehilangan adab lebih memalukan daripada kehilangan harta. Nilai ini menciptakan budaya integritas yang sangat relevan bagi tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan publik.

Ketiga tradisi budaya tersebut menunjukkan bahwa martabat dalam masyarakat NTB bersifat kolektif, etis, dan berorientasi jangka panjang. Martabat bukan sekadar hak individual, melainkan tanggung jawab sosial untuk menjaga kehormatan diri, keluarga, komunitas, dan alam. Oleh karena itu, pembangunan NTB yang bermartabat harus menjadikan budaya sebagai landasan utama dalam merumuskan visi, kebijakan, dan strategi pembangunan.

Budaya sebagai landasan martabat juga memiliki implikasi langsung terhadap pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai lokal yang menekankan keseimbangan, kehati-hatian, dan tanggung jawab lintas generasi sejatinya sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan modern. Dengan demikian, integrasi budaya dalam pembangunan bukanlah romantisme masa lalu, melainkan strategi rasional untuk menjaga keberlanjutan sosial dan ekologis.

Dalam kerangka Pemikiran Saya dalam Memajukan Provinsi NTB yang Bermartabat, budaya diposisikan sebagai fondasi normatif yang menjiwai seluruh pilar kemajuan: inovasi diarahkan agar tidak meminggirkan masyarakat; kreativitas tumbuh dari identitas lokal; daya saing dibangun tanpa mengorbankan keadilan; transformasi digital dijalankan secara manusiawi; dimana politik dijalankan secara beradab; dan kepemimpinan berakar pada nilai spiritual. Tanpa budaya, seluruh pilar tersebut akan kehilangan arah dan makna.

Dengan demikian, budaya bukanlah sekadar latar belakang pembangunan, melainkan jiwa pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang berakar pada budaya adalah pembangunan yang memuliakan manusia, menjaga kehormatan komunitas, dan menyiapkan masa depan yang berkeadaban. Inilah makna sejati budaya sebagai landasan martabat bagi Nusa Tenggara Barat pada hari ini, dan bagi generasi yang akan datang.

BAB II TRANSFORMASI PEMBANGUNAN NTB

Transformasi pembangunan di wilayah Nusa Tenggara Barat bukan hanya sekadar melanjutkan program yang telah berjalan, melainkan sebuah proses penataan ulang secara mendasar terhadap arah, struktur, dan orientasi pembangunan daerah. Transformasi ini dimaksud memperbaiki fondasi yang lemah, memperkuat kelembagaan yang belum efektif, serta menggeser pola pertumbuhan dari model yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya mentah menuju ekonomi bernilai tambah yang berpihak pada masyarakat.

Artinya pembangunan di wilayah Nusa Tenggara Barat dapat dipahami sebagai upaya pemulihan dan pembaruan sistem ekonomi agar kembali pada prinsip-prinsip yang sehat dan berkelanjutan. Ia bukan berarti kembali ke masa lalu, melainkan memperbaiki arah perjalanan pembangunan dengan melakukan koreksi struktural. Dalam teori transformasi struktural, pembangunan yang berhasil ditandai oleh perubahan komposisi sektor ekonomi, dari dominasi sektor primer berproduktivitas rendah menuju sektor industri dan jasa yang lebih produktif dan inovatif. Maka dalam konteks ini, berarti mempercepat dan menata ulang proses pergeseran tersebut agar lebih terarah dan inklusif.

Di sisi lain, pendekatan kelembagaan dalam ekonomi menegaskan bahwa kualitas institusi sangat menentukan

keberhasilan pembangunan jangka panjang. Regulasi yang konsisten, tata kelola yang transparan, serta birokrasi yang efisien menjadi fondasi bagi pertumbuhan yang stabil. Tanpa penguatan kelembagaan, pertumbuhan ekonomi cenderung bersifat rapuh dan tidak merata. Oleh karena itu, restorasi pembangunan ini juga mencakup reformasi tata kelola agar pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga akuntabel dan berkeadilan.

Selain itu, makna transformasi ini juga dapat dipahami sebagai proses penyeimbangan kembali antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Selama ini, pembangunan sering kali terlalu berfokus pada angka-angka pertumbuhan tanpa memperhatikan distribusi manfaat dan daya dukung alam. Dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, ketiga dimensi tersebut harus berjalan beriringan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun disertai ketimpangan sosial dan bahkan kerusakan lingkungan bukanlah pertumbuhan yang bermartabat.

Namun dilain pihak, ekonomi juga harus tumbuh melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah, artinya bahwa pertumbuhan itu harus dirasakan secara luas oleh masyarakat dan tidak merusak fondasi ekologis daerah. Menempatkan kembali manusia dan lingkungan sebagai pusat pembangunan, bukan sekadar objek dari aktivitas ekonomi. Dengan demikian, hal ini merupakan proses menyeluruh untuk memperbaiki fondasi ekonomi, menata ulang arah kebijakan, dan membangun paradigma pembangunan yang lebih produktif, inklusif, serta berkelanjutan. Restorasi bukan sekadar agenda teknokratis, melainkan komitmen untuk memastikan bahwa pembangunan

benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan dan martabat masyarakat Nusa Tenggara Barat secara menyeluruh.

2.1 Potret Ekonomi NTB Saat Ini

Potret ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, namun tetap memperlihatkan arah pertumbuhan yang positif. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, mencerminkan aktivitas produksi barang dan jasa yang terus berjalan di berbagai sektor ekonomi.

Pada Triwulan III Tahun 2025, PDRB NTB atas dasar harga berlaku tercatat mencapai sekitar Rp 49,49 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp 28,92 triliun. Angka ini menunjukkan ukuran ekonomi NTB pada periode tersebut sekaligus menggambarkan kapasitas produksi riil setelah dikoreksi oleh faktor inflasi. Secara triwulanan (*quarter to quarter*), ekonomi NTB tumbuh sekitar 3,91 persen dibandingkan Triwulan II 2025. Sementara secara tahunan (*year on year*), pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2025 mencapai sekitar 2,82 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Jika ditarik lebih jauh ke belakang, pada tahun 2024 secara keseluruhan perekonomian NTB menunjukkan pertumbuhan yang relatif lebih tinggi, yakni sekitar 5 persen lebih dibandingkan tahun 2023. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi NTB cenderung bergerak dinamis, dipengaruhi oleh faktor produksi sektoral, kondisi permintaan domestik, serta perkembangan harga komoditas dan situasi ekonomi nasional maupun global.

Dari sisi struktur ekonomi, NTB masih bertumpu pada sektor-sektor primer. Pertanian tetap menjadi sektor penting, baik dalam kontribusinya terhadap PDRB maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar penduduk masih menggantungkan penghidupan pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, serta perikanan tangkap dan budidaya. Sektor ini memiliki peran sosial yang sangat besar karena menjadi penyangga ekonomi rumah tangga di pedesaan. Namun, produktivitas yang relatif rendah dan ketergantungan pada musim serta harga pasar membuat pendapatan petani dan nelayan cenderung fluktuatif.

Industri pengolahan mulai menunjukkan peran yang semakin signifikan, terutama sebagai penggerak pertumbuhan pada beberapa periode terakhir. Peningkatan aktivitas pengolahan, baik berbasis hasil pertanian, perikanan, maupun sektor lainnya, menjadi sinyal awal terjadinya pergeseran struktur ekonomi. Meski kontribusinya belum dominan, sektor ini memiliki potensi besar sebagai motor peningkatan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja dengan produktivitas yang lebih tinggi.

Selain itu, sektor perdagangan, konstruksi, serta jasa menjadi penopang penting dalam dinamika ekonomi daerah. Perdagangan mencerminkan perputaran konsumsi domestik dan distribusi barang, konstruksi menunjukkan geliat pembangunan fisik dan investasi, sementara sektor jasa, termasuk pariwisata, transportasi, dan jasa lainnya, yang mencerminkan semakin kompleksnya aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan sektor-sektor ini memperlihatkan adanya proses urbanisasi dan diversifikasi ekonomi, meskipun masih belum sepenuhnya mengurangi dominasi sektor primer.

Namun demikian, ketergantungan pada sektor berbasis komoditas mentah dan fluktuasi harga global masih menjadi tantangan struktural. Ketika harga komoditas melemah atau produksi terganggu akibat faktor cuaca, gangguan distribusi, atau perubahan kebijakan, pertumbuhan ekonomi daerah dapat mengalami perlambatan yang signifikan. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi di Nusa Tenggara Barat masih rentan terhadap guncangan eksternal. Oleh karena itu, penguatan struktur ekonomi melalui diversifikasi sektor dan peningkatan nilai tambah menjadi agenda mendesak.

Diversifikasi tidak hanya berarti menambah jenis usaha, tetapi membangun keterkaitan antar-sektor yang lebih kuat. Pertanian harus terhubung dengan industri pengolahan, pariwisata harus terintegrasi dengan UMKM lokal, dan sektor jasa harus menopang distribusi produk bernilai tambah. Dengan keterhubungan tersebut, setiap sektor tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk ekosistem ekonomi yang saling menguatkan.

Indikator lain yang penting adalah PDRB per kapita. Pada tahun 2024, PDRB per kapita NTB berada pada kisaran Rp 32 juta lebih per tahun Angka ini memberikan gambaran rata-rata nilai produksi ekonomi per penduduk, sekaligus menjadi indikator awal dalam menilai tingkat kesejahteraan relatif masyarakat. Adapun peningkatan angka ini dari tahun ke tahun menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi, namun belum sepenuhnya mencerminkan distribusi pendapatan yang merata.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan PDRB per kapita melalui peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja bernilai tambah tinggi. Hal ini

memerlukan investasi pada pendidikan, pelatihan vokasi, teknologi produksi, serta pengembangan industri pengolahan dan jasa modern. Tanpa peningkatan produktivitas, kenaikan PDRB per kapita akan berjalan lambat dan sulit mengejar rata-rata nasional.

Sementara itu, peningkatan PDRB per kapita tidak cukup hanya mengandalkan ekspansi jumlah tenaga kerja, tetapi harus bertumpu kenaikan produktivitas per pekerja. Produktivitas menjadi kunci karena ia menentukan seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan setiap individu dalam proses produksi. Ketika tenaga kerja terjebak pada sektor berproduktivitas rendah, peningkatan pendapatan akan berlangsung sangat terbatas meskipun jumlah pekerja bertambah.

Oleh karena itu, strategi peningkatan produktivitas harus dilakukan secara terarah. Pertama, melalui peningkatan kualitas pendidikan dasar hingga menengah yang memperkuat literasi, numerasi, dan kemampuan berpikir kritis. Kedua, melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri yang relevan dengan sektor unggulan daerah. Keterampilan teknis di bidang agroindustri, pengolahan hasil perikanan, pariwisata berkelanjutan, serta teknologi digital perlu diperluas agar tenaga kerja lokal mampu mengisi posisi bernilai tambah tinggi. Ketiga, modernisasi teknologi produksi harus menjadi agenda utama. Penggunaan peralatan yang lebih efisien, sistem manajemen berbasis data, serta integrasi digital dalam rantai pasok akan meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Transformasi digital, termasuk pemanfaatan platform pemasaran daring dan sistem pembayaran non-tunai, juga dapat memperluas akses pasar bagi UMKM. Keempat, pengembangan industri pengolahan dan jasa modern perlu diarahkan sebagai

penggerak utama transformasi ekonomi. Industri pengolahan akan memperpanjang rantai nilai komoditas lokal, sementara sektor jasa modern, seperti logistik, keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata berbasis pengalaman, hal ini akan menciptakan lapangan kerja dengan tingkat produktivitas dan upah yang lebih tinggi.

Dalam jangka panjang, peningkatan PDRB per kapita harus berjalan seiring dengan pemerataan kesempatan ekonomi. Jika pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu atau wilayah tertentu, maka kesenjangan akan tetap lebar. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus memastikan bahwa transformasi ekonomi menjangkau pedesaan, kawasan pesisir, dan kelompok masyarakat rentan.

Dengan pendekatan yang terintegrasi menjadikan NTB memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas secara signifikan. Ketika produktivitas meningkat, pendapatan masyarakat akan naik secara berkelanjutan, sehingga PDRB per kapita tidak hanya bertambah secara nominal, tetapi benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang nyata dan merata.

2.2 Transformasi Ekonomi: Komoditas ke Nilai Tambah

Transformasi ekonomi merupakan kebutuhan strategis untuk keluar dari ketergantungan pada pola produksi berbasis komoditas mentah. Selama ini, sebagian besar hasil pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya dipasarkan dalam bentuk bahan baku dengan nilai tambah yang terbatas. Model ini membuat daerah rentan terhadap fluktuasi harga global serta membatasi potensi peningkatan pendapatan masyarakat.

Adapun transformasi dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi bernilai tambah berarti memperpanjang proses produksi di dalam daerah. Komoditas tidak lagi dijual sebagai produk mentah, tetapi diolah, dikemas, dipasarkan, dan bahkan dikembangkan menjadi produk turunan yang memiliki daya saing lebih tinggi. Proses ini menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, serta memperbesar kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

Secara teoritis, transformasi ini selaras dengan konsep transformasi struktural dalam ekonomi pembangunan, yang menekankan pentingnya pergeseran tenaga kerja dan *output* dari sektor primer berproduktivitas rendah ke sektor industri dan jasa yang lebih produktif. Negara atau daerah yang berhasil melakukan transformasi ini umumnya mengalami peningkatan pendapatan per kapita yang signifikan dan lebih stabil.

Bagi NTB, transformasi ekonomi dapat dilakukan melalui beberapa jalur utama. Pertama, hilirisasi sektor pertanian dan perikanan. Jagung, bawang merah, padi, hasil laut, dan komoditas lainnya perlu dikembangkan menjadi produk olahan dengan standar mutu yang baik. Kedua, integrasi sektor pariwisata dengan industri kreatif dan UMKM lokal, sehingga nilai ekonomi wisata tidak hanya berhenti pada kunjungan, tetapi menggerakkan produksi barang dan jasa lokal. Ketiga, pengembangan sektor energi terbarukan dan ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan.

Cacatan atas keberhasilan transformasi struktural di berbagai negara menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas dan diversifikasi ekonomi menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pertumbuhan. Ketika tenaga kerja berpindah dari

sektor primer berproduktivitas rendah menuju sektor industri dan jasa modern, terjadi peningkatan nilai tambah per pekerja, yang pada akhirnya mendorong kenaikan pendapatan per kapita secara berkelanjutan. Transformasi ini juga memperluas basis pajak, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga komoditas.

Maka secara kontekstual bahwa transformasi ekonomi harus dirancang secara sistematis dan berbasis potensi wilayah. Jalur pertama adalah hilirisasi sektor pertanian dan perikanan. Komoditas seperti jagung tidak hanya dijual sebagai bahan baku, tetapi dapat diolah menjadi pakan ternak, tepung, atau produk pangan olahan. Bawang merah dapat dikembangkan menjadi produk olahan siap konsumsi atau bahan baku industri makanan. Hasil laut dapat diproses menjadi produk beku, olahan kemasan, maupun produk ekspor dengan standar mutu internasional. Dengan memperpanjang rantai nilai ini, daerah memperoleh tambahan nilai ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Jalur kedua adalah integrasi sektor pariwisata dengan industri kreatif dan UMKM lokal. Pariwisata tidak boleh berdiri sendiri sebagai sektor jasa, melainkan menjadi penggerak ekonomi lokal yang lebih luas. Produk kuliner khas, kerajinan tangan, fesyen berbasis budaya lokal, hingga pertunjukan seni tradisional dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata. Dengan pendekatan ini, setiap kunjungan wisatawan akan memicu perputaran ekonomi yang lebih besar dan menyentuh pelaku usaha kecil di berbagai wilayah.

Jalur ketiga adalah pengembangan sektor energi terbarukan dan ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan baru. Nusa

Tenggara Barat sendiri pada dasarnya memiliki berbagai potensi energi terbarukan seperti surya, angin, dan biomassa dan hal ini dapat dikembangkan guna mendukung kebutuhan energi bersih. Investasi di sektor ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga membuka peluang industri baru yang berbasis teknologi dan inovasi. Ekonomi hijau juga mencakup pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular, serta pariwisata ramah lingkungan.

Selain tiga jalur utama tersebut, transformasi ekonomi NTB juga memerlukan dukungan ekosistem yang kuat. Infrastruktur logistik, akses pembiayaan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan. Tanpa dukungan tersebut, upaya hilirisasi dan diversifikasi akan berjalan lambat.

Transformasi ekonomi pada akhirnya bukan sekadar perubahan sektor dominan, melainkan perubahan cara pandang terhadap pembangunan. Dari sekadar menjual bahan mentah menjadi mengolah dan menciptakan nilai tambah; dari bergantung pada pasar eksternal menjadi memperkuat kapasitas internal; dari pertumbuhan kuantitatif menjadi pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Transformasi ini menjadi fondasi untuk membangun ekonomi daerah yang lebih tangguh, berdaya saing, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

BAB III PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH

Investasi merupakan salah satu instrumen strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi regional karena berperan langsung dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong transformasi struktural ekonomi daerah. Melalui investasi, terjadi penambahan modal tetap baik dalam bentuk infrastruktur, mesin, teknologi, maupun pengembangan usaha, yang pada akhirnya meningkatkan *output* dan produktivitas. Dalam teori pertumbuhan ekonomi, sebagai pembentukan modal (*capital formation*) menjadi faktor kunci dalam memperbesar kapasitas produksi dan mempercepat ekspansi ekonomi wilayah.

Perlu untuk dicatat bahwa investasi tidak dipahami semata sebagai masuknya arus modal finansial ke dalam daerah. Investasi harus dilihat sebagai proses kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Nilai investasi tidak hanya diukur dari besarnya angka realisasi, tetapi dari kualitas dampaknya terhadap pembangunan daerah. Investasi yang ideal adalah investasi yang mampu:

1. Menciptakan nilai tambah lokal melalui hilirisasi dan pengolahan di dalam wilayah.

2. Menghasilkan transfer teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal.
3. Memperkuat kapasitas pelaku usaha daerah melalui kemitraan dan integrasi rantai pasok.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperluas kesempatan kerja yang layak.

Dengan pendekatan ini, investasi menjadi instrumen pembangunan yang menyentuh aspek ekonomi sekaligus sosial.

Sementara itu, pengelolaan investasi daerah menuntut keseimbangan antara daya tarik (*attractiveness*) dan keberlanjutan (*sustainability*). Daya tarik investasi mencakup kemudahan perizinan, kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur, stabilitas sosial, serta insentif fiskal yang kompetitif. Daerah yang mampu menyediakan ekosistem usaha yang efisien dan transparan akan lebih mudah menarik investor.

Namun daya tarik semata tidak cukup. Investasi yang tidak mempertimbangkan terhadap aspek keberlanjutan yang akan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, atau ketergantungan ekonomi yang berlebihan. Oleh karena itu, prinsip keberlanjutan harus menjadi bagian integral dalam kebijakan investasi daerah. Keberlanjutan mencakup:

1. Perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijak.
2. Keadilan sosial melalui penciptaan lapangan kerja lokal dan distribusi manfaat yang adil.
3. Penguatan ekonomi lokal agar tidak tersisih oleh modal besar.

Oleh karena itu, strategi investasi daerah harus dirancang secara terencana, transparan, dan berorientasi jangka panjang. Perencanaan investasi perlu berbasis peta potensi wilayah dan analisis sektor unggulan. Transparansi dalam proses perizinan dan kemitraan akan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus masyarakat. Sementara orientasi jangka panjang memastikan bahwa investasi tidak bersifat spekulatif atau eksploitatif, tetapi membangun fondasi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan.

Artinya investasi yang berkualitas adalah investasi yang memperkuat kemandirian daerah, meningkatkan martabat tenaga kerja lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dengan tata kelola yang baik, investasi menjadi motor transformasi ekonomi yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga memperluas kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh

3.1. Strategi Peningkatan Daya Tarik Investasi Daerah

Daya tarik investasi daerah merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang membentuk persepsi investor terhadap risiko dan potensi keuntungan suatu wilayah. Investor pada dasarnya mempertimbangkan dua hal utama, yakni: tingkat pengembalian (*return*) dan tingkat risiko (*risk*). Kombinasi faktor ekonomi, kelembagaan, infrastruktur, serta stabilitas sosial menentukan bagaimana dua aspek tersebut dinilai.

Secara umum, investor melihat ukuran pasar, pertumbuhan ekonomi, struktur sektor unggulan, serta daya beli masyarakat. Daerah dengan pertumbuhan stabil dan sektor basis yang kuat cenderung dianggap memiliki prospek usaha yang lebih menjanjikan. Dalam konteks NTB, potensi sektor pertanian

modern, perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan menjadi daya tarik yang perlu dikemas dalam kerangka peluang investasi yang konkret dan terukur.

Selain itu, dari sisi kelembagaan, kualitas tata kelola pemerintahan memainkan peran penting. Kepastian hukum, transparansi perizinan, konsistensi regulasi, dan efektivitas birokrasi akan menurunkan biaya transaksi serta meningkatkan kepercayaan investor. Dalam kajian teori ekonomi kelembagaan menegaskan bahwa institusi yang kuat mampu menciptakan lingkungan usaha yang efisien dan minim ketidakpastian. Tanpa dukungan kelembagaan yang baik, potensi ekonomi yang besar sekalipun sulit dikapitalisasi.

Sementara itu, infrastruktur juga menjadi faktor krusial berikutnya. Dalam *Location Theory*, oleh Alfred Weber (1929) menekankan pentingnya minimisasi biaya transportasi dan logistik dalam penentuan lokasi investasi. Investor cenderung memilih wilayah dengan akses jalan, pelabuhan, energi, dan jaringan komunikasi yang memadai, disebabkan karena hal tersebut secara langsung memengaruhi biaya produksi. Sementara itu, dalam kerangka *New Economic Geography*, Paul Krugman (1991) menjelaskan bahwa aglomerasi ekonomi, yakni pengelompokan aktivitas ekonomi dalam satu kawasan, dapat menciptakan efisiensi melalui skala ekonomi dan kedekatan pasar. Artinya, pengembangan kawasan industri atau klaster ekonomi di NTB dapat meningkatkan daya tarik wilayah secara signifikan.

Tak ketinggalan pula mengenai faktor stabilitas sosial dan harmonisasi hubungan masyarakat dengan dunia usaha juga menjadi pertimbangan penting. Lingkungan sosial yang

kondusif, keamanan yang terjaga, serta komunikasi yang terbuka antara pemerintah, investor, dan masyarakat akan menurunkan risiko non-ekonomi seperti konflik sosial atau penolakan proyek.

Oleh karena itu, strategi peningkatan daya tarik investasi di NTB harus dirancang secara komprehensif dan terintegrasi. Pendekatan parsial, misalnya hanya memperbaiki promosi tanpa reformasi regulasi tidak akan menghasilkan dampak optimal. Strategi tersebut perlu mencakup:

1. Penguatan kepastian hukum dan reformasi birokrasi.

   Kepastian hukum merupakan fondasi utama iklim investasi. Investor membutuhkan jaminan bahwa aturan yang berlaku jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam jangka panjang. Ketidakpastian regulasi, tumpang tindih kewenangan, atau proses perizinan yang berbelit akan meningkatkan biaya transaksi dan memperbesar risiko usaha. Adapun penguatan kepastian hukum dapat dilakukan melalui:

   - Harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.
   - Penyederhanaan prosedur perizinan melalui sistem pelayanan terpadu berbasis digital.
   - Transparansi informasi mengenai persyaratan, biaya, dan waktu proses.
   - Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

   Dilain pihak, reformasi birokrasi juga penting untuk meningkatkan profesionalisme aparatur, mempercepat pelayanan, serta membangun budaya kerja yang responsif.

Birokrasi yang efisien bukan hanya mempermudah investasi, tetapi juga dapat mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur.

Infrastruktur yang memadai akan menurunkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi distribusi. Dalam konteks investasi, kualitas jalan, pelabuhan, energi, air bersih, dan jaringan digital sangat memengaruhi keputusan lokasi usaha. Maka diperlukan sebuah strategi dalam peningkatan infrastruktur meliputi:

- Pembangunan dan pemeliharaan jalan produksi dan akses ke kawasan industri.
- Penguatan sistem logistik dan konektivitas antarwilayah.
- Penyediaan energi yang stabil dan terjangkau.
- Perluasan jaringan internet dan teknologi informasi.

Artinya bahwa dengan adanya konektivitas yang baik memungkinkan integrasi pasar lokal dengan pasar nasional maupun global, sehingga meningkatkan daya saing daerah

3. Pengembangan klaster industri berbasis potensi lokal.

Klaster industri adalah suatu cara pengelompokan usaha-usaha yang saling terkait dalam satu wilayah tertentu. Pendekatan klaster menciptakan efisiensi melalui kedekatan geografis, berbagi infrastruktur, dan kolaborasi antar-pelaku usaha. Di NTB, klaster dapat dikembangkan berdasarkan potensi unggulan, seperti:

- Agroindustri berbasis jagung, bawang merah, atau hortikultura.
- Industri pengolahan hasil perikanan dan budidaya laut.
- Klaster pariwisata terintegrasi dengan ekonomi kreatif.
- Energi terbarukan berbasis sumber daya lokal.

Dengan pengembangan klaster tersebut setidaknya akan menciptakan efek aglomerasi, memperkuat rantai nilai, serta meningkatkan produktivitas dan inovasi.

4. Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja.

Tenaga kerja yang terampil dan produktif menjadi salah satu faktor penentu daya saing daerah. Investor akan mempertimbangkan tentang ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Dalam upaya peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui:

- Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar.
- Sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
- Kerja sama antara industri dan lembaga pendidikan.
- Program *reskilling* dan *upskilling* untuk menghadapi transformasi teknologi.

Dengan SDM yang berkualitas, investasi yang masuk akan lebih produktif dan memberikan dampak jangka panjang.

5. Penciptaan stabilitas sosial melalui partisipasi masyarakat.

Stabilitas sosial merupakan faktor non-ekonomi yang sangat penting dalam keberlanjutan investasi. Konflik sosial, ketidakpuasan masyarakat, atau kurangnya komunikasi dapat menghambat proyek investasi. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan investasi akan memiliki imbas:

- Meningkatkan rasa memiliki terhadap proyek pembangunan.
- Mengurangi potensi konflik.
- Memastikan distribusi manfaat yang lebih adil.

Maka dalam hal ini dialog terbuka, transparansi informasi, serta kemitraan antara investor dan pelaku usaha lokal menjadi kunci terciptanya stabilitas sosial.

Daya tarik investasi pada dasarnya bukan hanya soal kompetisi antarwilayah dalam menarik modal, akan tetapi hal ini tentang membangun ekosistem usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Ketika faktor-faktor: ekonomi, kelembagaan, infrastruktur, dan sosial berjalan selaras, NTB akan memiliki fondasi kuat untuk menjadi tujuan investasi yang kompetitif sekaligus berpihak pada kepentingan daerah dan juga kepada masyarakatnya.

3.2. Investasi Berbasis Nilai Tambah dan Keterlibatan Lokal

Pada dasarnya investasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari besarnya nilai modal yang masuk, tetapi dari seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan dan seberapa luas

manfaatnya dirasakan oleh masyarakat lokal. Artinya investasi harus menjadi instrumen transformasi struktural, yang dapat menggeser paradigma ekonomi dari berbasis bahan mentah (*raw material economy*) menuju ekonomi berbasis nilai tambah (*value-added economy*) yang inklusif dan berkelanjutan.

Konsep investasi berbasis nilai tambah pada dasarnya berakar kuat pada teori *Structural Transformation* (Arthur Lewis; Hollis Chenery), yang menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi ditandai oleh pergeseran dari sektor berproduktivitas rendah (primer) menuju sektor berproduktivitas tinggi (industri dan jasa modern). Tanpa proses hilirisasi dan pengolahan, daerah cenderung terjebak dalam perangkap komoditas (*commodity trap*), yakni ketergantungan pada ekspor bahan mentah dengan volatilitas harga tinggi. Selain itu, teori *Value Chain* (Michael Porter) menekankan bahwa keunggulan kompetitif suatu wilayah dibentuk oleh kemampuannya mengelola seluruh rantai nilai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Investasi yang hanya berhenti pada ekstraksi atau produksi primer akan menghasilkan nilai tambah minimal. Sebaliknya, investasi yang memperkuat mata rantai hilir akan meningkatkan margin ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas efek berganda (*multiplier effect*).

3.2.1. Hilirisasi dan Penguatan Rantai Nilai Lokal

Hilirisasi merupakan strategi kunci dalam transformasi ekonomi daerah karena bertujuan memperpanjang proses produksi di dalam wilayah sehingga nilai tambah tidak keluar ke daerah lain. Hilirisasi pada hal ini bukan sekadar membangun industri pengolahan, tetapi membentuk sistem ekonomi terintegrasi yang menghubungkan produksi primer dengan pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga ekspor secara

berkelanjutan hingga ekspor secara berkelanjutan. Dengan demikian, setiap tahapan produksi tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari satu rantai nilai yang saling terhubung dan saling memperkuat.

Dalam praktiknya, hilirisasi menuntut perencanaan yang sistematis sejak tahap hulu. Produksi primer, seperti pertanian, perikanan, atau peternakan yang harus didukung oleh kepastian pasokan, standar kualitas, serta kontinuitas produksi. Tanpa fondasi hulu yang kuat, industri pengolahan di hilir akan menghadapi kendala bahan baku, fluktuasi kualitas, dan inefisiensi biaya.

Selanjutnya, pada tahap pengolahan, diperlukan investasi pada teknologi, peralatan modern, serta manajemen produksi yang efisien. Di sinilah nilai tambah mulai tercipta secara signifikan. Komoditas yang sebelumnya dijual dalam bentuk mentah dapat diolah menjadi produk setengah jadi atau produk akhir dengan harga jual yang jauh lebih tinggi. Proses ini juga membuka peluang diversifikasi produk, sehingga daerah tidak hanya bergantung pada satu jenis komoditas.

Tahap distribusi dan pemasaran juga menjadi bagian penting dari hilirisasi. Produk bernilai tambah membutuhkan sistem logistik yang efisien, pengemasan yang memenuhi standar, serta strategi branding yang kuat. Identitas produk daerah harus dibangun sebagai kekuatan kompetitif di pasar nasional dan internasional.

Lebih jauh, hilirisasi harus memperhatikan integrasi antaraktor ekonomi. Petani, nelayan, pelaku UMKM, koperasi, industri pengolahan, hingga eksportir perlu berada dalam satu ekosistem yang terkoordinasi. Kemitraan yang adil dan

transparan akan memastikan bahwa peningkatan nilai tambah tidak terpusat pada satu pihak, melainkan terdistribusi secara lebih merata.

Dengan pendekatan tersebut, hilirisasi menjadi instrumen transformasi struktural yang nyata. Ia tidak hanya meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Ketahanan ini tercermin pada kemampuan ekonomi lokal untuk bertahan dari guncangan eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas global, krisis logistik, maupun perlambatan ekonomi nasional, hal ini karena struktur produksinya tidak lagi bergantung pada satu mata rantai atau satu sektor semata.

Hilirisasi juga menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) yang luas. Ketika industri pengolahan berkembang, permintaan terhadap bahan baku meningkat, jasa transportasi tumbuh, kebutuhan kemasan dan distribusi bertambah, serta sektor keuangan dan perdagangan ikut bergerak. Dengan demikian, satu kebijakan hilirisasi dapat mendorong pertumbuhan lintas sektor secara simultan.

Selain dampak ekonomi langsung, hilirisasi mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Industri pengolahan membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan teknis, manajerial, dan standar mutu yang lebih tinggi. Hal ini mendorong investasi pada pelatihan, pendidikan vokasi, dan sertifikasi kompetensi. Dalam jangka panjang, proses ini mempercepat peningkatan produktivitas tenaga kerja dan memperkuat daya saing daerah.

Dari sisi fiskal, hilirisasi memperluas basis pajak dan retribusi daerah. Aktivitas produksi, distribusi, dan perdagangan yang meningkat akan berkontribusi terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan basis ekonomi yang lebih beragam dan bernilai tambah tinggi, kapasitas fiskal daerah menjadi lebih kuat dan stabil.

Hilirisasi harus dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Industri pengolahan tidak boleh merusak lingkungan atau memarginalkan pelaku usaha kecil. Sebaliknya, model kemitraan antara investor, koperasi, dan UMKM perlu dikedepankan agar nilai tambah benar-benar tersebar dan dinikmati oleh masyarakat luas. Dengan demikian, hilirisasi bukan hanya strategi ekonomi, tetapi strategi peradaban dengan membangun kemandirian, meningkatkan martabat tenaga kerja lokal, serta memastikan bahwa kekayaan sumber daya NTB diolah dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya sendiri.

3.2.2. Keterlibatan Lokal dan Kemitraan Inklusif

Investasi yang berkelanjutan tidak dapat berdiri di atas struktur ekonomi yang eksklusif. Ketika suatu proyek investasi hanya terhubung secara vertikal dengan pemilik modal dan pasar eksternal, tanpa integrasi dengan pelaku ekonomi lokal, maka yang tercipta adalah *enclave economy* yakni sebuah kantong pertumbuhan yang terisolasi dari lingkungan sosial-ekonomi sekitarnya. Model seperti ini mungkin menghasilkan *output* dan ekspor yang tinggi, tetapi dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar relatif terbatas.

Dalam kondisi *enclave*, sebagian besar nilai tambah, keuntungan, dan pengambilan keputusan berada di luar

wilayah. Tenaga kerja lokal hanya terlibat pada posisi berupah rendah, sementara rantai pasok, teknologi, dan jaringan distribusi dikendalikan oleh pihak eksternal. Akibatnya, pertumbuhan yang terjadi tidak membentuk basis ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, setiap investasi harus dirancang dengan pendekatan kemitraan inklusif yang menjadikan pelaku ekonomi lokal sebagai bagian integral dari sistem produksi. Keterlibatan ini bukan sekadar simbolis, tetapi struktural, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga distribusi manfaat. Investasi harus menciptakan hubungan horizontal dengan UMKM, koperasi, petani, nelayan, serta komunitas lokal sehingga terjadi integrasi dalam rantai nilai.

Pendekatan ini sejalan dengan teori *Inclusive Growth*, yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus menciptakan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan yang inklusif tidak hanya memperbesar output agregat, tetapi juga memperluas akses terhadap pekerjaan produktif, modal, teknologi, dan pasar. Dalam paradigma ini, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan PDRB, tetapi dari sejauh mana masyarakat luas memperoleh manfaat nyata.

Secara konseptual, pertumbuhan inklusif tidak hanya berbicara tentang "siapa yang tumbuh", tetapi juga "siapa yang terlibat" dan "siapa yang menikmati hasilnya". Dalam kerangka pembangunan daerah, terdapat beberapa dimensi penting yang harus dijalankan secara simultan agar investasi benar-benar menghasilkan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.

1. Akses terhadap Kesempatan Ekonomi

Akses merupakan fondasi utama dari inklusivitas ekonomi. Investasi yang masuk ke suatu wilayah harus membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat lokal dalam berbagai tingkatan ekonomi, yang tidak hanya sebagai tenaga kerja pada posisi rendah, tetapi juga sebagai pemasok bahan baku, distributor, mitra produksi, hingga bagian dari kepemilikan usaha. Dengan demikian, masyarakat terlibat secara struktural dalam proses penciptaan nilai. Tanpa akses yang nyata dan setara, investasi berisiko menciptakan pertumbuhan yang tertutup, terpisah dari ekosistem ekonomi lokal, dan minim dampak terhadap kesejahteraan Adapun akses ini mencakup:

- Kesempatan kerja dengan standar upah layak dan perlindungan sosial.
- Akses UMKM dan koperasi terhadap rantai pasok perusahaan besar.
- Kemudahan memperoleh informasi peluang usaha dan kemitraan.
- Akses terhadap pembiayaan dan pelatihan yang mendukung partisipasi usaha kecil.

2. Distribusi Manfaat yang Lebih Merata

Pertumbuhan yang inklusif menuntut distribusi manfaat yang lebih adil dan merata, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan, perluasan peluang usaha, maupun perbaikan kualitas hidup. Apabila keuntungan hanya terkonsentrasi pada segelintir pelaku, ketimpangan akan semakin melebar dan berpotensi mengganggu

stabilitas sosial. Sebaliknya, ketika manfaat pertumbuhan tersebar secara lebih luas, kemajuan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka-angka makro, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Adapun distribusi manfaat dapat diwujudkan melalui:

- Skema kemitraan berbagi keuntungan (*profit sharing*).
- Peningkatan pendapatan rumah tangga melalui pekerjaan produktif.
- Penguatan usaha kecil sebagai bagian dari rantai nilai.
- Pajak dan retribusi yang kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan publik.

3. Peningkatan Kapasitas dan Produktivitas

Pada dasarnya Investasi tidak boleh berhenti pada pemanfaatan sumber daya semata, tetapi harus menjadi medium transfer pengetahuan, teknologi, dan manajemen modern yang mendorong peningkatan kapasitas. Ketika kapasitas tersebut dapat tumbuh, pelaku lokal dapat bertransformasi dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi produsen dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, proses ini akan memperkuat struktur ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan. Hal ini mencakup:

- Transfer teknologi dan standar produksi modern.
- Pelatihan manajemen dan kewirausahaan bagi mitra lokal.

- Sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
- Penguatan koperasi dan kelembagaan ekonomi desa.

4. Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi

Pertumbuhan yang inklusif tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga harus menjamin keberlanjutan dalam jangka panjang. Salah satu kunci keberlanjutan tersebut adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses investasi. Partisipasi yang nyata baik melalui konsultasi, kemitraan usaha, maupun penyerapan tenaga kerja, akan menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap proyek yang berjalan.

Ketika masyarakat merasa menjadi bagian dari proses pembangunan, dukungan sosial akan meningkat secara alami. Hubungan antara investor, pemerintah, dan komunitas lokal menjadi lebih harmonis karena terdapat komunikasi dan kepentingan bersama. Sebaliknya, investasi yang berjalan tanpa partisipasi berisiko memunculkan kesalahpahaman, resistensi, bahkan konflik sosial.

Legitimasi sosial inilah yang menjadi fondasi stabilitas investasi. Proyek yang memiliki penerimaan publik yang kuat cenderung lebih tahan terhadap gejolak ekonomi maupun tekanan sosial. Dengan dukungan masyarakat, investasi tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan, menciptakan siklus kepercayaan yang memperkuat ekosistem ekonomi daerah secara keseluruhan.

Adapun keberlanjutan sosial dan ekonomi tercermin pada:

- Hubungan harmonis antara investor dan komunitas.
- Pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.
- Keberlangsungan usaha setelah masa insentif atau fase awal investasi berakhir.

3.2.3.Transfer Teknologi dan Penguatan SDM

Transfer teknologi dan penguatan sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen strategis untuk memastikan bahwa investasi tidak berhenti pada peningkatan *output* jangka pendek, tetapi benar-benar memperkuat fondasi ekonomi daerah secara berkelanjutan. Investasi yang berkualitas harus menjadi sarana alih pengetahuan (*knowledge transfer*), pengembangan inovasi, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal sehingga kapasitas produksi daerah meningkat secara permanen.

Secara konseptual, bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ini sangat ditentukan oleh kualitas SDM dan kemampuan menguasai teknologi. Dalam teori *Human Capital* menegaskan bahwa pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja meningkatkan produktivitas individu, yang pada akhirnya memperbesar nilai tambah ekonomi. Sementara itu, dalam kerangka *Endogenous Growth Theory*, bahwa kemajuan teknologi dan inovasi yang tertanam di dalam wilayah menjadi pendorong utama pertumbuhan jangka panjang. Artinya, ketika investasi membawa teknologi dan sistem manajemen modern, dampaknya akan lebih besar apabila terjadi proses pembelajaran yang sistematis di tingkat lokal.

Dalam hal ini perlu dipahami bahwa transfer teknologi tidak semata-mata berarti menghadirkan mesin atau peralatan baru. Yang lebih penting adalah proses penguasaan teknologi tersebut oleh tenaga kerja dan institusi lokal. Transfer yang efektif mencakup:

1. Alih keterampilan teknis, seperti pengoperasian mesin, pengendalian mutu, dan standar produksi modern.
2. Alih manajerial, meliputi perencanaan produksi, pengelolaan rantai pasok, sistem keuangan, dan manajemen risiko.
3. Alih standar dan sertifikasi, termasuk standar mutu, keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, serta akses pasar ekspor.
4. Digitalisasi proses usaha, seperti penggunaan sistem informasi produksi, pemasaran digital, dan analisis data.

Tanpa proses alih pengetahuan yang terstruktur dan terukur, investasi berisiko menciptakan pola ketergantungan jangka panjang pada tenaga ahli dari luar daerah/negeri. Dalam situasi seperti ini, posisi tenaga kerja lokal hanya terbatas pada pekerjaan operasional dengan nilai tambah rendah, sementara fungsi teknis, manajerial, dan strategis tetap dikuasai oleh pihak eksternal. Akibatnya, ketika proyek berakhir atau terjadi relokasi investasi, kapasitas lokal tidak mengalami peningkatan yang berarti.

Sebaliknya, transfer teknologi yang dirancang secara sistematis akan menciptakan proses pembelajaran berjenjang. Tenaga kerja lokal dapat berkembang dari sekadar operator mesin menjadi teknisi terampil, supervisor produksi, manajer

operasional, hingga pada tahap tertentu menjadi inovator yang mampu mengembangkan produk dan proses baru. Transformasi ini bukan hanya meningkatkan produktivitas individu, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi daerah secara keseluruhan.

Agar proses tersebut berjalan efektif, penguatan SDM harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dengan kebutuhan sektor investasi. Artinya, pelatihan tidak boleh bersifat umum dan sporadis, melainkan berbasis pada analisis kebutuhan industri (*industry needs assessment*). Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan dunia usaha dan lembaga pendidikan.

Adapun kemitraan tersebut yang dapat dibangun meliputi:

1. *Link and Match* antara Industri dan Pendidikan

   Kurikulum pendidikan vokasi dan politeknik disesuaikan dengan kebutuhan sektor unggulan, seperti agroindustri, perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan.

2. Program Magang dan *Apprenticeship* Terstruktur

   Mahasiswa dan peserta pelatihan mendapatkan pengalaman langsung di industri, sehingga terjadi transfer keterampilan praktis dan budaya kerja profesional.

3. Pusat Pelatihan Berbasis Industri (*Industry Training Center*)

   Perusahaan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun pusat pelatihan yang menggunakan standar dan peralatan industri terkini.

4. Skema Sertifikasi Kompetensi

Tenaga kerja lokal memperoleh pengakuan formal atas keterampilannya, sehingga meningkatkan mobilitas dan daya saing.

Selain itu, di tengah percepatan transformasi digital dan otomatisasi, program *reskilling* dan *upskilling* menjadi sangat penting. Tenaga kerja yang sebelumnya berada pada sektor tradisional perlu dibekali keterampilan baru agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Proses ini akan mencegah terjadinya pengangguran struktural akibat disrupsi teknologi.

3.2.4. Keberlanjutan Lingkungan dan Ekonomi Hijau

Keberlanjutan lingkungan merupakan dimensi yang tidak terpisahkan dari strategi investasi berbasis nilai tambah dan keterlibatan lokal. Pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan daya dukung lingkungan hanya akan menghasilkan kemajuan yang bersifat semu, seperti terlihat meningkat dalam jangka pendek, tetapi rapuh dan berbiaya tinggi dalam jangka panjang. Kerusakan ekosistem, pencemaran, dan degradasi sumber daya yang pada akhirnya justru menghambat produktivitas dan menimbulkan beban sosial yang besar. Oleh karena itu, setiap investasi harus dirancang selaras dengan prinsip ekonomi hijau (*green economy*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Adapun konsep pembangunan berkelanjutan ini pada dasarnya menekankan keseimbangan antara tiga pilar utama, yakni: (1) pertumbuhan ekonomi; (2) keadilan sosial; dan (3) perlindungan lingkungan. Artinya investasi yang ideal bukan hanya menciptakan keuntungan finansial dan lapangan kerja, tetapi juga memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam

dilakukan secara bijaksana, sehingga tetap tersedia dan produktif bagi generasi mendatang.

Dalam perspektif teori ekonomi lingkungan, aktivitas produksi memang kerap menimbulkan dampak eksternal (*externalities*) yang tidak tercermin dalam harga pasar. Pencemaran udara, degradasi tanah, penurunan kualitas air, hingga hilangnya keanekaragaman hayati sering kali tidak masuk dalam struktur biaya perusahaan. Akibatnya, keuntungan ekonomi yang tampak di atas kertas sesungguhnya "dibayar" oleh masyarakat dalam bentuk kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, serta biaya rehabilitasi di masa depan.

Fenomena ini dikenal sebagai kegagalan pasar (*market failure*), di mana mekanisme harga tidak mampu mencerminkan biaya sosial yang sebenarnya. Jika tidak dikoreksi melalui kebijakan publik, praktik ini dapat mendorong eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan memperlemah keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan investasi harus menginternalisasi biaya lingkungan, sehingga biaya produksi mencerminkan biaya sosial yang sesungguhnya.

Internalisasi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa instrumen kebijakan, antara lain:

1. Standar dan Regulasi Lingkungan yang Tegas

   Penetapan batas emisi, standar kualitas air dan udara, serta kewajiban pengelolaan limbah menjadi mekanisme dasar untuk mengendalikan dampak negatif investasi.

2. Penerapan Teknologi Bersih (*Clean Technology*)

Investasi didorong menggunakan teknologi hemat energi, rendah emisi, dan ramah lingkungan untuk mengurangi jejak ekologis produksi.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

   Prinsip produksi yang efisien dalam penggunaan air, energi, dan bahan baku akan menekan biaya sekaligus mengurangi tekanan terhadap lingkungan.

4. Pendekatan Ekonomi Sirkular (*Circular Economy*)

   Limbah produksi dapat diolah kembali menjadi bahan baku, sehingga mengurangi pemborosan dan memperpanjang siklus pemanfaatan sumber daya.

5. Instrumen Insentif dan Disinsentif

   Pemberian insentif bagi investasi hijau serta pengenaan sanksi atau biaya tambahan bagi kegiatan yang merusak lingkungan menjadi alat kebijakan yang efektif.

Dalam konteks NTB, penerapan prinsip-prinsip ini menjadi sangat penting mengingat perekonomian daerah banyak bertumpu pada sektor berbasis sumber daya alam, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Kerusakan lingkungan pada sektor-sektor tersebut akan berdampak langsung pada penurunan produktivitas dan daya tarik ekonomi daerah.

Lebih jauh, investasi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan justru memiliki nilai tambah strategis. Pasar global semakin menuntut standar keberlanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Produk yang dihasilkan melalui proses ramah lingkungan

cenderung memiliki akses pasar yang lebih luas dan reputasi yang lebih baik.

Dengan demikian, pengintegrasian aspek lingkungan dalam kebijakan investasi bukanlah beban tambahan, melainkan strategi jangka panjang untuk menjaga daya saing dan ketahanan ekonomi daerah. Maka pengelolaan investasi yang berwawasan lingkungan menjadi bagian dari komitmen moral dan ekonomi untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian, antara pertumbuhan dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang.

3.3. Tata Kelola dan Pengawasan Investasi Daerah

Keberhasilan investasi daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya nilai realisasi modal atau jumlah proyek yang masuk, tetapi dari bagaimana investasi tersebut dikelola, diawasi, dan diintegrasikan ke dalam sistem pembangunan daerah. Investasi yang besar tanpa tata kelola yang baik dapat menimbulkan distorsi ekonomi, memperlebar ketimpangan, memicu konflik sosial, bahkan menimbulkan kerugian fiskal dan kerusakan lingkungan yang jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.

Dalam praktiknya, lemahnya tata kelola dapat terlihat dalam bentuk perizinan yang tidak transparan, pengawasan lingkungan yang longgar, ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi proyek, atau minimnya kontribusi terhadap ekonomi lokal. Kondisi semacam ini bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak iklim investasi itu sendiri karena menurunkan kepercayaan publik dan kredibilitas pemerintah daerah.

Oleh karena itu, tata kelola dan pengawasan investasi harus menjadi pilar utama kebijakan pembangunan. Tata kelola yang baik (*good governance*) dapat memastikan bahwa investasi berjalan sesuai rencana, memberikan manfaat nyata, dan mematuhi ketentuan hukum serta standar lingkungan yang berlaku.

Adapun prinsip-prinsip utama yang harus menjadi landasan adalah:

1. Transparansi

   Transparansi berarti keterbukaan informasi mengenai proses perizinan, bentuk insentif yang diberikan, lokasi proyek, dampak lingkungan, serta kewajiban investor. Informasi yang terbuka akan mencegah praktik kolusi, mengurangi spekulasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta pelaku usaha. Sistem digitalisasi perizinan dan pelaporan menjadi instrumen penting untuk memastikan proses yang jelas dan dapat ditelusuri.

2. Akuntabilitas

   Akuntabilitas menuntut setiap keputusan dan kebijakan investasi dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan etis. Pemerintah daerah harus memiliki mekanisme evaluasi berkala terhadap kinerja investasi, termasuk realisasi komitmen investor dalam penyerapan tenaga kerja, pembayaran pajak, dan pemenuhan standar lingkungan. Dengan akuntabilitas yang kuat, risiko penyimpangan dapat diminimalkan.

3. Partisipasi

Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal menjadi kunci untuk menciptakan legitimasi sosial investasi. Keterlibatan publik dalam proses perencanaan, konsultasi, dan evaluasi proyek akan memperkuat rasa memiliki serta mengurangi potensi konflik. Partisipasi juga menjadi sarana kontrol sosial yang efektif terhadap pelaksanaan investasi.

4. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menciptakan keseimbangan antara perlindungan kepentingan investor dan perlindungan hak masyarakat. Regulasi yang jelas, konsisten, dan tidak diskriminatif akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha sekaligus menjaga keadilan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, baik oleh investor maupun aparat, menjadi fondasi utama tata kelola yang kredibel.

Lebih jauh, tata kelola investasi yang baik juga harus berbasis data dan perencanaan jangka panjang dan hal ini adalah titik krusial. Artinya pemerintah daerah perlu memiliki peta investasi strategis yang selaras dengan rencana pembangunan daerah, sehingga investasi tidak berjalan secara sporadis, tetapi mendukung transformasi ekonomi yang terarah.

BAB IV PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pembangunan sumber daya manusia merupakan inti dan fondasi dari seluruh proses pembangunan daerah. Tanpa manusia yang sehat secara jasmani, cerdas secara intelektual, berdaya secara sosial, dan bermartabat secara moral, kemajuan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta adopsi teknologi modern hanya akan menghasilkan pencapaian semu yang rapuh dan tidak berkelanjutan. Sebagaimana telah ditegaskan dalam bab-bab sebelumnya, pembangunan yang bermartabat menempatkan manusia bukan sebagai alat atau instrumen pembangunan, melainkan sebagai tujuan utama dan subjek yang menentukan arah pembangunan itu sendiri.

Dalam konteks Nusa Tenggara Barat, pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial, budaya, dan tantangan struktural yang dihadapi daerah. NTB tengah berada pada fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif meningkat secara signifikan. Kondisi ini menghadirkan peluang besar untuk mempercepat kemajuan daerah, tetapi sekaligus menyimpan risiko serius apabila tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tanpa kebijakan yang tepat, bonus demografi dapat berubah menjadi beban sosial berupa pengangguran, kemiskinan struktural, dan ketimpangan antarwilayah.

Berbagai persoalan mendasar masih menjadi tantangan nyata, mulai dari ketimpangan akses dan mutu pendidikan, kualitas layanan kesehatan yang belum merata, persoalan gizi dan stunting, hingga keterbatasan ruang partisipasi dan pemberdayaan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Tantangan-tantangan ini menuntut pendekatan pembangunan sumber daya manusia yang menyeluruh, manusiawi, dan berkelanjutan, bukan kebijakan parsial yang bersifat jangka pendek.

Oleh karena itu, bab ini membangun kerangka pembangunan manusia yang utuh dan berlapis, yang tidak semata-mata bertumpu pada pertumbuhan ekonomi atau peningkatan keterampilan teknis. Pembangunan sumber daya manusia harus mencakup dimensi biologis, sebagai fondasi kesehatan dan kualitas hidup; dimensi kecerdasan, sebagai basis kemampuan berpikir, belajar, dan berinovasi; serta dimensi spiritual, sebagai penyangga nilai, etika, dan martabat manusia. Ketiga dimensi ini dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam membentuk manusia NTB yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.

Dengan pendekatan tersebut, pembangunan sumber daya manusia tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja hari ini, tetapi juga untuk menyiapkan generasi masa depan yang mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai kemanusiaannya. Inilah landasan utama bagi terwujudnya Nusa Tenggara Barat yang maju, berkeadilan, dan bermartabat secara berkelanjutan.

4.1. Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan konsep sentral dalam teori dan praktik pembangunan. Namun, pemaknaannya sering kali mengalami penyempitan menjadi sekadar tenaga kerja atau faktor produksi dalam sistem ekonomi. Dalam paradigma pembangunan yang bermartabat, pemahaman sempit semacam ini perlu dikritisi dan dilampaui. Sumber daya manusia tidak dapat direduksi menjadi angka produktivitas, tingkat upah, atau kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus dipahami sebagai manusia seutuhnya dengan seluruh potensi dan martabatnya.

Secara klasik, ilmu ekonomi memandang manusia sebagai salah satu faktor produksi di samping tanah, modal, dan teknologi. Pandangan ini kemudian berkembang melalui sebuah teori *human capital*, yang menekankan bahwa pendidikan, keterampilan, dan kesehatan merupakan bentuk investasi yang meningkatkan produktivitas individu dan pertumbuhan ekonomi (Becker, 1964). Meskipun pendekatan ini membawa kemajuan penting dalam menempatkan manusia sebagai aset strategis pembangunan, ia tetap menyisakan kelemahan ketika manusia dipandang terutama dari sudut manfaat ekonominya.

Adapun menurut *United Nations Development Programme* (UNDP). Dalam laporan *Human Development Report* (1990), bahwa pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan-pilihan hidup manusia, sehingga mereka dapat hidup panjang, sehat, berpengetahuan, dan bermartabat. Dalam kerangka ini, manusia ditempatkan sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan sekadar alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Amartya Sen (1999), menegaskan bahwa pembangunan sejati pada dasarnya perluasan *capabilities*, yakni kemampuan nyata manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia tidak hanya diukur dari apa yang dapat mereka hasilkan, tetapi dari apa yang mampu mereka capai dan menjadi. Perspektif ini memperkuat gagasan bahwa pembangunan SDM harus mencakup kebebasan, martabat, dan kesempatan yang adil bagi setiap individu.

Dalam konteks sosial dan kultural, sumber daya manusia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai, budaya, dan relasi sosial tempat manusia hidup. Manusia bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan makhluk sosial yang dibentuk oleh lingkungan, adat, dan sistem nilai kolektif. Oleh karena itu, pembangunan SDM yang mengabaikan konteks budaya berisiko melahirkan manusia yang terampil secara teknis, tetapi tercerabut dari identitas dan tanggung jawab sosialnya.

Apabila kita melihat masyarakat seperti Nusa Tenggara Barat, yang memiliki kekayaan nilai budaya dan religius yang kuat, pengertian sumber daya manusia harus dimaknai secara lebih utuh. SDM tidak hanya berarti tenaga kerja yang siap diserap pasar, tetapi manusia yang sehat jasmani, cerdas akal, kuat moral, dan berakar pada nilai lokal. Pembangunan manusia yang demikian tidak hanya meningkatkan daya saing daerah, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan martabat kolektif masyarakat. Lebih jauh, pengertian sumber daya manusia dalam konteks pembangunan bermartabat yakni menuntut pengakuan keberagaman kondisi manusia. Anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas semuanya merupakan bagian integral dari SDM daerah. Mereka bukan beban pembangunan,

melainkan potensi yang harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing. Dengan demikian, pembangunan SDM harus bersifat inklusif dan berkeadilan.

Sedangkan dari perspektif etika pembangunan, memanusiakan manusia menjadi prinsip utama. Yakni pembangunan sumber daya manusia tidak boleh menghasilkan eksploitasi, peminggiran, atau dehumanisasi atas nama efisiensi dan pertumbuhan. Sebaliknya, pembangunan Sumber Daya Manusia harus memperkuat martabat, kebebasan, dan tanggung jawab manusia sebagai subjek pembangunan. Dalam pengertian inilah, sumber daya manusia bukan sekadar "*resource*", tetapi manusia bermartabat yang menjadi penentu arah masa depan daerah.

Dengan pemahaman tersebut, pembangunan sumber daya manusia dalam buku ini diposisikan sebagai fondasi strategis seluruh agenda pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tanpa SDM yang berkualitas dan bermartabat, seluruh kebijakan ekonomi, teknologi, dan infrastruktur tidak akan berkelanjutan. Sebaliknya, dengan manusia sebagai pusat dan tujuan pembangunan, kemajuan daerah dapat berjalan seiring dengan keadilan sosial, keberlanjutan, dan peradaban yang beradab.

4.2. Dimensi Pembangunan Manusia

Pembangunan sumber daya manusia yang bermartabat mensyaratkan pemahaman yang komprehensif tentang hakikat manusia itu sendiri. Pada dasarnya manusia bukanlah entitas tunggal yang dapat dikembangkan hanya melalui satu pendekatan, melainkan makhluk multidimensional yang terdiri dari tubuh, akal, dan jiwa. Oleh karena itu, pembangunan manusia tidak dapat direduksi menjadi sekadar peningkatan

pendapatan, keterampilan teknis, atau capaian pendidikan formal semata.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) menegaskan pada dasarnya pembangunan manusia mencakup perluasan kemampuan hidup sehat, berpengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak, serta kebebasan untuk menentukan pilihan hidup secara bermakna. Pendekatan ini menolak pandangan sempit yang mengukur kemajuan manusia hanya dari sisi ekonomi, dan menekankan pentingnya kualitas hidup secara menyeluruh.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Amartya Sen melalui pendekatan *capability* juga menegaskan bahwa pembangunan manusia harus diukur dari kemampuan nyata manusia untuk menjadi dan melakukan sesuatu yang mereka nilai penting. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya soal "apa yang dimiliki", tetapi "apa yang mampu dijalani" oleh seseorang. Perspektif ini memperkuat gagasan bahwa pembangunan manusia harus menyentuh seluruh dimensi eksistensi manusia.

Dalam konteks pembangunan daerah seperti Nusa Tenggara Barat, bahwa pendekatan multidimensi ini menjadi semakin relevan. Tantangan pembangunan SDM di NTB tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga dengan kondisi kesehatan, kualitas pendidikan, ketahanan nilai, serta kesiapan moral dan sosial dalam menghadapi perubahan zaman. Oleh karena itu, pembangunan manusia perlu dirancang sebagai proses jangka panjang yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berpijak pada realitas lokal.

Dalam bab ini, pembangunan manusia dipahami melalui tiga dimensi hakiki yang menyatu dalam keberadaan manusia itu

sendiri, yakni dimensi biologis, dimensi kecerdasan, dan dimensi spiritual. Ketiganya tidak hadir sebagai lapisan yang terpisah, melainkan sebagai kesatuan eksistensial yang saling menjiwai dan menentukan kualitas kemanusiaan. Tubuh yang sehat memberi ruang bagi akal untuk berkembang, kecerdasan memberi arah bagi tindakan, dan spiritualitas menjaga agar seluruh kemampuan manusia tetap berpijak pada nilai dan martabat.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Aristoteles, yang memandang manusia sebagai *zoon politikon* yakni makhluk hidup yang berakal dan bermoral yang memiliki tujuan hidup guna mencapai *eudaimonia* (kehidupan yang baik dan bermakna). Bagi Aristoteles, kebajikan (*virtue*) lahir dari keseimbangan antara tubuh yang terpelihara, akal yang terlatih, dan karakter yang dibentuk melalui sebuah kebiasaan etis. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari upaya memelihara kesehatan fisik, mengembangkan rasionalitas, dan menumbuhkan keutamaan moral secara serempak.

Adapun dalam khazanah filsafat Islam yang berkembang, Al-Farabi menegaskan bahwa tujuan akhir kehidupan manusia adalah *al-sa'adah* (kebahagiaan sejati), yang hanya dapat dicapai melalui kesempurnaan akal dan kematangan moral dalam tatanan masyarakat yang beradab. Al-Farabi memandang manusia sebagai makhluk rasional-spiritual yang hanya dapat berkembang secara utuh jika dimensi jasmani, intelektual, dan spiritualnya dibina secara seimbang. Pembangunan manusia, dalam perspektif ini, bukan sekadar peningkatan kapasitas teknis, melainkan proses pembentukan insan beradab yang mampu hidup bersama secara harmonis.

Sementara itu, menurut Ibn Khaldun melalui Muqaddimah menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang kualitas peradabannya sangat ditentukan oleh kondisi fisik, kecerdasan, dan moral masyarakatnya. Ia menunjukkan bahwa kemunduran peradaban sering kali bermula dari melemahnya kualitas manusia, baik karena kemerosotan etika, melemahnya solidaritas sosial (*'asabiyyah*), maupun pengabaian terhadap pendidikan dan kesejahteraan. Dengan demikian, pembangunan manusia menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan peradaban.

Dengan merujuk pada tradisi filsafat klasik ini, menjadi jelas bahwa pembangunan manusia bukanlah konsep baru, melainkan agenda peradaban yang telah lama dipikirkan secara mendalam. Ketiga dimensi : biologis, kecerdasan, dan spiritual merupakan fondasi yang telah diakui lintas zaman dan lintas tradisi pemikiran. Pembangunan yang mengabaikan salah satu dimensi tersebut akan melahirkan ketimpangan dalam diri manusia: kecerdasan tanpa etika, kesehatan tanpa makna, atau spiritualitas tanpa daya.

Oleh karena itu, pembangunan manusia yang bermartabat harus dipahami sebagai proses memuliakan eksistensi manusia secara utuh, bukan sekadar meningkatkan kemampuan kerja atau produktivitas ekonomi. Ia adalah upaya sadar untuk membentuk manusia yang sehat tubuhnya, tajam akalnya, dan lurus jiwanya, yakni manusia yang mampu hidup bermakna, berkontribusi bagi masyarakat, dan menjaga kesinambungan peradaban di tengah perubahan zaman.

4.2.1. Dimensi Biologi

Dimensi biologis merupakan fondasi paling elementer sekaligus paling menentukan dalam pembangunan manusia.

Tubuh manusia adalah ruang pertama tempat kehidupan berlangsung, sekaligus medium utama bagi berkembangnya akal, emosi, dan spiritualitas. Tanpa kondisi biologis yang sehat dan layak, seluruh upaya pembangunan kecerdasan, pembentukan karakter, maupun penguatan nilai spiritual akan menghadapi batas yang sangat serius. Oleh karena itu, pembangunan manusia yang bermartabat harus dimulai dari pengakuan atas hak hidup yang sehat sebagai prasyarat kemanusiaan.

Dalam tradisi filsafat klasik, tubuh tidak pernah dipahami sebagai unsur yang terpisah atau lebih rendah dibandingkan jiwa. Aristoteles menempatkan kesehatan tubuh sebagai kondisi awal bagi manusia untuk menjalankan fungsi rasional dan etisnya secara optimal. Dalam *Nicomachean Ethics*, Aristoteles menegaskan bahwa tujuan hidup manusia adalah *eudaimonia* kehidupan yang baik dan bermakna dan hanya dapat dicapai ketika kondisi fisik memungkinkan seseorang untuk belajar, bertindak, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Tubuh yang sakit atau terabaikan akan membatasi kebebasan manusia untuk mengembangkan kebajikan dan rasionalitasnya.

Pemikiran ini menemukan resonansinya dalam khazanah filsafat Islam melalui Ibn Khaldun. Dalam Muqaddimah, Ibn Khaldun menunjukkan bahwa kualitas biologis masyarakat, termasuk kesehatan, kecukupan pangan, dan kondisi hidup dasar, hal ini sangat memengaruhi daya hidup peradaban. Masyarakat yang terjerat kemiskinan biologis, kelaparan, dan penyakit kronis akan mengalami pelemahan produktivitas, kemerosotan solidaritas sosial (*'asabiyyah*), serta penurunan kapasitas berpikir jangka panjang. Dengan demikian, dimensi biologis tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga

menentukan kekuatan kolektif dan keberlanjutan suatu masyarakat.

Dalam konteks pembangunan modern, dimensi biologis mencakup kesehatan fisik, kecukupan dan kualitas gizi, lingkungan hidup yang sehat, serta akses yang adil terhadap layanan kesehatan. World Health Organization mendefinisikan kesehatan bukan sekadar sebagai ketiadaan penyakit, melainkan sebagai kondisi sejahtera secara fisik yang memungkinkan manusia menjalani kehidupan secara produktif dan bermakna. Perspektif ini menegaskan bahwa kesehatan merupakan kondisi aktif, bukan pasif. Artinya, kesehatan harus dipelihara dan dihasilkan melalui kebijakan publik yang tepat, lingkungan sosial yang mendukung, serta perilaku hidup masyarakat yang sehat dan berkelanjutan.

Di sisi lain, dimensi biologis tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan martabat manusia. Ketika akses terhadap layanan kesehatan, gizi yang layak, dan lingkungan hidup yang sehat hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat, sementara kelompok lain tertinggal, maka pembangunan kehilangan dasar etiknya. Pembangunan manusia yang bermartabat menolak pandangan bahwa kesehatan adalah privilese, dan menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia yang wajib dijamin oleh negara dan didukung oleh masyarakat. Dalam perspektif ini, kebijakan kesehatan tidak dapat dipahami semata sebagai kebijakan teknis atau administratif, melainkan sebagai perwujudan tanggung jawab moral negara terhadap warganya.

Satu contoh kasus di Nusa Tenggara Barat, bahwa dimensi biologis memiliki nilai strategis yang sangat besar, terutama

dalam konteks bonus demografi yang sedang berlangsung. Salah satu tantangan paling menonjol adalah tingginya prevalensi *stunting* di kalangan balita sebagai indikator kegagalan pemenuhan kebutuhan biologis dasar pada periode awal kehidupan. Menurut Survei Status Gizi Indonesia, NTB termasuk salah satu daerah dengan tingkat stunting yang tergolong tinggi, mencapai sekitar 32,7 % pada tahun 2022, menempatkannya di antara provinsi dengan prevalensi *stunting* tertinggi di Indonesia. Angka ini secara signifikan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan menunjukkan bahwa banyak anak mengalami gangguan pertumbuhan sejak dini, yang berpotensi menyebabkan hambatan perkembangan fisik dan kognitif (Nastiti, et al, 2025)

Data lain yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB menunjukkan bahwa ribuan balita di provinsi ini masih mengalami *stunting* yang menjadi perhatian serius dalam upaya peningkatan kualitas hidup anak. Untuk beberapa periode, angka *stunting* bahkan sempat berada pada lebih dari 30 % sebelum berbagai intervensi dilaksanakan, meskipun tren awal penurunan mulai tampak melalui kebijakan gizi dan kesehatan publik yang terintegrasi (https://ntbprov.go.id).

Dengan demikian, kegagalan memenuhi kebutuhan biologis dasar sejak usia dini tidak hanya menciptakan beban kesehatan dalam jangka pendek, tetapi juga melahirkan ketertinggalan struktural jangka panjang yang sulit diperbaiki. Ketertinggalan ini pada akhirnya membentuk lingkaran kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, rendahnya produktivitas, serta kesenjangan sosial yang berpotensi diwariskan lintas generasi. Masalah biologis, dengan kata lain,

bukan persoalan individual, melainkan persoalan pembangunan dan keadilan sosial.

Namun, lebih jauh, pembangunan dimensi biologis tidak dapat dipersempit sebagai urusan sektor kesehatan semata. Ia merupakan agenda lintas sektor yang melibatkan kebijakan pangan dan gizi, sanitasi dan air bersih, lingkungan hidup, pendidikan kesehatan, perumahan layak, serta sistem perlindungan sosial. Dimensi biologis menjadi pondasi awal bagi pembangunan manusia secara utuh: tubuh yang sehat memungkinkan akal berkembang secara optimal, dan jiwa bertumbuh dalam kesadaran nilai, tanggung jawab, dan martabat.

4.2.2. Dimensi Kecerdasan

Dimensi kecerdasan merupakan jantung pembangunan sumber daya manusia. Jika dimensi biologis menyediakan fondasi kehidupan fisik, maka dimensi kecerdasan menentukan arah, kualitas, dan makna penggunaan kehidupan tersebut. Kecerdasan memungkinkan manusia memahami realitas, mengambil keputusan, memecahkan persoalan, serta beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, pembangunan manusia yang bermartabat tidak cukup hanya memastikan manusia hidup sehat, tetapi juga memastikan mereka mampu berpikir, belajar, dan bernalar secara mandiri.

Dalam tradisi filsafat klasik, akal menempati posisi sentral dalam definisi manusia. Aristoteles memandang manusia sebagai *animal rationale* yakni makhluk hidup yang memiliki kemampuan berpikir dan bernalar. Bagi Aristoteles, pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan proses pembiasaan akal untuk mengenali kebenaran dan membentuk

kebajikan. Akal yang terdidik memungkinkan manusia tidak hanya mengetahui apa yang benar, tetapi juga memilih yang baik dalam tindakan nyata.

Dalam khazanah filsafat Islam, pemikiran tentang akal memperoleh kedalaman spiritual dan etis. Al-Farabi menegaskan bahwa kesempurnaan manusia dicapai melalui pengembangan akal hingga mencapai kebijaksanaan (hikmah). Pendidikan, dalam pandangan Al-Farabi, bertujuan membentuk manusia yang mampu berpikir rasional sekaligus hidup beradab dalam masyarakat. Akal tidak dipisahkan dari etika; kecerdasan yang sejati adalah kecerdasan yang mengarahkan manusia pada kehidupan bersama yang adil dan bermakna.

Sementara itu, Ibn Khaldun melihat kecerdasan manusia sebagai hasil dari proses sosial dan pendidikan yang berkelanjutan. Dalam Muqaddimah, Ibn Khaldun menekankan bahwa kualitas akal masyarakat sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan, tradisi keilmuan, dan lingkungan sosial. Kemunduran peradaban, menurut Ibn Khaldun, sering kali ditandai oleh melemahnya tradisi berpikir kritis dan pendidikan yang bermutu. Dengan demikian, pembangunan kecerdasan bukan hanya urusan individu, tetapi urusan peradaban.

Dalam konteks pembangunan modern, dimensi kecerdasan tidak lagi dapat dipersempit pada kecerdasan akademik atau kemampuan kognitif formal semata. Kecerdasan mencakup kemampuan berpikir kritis, kreativitas, literasi digital, kecerdasan emosional, serta kemampuan belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*). Pendidikan yang bermartabat harus membentuk manusia yang tidak hanya mampu menghafal dan mengikuti instruksi, tetapi juga mampu memahami,

mempertanyakan, dan mencipta solusi atas persoalan nyata yang dihadapi masyarakatnya.

Namun, saat ini tantangan dimensi kecerdasan menjadi semakin kompleks di era kecerdasan buatan (AI). Teknologi AI yang telah mampu melakukan banyak fungsi kognitif seperti" menghitung, menganalisis data, bahkan menghasilkan teks dan gambar, yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah eksklusif manusia. Kondisi ini menghadirkan paradoks: di satu sisi AI membuka peluang efisiensi dan inovasi, tetapi di sisi lain berpotensi melemahkan kapasitas berpikir manusia jika pendidikan hanya diarahkan pada kepatuhan prosedural dan penguasaan teknis yang mudah digantikan mesin.

Oleh karena itu, pembangunan kecerdasan manusia di era AI harus diarahkan pada kemampuan yang tidak dapat direduksi menjadi algoritma semata. Berpikir kritis, penalaran etis, kemampuan memahami konteks, empati sosial, serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan menjadi kompetensi kunci. Pendidikan tidak boleh kalah cepat dari teknologi, tetapi juga tidak boleh larut menjadi sekadar pelatihan teknis. Pendidikan harus membekali manusia dengan kemampuan untuk mengendalikan teknologi, bukan dikendalikan olehnya.

Dalam konteks Nusa Tenggara Barat, tantangan dimensi kecerdasan tercermin pada kesenjangan mutu pendidikan, keterbatasan akses pendidikan berkualitas di wilayah tertentu, serta belum optimalnya integrasi antara pendidikan, kebutuhan dunia kerja, dan perkembangan teknologi. Bonus demografi hanya akan menjadi kekuatan jika diiringi oleh bonus kecerdasan, yakni generasi muda yang memiliki daya pikir kritis, kemampuan adaptasi, dan literasi teknologi yang memadai.

Namun demikian, pembangunan kecerdasan di NTB tidak boleh tercerabut dari nilai dan konteks budaya lokal. Nilai-nilai kebijaksanaan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial yang hidup dalam budaya Sasak, Samawa, dan Mbojo merupakan modal penting dalam membangun kecerdasan yang berakar. Kecerdasan yang bermartabat adalah kecerdasan yang mampu berdialog dengan teknologi modern, tanpa kehilangan jati diri dan kepekaan sosial. Artinya hal ini dipahami sebagai ruang pembentukan akal yang merdeka, kritis, dan bertanggung jawab. Yang akan menjadi penghubung antara kesehatan biologis dan kedalaman spiritual. Tanpa kecerdasan yang terdidik, manusia mudah terjebak dalam ketergantungan teknologi; tanpa nilai, kecerdasan berubah menjadi alat dominasi. Oleh karena itu, pembangunan dimensi kecerdasan menjadi prasyarat utama bagi manusia NTB untuk menghadapi masa depan yang semakin kompleks dan terdigitalisasi.

4.2.3. Dimensi Spiritual

Dimensi spiritual merupakan penyangga terdalam dalam pembangunan manusia. Jika dimensi biologis memastikan keberlangsungan hidup dan dimensi kecerdasan menentukan kemampuan berpikir serta beradaptasi, maka dimensi spiritual memberi arah, makna, dan orientasi nilai bagi seluruh kemampuan manusia. Spiritualitas menjaga agar kesehatan dan kecerdasan tidak bergerak tanpa kompas etis, serta memastikan bahwa kemajuan tidak berakhir pada dehumanisasi.

Dalam tradisi filsafat klasik, spiritualitas tidak dipahami sebagai penolakan terhadap rasionalitas, melainkan sebagai puncak kesempurnaan manusia. Aristoteles menegaskan bahwa tujuan akhir manusia adalah *eudaimonia*, yang hanya dapat

dicapai melalui kehidupan berkeutamaan (*virtue*). Keutamaan ini bukan semata hasil kecerdasan teknis, melainkan buah dari pembiasaan moral yang menata hasrat, akal, dan tindakan dalam satu kesatuan etis. Dengan demikian, spiritualitas berfungsi sebagai landasan pembentukan karakter dan kebijaksanaan.

Dalam khazanah pemikiran Islam, dimensi spiritual memperoleh kedalaman yang lebih eksplisit. Al-Farabi memandang bahwa tujuan hidup manusia adalah *al-sa'adah* (kebahagiaan sejati), yang dicapai melalui kesempurnaan akal dan kematangan moral dalam tatanan masyarakat yang beradab. Spiritualitas, dalam pandangan ini, bukan sekadar ritual personal, melainkan kekuatan etis yang menata kehidupan sosial dan politik. Manusia yang cerdas tetapi tidak memiliki landasan spiritual dimungkinkan kehilangan arah dalam menggunakan kecerdasannya.

Sementara itu, Ibn Khaldun menunjukkan bahwa kekuatan peradaban sangat ditentukan oleh nilai moral dan spiritual yang hidup dalam masyarakat. Dalam Muqaddimah, ia menjelaskan bahwa kemerosotan peradaban sering kali diawali oleh melemahnya etika, kejujuran, dan tanggung jawab kolektif. Spiritualitas, dalam konteks ini, berfungsi sebagai perekat sosial yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama.

Dalam pembangunan manusia modern, dimensi spiritual sering kali terpinggirkan oleh pendekatan teknokratis dan materialistis. Pendidikan dan pembangunan lebih menekankan keterampilan teknis, produktivitas, dan efisiensi, sementara pembentukan nilai, adab, dan makna hidup dianggap sebagai urusan privat. Padahal, pengalaman sejarah menunjukkan

bahwa kemajuan yang mengabaikan dimensi spiritual cenderung melahirkan krisis makna, konflik sosial, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Di era kecerdasan buatan dan teknologi digital, urgensi dimensi spiritual justru semakin besar. Teknologi mampu mempercepat proses, meningkatkan efisiensi, dan menggantikan banyak fungsi kognitif manusia. Namun teknologi tidak memiliki kesadaran moral. Tanpa fondasi spiritual, manusia berisiko menyerahkan keputusan etis kepada algoritma, atau menggunakan teknologi semata berdasarkan logika keuntungan dan kekuasaan. Dalam konteks ini, dimensi spiritual berperan sebagai penjaga nurani manusia agar kecerdasan dan teknologi tetap berada dalam koridor kemanusiaan.

Dalam konteks Nusa Tenggara Barat, dimensi spiritual memiliki relevansi yang sangat kuat. Masyarakat NTB hidup dalam tradisi religius dan budaya yang menekankan adab, tanggung jawab moral, serta keseimbangan hidup. Nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, kesantunan, dan amanah merupakan modal spiritual yang telah lama menjadi penyangga kehidupan sosial. Pembangunan sumber daya manusia di NTB akan kehilangan ruhnya jika dimensi spiritual ini tidak diintegrasikan secara sadar dalam pendidikan, kebijakan publik, dan kepemimpinan.

Selain itu, dimensi spiritual juga berperan penting dalam membangun ketahanan mental dan etika kerja. Manusia yang memiliki landasan spiritual yang kuat cenderung lebih tangguh menghadapi perubahan, lebih bertanggung jawab dalam bekerja, dan lebih peduli terhadap dampak sosial dari tindakannya. Spiritualitas membentuk kesadaran bahwa kerja, belajar, dan

kepemimpinan bukan semata aktivitas ekonomi, tetapi juga amanah moral. Dengan demikian, dimensi spiritual tidak dapat dipahami sebagai pelengkap atau sisa dari pembangunan manusia, melainkan sebagai poros nilai yang menyatukan dimensi biologis dan kecerdasan. Ia memastikan bahwa manusia yang sehat dan cerdas juga menjadi manusia yang beradab, berempati, dan bertanggung jawab. Pembangunan manusia yang bermartabat hanya dapat terwujud ketika tubuh dipelihara, akal dikembangkan, dan jiwa ditumbuhkan secara seimbang.

Melalui pemahaman inilah, pembangunan sumber daya manusia diarahkan bukan hanya untuk menghasilkan individu yang kompeten secara teknis, tetapi manusia yang utuh secara eksistensial yang mampu hidup bermakna, berkontribusi bagi masyarakat, dan menjaga keberlanjutan peradaban di tengah perubahan zaman.

4.3. Kesehatan dan Disabilitas

Kesehatan dan disabilitas merupakan dimensi fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang bermartabat. Dan keduanya tidak dapat dipisahkan, karena kesehatan menentukan kualitas hidup manusia secara umum, sementara isu disabilitas menguji sejauh mana pembangunan benar-benar menjunjung prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Dalam konteks Nusa Tenggara Barat (NTB), persoalan kesehatan dan disabilitas bukan sekadar tantangan teknis pelayanan publik, melainkan cerminan dari kualitas pembangunan manusia secara menyeluruh.

Dalam kerangka global, Indonesia telah berkomitmen pada kerangka kerja *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai agenda pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030.

Sehingga su kesehatan dan disabilitas NTB beririsan langsung dengan beberapa tujuan utama SDGs, khususnya pada SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), juga SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan), serta SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Inklusif). Dengan demikian, capaian dan tantangan kesehatan di NTB tidak hanya menentukan kualitas hidup masyarakat daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian komitmen nasional dan global.

Salah satu tantangan paling mendasar adalah tingginya prevalensi stunting. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di NTB mencapai sekitar 32,7 persen, menempatkan NTB di antara provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia. Meskipun pada tahun berikutnya terdapat tren penurunan, angka ini masih berada jauh di atas target nasional dan target SDGs. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan biologis dasar belum berjalan optimal. Dalam perspektif Target 3.2 SDGs, stunting bukan hanya persoalan gizi, melainkan indikator kegagalan sistem kesehatan, sanitasi, pendidikan ibu, dan perlindungan sosial yang saling terkait.

Selain stunting, ketimpangan akses layanan kesehatan antarwilayah masih menjadi persoalan serius di NTB. Struktur geografis provinsi yang terdiri dari wilayah Lombok, Pulau Sumbawa, serta daerah pegunungan dan kepulauan kecil menciptakan tantangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan. Rumah sakit dan layanan rujukan lanjutan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara masyarakat di daerah terpencil harus menghadapi jarak tempuh yang jauh, keterbatasan transportasi, dan biaya tambahan untuk memperoleh layanan kesehatan bermutu. Ketimpangan ini berdampak langsung pada

disparitas Angka Harapan Hidup (AHH) antar kabupaten/kota, yang menjadi salah satu indikator utama kesehatan nasional.

Pada saat yang sama, NTB juga menghadapi peningkatan beban penyakit tidak menular (PTM), seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Fenomena ini sejalan dengan transisi epidemiologis nasional, di mana perubahan pola hidup, urbanisasi, dan kurangnya aktivitas fisik meningkatkan risiko PTM. Kondisi ini berkaitan erat dengan Target 3.4 SDGs, yaitu menurunkan sepertiga kematian prematur akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengobatan. Tantangan ini menuntut perubahan paradigma pembangunan kesehatan dari pendekatan kuratif menuju promotif dan preventif, dengan menekankan edukasi kesehatan, deteksi dini, dan perubahan perilaku hidup masyarakat.

Persoalan kesehatan di NTB menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan isu disabilitas. Penyandang disabilitas sering kali menghadapi hambatan ganda: keterbatasan kondisi kesehatan dan keterbatasan akses terhadap layanan publik. Banyak fasilitas kesehatan, pendidikan, dan ruang publik di NTB yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, baik dari sisi akses fisik, sistem informasi, maupun sikap pelayanan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *no one left behind* yang menjadi ruh SDGs, serta dengan indikator nasional yang menekankan inklusivitas layanan kesehatan.

Dalam kerangka SDG 10 tentang pengurangan ketimpangan, pembangunan kesehatan tidak dapat dianggap berhasil jika masih ada kelompok masyarakat yang tertinggal secara sistemik. Penyandang disabilitas bukan sekadar objek belas kasihan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki

hak untuk hidup sehat, berpendidikan, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, layanan kesehatan yang inklusif dan ramah disabilitas harus menjadi bagian integral dari pembangunan manusia NTB.

Lebih jauh, keterbatasan sistem rujukan dan layanan gawat darurat juga menjadi tantangan nyata. Kapasitas rumah sakit rujukan yang terbatas, distribusi tenaga spesialis yang belum merata, serta keterbatasan fasilitas gawat darurat di daerah tertentu berpotensi memperburuk hasil kesehatan, terutama pada kasus-kasus kritis yang memerlukan penanganan cepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan sistem rujukan merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

Dalam perspektif pembangunan bermartabat, seluruh persoalan ini tidak boleh dilihat sebagai sekadar angka statistik atau indikator teknis. Kesehatan adalah hak dasar manusia, dan kegagalan negara serta masyarakat dalam memenuhinya merupakan kegagalan moral sekaligus struktural. Pembangunan kesehatan yang sejati adalah pembangunan yang memastikan setiap manusia (tanpa kecuali) memiliki kesempatan yang adil untuk hidup sehat, berdaya, dan bermakna.

Dengan demikian, pembangunan kesehatan dan inklusi disabilitas di NTB harus dipahami sebagai agenda strategis lintas sektor, yang mencakup perbaikan gizi dan pangan, sanitasi dan air bersih, pendidikan kesehatan, lingkungan hidup, perumahan layak, serta sistem perlindungan sosial. Upaya ini tidak hanya bertujuan memenuhi target SDGs dan indikator nasional, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan manusia di NTB benar-benar berpijak pada nilai martabat, keadilan, dan keberlanjutan.

Melalui pendekatan ini, kesehatan dan disabilitas tidak lagi diposisikan sebagai beban pembangunan, melainkan sebagai ukuran kemajuan peradaban. Sejauh mana NTB mampu melindungi yang paling rentan dan menjamin hak hidup sehat bagi seluruh warganya, sejauh itulah pembangunan manusia yang bermartabat benar-benar terwujud.

4.3.1. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan kesehatan masyarakat merupakan agenda inti pembangunan sumber daya manusia. Kesehatan publik tidak hanya menentukan kualitas hidup individu, tetapi juga produktivitas ekonomi, ketahanan sosial, dan keberlanjutan pembangunan daerah. Dalam kerangka pembangunan yang bermartabat, peningkatan kesehatan masyarakat harus dipahami sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran rutin sektor kesehatan.

Pendekatan peningkatan kesehatan masyarakat menuntut pergeseran paradigma dari model yang reaktif dan kuratif menuju pendekatan promotif dan preventif. Pengalaman menunjukkan bahwa sistem kesehatan yang hanya berfokus pada pengobatan penyakit akan selalu tertinggal dari laju masalah kesehatan itu sendiri. Sebaliknya, pembangunan kesehatan yang kuat adalah pembangunan yang mencegah manusia jatuh sakit, menjaga kualitas hidup sejak dini, dan memperkuat ketahanan biologis masyarakat.

Dalam kerangka global, pendekatan ini sejalan dengan prinsip *World Health Organization, yang menekankan primary health care* dan *health promotion* sebagai fondasi sistem kesehatan yang adil dan efektif. Di tingkat nasional, arah ini juga sejalan dengan

transformasi sistem kesehatan Indonesia yang menempatkan layanan primer sebagai garda terdepan.

1. Fokus pada Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak

   Peningkatan kesehatan masyarakat di NTB harus dimulai dari fase paling awal kehidupan, yaitu kesehatan ibu, bayi, dan anak. Tingginya angka stunting dan risiko kematian bayi menunjukkan bahwa intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan masih menjadi pekerjaan rumah utama. Upaya peningkatan kesehatan masyarakat harus memperkuat:

   a) Layanan kesehatan ibu hamil dan persalinan yang aman,

   b) Pemenuhan gizi ibu dan anak,

   c) Penguatan peran posyandu sebagai pusat layanan kesehatan komunitas,

   d) Edukasi keluarga tentang gizi, sanitasi, dan pola asuh sehat.

2. Penguatan Layanan Kesehatan Primer dan Berbasis Komunitas

   Puskesmas, pustu, dan layanan kesehatan desa harus diposisikan sebagai tulang punggung sistem kesehatan NTB. Di wilayah dengan tantangan geografis seperti NTB, layanan kesehatan primer yang kuat jauh lebih efektif dibanding ketergantungan pada rumah sakit rujukan yang terpusat. Penguatan ini mencakup:

   a) Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan,

b) Ketersediaan obat dan alat kesehatan dasar,

c) Pemanfaatan teknologi kesehatan digital untuk layanan jarak jauh (*telemedicine*),

d) Integrasi data kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Pencegahan Penyakit Tidak Menular melalui Perubahan Perilaku

Meningkatnya beban penyakit tidak menular di NTB menuntut pendekatan kesehatan masyarakat yang lebih proaktif. Pencegahan PTM tidak dapat dicapai hanya melalui layanan medis, tetapi melalui perubahan perilaku dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, peningkatan kesehatan masyarakat harus mencakup:

a) Kampanye hidup aktif dan sehat,

b) Pengendalian konsumsi rokok dan makanan tidak sehat,

c) Penguatan ruang publik yang mendukung aktivitas fisik,

d) Integrasi pendidikan kesehatan di sekolah dan komunitas.

4. Lingkungan Sehat sebagai Determinan Kesehatan

Kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas lingkungan hidup. Sanitasi buruk, air bersih yang terbatas, dan pengelolaan limbah yang tidak memadai akan terus memperbesar beban penyakit, terutama pada

kelompok rentan. Oleh karena itu, peningkatan kesehatan masyarakat di NTB harus berjalan seiring dengan:

a) Penyediaan air bersih dan sanitasi layak,

b) Pengelolaan lingkungan berbasis komunitas,

c) Penataan permukiman yang sehat dan aman.

5. Keadilan Akses dan Prinsip Inklusivitas

Peningkatan kesehatan masyarakat harus menjangkau seluruh warga tanpa kecuali, termasuk masyarakat miskin, wilayah terpencil, dan penyandang disabilitas. Prinsip no one left behind harus diwujudkan dalam kebijakan konkret, bukan sekadar slogan. Ini berarti:

a) Memastikan layanan kesehatan ramah disabilitas,

b) Menghilangkan hambatan biaya dan geografis,

c) Melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan.

Dengan demikian, meningkatkan kesehatan masyarakat di NTB berarti membangun sistem kesehatan yang preventif, inklusif, dan berkelanjutan, yang berakar pada layanan primer, pemberdayaan komunitas, dan keadilan sosial. Kesehatan masyarakat tidak boleh dipahami sebagai beban fiskal, melainkan sebagai modal utama pembangunan manusia dan peradaban. Artinya pendekatan ini, kesehatan menjadi pintu masuk bagi pembangunan manusia yang utuh

4.3.2. Meningkatkan Asupan Gizi

Asupan gizi merupakan fondasi paling awal dan paling menentukan dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

Kualitas gizi tidak hanya memengaruhi kondisi fisik seseorang pada satu fase kehidupan, tetapi membentuk lintasan hidup manusia secara keseluruhan, mulai dari kemampuan belajar, ketahanan terhadap penyakit, hingga produktivitas dan kualitas hidup di usia dewasa. Oleh karena itu, persoalan gizi tidak dapat dipandang sebagai isu sektoral semata, melainkan sebagai persoalan strategis pembangunan manusia dan peradaban.

Di Nusa Tenggara Barat, tantangan gizi masih menjadi masalah serius yang tercermin dari tingginya prevalensi stunting dan gizi kurang pada balita. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di NTB tercatat sekitar 32,7 persen, menempatkan provinsi ini di antara daerah dengan angka stunting tertinggi di Indonesia. Meskipun pada tahun-tahun berikutnya mulai terlihat tren penurunan, angka tersebut masih berada jauh di atas rata-rata nasional dan target pembangunan kesehatan jangka menengah. Tingginya prevalensi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak di NTB masih mengalami kekurangan gizi kronis sejak periode awal kehidupannya.

Stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak yang lebih pendek dari standar usianya. Ia merupakan indikator akumulatif dari berbagai kekurangan yang terjadi sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun, periode yang dikenal sebagai 1.000 hari pertama kehidupan. Kekurangan gizi pada fase ini berdampak langsung pada perkembangan otak, sistem imun, dan kapasitas kognitif anak. Anak yang mengalami stunting berisiko lebih besar mengalami kesulitan belajar, produktivitas rendah saat dewasa, serta kerentanan terhadap penyakit tidak menular. Dengan demikian, tingginya prevalensi stunting di

NTB merupakan peringatan serius tentang masa depan kualitas sumber daya manusia daerah.

Selain stunting, NTB juga menghadapi persoalan gizi kurang (*underweight*) dan kasus gizi buruk di sejumlah wilayah. Prevalensi balita dengan berat badan di bawah standar menunjukkan bahwa masalah gizi di NTB tidak hanya bersifat kronis, tetapi juga akut pada kelompok tertentu. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, ketahanan pangan rumah tangga yang belum kuat, serta masih rendahnya pengetahuan sebagian keluarga mengenai pola asuh dan pemberian makan yang tepat bagi bayi dan anak.

Tingginya prevalensi masalah gizi tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural yang saling terkait. Kerentanan ekonomi rumah tangga, keterbatasan akses pangan bergizi yang beragam, sanitasi dan air bersih yang belum merata, serta layanan kesehatan ibu dan anak yang belum optimal di wilayah tertentu menjadi determinan utama. Dengan kata lain, prevalensi gizi buruk dan stunting di NTB adalah cermin ketimpangan sosial dan pembangunan, bukan semata kegagalan individu atau keluarga.

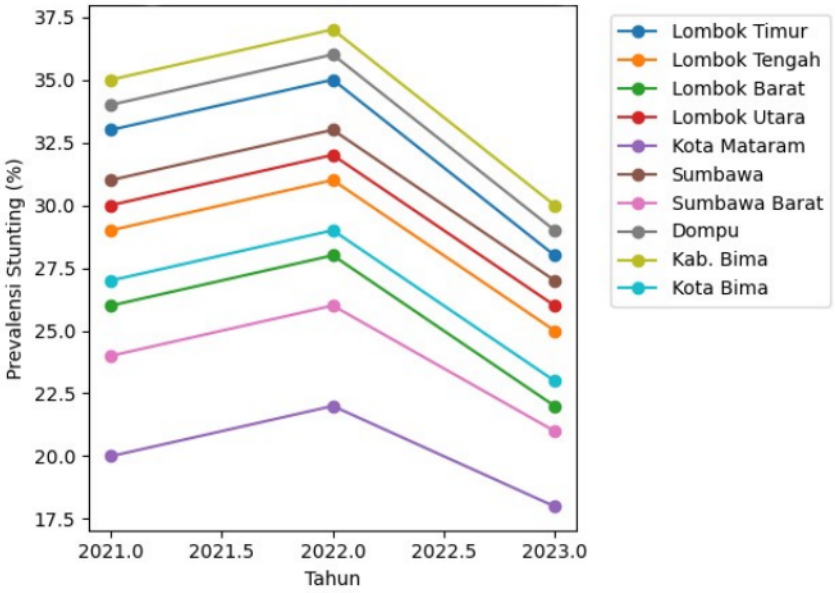
Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kondisi ini memiliki implikasi jangka panjang yang sangat serius. Kegagalan memperbaiki status gizi anak hari ini akan menciptakan ketertinggalan struktural di masa depan. Hal ini dapat berupa rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya daya saing tenaga kerja, serta meningkatnya beban kesehatan dan sosial. Lingkaran ini berpotensi diwariskan lintas generasi, sehingga menghambat upaya NTB untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal.

Oleh karena itu, meningkatkan asupan gizi harus diposisikan sebagai intervensi prioritas dan strategis dalam pembangunan kesehatan masyarakat NTB. Upaya ini tidak cukup dilakukan melalui pemberian makanan tambahan atau intervensi sesaat, tetapi memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Peningkatan gizi harus dimulai sejak masa kehamilan, dilanjutkan dengan perlindungan gizi pada bayi dan anak, serta didukung oleh ketahanan pangan keluarga, edukasi gizi, dan lingkungan hidup yang sehat.

Dengan menurunkan prevalensi stunting dan gizi kurang secara signifikan, NTB tidak hanya menyelamatkan generasi hari ini, tetapi juga sedang membangun fondasi biologis bagi masa depan daerah. Perbaikan status gizi adalah investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak langsung terlihat dalam satu atau dua tahun, tetapi menentukan kualitas manusia NTB dalam satu hingga dua dekade ke depan. Inilah makna strategis peningkatan asupan gizi dalam pembangunan manusia yang bermartabat: menjaga kehidupan sejak awal agar setiap anak memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh, belajar, dan berkontribusi bagi daerah dan bangsa..

Namun demikian, peningkatan asupan gizi di Nusa Tenggara Barat tidak dapat dilakukan melalui pendekatan yang seragam. Setiap kabupaten/kota, bahkan hingga tingkat kecamatan dan desa, tentunya memiliki karakter geografis, sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda-beda. Variasi kondisi ini memengaruhi pola konsumsi pangan, akses terhadap sumber gizi, layanan kesehatan, serta kerentanan gizi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan gizi yang efektif harus dirancang secara spesifik wilayah (*place-based policy*), bukan berbasis pendekatan umum yang mengabaikan konteks lokal.

Gambar 4.1 Tren Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat Tahun 2021–2023



Catatan: Grafik disusun secara ilustratif berbasis tren data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan RI dan publikasi Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Angka digunakan untuk analisis kebijakan dan menunjukkan variasi antarwilayah

Sebagai contoh, desa-desa pegunungan di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, memiliki akses geografis yang relatif sulit, terutama pada musim tertentu. Meskipun wilayah ini dikenal sebagai sentra pertanian hortikultura, konsumsi protein hewani pada rumah tangga miskin masih relatif rendah akibat keterbatasan daya beli dan akses pasar. Dalam konteks ini, kebijakan gizi yang efektif bukan sekadar distribusi makanan tambahan, melainkan integrasi program gizi dengan penguatan pangan lokal, seperti pengembangan ternak

kecil (ayam, telur), kebun gizi keluarga, dan edukasi pemanfaatan hasil pertanian setempat untuk MP-ASI bergizi.

Berbeda dengan itu, desa-desa pesisir di Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, menghadapi paradoks gizi yang lain. Ketersediaan ikan relatif melimpah, namun kasus stunting tetap ditemukan karena rendahnya variasi konsumsi pangan, sanitasi yang buruk, serta praktik pemberian makan anak yang kurang tepat. Di wilayah seperti ini, pendekatan gizi harus difokuskan pada edukasi pola konsumsi, pengolahan ikan untuk balita, serta intervensi sanitasi dan air bersih, bukan pada peningkatan suplai pangan semata.

Contoh lain dapat dilihat di kecamatan-kecamatan terpencil di Kabupaten Dompu dan Bima bagian selatan, di mana akses layanan kesehatan dan pasar pangan masih terbatas. Pada wilayah ini, posyandu sering menjadi satu-satunya titik layanan gizi bagi ibu dan anak. Kebijakan gizi yang relevan harus memperkuat posyandu sebagai pusat intervensi gizi terpadu, dilengkapi dengan kader gizi terlatih, pencatatan digital status gizi, serta dukungan pangan bergizi yang konsisten. Pendekatan ini jauh lebih efektif dibandingkan program bantuan berskala besar yang tidak berkelanjutan.

Sementara itu, di wilayah perkotaan seperti kelurahan-kelurahan padat penduduk di Kota Mataram, tantangan gizi justru bersifat ganda. Di satu sisi masih ditemukan balita gizi kurang pada keluarga miskin perkotaan, namun di sisi lain muncul peningkatan kasus obesitas anak akibat konsumsi makanan ultra-proses dan gaya hidup sedentari. Oleh karena itu, kebijakan gizi di wilayah perkotaan harus diarahkan pada pengendalian kualitas pangan, regulasi jajanan anak, edukasi gizi

keluarga, serta penciptaan lingkungan yang mendorong pola hidup aktif dan sehat.

Pendekatan berbasis wilayah ini menunjukkan bahwa keadilan dalam kebijakan gizi bukan berarti setiap desa menerima program yang sama, melainkan setiap desa menerima intervensi yang paling sesuai dengan masalahnya. Inilah makna keadilan substantif dalam pembangunan bermartabat. Desa dengan stunting tinggi dan akses terbatas memerlukan intervensi lebih intensif, sementara desa dengan ketersediaan pangan memadai membutuhkan perbaikan perilaku dan lingkungan.

Artinya pendekatan spesifik wilayah ini menegaskan bahwa keadilan dalam pembangunan tidak selalu berarti perlakuan yang sama, melainkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kerentanan masing-masing wilayah. Daerah dengan prevalensi stunting tinggi, akses pangan terbatas, atau hambatan geografis memerlukan intervensi yang lebih intensif dan berbeda dibandingkan wilayah dengan kondisi yang relatif lebih baik. Dengan demikian, kebijakan gizi yang bermartabat adalah kebijakan yang mampu membaca realitas lokal secara cermat dan meresponsnya secara proporsional.

Dialin pihak, pendekatan *place-based policy* inipun juga sejalan dengan semangat *Sustainable Development* Goals (SDGs), khususnya prinsip *no one left behind*, yang menekankan bahwa pembangunan harus menjangkau kelompok dan wilayah yang paling tertinggal. SDGs tidak menuntut keseragaman administratif, melainkan mendorong keadilan substantif, yakni keadilan yang diwujudkan melalui diferensiasi kebijakan sesuai konteks. Dalam kerangka ini, peningkatan asupan gizi di NTB bukan sekadar program teknis kesehatan, tetapi bagian dari

strategi pembangunan manusia yang berorientasi pada martabat, keberlanjutan, dan keadilan antarwilayah.

Dengan menempatkan kebijakan gizi sebagai kebijakan berbasis wilayah, NTB memiliki peluang lebih besar untuk mencapai penurunan stunting dan perbaikan status gizi secara signifikan dan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta lebih adil dalam menjamin hak hidup sehat bagi seluruh warga, tanpa terkecuali.

4.3.3. NTB Pro Disabiltas

Pembangunan manusia yang bermartabat diuji paling nyata pada cara sebuah daerah memperlakukan penyandang disabilitas. Selama ini, kerap diposisikan sebagai objek "belas kasihan", mereka diberi bantuan, tetapi tidak sungguh-sungguh diberi jalan keluar dari keterbatasan yang membelenggu kehidupan mereka. Program-program sosial yang berjalan sering kali berhenti pada bantuan sesaat, bersifat karitatif, dan tidak menyentuh akar persoalan disabilitas. Akibatnya, keterbatasan tetap melekat, ketergantungan berulang, dan eksklusi sosial berlangsung lintas generasi.

Akibatnya, banyak penyandang disabilitas tetap berada dalam kondisi keterbatasan yang sama dari waktu ke waktu. "Dibantu", tetapi tidak diberdayakan. "Diperhatikan", tetapi tidak dimerdekakan. Inilah problem mendasar dalam pendekatan disabilitas yang masih berorientasi pada rasa kasihan (*charity-based approach*), namun, bukan pada pemenuhan hak dan pengembangan kapasitas (*capability-based approach*).

Paradigma inilah yang perlu diubah secara mendasar. **NTB Pro Disabilitas berangkat dari kesadaran bahwa persoalan utama disabilitas bukan terletak pada kondisi individu semata, melainkan pada sistem sosial, teknologi, dan kebijakan yang gagal menyediakan sarana pemulihan fungsi, adaptasi, dan partisipasi penuh**. Dengan kata lain, disabilitas sering kali merupakan hasil dari keterbatasan sistem, bukan keterbatasan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini menunjukkan bahwa banyak keterbatasan fisik, sensorik, bahkan kognitif tidak lagi bersifat final. Inovasi teknologi asistif modern, rehabilitasi berbasis fungsi, hingga riset antarmuka saraf telah membuka kemungkinan baru bagi manusia untuk melampaui batas-batas biologisnya. Dalam konteks ini, kebijakan disabilitas tidak boleh berhenti pada logika "memberi bantuan", melainkan harus bergerak ke arah menyelesaikan keterbatasan secara nyata dan berkelanjutan.

Artinya dalam perspektif ini, pokok persoalan disabilitas bukan semata kondisi tubuh seseorang, melainkan ketiadaan akses terhadap teknologi, layanan, dan lingkungan yang memungkinkan fungsi hidup optimal. Dengan kata lain, disabilitas sering kali bukan disebabkan oleh keterbatasan individu, tetapi oleh keterbatasan sistem. Ketika sistem tidak menyediakan akses teknologi, pendidikan, dan pekerjaan yang adaptif, maka keterbatasan menjadi permanen dan diwariskan sebagai ketidakadilan struktural. Sehingga dengan menggeser fokus dari "sumbangan kasihan" menuju "penyelesaian keterbatasan", NTB tidak hanya membangun sistem yang lebih inklusif, tetapi juga menegaskan satu prinsip fundamental pembangunan bermartabat: setiap manusia berhak atas kesempatan yang adil untuk hidup mandiri, berdaya, dan

bermakna. Inilah esensi NTB Pro Disabilitas, bukan sekadar program sosial, melainkan lompatan peradaban dalam cara memandang dan memperlakukan manusia.

Dilain pihak, di bidang pendidikan, NTB Pro Disabilitas menempatkan penyandang disabilitas sebagai sebuah subjek pembelajaran yang memiliki potensi unik. Pendidikan inklusif tidak cukup dimaknai sebagai penerimaan administratif di sekolah umum, tetapi harus diwujudkan sebagai sistem yang mampu mengembangkan kapabilitas aktual setiap individu. Ini menuntut asesmen fungsional yang tepat, dukungan teknologi pembelajaran adaptif, serta guru yang terlatih untuk melihat potensi, bukan sekadar keterbatasan. Pendidikan menjadi ruang pembebasan, bukan sekadar ruang kehadiran.

Dalam bidang kesehatan, pendekatan disabilitas harus bergeser dari bantuan pasif menuju pemulihan dan optimalisasi fungsi. Layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas tidak boleh berhenti pada pemberian alat bantu standar, tetapi harus mencakup rehabilitasi berkelanjutan, terapi berbasis kebutuhan individu, serta akses terhadap teknologi asistif yang relevan. Kesehatan, dalam konteks ini, bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi soal kualitas hidup dan kemandirian.

Sementara itu, di bidang ketenagakerjaan, NTB Pro Disabilitas menolak pendekatan simbolik berbasis kuota semata. Penyandang disabilitas bukanlah beban ekonomi, melainkan sumber daya manusia yang selama ini terhambat oleh desain kerja yang tidak inklusif. Dengan dukungan teknologi, desain kerja yang adaptif, dan pelatihan berbasis kompetensi nyata, penyandang disabilitas dapat berkontribusi secara produktif. Dunia kerja harus bertransformasi dari ruang eksklusif menjadi

ruang kolaboratif yang menghargai keberagaman kemampuan manusia.

Dengan seluruh pendekatan ini menempatkan penyandang disabilitas sebagai bagian utuh dari pembangunan daerah. Mereka bukan penerima pasif kebijakan, melainkan mitra aktif dalam merancang solusi atas keterbatasan yang mereka alami. Prinsip partisipasi ini sejalan dengan semangat United Nations, yang menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus menjamin tidak ada seorang pun yang tertinggal (*no one left behind*), serta dengan prinsip hak asasi manusia yang menjunjung kesetaraan, martabat, dan keadilan. Lebih jauh, NTB Pro Disabilitas juga harus dibaca dalam kerangka keadilan antar generasi. Pendekatan lama yang karitatif berisiko mewariskan ketergantungan dan kemiskinan struktural kepada generasi berikutnya. Sebaliknya, pendekatan dengan berbasis kapabilitas, teknologi, dan kemandirian memutus rantai ketidakadilan tersebut. Artinya anak dengan disabilitas hari ini tidak boleh mewarisi keterbatasan sistem yang sama di masa depan.

Dengan demikian, **NTB Pro Disabilitas bukanlah program sosial tambahan, melainkan agenda peradaban**. Ia menandai pergeseran cara berpikir: dari kasihan menuju keadilan, dari bantuan menuju pemberdayaan, dari keterbatasan menuju kemungkinan. Dalam pembangunan yang bermartabat, ukuran kemajuan tidak terletak pada seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi pada seberapa adil kesempatan hidup dibuka bagi semua manusia, tanpa ada yang harus di pinggiran.

4.3.4. Asuransi dan Layanan Kesehatan

Dalam pembangunan sumber daya manusia yang bermartabat, jaminan atas kesehatan dan perlindungan sosial

merupakan prasyarat fundamental. Kesehatan bukan hanya urusan medis, melainkan fondasi bagi produktivitas, kemandirian, dan rasa aman manusia dalam menjalani kehidupan. Ketika risiko sakit, kecelakaan kerja, atau kehilangan penghasilan tidak ditanggung secara sistemik, maka manusia hidup dalam ketidakpastian yang melemahkan daya hidup dan daya juang. Oleh karena itu, sistem asuransi sosial menjadi instrumen keadilan sosial yang memungkinkan setiap warga negara menjalani kehidupan secara layak tanpa dibebani rasa takut akan risiko yang tidak mampu ia tanggung sendiri.

Di Indonesia, mandat konstitusional mengenai jaminan sosial ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial dan negara bertanggung jawab mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Mandat ini kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang menegaskan bahwa jaminan sosial diselenggarakan berdasarkan prinsip kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kerangka inilah hadir BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pilar utama perlindungan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Keduanya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang mengamanatkan penyelenggaraan jaminan sosial secara nasional, wajib, dan nirlaba.

BPJS Kesehatan memainkan peran strategis dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi

seluruh warga, termasuk kelompok miskin, rentan, dan penyandang disabilitas. Melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masyarakat memperoleh perlindungan dari risiko biaya kesehatan yang tinggi, mulai dari layanan promotif dan preventif hingga kuratif dan rehabilitatif. Dalam konteks NTB, keberadaan BPJS Kesehatan menjadi sangat penting mengingat masih adanya keterbatasan daya beli masyarakat, ketimpangan akses layanan kesehatan antarwilayah, serta beban penyakit kronis yang terus meningkat. Jaminan kesehatan, dengan demikian, bukan sekadar fasilitas administratif, melainkan alat pemelihara martabat manusia, karena memastikan bahwa hak atas kesehatan tidak ditentukan oleh kemampuan ekonomi semata.

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap risiko sosial-ekonomi yang melekat pada dunia kerja, melalui program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Perlindungan ini memiliki arti strategis dalam pembangunan sumber daya manusia daerah, karena memberikan rasa aman bagi pekerja untuk bekerja secara produktif tanpa ketakutan akan risiko yang dapat menjatuhkan mereka dan keluarganya ke dalam kemiskinan. Dalam konteks NTB, di mana sektor informal masih dominan dan perlindungan tenaga kerja belum merata, perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi agenda keadilan sosial yang mendesak.

Lebih jauh, asuransi sosial tidak boleh dipahami hanya sebagai mekanisme kompensasi risiko, tetapi sebagai instrumen pencegahan kemiskinan struktural. Tanpa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, satu peristiwa sakit atau kecelakaan dapat menghapus seluruh aset keluarga dan memutus keberlanjutan

pendidikan anak. Dalam perspektif pembangunan bermartabat, kondisi ini merupakan bentuk ketidakadilan yang harus dicegah oleh negara melalui sistem perlindungan sosial yang kuat dan inklusif.

Namun demikian, tantangan implementasi di daerah masih nyata. Masih terdapat warga yang belum terdaftar, pekerja informal yang belum terlindungi, serta pemanfaatan layanan yang belum optimal akibat keterbatasan informasi dan kualitas layanan. Oleh karena itu, kebijakan daerah perlu mengarahkan asuransi sosial tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian integral dari strategi pembangunan manusia. Integrasi data kependudukan, ketenagakerjaan, dan kesehatan menjadi kunci untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal dari sistem perlindungan sosial.

Dengan demikian, penguatan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di NTB harus diposisikan sebagai investasi jangka panjang dalam martabat manusia. Ketika masyarakat terlindungi dari risiko kesehatan dan kerja, mereka memiliki ruang untuk berkembang, belajar, dan berkontribusi secara optimal. Inilah makna substantif dari asuransi dan layanan kesehatan dalam pembangunan manusia: bukan sekadar skema pembiayaan, tetapi jaminan atas hak hidup yang layak, adil, dan bermartabat.

4.4. Meningkatkan Mutu Pendidikan

Pendidikan merupakan jantung pembangunan sumber daya manusia. Ia bukan sekadar proses transfer pengetahuan dari guru kepada murid, melainkan proses pembentukan manusia seutuhnya, yakni manusia yang mampu berpikir kritis, memiliki karakter yang kokoh, berdaya saing dalam kehidupan

nyata, dan bermartabat sebagai insan. Pendidikan membentuk cara manusia memahami dirinya, memaknai dunia di sekitarnya, serta mengambil peran dalam kehidupan sosial. Dalam kerangka pembangunan daerah, mutu pendidikan menjadi faktor penentu apakah bonus demografi akan bertransformasi menjadi energi kemajuan atau justru berubah menjadi beban sosial akibat rendahnya kualitas manusia.

Pandangan ini sejalan tidak hanya dengan pemikiran filsafat klasik dan modern, tetapi juga memiliki akar yang sangat kuat dalam ajaran Al-Qur'an. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dimulai dengan perintah *iqra'* (QS. Al-'Alaq: 1–5). Perintah ini menegaskan bahwa pendidikan, literasi, dan pencarian ilmu merupakan fondasi awal peradaban Islam. Al-Qur'an tidak membuka risalahnya dengan perintah ritual formal, melainkan dengan ajakan untuk membaca, memahami, dan menyingkap makna, sebuah isyarat bahwa peradaban yang bermartabat dibangun di atas kesadaran intelektual dan pencarian pengetahuan.

Lebih jauh, Al-Qur'an secara konsisten meninggikan derajat orang-orang berilmu. Dalam QS. Al-Mujādilah (11) ditegaskan bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu bukan sekadar alat pragmatis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, melainkan sumber kemuliaan dan martabat manusia. Pendidikan, dalam perspektif ini, adalah jalan untuk memuliakan manusia, mengangkat derajatnya secara moral, intelektual, dan sosial.

Selain itu, Al-Qur'an berulang kali mendorong penggunaan akal (*'aql*), refleksi (*tafakkur*), dan perenungan mendalam

(*tadabbur*). Pertanyaan-pertanyaan retoris seperti "apakah kamu tidak berpikir?" (QS. Al-Baqarah: 44) atau "apakah kamu tidak menggunakan akal?" menegaskan bahwa pendidikan sejati bukanlah hafalan mekanis atau pengulangan tanpa makna. Pendidikan sejati adalah proses pencerahan akal dan pembentukan kesadaran moral, yang mendorong manusia untuk memahami sebab-akibat, menimbang nilai, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Dengan demikian, pendidikan menurut Al-Qur'an bersifat integratif: ia menyatukan pengetahuan, akhlak, dan tanggung jawab sosial dalam satu kesatuan yang utuh.

Bertolak dari pemahaman ini, menjadi jelas bahwa meningkatkan mutu pendidikan tidak dapat dimaknai hanya sebagai peningkatan angka partisipasi sekolah atau tingkat kelulusan semata. Angka-angka statistik penting, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya. Mutu pendidikan harus dilihat dari apa yang benar-benar dipelajari, dipahami, dan mampu dilakukan oleh peserta didik; sejauh mana pendidikan membentuk kemampuan berpikir, kepekaan moral, kemandirian, dan kesiapan menghadapi kehidupan nyata.

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang relevan dengan kehidupan, mampu mengembangkan potensi lokal, dan memberi makna pada konteks sosial-budaya tempat peserta didik hidup. Ia mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan, tanpa mencabut mereka dari akar nilai, budaya, dan identitasnya. Dengan cara inilah pendidikan berfungsi sebagai jembatan antara tradisi dan masa depan, antara nilai dan inovasi, serta antara kemajuan dan martabat manusia.

Sehingga dalam kerangka pembangunan yang bermartabat, pendidikan pada akhirnya bukan hanya instrumen kebijakan, melainkan proses peradaban. Ia menentukan arah perjalanan suatu daerah: apakah tumbuh sebagai masyarakat yang sekadar maju secara material, atau berkembang sebagai masyarakat yang cerdas, beradab, dan berkeadilan.

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka pendidikan dalam kerangka pembangunan yang bermartabat harus diterjemahkan ke dalam program-program yang konkret, terukur, dan berdampak langsung pada kualitas manusia. Tanpa desain kebijakan yang nyata, pendidikan berisiko berhenti sebagai wacana normatif yang indah tetapi tidak mengubah realitas sosial.

Pertama, pembangunan pendidikan bermartabat harus dimulai dari penguatan mutu pembelajaran di ruang kelas. Program prioritas bukan sekadar pembangunan gedung sekolah, tetapi peningkatan kualitas proses belajar. Hal ini mencakup pelatihan guru secara berkelanjutan untuk mengembangkan pedagogi yang mendorong berpikir kritis, bukan hafalan; pembelajaran kontekstual yang mengaitkan materi dengan realitas kehidupan lokal; serta evaluasi pembelajaran yang menilai pemahaman dan nalar, bukan sekadar kemampuan mengingat. Guru dalam kerangka ini diposisikan sebagai pendidik peradaban, bukan sekadar penyampai kurikulum.

Kedua, pendidikan bermartabat menuntut penguatan literasi dasar dan literasi baru secara bersamaan. Literasi baca-tulis dan numerasi tetap menjadi fondasi yang tidak bisa ditawar, terutama di wilayah dengan capaian pendidikan dasar yang masih tertinggal. Namun pada saat yang sama, generasi muda

harus dibekali literasi digital, literasi sains, dan literasi etika. Program konkret yang diperlukan adalah penyediaan bahan ajar bermutu, perpustakaan hidup di sekolah dan desa, serta pemanfaatan teknologi pendidikan yang mendukung pembelajaran aktif dan inklusif. Literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan teknis, tetapi sebagai kemampuan memahami dunia secara kritis dan bertanggung jawab.

Ketiga, pendidikan bermartabat harus menghadirkan pendidikan karakter dan nilai secara nyata, bukan simbolik. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kerja sama, adab, dan kepedulian sosial tidak cukup diajarkan melalui slogan atau mata pelajaran tersendiri, tetapi harus diintegrasikan dalam praktik keseharian sekolah. Program konkret dapat berupa pembelajaran berbasis proyek sosial, pengabdian siswa di komunitas, serta penguatan budaya sekolah yang meneladankan etika dan penghormatan terhadap sesama. Dalam konteks daerah seperti NTB, nilai-nilai lokal Sasak, Samawa, dan Mbojo menjadi sumber pembelajaran karakter yang hidup dan relevan.

Keempat, peningkatan mutu pendidikan harus dihubungkan secara langsung dengan kebutuhan nyata pembangunan daerah. Pendidikan menengah dan kejuruan perlu diarahkan untuk mengembangkan kompetensi yang selaras dengan potensi lokal, seperti pertanian modern, pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, dan teknologi terapan. Program konkret yang dibutuhkan antara lain kemitraan sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri, kurikulum berbasis keterampilan nyata, serta inkubasi wirausaha muda berbasis pengetahuan dan budaya lokal. Dengan cara ini, pendidikan tidak menciptakan pengangguran terdidik, tetapi manusia yang siap berkarya dan mandiri.

Kelima, pendidikan bermartabat harus bersifat inklusif dan adil, memastikan tidak ada anak yang tertinggal karena kondisi ekonomi, geografis, atau disabilitas. Program konkret mencakup beasiswa berbasis kebutuhan dan potensi, dukungan teknologi pembelajaran bagi daerah terpencil, serta penguatan pendidikan inklusif yang benar-benar memampukan peserta didik dengan kebutuhan khusus. Keadilan pendidikan dalam kerangka ini bukan berarti perlakuan yang sama, tetapi perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak.

Keenam, pendidikan sebagai proses peradaban menuntut sinergi lintas sektor dan lintas generasi. Sekolah tidak dapat bekerja sendiri. Keluarga, komunitas, tokoh agama, dan pemerintah daerah harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan. Program konkret dapat berupa sekolah berbasis komunitas, keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran, serta ruang-ruang belajar di luar sekolah yang menghidupkan budaya literasi dan dialog. Dengan demikian, pendidikan tidak berhenti di ruang kelas, tetapi menjadi gerakan sosial yang membentuk kesadaran kolektif.

Dengan demikian pendidikan benar-benar menjadi proses peradaban, bukan sekadar kebijakan sektoral. Ia membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral, tangguh secara sosial, dan siap menghadapi masa depan tanpa kehilangan jati diri. Inilah pendidikan yang memungkinkan suatu daerah tidak sekadar tumbuh secara material, tetapi berkembang sebagai masyarakat yang cerdas, beradab, dan berkeadilan.

4.5. Toleransi dan Pembangunan Spiritual

Pembangunan sumber daya manusia yang bermartabat tidak akan pernah utuh tanpa pembangunan spiritual dan penguatan toleransi. Kesehatan fisik, kecerdasan intelektual, dan keterampilan teknis hanya akan menghasilkan kemajuan semu apabila tidak disertai kedalaman batin, keluhuran akhlak, dan kemampuan hidup bersama secara damai. Dalam kerangka ini, toleransi dan spiritualitas bukanlah isu tambahan, melainkan fondasi etis yang menopang seluruh proses pembangunan manusia.

Spiritualitas dalam pembangunan manusia tidak identik dengan ritual keagamaan semata, melainkan berkaitan dengan kesadaran makna, orientasi nilai, dan tanggung jawab moral. Manusia yang memiliki kedalaman spiritual adalah manusia yang mampu menempatkan dirinya secara proporsional: menyadari keterbatasannya, menghormati sesamanya, serta memaknai kehidupan bukan hanya sebagai arena kompetisi, tetapi ruang pengabdian dan kebersamaan. Pembangunan spiritual, dengan demikian, merupakan proses pembentukan batin agar kemajuan material tidak melahirkan keserakahan, kekerasan, atau dehumanisasi.

Dalam konteks masyarakat majemuk seperti Nusa Tenggara Barat, pembangunan spiritual memiliki hubungan yang sangat erat dengan toleransi. NTB dihuni oleh beragam komunitas dengan latar belakang agama, etnis, dan budaya yang berbeda. Keragaman ini merupakan kekayaan sosial yang besar, namun juga berpotensi menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola dengan kesadaran nilai dan sikap saling menghormati. Toleransi bukan berarti meniadakan perbedaan, melainkan

kemampuan untuk hidup berdampingan secara bermartabat di tengah perbedaan.

Toleransi yang bermakna tidak lahir dari sikap permisif yang dangkal, tetapi dari kedalaman spiritual yang mengakui martabat setiap manusia. Dalam banyak tradisi keagamaan, nilai ini ditegaskan secara kuat. Islam, misalnya, menegaskan prinsip *ta'āruf* (saling mengenal) dan *lā ikrāha fī al-dīn* (tidak ada paksaan dalam beragama), yang menunjukkan bahwa perbedaan adalah bagian dari kehendak Ilahi dan harus dikelola dengan hikmah. Spiritualitas yang matang melahirkan sikap rendah hati, empati, dan kemampuan menahan diri. Dan semua ini adalah prasyarat toleransi yang sejati.

Dalam pembangunan daerah, toleransi dan spiritualitas memiliki implikasi yang sangat praktis. Masyarakat yang toleran cenderung lebih stabil secara sosial, lebih terbuka terhadap kerja sama, dan lebih mampu mengelola konflik secara damai. Stabilitas sosial ini merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi, pendidikan, dan inovasi. Sebaliknya, pembangunan yang mengabaikan dimensi spiritual dan toleransi berisiko melahirkan fragmentasi sosial, polarisasi identitas, dan konflik laten yang menggerogoti kepercayaan publik.

Oleh karena itu, pembangunan spiritual dan toleransi harus dihadirkan secara sadar dan sistematis dalam kebijakan pembangunan manusia. Sementara, di bidang pendidikan, nilai toleransi dan spiritualitas perlu diintegrasikan dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai materi kognitif, tetapi sebagai pengalaman hidup melalui dialog, kerja sama lintas latar belakang, dan keteladanan. Sekolah dan lembaga pendidikan

harus menjadi ruang aman bagi perjumpaan, bukan arena segregasi.

Di tingkat komunitas, pembangunan spiritual dapat diperkuat melalui peran tokoh agama, tokoh adat, dan institusi sosial sebagai penjaga nilai dan penenun harmoni sosial. Tradisi lokal Sasak, Samawa, dan Mbojo memiliki kekayaan nilai yang menekankan adab, keseimbangan, dan penghormatan terhadap sesama. Nilai-nilai ini merupakan modal sosial yang sangat penting untuk membangun toleransi yang berakar pada budaya, bukan sekadar slogan kebijakan.

Lebih jauh, toleransi dan pembangunan spiritual juga berkaitan langsung dengan keadilan sosial. Masyarakat yang memiliki kesadaran spiritual yang kuat akan lebih peka terhadap penderitaan sesama, lebih menolak ketimpangan yang tidak adil, dan lebih terdorong untuk membangun solidaritas. Dengan demikian, spiritualitas bukanlah pelarian dari realitas sosial, tetapi justru sumber energi moral untuk memperbaiki realitas tersebut.

Maka bahwa pembangunan manusia yang sejati adalah pembangunan yang memuliakan kehidupan, bukan hanya melalui peningkatan kecerdasan ataupun keterampilan semata, tetapi melalui kebijaksanaan, empati, dan kesanggupan hidup bersama secara damai.Artinya, **masa depan NTB tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia membangun, tetapi oleh bagaimana ia menjaga harmoni, merawat nilai, dan memelihara martabat manusia di tengah perubahan. Inilah fondasi terdalam dari pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berkeadilan.**

BAB V MEMBANGUN DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM BISNIS DAERAH

5.1. Ekosistem Bisnis Berbasis Martabat dan Budaya Lokal

Ekosistem bisnis daerah bukan sekadar kumpulan pelaku usaha, melainkan jaringan relasi yang dinamis dan saling terhubung, yang meliputi produsen, konsumen, pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas adat, koperasi, hingga pasar. Maka sudah barang tentu ekosistem ini harus bertumbuh dari nilai-nilai lokal yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Budaya Sasak, Samawa, dan Mbojo mewariskan etika kolektif, semangat kerja sama, serta tanggung jawab sosial yang kuat. Gotong royong bukan hanya tradisi sosial, tetapi menjadi landasan etika ekonomi: keuntungan tidak boleh menggerus relasi kemanusiaan, dan pertumbuhan tidak boleh melahirkan ketimpangan yang mencederai rasa keadilan.

Berangkat dari landasan tersebut, pengembangan ekosistem bisnis daerah harus diarahkan pada penciptaan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Pertumbuhan tidak boleh berdiri sendiri sebagai angka statistik, tetapi harus tercermin dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat: pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang merata, serta kesempatan usaha yang terbuka luas.

Dalam konteks ini, kelembagaan ekonomi rakyat seperti koperasi dan BUMDes perlu diperkuat sebagai simpul distribusi nilai tambah. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi sebagai wahana pembelajaran kolektif, penguatan solidaritas, dan pemerataan akses modal. Melalui tata kelola yang transparan dan profesional, koperasi dapat menjadi instrumen nyata ekonomi Pancasila yang menempatkan manusia sebagai subjek, bukan objek pembangunan.

Selanjutnya, integrasi antara sektor tradisional dan modern menjadi keharusan. Petani, nelayan, dan pelaku UMKM perlu terhubung dengan teknologi digital, sistem logistik yang efisien, serta pasar yang lebih luas. Transformasi ini bukan untuk menghilangkan identitas lokal, melainkan untuk memperkuat daya saing tanpa tercerabut dari akar budaya.

Pada akhirnya, ekosistem bisnis daerah yang bermartabat merupakan ekosistem (jaringan relasi) yang menumbuhkan kepercayaan. Kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen, antara pemerintah dan masyarakat, serta antaranggota komunitas. Di atas fondasi kepercayaan inilah ekonomi daerah dapat berkembang secara berkelanjutan, yang tidak rapuh oleh krisis, tidak timpang oleh konsentrasi modal, dan tidak kehilangan arah oleh arus globalisasi.

Kepercayaan yang tumbuh dalam ekosistem bisnis akan melahirkan stabilitas dan keberanian untuk berinovasi. Ketika pelaku usaha merasa dilindungi oleh kepastian hukum, didukung oleh kebijakan yang konsisten, dan dihargai oleh masyarakatnya sendiri, maka energi kewirausahaan akan berkembang secara alami. Inovasi tidak lagi dipandang sebagai

risiko yang menakutkan, melainkan sebagai jalan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas manfaat bersama.

Pada tahap berikutnya, penting untuk membangun sistem insentif yang selaras dengan nilai martabat. Usaha yang ramah lingkungan, memberdayakan tenaga kerja lokal, dan bermitra dengan koperasi atau komunitas adat perlu memperoleh prioritas dalam akses pembiayaan, perizinan, maupun promosi pasar. Dengan demikian, arah pertumbuhan ekonomi menjadi jelas: bukan sekadar besar, tetapi berkualitas dan inklusif.

Ekosistem bisnis daerah juga harus mampu beradaptasi terhadap perubahan global, seperti: digitalisasi, ekonomi hijau, dan transformasi industri. Namun adaptasi ini harus dilakukan secara selektif dan kontekstual. Teknologi digunakan untuk memperkuat produktivitas petani, nelayan, dan UMKM; ini bukan menggantikan peran manusia, tetapi meningkatkan kapasitasnya. Digitalisasi pemasaran, sistem pembayaran elektronik, serta platform distribusi daring menjadi alat untuk memperluas jangkauan pasar produk NTB tanpa memutus hubungan sosial yang menjadi ciri khas masyarakatnya.

Lebih jauh, pembinaan kewirausahaan perlu dimulai sejak dini melalui pendidikan karakter dan literasi ekonomi. Generasi muda NTB harus memahami bahwa menjadi wirausaha bukan sekadar mencari keuntungan, melainkan menciptakan nilai dan solusi bagi masyarakat. Dengan semangat ini, kewirausahaan menjadi bagian dari gerakan kebudayaan dalam membangun ekonomi yang produktif sekaligus menjaga identitas.

Artinya pembangunan dan pengembangan ekosistem bisnis daerah bukanlah proyek jangka pendek, melainkan proses berkelanjutan. Serta menuntut konsistensi kebijakan, partisipasi

masyarakat, kepemimpinan yang visioner dan berintegritas. Jika fondasi nilai tetap terjaga dan kolaborasi terus diperkuat, maka ekonomi NTB akan tumbuh tidak hanya dalam angka, tetapi dalam kualitas kehidupan dan harga diri masyarakatnya.

5.2. Infrastruktur, Inovasi, dan Hilirisasi Nilai Tambah

Penguatan ekosistem bisnis daerah menuntut sinergi yang utuh antara infrastruktur yang memadai, inovasi yang berkelanjutan, serta strategi hilirisasi yang sistematis dan terencana. Ketiganya bukan elemen yang berdiri sendiri, melainkan satu rangkaian yang saling menopang dalam membentuk struktur ekonomi yang kokoh dan berdaya saing.

Tanpa infrastruktur yang baik, seperti jalan produksi, pelabuhan, irigasi, listrik, hingga jaringan digital, menjadikan biaya logistik menjadi tinggi, distribusi terhambat, dan efisiensi produksi menurun. Akibatnya, pelaku usaha lokal sulit bersaing bahkan di pasar regionalnya sendiri. Infrastruktur yang kuat bukan hanya memperlancar arus barang dan jasa, tetapi juga menurunkan ketimpangan antarwilayah serta membuka akses ekonomi bagi desa-desa yang selama ini terpinggirkan.

Namun infrastruktur saja tidak cukup. Tanpa inovasi, produktivitas stagnan dan produk lokal sulit bersaing dalam kualitas maupun harga. Inovasi di sini tidak selalu berarti teknologi canggih, tetapi pembaruan cara kerja, manajemen, pengemasan, pemasaran, hingga model bisnis yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Inovasi adalah energi pembaruan yang memastikan ekonomi daerah tidak terjebak pada pola lama yang kurang efisien.

Namun lebih dari itu, tanpa hilirisasi yang terarah, nilai tambah komoditas daerah akan terus mengalir keluar. Daerah

hanya menjadi pemasok bahan mentah, sementara keuntungan terbesar dinikmati oleh pihak yang mengolah dan memasarkan produk akhir. Hilirisasi memperpanjang rantai produksi di dalam daerah, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat struktur industri lokal.

Karena itu, infrastruktur, inovasi, dan hilirisasi harus dirancang sebagai satu kesatuan strategi pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Infrastruktur membuka akses dan efisiensi; inovasi meningkatkan kualitas dan daya saing; hilirisasi memastikan nilai tambah tinggal dan berputar di daerah. Ketiganya membentuk siklus ekonomi yang produktif sekaligus inklusif, dimana pertumbuhan tidak hanya terukur dari besarnya angka, tetapi dari luasnya manfaat yang dirasakan masyarakat.

5.2.1. Infrastruktur untuk Pengungkit Produktivitas

Infrastruktur merupakan pengungkit utama produktivitas daerah. Karena hal ini berfungsi sebagai sistem pendukung yang memungkinkan kegiatan ekonomi berjalan lebih cepat, lebih efisien, dan lebih terintegrasi. Namun, dalam pembangunan infrastruktur tidak boleh dipahami semata sebagai proyek fisik, tetapi sebagai investasi strategis untuk memperkuat kapasitas produksi rakyat dan memperkecil ketimpangan wilayah.

Sebagai daerah kepulauan dengan karakter geografis yang beragam, NTB membutuhkan konektivitas darat, laut, dan udara yang saling terhubung. Infrastruktur transportasi menjadi fondasi distribusi hasil pertanian, perikanan, peternakan, serta produk UMKM ke pusat pasar regional maupun nasional.

Peran Bandara Internasional Lombok sebagai gerbang konektivitas udara, Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Badas

sebagai simpul distribusi laut, harus dioptimalkan melalui sistem logistik terpadu. Namun infrastruktur besar tersebut harus terhubung dengan jalan produksi desa dan sentra ekonomi rakyat agar manfaatnya tidak berhenti di pusat pertumbuhan saja.

Selain konektivitas, infrastruktur produktif seperti irigasi, embung desa, gudang penyimpanan, dan fasilitas cold storage menjadi faktor kunci peningkatan hasil dan pengurangan kehilangan pasca-panen. Tanpa fasilitas penyimpanan yang memadai, petani dan nelayan terpaksa menjual hasilnya segera dengan harga rendah. Infrastruktur penyimpanan memberi ruang tawar yang lebih kuat bagi produsen lokal.

Di era digital, infrastruktur juga mencakup jaringan internet yang merata hingga ke desa. Akses digital memungkinkan UMKM memasarkan produknya secara daring, mengakses informasi harga, serta memperoleh layanan keuangan berbasis teknologi. Digitalisasi memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan transparansi pasar.

Artinya, infrastruktur dalam hal ini haruslah dibangun dengan prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Terhubung (*connectivity*). Mengintegrasikan desa, kota, dan pelabuhan dalam satu sistem distribusi.
2. Inklusif .Memberi manfaat langsung bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah.
3. Berorientasi nilai tambah. Mendukung hilirisasi dan pengolahan lokal.

4. Berkelanjutan. Memperhatikan aspek lingkungan dan efisiensi energi.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, pembangunan infrastruktur tidak lagi dipahami sebagai proyek sektoral yang terpisah-pisah, melainkan sebagai arsitektur ekonomi yang dirancang secara terpadu. Konektivitas memastikan bahwa hasil produksi dari desa dapat bergerak cepat menuju pusat distribusi dan pelabuhan; inklusivitas menjamin bahwa petani, nelayan, dan pelaku UMKM menjadi penerima manfaat utama; orientasi nilai tambah mengarahkan infrastruktur untuk mendukung proses pengolahan lokal; sementara keberlanjutan menjaga agar pembangunan hari ini tidak mengorbankan generasi mendatang.

Lebih jauh, pendekatan ini menuntut perencanaan berbasis kawasan. Sentra produksi pertanian perlu dilengkapi dengan irigasi modern, gudang, dan akses jalan produksi. Sentra perikanan memerlukan dermaga yang layak, fasilitas pendingin, serta sistem distribusi berantai dingin (*cold chain*). Kawasan industri kecil dan menengah membutuhkan pasokan energi stabil serta akses digital yang kuat. Dengan desain berbasis kawasan, infrastruktur menjadi relevan terhadap kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar simbol pembangunan.

Infrastruktur juga harus memperkuat kemandirian daerah. Pemanfaatan energi terbarukan skala lokal, seperti tenaga surya atau mikrohidro yang dapat mendukung operasional UMKM dan fasilitas penyimpanan tanpa membebani biaya tinggi. Sistem pengelolaan air yang efisien menjaga ketahanan pangan sekaligus keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, produktivitas meningkat tanpa merusak keseimbangan alam.

Pada akhirnya, infrastruktur yang dirancang dengan visi jangka panjang akan menciptakan efek berganda (*multiplier effect*), dimana biaya produksi menurun, pendapatan meningkat, lapangan kerja bertambah, dan daya saing daerah menguat. Infrastruktur bukan sekadar sarana fisik, melainkan fondasi struktural bagi pertumbuhan ekonomi yang adil, produktif, dan berakar pada kepentingan masyarakat NTB secara menyeluruh.

5.2.2. Inovasi Teknologi dan Inkubasi Bisnis Daerah

Apabila infrastruktur menjadi fondasi produktivitas, maka inovasi adalah daya dorong yang menggerakkan transformasi ekonomi. Inovasi memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki daerah tidak hanya dikelola, tetapi juga dapat dioptimalkan, agar lebih efisien, berkualitas, dan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Inovasi dipahami sebagai proses pembaruan yang berakar pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar adopsi teknologi modern tanpa konteks lokal. Artinya Arah inovasi harus bertumpu pada sektor unggulan yang ada di NTB: pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Teknologi pertanian hemat air, sistem pasca-panen yang lebih efektif, pengolahan hasil laut berbasis standar mutu, hingga pengemasan modern adalah bentuk inovasi terapan yang langsung meningkatkan daya saing produk lokal.

Di samping teknologi produksi, inovasi manajerial dan model bisnis juga sangat menentukan. Perbaikan tata kelola usaha, digitalisasi pemasaran, penguatan merek lokal, serta penerapan standar mutu dan sertifikasi dapat meningkatkan posisi tawar UMKM di pasar regional maupun nasional. Dalam banyak kasus, pembaruan cara kerja dan strategi pemasaran justru lebih cepat menghasilkan dampak ekonomi dibanding investasi teknologi mahal.

Untuk mempercepat lahirnya inovasi, diperlukan sistem inkubasi bisnis yang terstruktur. Inkubator bisnis daerah berfungsi sebagai ruang pembelajaran, pendampingan, dan eksperimen bagi wirausahawan pemula maupun pelaku usaha yang ingin berkembang. Di dalamnya tersedia pelatihan manajemen, literasi keuangan, akses mentor, hingga jejaring pembiayaan dan pasar. Inkubasi tidak hanya membantu usaha bertahan, tetapi mendorongnya tumbuh secara berkelanjutan.

Sinergi antara perguruan tinggi, sekolah vokasi, pelaku usaha, dan pemerintah daerah menjadi kunci. Riset terapan harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan riil di lapangan, sementara mahasiswa didorong menjadi inovator dan pencipta lapangan kerja. Dengan demikian, pendidikan dan dunia usaha tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling memperkuat dalam satu ekosistem produktif.

5.2.3. Strategi Hilirisasi dan Rantai Nilai Terintegrasi

Hilirisasi merupakan tahapan strategis untuk memastikan bahwa nilai tambah dari setiap komoditas unggulan tidak berhenti pada produksi bahan mentah. Selama ini, sebagian besar hasil pertanian, perikanan, dan peternakan dijual dalam bentuk primer dengan margin keuntungan yang relatif kecil. Dalam pola seperti ini, daerah hanya menjadi pemasok bahan baku, sementara keuntungan terbesar justru dinikmati oleh pihak yang melakukan pengolahan lanjutan, pengemasan, dan distribusi di luar wilayah. Kondisi tersebut menciptakan ketimpangan struktural dalam rantai ekonomi.

Karena itu, hilirisasi sesungguhnya adalah instrumen pemerataan. Ketika rantai nilai dibangun secara terintegrasi di dalam daerah, petani, nelayan, dan peternak tidak lagi berada

pada posisi paling lemah dalam struktur pasar. Mereka tidak sekadar menjadi penerima harga, melainkan bagian aktif dari sistem produksi yang menghasilkan nilai tambah lebih besar. Dengan demikian, hilirisasi memperkuat daya tawar produsen lokal sekaligus memperluas distribusi kesejahteraan.

Hilirisasi tidak semata-mata berarti membangun pabrik atau industri pengolahan. Lebih dari itu, hilirisasi adalah upaya membentuk rantai nilai (*value chain*) yang utuh di daerah. Setiap tahapan, mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, hingga pemasaran, harus saling terhubung dalam satu sistem ekonomi yang efisien, transparan, dan berkeadilan. Ketika rantai ini terintegrasi, kebocoran nilai tambah dapat ditekan dan perputaran ekonomi lokal menjadi lebih kuat.

Langkah pertama dalam strategi hilirisasi adalah pemetaan komoditas unggulan berbasis potensi wilayah. Sentra jagung, bawang merah, padi, perikanan tangkap, budidaya laut, peternakan, hingga tenun dan kerajinan perlu dianalisis secara komprehensif. Analisis tersebut mencakup identifikasi pelaku di setiap mata rantai, struktur biaya dan margin, jalur distribusi, serta titik-titik di mana nilai tambah terbesar tercipta. Dari sini dapat diketahui di mana intervensi kebijakan paling efektif untuk memperkuat posisi produsen lokal dan mengurangi kebocoran ekonomi.

Langkah kedua adalah penguatan industri pengolahan skala lokal dan menengah. Industri ini dapat dikembangkan melalui koperasi produksi, kemitraan antar-UMKM, atau investasi daerah yang berpihak pada masyarakat. Fokusnya tidak hanya pada kapasitas produksi, tetapi juga pada kualitas:

pengolahan pasca-panen yang baik, standarisasi mutu, sertifikasi keamanan pangan, serta pengemasan modern yang sesuai dengan selera pasar. Dengan kualitas yang terjaga, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi.

Langkah ketiga adalah integrasi pembiayaan dan pemasaran. Hilirisasi memerlukan dukungan modal kerja yang memadai, akses terhadap lembaga keuangan, serta jaringan distribusi yang efisien. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator kemitraan antara koperasi, pelaku usaha, investor lokal, dan perbankan. Di sisi lain, strategi branding daerah perlu dirancang secara sistematis agar produk NTB memiliki identitas yang kuat dan dikenali sebagai produk berkualitas. Identitas ini bukan sekadar label, melainkan representasi mutu, budaya, dan kepercayaan.

Lebih jauh, hilirisasi harus terhubung dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Produk pangan olahan, kerajinan, dan kuliner khas dapat menjadi bagian dari ekosistem wisata. Wisatawan tidak hanya menikmati lanskap dan budaya, tetapi juga berinteraksi dengan produk lokal yang bernilai tambah. Dengan integrasi ini, sektor pariwisata menjadi pintu masuk bagi perluasan pasar produk daerah.

Hilirisasi adalah strategi untuk membangun kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat struktur sosial. Nilai tambah yang dihasilkan tidak mengalir keluar, tetapi berputar di dalam daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkokoh fondasi ekonomi rakyat secara berkelanjutan.

5.3. Kolaborasi Multipihak dan Transformasi Kewirausahaan

Penguatan ekosistem bisnis daerah tidak dapat bertumpu pada satu aktor semata. Transformasi ekonomi memerlukan kolaborasi multipihak yang terstruktur, konsisten, dan berbasis visi bersama. Artinya kolaborasi bukan sekadar koordinasi administratif, melainkan kerja bersama yang dilandasi etika gotong royong, saling percaya, dan tanggung jawab kolektif terhadap masa depan daerah.

Secara teoritis, pendekatan kolaborasi multipihak dalam pembangunan ekonomi daerah selaras dengan konsep *Triple Helix* yang diperkenalkan oleh Henry Etzkowitz dan Loet Leydesdorff (1995). Model ini menekankan bahwa inovasi dan pertumbuhan ekonomi modern tidak lagi bertumpu semata pada akumulasi modal fisik atau eksploitasi sumber daya alam, melainkan pada kemampuan menciptakan, mentransformasikan, dan mendiseminasikan pengetahuan. Dalam kerangka *Triple Helix*, terdapat tiga aktor utama yang berinteraksi secara dinamis, yaitu pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

Pemerintah berperan sebagai pembentuk kebijakan, penyedia regulasi, dan fasilitator ekosistem inovasi. Perguruan tinggi berfungsi sebagai pusat produksi pengetahuan dan riset, sekaligus inkubator gagasan baru. Dunia usaha bertindak sebagai penggerak komersialisasi inovasi dan penghubung antara pengetahuan dengan kebutuhan pasar. Sinergi ketiga unsur ini menciptakan sistem inovasi yang adaptif, di mana batas-batas peran menjadi lebih cair: perguruan tinggi dapat melahirkan perusahaan rintisan, pemerintah dapat mendorong inkubasi dan kemitraan industri, sementara dunia usaha berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan.

Dalam konteks pembangunan daerah, khususnya di wilayah yang memiliki karakter sosial dan budaya kuat seperti NTB, model *Triple Helix* memerlukan perluasan. Pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh institusi formal, tetapi juga oleh norma sosial, nilai budaya, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, berkembang konsep *Quadruple Helix*, yang menambahkan masyarakat dan komunitas sebagai aktor keempat dalam sistem inovasi (Carayannis & Campbell, 2010). Unsur masyarakat mencakup komunitas lokal, koperasi, kelompok tani dan nelayan, pelaku UMKM, serta organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengetahuan kontekstual (*local knowledge*) dan pengalaman praksis. Partisipasi mereka memastikan bahwa inovasi tidak bersifat elitis, melainkan responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.

Lebih lanjut, dalam era ekonomi digital dan keterbukaan informasi, konsep tersebut berkembang menjadi *Penta Helix*, dengan memasukkan media sebagai aktor kelima (Carayannis & Campbell, 2012). Media berfungsi memperkuat ekosistem informasi, membangun citra dan reputasi daerah, serta memperluas jangkauan promosi produk dan inovasi lokal. Dalam sistem ekonomi yang semakin terhubung, arus informasi memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi pasar dan kepercayaan publik.

5.3.1. Pemerintah sebagai Orkestrator Ekosistem

Dalam kerangka kolaborasi multipihak, pemerintah daerah tidak lagi diposisikan semata sebagai regulator yang mengatur dan mengawasi, melainkan sebagai orkestrator ekosistem, yakni pihak yang menyelaraskan berbagai aktor agar bergerak dalam arah yang sama. Istilah orkestrator menegaskan peran koordinatif dan strategis: pemerintah tidak memainkan semua

instrumen, tetapi memastikan setiap instrumen berbunyi harmonis dalam satu komposisi pembangunan ekonomi yang utuh.

Secara konseptual, peran ini sejalan dengan gagasan *Entrepreneurial Government* yang menekankan bahwa pemerintah harus inovatif, responsif, dan berorientasi hasil. Pemerintah tidak cukup hanya membuat peraturan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya usaha produktif, inovasi, dan investasi yang berkualitas. Dalam konteks daerah, peran orkestrasi mencakup beberapa dimensi utama.

Pertama, dimensi regulatif. Pemerintah bertanggung jawab menciptakan kepastian hukum, kemudahan perizinan, serta regulasi yang sederhana dan transparan. Kepastian regulasi menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta integrasi perizinan menjadi instrumen penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.

Kedua, dimensi fasilitatif. Dimana pemerintah menjadi penghubung antara pelaku usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan pasar. Fasilitasi ini dapat berupa penyediaan pusat inkubasi bisnis, pelatihan kewirausahaan, bantuan standarisasi dan sertifikasi produk, hingga promosi dagang. Dalam peran ini, pemerintah tidak menggantikan pelaku usaha, tetapi memperkuat kapasitas mereka agar mampu berkembang secara mandiri.

Ketiga, dimensi katalitik. Sebagai katalisator, pemerintah mendorong lahirnya kolaborasi strategis antar-sektor. Misalnya, menghubungkan sentra produksi pertanian dengan industri pengolahan, atau mengintegrasikan produk UMKM dengan

sektor pariwisata. Intervensi kebijakan diarahkan untuk mempercepat proses yang mungkin berjalan lambat jika hanya mengandalkan mekanisme pasar.

Keempat, dimensi protektif dan afirmatif. Dalam struktur ekonomi yang tidak selalu seimbang, pelaku usaha kecil sering berada pada posisi rentan. Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan afirmatif, seperti akses pembiayaan inklusif, penguatan koperasi, dan perlindungan dari praktik monopoli.

Sehingga fungsi orkestrasi ini harus dijalankan dengan landasan etika gotong royong dan keberpihakan pada ekonomi yang pro rakyat. Artinya pemerintah bukan hanya sekadar administrator kebijakan, tetapi pemimpin moral pembangunan yang menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak mengabaikan nilai keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, pemerintah sebagai orkestrator ekosistem berperan menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pemerataan, antara inovasi dan perlindungan, serta antara pertumbuhan dan keberlanjutan. Ketika peran ini dijalankan secara konsisten dan visioner, kolaborasi multipihak dapat terwujud secara efektif, dan transformasi kewirausahaan daerah dapat bergerak dalam arah yang terstruktur dan berjangka panjang

5.3.2. Perguruan Tinggi sebagai Sumber Inovasi

Perguruan tinggi memegang posisi strategis dalam ekosistem pembangunan ekonomi daerah sebagai pusat produksi pengetahuan, riset, dan inovasi. Dalam ekonomi modern yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*), keunggulan kompetitif suatu daerah tidak lagi ditentukan semata oleh kelimpahan sumber daya alam, melainkan oleh

kemampuan mengelola ilmu pengetahuan menjadi solusi produktif. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus bertransformasi dari sekadar institusi pendidikan menjadi motor inovasi yang terhubung langsung dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Dalam perspektif *Human Capital Theory*, investasi pada pendidikan akan meningkatkan produktivitas individu dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diiringi dengan relevansi. Artinya, kurikulum, riset, dan pengabdian masyarakat harus diarahkan untuk menjawab tantangan riil yang dihadapi sektor unggulan daerah, baik pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Maka setidaknya perguruan tinggi perlu memperkuat tiga fungsi utamanya secara terintegrasi:

Pertama, fungsi riset terapan. Penelitian tidak berhenti pada publikasi akademik, tetapi diarahkan pada solusi praktis: teknologi pasca-panen yang efisien, sistem budidaya yang ramah lingkungan, inovasi pengolahan pangan, desain kemasan yang kompetitif, hingga model bisnis berbasis digital. Riset terapan menjembatani ilmu pengetahuan dengan kebutuhan pasar, sehingga hasilnya dapat langsung diadopsi oleh pelaku usaha.

Kedua, fungsi inkubasi dan kewirausahaan. Kampus perlu menyediakan pusat inkubasi bisnis yang mendampingi mahasiswa dan masyarakat dalam mengembangkan usaha rintisan (*start-up*). Inkubator ini memberikan pelatihan manajemen, literasi keuangan, validasi model bisnis, serta akses jejaring pembiayaan. Dengan pendekatan ini, perguruan tinggi

menjadi ruang lahirnya wirausahawan muda yang inovatif dan berorientasi solusi.

Ketiga, fungsi pengabdian berbasis kolaborasi. Pengabdian masyarakat tidak sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari sistem pendampingan berkelanjutan bagi UMKM, koperasi, dan komunitas produksi. Dosen dan mahasiswa dapat berperan sebagai konsultan teknis, pendamping manajemen, maupun fasilitator transformasi digital bagi pelaku usaha lokal.

Lebih jauh, perguruan tinggi perlu membangun kemitraan strategis dengan pemerintah daerah dan dunia usaha. Kolaborasi ini dapat berbentuk riset bersama, program magang industri, hingga pengembangan klaster inovasi berbasis wilayah. Dengan demikian, terjadi aliran pengetahuan dua arah, yakni: dimana dunia usaha menyampaikan kebutuhan dan tantangan nyata, sementara perguruan tinggi menyediakan solusi berbasis ilmu pengetahuan.

Namun yang perlu digaris bawahi peran perguruan tinggi juga mencakup penguatan nilai dan karakter. Inovasi yang dihasilkan tidak boleh terlepas dari etika sosial dan keberlanjutan lingkungan. Pendidikan kewirausahaan harus menanamkan semangat tanggung jawab sosial, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas. Dengan landasan nilai ini, inovasi tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan budaya daerah. Dengan demikian, perguruan tinggi sebagai sumber inovasi bukan sekadar institusi akademik, melainkan simpul strategis dalam transformasi ekonomi daerah. Ketika riset relevan, inkubasi berjalan efektif, dan kolaborasi multipihak terbangun kuat,

perguruan tinggi akan menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi NTB yang adaptif, kreatif, dan bermartabat.

5.3.3. Dunia Usaha sebagai Penggerak Utama

Apabila pemerintah berperan sebagai orkestrator dan perguruan tinggi sebagai sumber inovasi, maka dunia usaha adalah penggerak utama yang mengubah gagasan menjadi aktivitas ekonomi nyata. Di tangan pelaku usaha, seperti: petani, nelayan, pengrajin, UMKM, koperasi, hingga perusahaan skala menengah, dimana proses produksi berlangsung, lapangan kerja tercipta, dan nilai tambah diwujudkan dalam bentuk barang serta jasa yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Dalam teori kewirausahaan Joseph Schumpeter (dalam McCraw, 2007), dimana pelaku usaha dipandang sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang menghadirkan pembaruan melalui kombinasi baru: produk baru, metode produksi baru, pasar baru, sumber bahan baku baru, atau bentuk organisasi baru. Transformasi ekonomi daerah sangat ditentukan oleh keberanian dunia usaha untuk melakukan inovasi semacam ini. Tanpa keberanian berinovasi, ekonomi akan berjalan stagnan dan sulit bersaing.

Di sisi lain, perspektif Ekonomi Kelembagaan (*Institutional Economics*) menegaskan bahwa kualitas institusi dan norma sosial sangat memengaruhi kinerja ekonomi. Dunia usaha yang tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung kepercayaan, transparansi, dan kepastian hukum akan lebih produktif dibanding yang beroperasi dalam ketidakpastian. Karena itu, pelaku usaha bukan hanya aktor ekonomi, tetapi juga bagian dari struktur kelembagaan yang membentuk budaya bisnis daerah.

Maka dalam konteks ini dunia usaha perlu menjalankan beberapa peran strategis, antara lain:

Pertama, sebagai pencipta nilai tambah lokal. Dunia usaha harus berorientasi pada penguatan rantai nilai di dalam daerah. Pengolahan hasil pertanian dan perikanan, pengembangan produk kreatif berbasis budaya, serta peningkatan kualitas kemasan dan pemasaran merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa keuntungan tidak keluar dari wilayah produksi.

Kedua, sebagai penyerap dan pengembang tenaga kerja lokal. Usaha yang bertumbuh akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat. Dengan pelatihan internal dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan, dunia usaha dapat menjadi ruang pembelajaran praktis bagi generasi muda.

Ketiga, sebagai mitra kolaboratif dalam ekosistem inovasi. Dunia usaha perlu aktif menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, koperasi, dan pemerintah daerah. Kolaborasi riset, pengembangan produk bersama, hingga pembentukan klaster industri akan meningkatkan efisiensi serta memperkuat posisi tawar di pasar.

Keempat, sebagai penjaga etika bisnis dan keberlanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan lingkungan dan keadilan sosial akan menciptakan kerentanan jangka panjang. Oleh karena itu, praktik usaha harus mengedepankan prinsip tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) dan keberlanjutan sumber daya.

Maka transformasi kewirausahaan harus bergerak dari pola usaha skala kecil yang bertahan hidup menuju pola usaha yang terorganisasi, berjejaring, dan berorientasi nilai tambah. Dunia usaha perlu membangun klaster atau jejaring produksi agar tercipta skala ekonomi yang lebih kuat. Koperasi modern dapat menjadi wadah agregasi produksi sekaligus penguatan posisi tawar. Artinya dunia usaha bukan sekadar entitas pencari keuntungan, tetapi mitra pembangunan. Keuntungan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Ketika dunia usaha mampu menjalankan peran ini secara konsisten, ia menjadi motor utama yang mendorong ekonomi daerah tumbuh secara produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

BAB VI PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL

Pertumbuhan ekonomi regional merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah karena mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan nilai tambah dari seluruh aktivitas produksinya. Namun dalam hal ini perlu dipahami bahwa pertumbuhan tidak dimaknai secara sempit sebagai kenaikan angka statistik semata (seperti peningkatan PDRB tahunan) melainkan sebagai proses transformasi yang lebih mendasar, yakni: peningkatan kapasitas produksi dalam masyarakat, pemerataan kesejahteraan, serta penguatan struktur ekonomi rakyat secara berkelanjutan.

Pertumbuhan yang hanya bertumpu pada ekspansi sektor tertentu tanpa memperhatikan distribusi manfaat berisiko menciptakan ketimpangan struktural. Oleh sebab itu, dalam perspektif ini, kualitas pertumbuhan menjadi lebih penting daripada sekadar kuantitasnya. Pertumbuhan yang bermartabat adalah pertumbuhan yang mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan riil masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat daya tahan ekonomi daerah terhadap krisis.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh kombinasi faktor produksi: modal (*capital*), tenaga kerja (*labor*), dan teknologi (*technology*), hal ini sebagaimana dijelaskan

dalam teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Robert Solow. Dalam Solow Growth Model, peningkatan *output* ekonomi ditentukan oleh akumulasi modal, pertumbuhan jumlah tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dimana model ini menegaskan bahwa tanpa inovasi dan juga peningkatan produktivitas, pertumbuhan jangka panjang akan mengalami kecenderungan melambat (*diminishing returns*).

Namun dalam praktik pembangunan daerah, dinamika pertumbuhan tidak sesederhana akumulasi faktor produksi. Pengalaman berbagai wilayah menunjukkan bahwa kualitas institusi, seperti kepastian hukum, efektivitas birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan tingkat kepercayaan sosial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi. Teori ekonomi kelembagaan menekankan bahwa institusi yang kuat mampu menurunkan biaya transaksi, meningkatkan kepastian investasi, dan mendorong efisiensi pasar.

Selain itu, struktur sektor unggulan dan kemampuan menciptakan nilai tambah di dalam wilayah menjadi faktor penentu. Daerah yang hanya bergantung pada sektor primer tanpa hilirisasi akan menghadapi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas. Sebaliknya, daerah/wilatah yang mampu memperpanjang rantai nilai, melalui pengolahan, inovasi produk, dan integrasi pasar akan memiliki struktur ekonomi yang lebih kokoh dan berdaya saing.

Dengan demikian, strategi pertumbuhan regional di NTB harus diarahkan pada penguatan struktur ekonomi yang produktif, inklusif, dan adaptif. Produktif berarti mampu meningkatkan *output* dan efisiensi secara berkelanjutan. Inklusif berarti melibatkan dan memberi manfaat kepada pelaku

ekonomi kecil dan menengah. Adaptif berarti mampu merespons perubahan global tanpa kehilangan identitas dan kearifan lokal.

Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pertumbuhan harus sejalan dengan pemerataan, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan nilai sosial dan budaya. Dengan pendekatan ini, ekonomi daerah tidak hanya berkembang dalam angka, tetapi juga dalam kualitas dan martabat masyarakatnya.

6.1. Strategi peningkatan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama untuk mengukur kapasitas produksi suatu daerah karena mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh aktivitas ekonomi dalam periode tertentu. Melalui PDRB, dapat dibaca seberapa besar kemampuan suatu wilayah dalam menggerakkan sumber daya, menciptakan output, serta membangun daya saing ekonominya.

Peningkatan PDRB tidak hanya dimaknai semata sebagai kenaikan angka output agregat. Namun, pertumbuhan ekonomi harus dipahami sebagai proses penguatan struktur ekonomi yang lebih produktif, bernilai tambah, dan berpihak pada ekonomi rakyat. Angka pertumbuhan menjadi bermakna apabila ia disertai peningkatan kualitas produksi, pemerataan manfaat, serta terbukanya kesempatan usaha dan kerja bagi masyarakat luas.

Secara konseptual, PDRB terbentuk dari akumulasi nilai tambah seluruh sektor ekonomi, seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, transportasi, pariwisata, dan berbagai jasa lainnya. Setiap sektor memberikan kontribusi

berbeda terhadap total output daerah, dan dinamika masing-masing sektor sangat menentukan arah pertumbuhan regional. Karena itu, membaca data PDRB tidak cukup hanya melihat besarnya angka total, tetapi juga memahami komposisi sektoral dan sumber pertumbuhannya.

Adapun data PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Triwulan III Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 6.1 PDRB Provinsi NTB pada Triwulan III 2025

Indikator	Nilai	Satuan	Keterangan
PDRB NTB (Harga Berlaku)	49,49	Triliun Rp	Total output barang & jasa periode Triwulan III 2025 (BPS Nusa Tenggara Barat)
PDRB NTB (Harga Konstan 2010)	28,92	Triliun Rp	Nilai riil output setelah penyesuaian inflasi (BPS Nusa Tenggara Barat)
Pertumbuhan q-to-q	3,91	%	Dibanding Triwulan II 2025 (BPS Nusa Tenggara Barat)
Pertumbuhan y-on-y	2,82	%	Dibanding Triwulan III 2024 (BPS Nusa Tenggara Barat)
Sektor dengan pertumbuhan tertinggi (Produksi)	Industri Pengolahan		Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi (BPS Nusa

Indikator	Nilai	Satuan	Keterangan
			Tenggara Barat)
Komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi	Ekspor Barang & Jasa		Pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran (BPS Nusa Tenggara Barat)

Catatan: Nilai di atas bersifat kuartalan dan menunjukkan perkembangan ekonomi NTB hingga Triwulan III tahun 2025.

Pada periode Triwulan III-2025, nilai PDRB NTB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp 49,49 triliun. Angka ini menunjukkan total nilai nominal barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah NTB selama periode tersebut. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan 2010 tercatat sebesar Rp 28,92 triliun, yang menggambarkan nilai produksi riil setelah menghilangkan pengaruh inflasi. Perbedaan antara kedua angka tersebut penting untuk membedakan pertumbuhan yang bersifat nominal dengan pertumbuhan yang benar-benar mencerminkan peningkatan volume produksi.

Dari sisi pertumbuhan, ekonomi NTB pada Triwulan III-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 3,91 persen dibandingkan Triwulan II-2025 (*quarter to quarter*). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, yang mencerminkan dinamika produksi dan konsumsi yang lebih kuat dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara tahunan (*year on year*), pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 2,82 persen dibandingkan Triwulan III-2024, yang mengindikasikan adanya perbaikan kinerja ekonomi dalam horizon satu tahun.

Dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan menjadi salah satu kontributor penting terhadap pertumbuhan, yang menandakan meningkatnya aktivitas hilirisasi dan nilai tambah. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekspor barang dan jasa turut memberikan dorongan terhadap kinerja ekonomi daerah, menunjukkan keterhubungan NTB dengan pasar luar wilayah.

Namun demikian, angka pertumbuhan tersebut perlu dibaca secara lebih mendalam agar tidak berhenti pada interpretasi kuantitatif semata. Pertumbuhan sebesar 3,91 persen (q-to-q) menunjukkan adanya percepatan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, yang bisa dipengaruhi oleh faktor musiman, peningkatan produksi sektor tertentu, atau dorongan ekspor. Sementara pertumbuhan tahunan sebesar 2,82 persen mencerminkan kecenderungan pemulihan dan stabilisasi ekonomi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Yang menjadi pertanyaan strategis bukan hanya "berapa besar" pertumbuhan terjadi, tetapi "dari mana" dan "untuk siapa" pertumbuhan tersebut berlangsung. Apabila pertumbuhan didominasi oleh sektor dengan keterkaitan terbatas terhadap ekonomi rakyat, maka dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa menjadi kurang optimal. Sebaliknya, apabila sektor-sektor yang padat karya dan berbasis ekonomi lokal, seperti pertanian, industri pengolahan berbasis komoditas daerah, UMKM mengalami peningkatan kontribusi, maka efek pemerataannya akan lebih luas.

Dalam data PDRB Triwulan III-2025 harus diarahkan pada analisis struktural, yaitu:

1. Seberapa besar kontribusi sektor bernilai tambah tinggi terhadap total PDRB.
2. Sejauh mana pertumbuhan tersebut menciptakan lapangan kerja baru.
3. Apakah terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja.
4. Bagaimana distribusi manfaat pertumbuhan terhadap kelompok masyarakat bawah.

Dengan pendekatan ini, PDRB tidak hanya menjadi indikator pertumbuhan ekonomi regional, tetapi juga menjadi alat evaluasi kualitas pembangunan. Data Triwulan III-2025 dapat dijadikan pijakan untuk memperkuat strategi hilirisasi, memperluas investasi produktif, serta meningkatkan produktivitas sektor unggulan agar pada triwulan-triwulan berikutnya pertumbuhan ekonomi NTB semakin kokoh secara struktural.

Dengan demikian, dinamika PDRB NTB pada Triwulan III-2025 menunjukkan arah yang positif, namun tetap membutuhkan konsistensi kebijakan, kolaborasi multipihak, dan penguatan ekonomi rakyat agar pertumbuhan tersebut benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan martabat masyarakat NTB secara menyeluruh.

6.2. Diversifikasi PAD daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin kuat kapasitas pemerintah daerah dalam merancang, membiayai, dan mengendalikan arah pembangunan secara mandiri. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak

sekadar dimaknai sebagai sumber penerimaan anggaran, tetapi sebagai refleksi produktivitas ekonomi daerah, efektivitas tata kelola fiskal, serta kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam sistem perpajakan yang adil dan transparan.

Berdasarkan laporan realisasi tahun anggaran 2025, capaian pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren yang relatif positif. Realisasi PAD NTB tercatat mendekati target yang telah ditetapkan dalam APBD, dengan pajak daerah menjadi kontributor utama. Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak rokok masih menjadi komponen dominan dalam struktur penerimaan provinsi. Selain itu, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turut menopang struktur pendapatan tersebut.

Tabel 6.2 PAD NTB Realisasi Tahun 2025

Komponen	Nilai	Keterangan
Realisasi PAD NTB 2025 (seluruh komponen)	± Rp 6,25 triliun	Total realisasi pendapatan daerah sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar Rp 6,25 triliun atau sekitar 96,31 % dari target yang ditetapkan. (INSIDELOMBOK)
Realisasi Pajak Daerah	Capai lebih dari target (103 %)	Pendapatan dari pajak daerah menunjukkan kinerja kuat dan menjadi pendorong utama pertumbuhan PAD. (YouTube)

Komponen	Nilai	Keterangan
Realisasi PAD daerah (angka lain laporan APBD 2025)	± Rp 2,87 triliun (pad murni)	Pada perubahan APBD 2025, PAD NTB tercatat meningkat dari Rp 2,51 triliun menjadi sekitar Rp 2,81 triliun, menunjukkan strategi fiskal yang adaptif. (PPID NTB)

Catatan: Angka-angka PAD di atas mencerminkan realisasi tahun anggaran 2025 berdasarkan berbagai laporan pemerintah daerah dan Bappenda. Sumber resmi seperti publikasi Statistik Keuangan Daerah NTB 2024 oleh BPS Provinsi NTB juga tersedia untuk data struktural lebih rinci, namun realisasi 2025 menjadi gambaran terkini capaian fiskal daerah.

Peningkatan realisasi PAD tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pemungutan dan manajemen fiskal daerah. Digitalisasi layanan pajak, integrasi sistem pembayaran non-tunai, optimalisasi basis data wajib pajak, serta penguatan pengawasan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penerimaan. Perbaikan tata kelola ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan daerah.

Meski demikian, struktur PAD NTB masih memerlukan penguatan dan diversifikasi. Ketergantungan yang tinggi pada pajak kendaraan bermotor, misalnya, menimbulkan risiko fiskal apabila terjadi perlambatan daya beli masyarakat, perubahan regulasi nasional, atau pergeseran pola konsumsi. Struktur penerimaan yang terlalu terkonsentrasi pada satu jenis pajak dapat membatasi fleksibilitas fiskal daerah dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, strategi diversifikasi PAD menjadi langkah strategis untuk memperluas sumber penerimaan secara berkelanjutan. Diversifikasi tidak hanya berarti menambah jenis pajak, tetapi memperluas basis ekonomi produktif yang secara alami meningkatkan penerimaan daerah. Penguatan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, pengelolaan aset daerah, optimalisasi BUMD, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik merupakan jalur strategis untuk memperkuat PAD tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Diversifikasi PAD harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan ekonomi yang lebih luas. Artinya, peningkatan penerimaan daerah tidak boleh bertumpu pada intensifikasi pemungutan semata, melainkan pada ekspansi aktivitas ekonomi yang produktif. Ketika sektor-sektor unggulan tumbuh, basis pajak dan retribusi akan meningkat secara alami, sehingga penerimaan daerah bertambah tanpa menciptakan tekanan berlebihan terhadap pelaku usaha dan masyarakat.

Pertama, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk memperluas basis PAD. Pajak hotel, restoran, hiburan, serta retribusi jasa wisata dapat meningkat seiring dengan naiknya kunjungan dan belanja wisatawan. Namun peningkatan tersebut harus dibarengi dengan perbaikan kualitas destinasi, infrastruktur, dan pelayanan agar pertumbuhan sektor ini berkelanjutan. Dengan demikian, penerimaan daerah tumbuh karena peningkatan nilai tambah, bukan sekadar kenaikan tarif.

Kedua, pengelolaan aset daerah perlu dioptimalkan melalui skema pemanfaatan produktif. Tanah, bangunan, kawasan strategis, serta potensi kerja sama investasi dapat dikelola melalui

pola kemitraan yang transparan dan profesional. Pendekatan ini memungkinkan aset daerah menghasilkan pendapatan berulang (*recurring revenue*) sekaligus mendorong aktivitas ekonomi baru.

Ketiga, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi instrumen penting dalam diversifikasi PAD. BUMD yang dikelola secara profesional, berorientasi bisnis sehat, dan akuntabel dapat memberikan dividen yang signifikan bagi daerah. Reformasi tata kelola, peningkatan kompetensi manajemen, serta fokus pada sektor strategis, seperti energi, air bersih, pangan, dan jasa keuangan daerah akan memperkuat kontribusi BUMD terhadap PAD.

Keempat, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik dan administrasi fiskal dapat memperluas cakupan penerimaan sekaligus meningkatkan efisiensi. Integrasi data, sistem informasi pajak berbasis elektronik, serta transparansi pelaporan akan menekan kebocoran dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Digitalisasi juga memungkinkan analisis potensi pajak secara lebih akurat dan berbasis data.

Penting yang harus dicatat bahwa diversifikasi PAD ini harus tetap menjunjung prinsip keadilan fiskal. Beban pajak dan retribusi harus proporsional dengan kemampuan masyarakat dan tidak menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Kebijakan fiskal yang sehat adalah kebijakan yang memperluas basis ekonomi, memperkuat kepercayaan publik, dan menciptakan ruang fiskal untuk membiayai layanan dasar secara berkelanjutan. Dengan demikian struktur PAD yang lebih beragam dan adaptif, NTB akan memiliki fondasi fiskal yang lebih kokoh. Kemandirian keuangan daerah bukan hanya memperbesar kapasitas anggaran, tetapi juga meningkatkan

fleksibilitas kebijakan dalam merespons dinamika ekonomi, menjaga stabilitas pembangunan, serta dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

6.3. peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, indikator ini menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. Namun harus dicatat bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan per kapita tidak hanya dapat dipahami sebagai kenaikan angka rata-rata, melainkan sebagai peningkatan pendapatan riil yang disertai pemerataan dan kualitas hidup yang lebih baik, yang tercermin pada :

1. Kualitas pendidikan yang lebih baik.
2. Akses kesehatan yang lebih luas.
3. Hunian dan lingkungan yang layak.
4. Kesempatan usaha yang adil.

Secara teoritis, pendapatan per kapita dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni: (1) pertumbuhan output ekonomi; dan (2) jumlah penduduk. Apabila pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk, maka secara agregat pendapatan per kapita akan meningkat. Namun demikian, peningkatan rata-rata tidak selalu mencerminkan distribusi yang adil. Oleh karena itu, strategi peningkatan pendapatan per kapita harus memperhatikan dimensi produktivitas, kesempatan kerja, dan distribusi pendapatan.

1. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Kunci utama peningkatan pendapatan per kapita adalah peningkatan produktivitas. Produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi menghasilkan *output* lebih besar per individu, yang pada akhirnya mendorong kenaikan upah dan pendapatan. Langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

a) Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri.

b) Sertifikasi kompetensi tenaga kerja di sektor unggulan seperti pertanian modern, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan.

c) Peningkatan literasi digital dan kewirausahaan.

Dengan produktivitas yang meningkat tidak hanya menaikkan pendapatan individu, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi daerah secara keseluruhan.

2. Penciptaan Lapangan Kerja Bernilai Tambah

Pendapatan masyarakat meningkat apabila tersedia lapangan kerja yang stabil dan berupah layak. Oleh karena itu, strategi pembangunan harus diarahkan pada penciptaan pekerjaan di sektor-sektor bernilai tambah tinggi, seperti:

a) Industri pengolahan berbasis komoditas lokal.

b) Pariwisata berkualitas dan ekonomi kreatif.

c) Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terintegrasi dalam rantai nilai.

d) Ekonomi digital dan jasa modern.

Dengan hilirisasi dan penguatan klaster industri akan menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan.

3. Penguatan Ekonomi Rakyat dan Koperasi

Dalam struktur ekonomi daerah, pelaku usaha kecil dan menengah memiliki peran dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Penguatan koperasi, BUMDes, dan UMKM menjadi strategi penting untuk memperluas distribusi pendapatan. Adapun langkah konkret meliputi:

a) Akses permodalan inklusif.

b) Pendampingan manajemen dan pemasaran.

c) Integrasi UMKM dalam sistem distribusi modern dan digital.

d) Kemitraan usaha antara skala kecil dan menengah.

Ketika usaha rakyat tumbuh, pendapatan masyarakat akan meningkat secara lebih merata.

4. Pengurangan Ketimpangan dan Kemiskinan

Peningkatan pendapatan per kapita harus diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Indikator seperti Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu menjadi bagian dari evaluasi kebijakan.

Program perlindungan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan

ekonomi benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

5. Transformasi Struktural Ekonomi Daerah

Dalam jangka panjang, peningkatan pendapatan per kapita membutuhkan transformasi struktural dari sektor berproduktivitas rendah menuju sektor berproduktivitas tinggi. Pergeseran dari pertanian subsisten ke agroindustri modern, dari perdagangan tradisional ke sistem distribusi terintegrasi, serta dari usaha informal ke formal akan meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat.

Transformasi ini harus dilakukan secara bertahap dan inklusif, agar supaya tidak menimbulkan disrupsi sosial. Pendidikan, pelatihan ulang (*reskilling*), dan dukungan kebijakan menjadi faktor penting dalam proses tersebut.

BAB VII ENTREPRENEURSHIP GOVERMENT

7.1. Dari Administratif ke Produktif

Perubahan zaman menuntut kita untuk mengevaluasi secara mendasar cara pemerintah bekerja. Model administratif klasik yang menekankan kepatuhan prosedur, hierarki kaku, dan orientasi pada penyerapan anggaran lahir dari kebutuhan menjaga stabilitas dan keteraturan. Namun dalam konteks tantangan pembangunan daerah dewasa ini, pendekatan tersebut tidak lagi memadai. Ketimpangan antarwilayah, kemiskinan yang bersifat struktural, rendahnya produktivitas sektor primer, serta minimnya hilirisasi komoditas lokal tidak dapat diselesaikan hanya dengan rutinitas birokrasi dan kepatuhan administratif semata.

Model lama cenderung mengukur keberhasilan dari terserapnya anggaran dan terlaksananya program sesuai rencana kerja. Padahal, masyarakat tidak merasakan "penyerapan anggaran", melainkan merasakan perubahan kualitas hidup. Di sinilah terjadi jarak antara aktivitas birokrasi dan dampak riil pembangunan. Pemerintahan yang terlalu prosedural berisiko terjebak pada formalitas, sementara persoalan ekonomi dan sosial bergerak lebih cepat dari mekanisme administratif yang tersedia.

Karena itu, paradigma baru diperlukan: pemerintahan yang berorientasi pada penciptaan nilai (*value creation*). Menciptakan nilai berarti memastikan setiap kebijakan, regulasi, dan belanja publik menghasilkan manfaat nyata yang dapat diukur dalam peningkatan kesejahteraan, produktivitas, dan keadilan sosial. Nilai dalam konteks ini bukan sekadar keuntungan finansial, tetapi nilai publik, yakni manfaat kolektif yang dirasakan luas oleh masyarakat.

Lebih jauh lagi, pemerintahan modern dituntut untuk mampu menggerakkan ekosistem, bukan bekerja secara sektoral dan terfragmentasi. Ekosistem pembangunan mencakup pelaku usaha, koperasi, lembaga pendidikan, komunitas lokal, sektor keuangan, dan infrastruktur pendukung. Pemerintah berperan sebagai penghubung, fasilitator, dan katalisator agar seluruh unsur tersebut terintegrasi dalam satu rantai nilai yang produktif. Tanpa pendekatan ekosistemik, intervensi kebijakan akan bersifat parsial dan dampaknya terbatas.

Selain itu, orientasi pada dampak nyata merupakan keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan modern. Dampak tersebut harus tercermin secara konkret dalam penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan petani dan nelayan, pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan, serta penguatan daya saing produk lokal di pasar regional maupun nasional. Pemerintahan yang produktif tidak berhenti pada tersusunnya laporan kegiatan atau terpenuhinya target administratif, melainkan menuntut perubahan kondisi sosial-ekonomi yang terukur, konsisten, dan berjangka panjang.

Secara teoretik, pergeseran ini sejalan dengan kritik terhadap model birokrasi tradisional yang dinilai terlalu

prosedural dan kurang adaptif terhadap dinamika publik saat ini (Weber, 1978). Dalam konteks tersebut, pemerintahan modern tidak cukup hanya menjalankan aturan secara normatif, tetapi harus mampu menghasilkan kinerja yang terukur, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat (Hood, 1991).

Namun demikian, penting ditegaskan bahwa paradigma produktif yang dimaksud tidak identik dengan komersialisasi negara. Pendekatan ini tidak mengubah pemerintah menjadi entitas pencari laba, melainkan menempatkan kebijakan publik sebagai instrumen penciptaan nilai sosial (*public value*) (Moore, 1995). Dengan demikian, setiap kebijakan harus mampu menjawab tiga pertanyaan fundamental:

1. Nilai apa yang diciptakan bagi masyarakat?
2. Siapa yang akan menerima manfaatnya, dan apakah distribusinya adil?
3. Bagaimana keberlanjutan manfaat tersebut dijaga dalam jangka panjang?

Maka melalui kerangka ini, produktivitas pemerintahan tidak diukur dari keuntungan finansial, melainkan dari kemampuan menghadirkan kesejahteraan yang inklusif dan bermartabat.

Kerangka tersebut menuntut adanya perubahan dalam cara kebijakan dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi. Perencanaan tidak lagi berhenti pada penyusunan dokumen teknokratik, tetapi harus diawali dengan identifikasi masalah publik secara mendalam, berbasis data dan realitas lapangan. Dengan demikian, kebijakan tidak lahir dari asumsi birokratis, melainkan dari kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam paradigma produktif, proses implementasi pun menjadi ruang inovasi. Aparatur pemerintah dituntut memiliki keberanian bereksperimen secara terukur (*policy experimentation*), memperbaiki desain kebijakan berdasarkan umpan balik, serta membuka ruang kolaborasi dengan berbagai aktor pembangunan. Fleksibilitas ini penting agar pemerintah mampu merespons perubahan ekonomi, teknologi, dan sosial yang berlangsung cepat.

Evaluasi kebijakan juga mengalami pergeseran. Jika sebelumnya evaluasi lebih menekankan pada kesesuaian prosedur dan kepatuhan administratif, kini evaluasi harus menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak sosial-ekonomi. Indikator keberhasilan tidak hanya bersifat kuantitatif, juga kualitatif, misalnya peningkatan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah, penguatan kohesi sosial, dan bertumbuhnya partisipasi publik.

Lebih jauh, paradigma produktif mendorong integrasi antara perencanaan pembangunan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Aparatur negara perlu dibekali kemampuan analitis, literasi data, kepemimpinan kolaboratif, serta etika pelayanan publik yang kuat. Tanpa transformasi kapasitas internal, perubahan paradigma hanya akan berhenti pada tataran wacana.

Pergeseran ini pada dasarnya merupakan proses transformasi kelembagaan sekaligus transformasi budaya kerja. Ia tidak cukup diwujudkan melalui perubahan struktur organisasi atau regulasi baru semata, tetapi menuntut perubahan cara berpikir, cara mengambil keputusan, dan cara mengukur keberhasilan. Transformasi kelembagaan menyentuh sistem, tata

kelola, dan mekanisme koordinasi; sementara transformasi budaya kerja menyentuh mentalitas aparatur dari hanya sekadar pelaksana prosedur menjadi penggerak perubahan.

Perubahan tersebut hanya dapat berlangsung apabila ditopang oleh komitmen politik yang kuat, konsistensi kebijakan lintas periode, serta kepemimpinan yang visioner dan berintegritas. Tanpa keberanian mengambil keputusan strategis dan menjaga kesinambungan arah pembangunan, paradigma produktif akan tereduksi menjadi jargon administratif. Pemerintahan yang produktif adalah pemerintahan yang mampu menjembatani regulasi dengan realitas sosial, anggaran dengan kesejahteraan rakyat, serta kebijakan dengan peningkatan martabat masyarakat secara menyeluruh.

Adapun transformasi ini dapat dipahami melalui empat pergeseran mendasar berikut.

1. Dari Orientasi *Input* ke Orientasi *Outcome*

   Dalam paradigma administratif yang berkembang, ukuran keberhasilan sering kali berhenti pada input, seperti: jumlah program yang dijalankan, besarnya anggaran yang terserap, atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Logika ini berisiko menciptakan ilusi kemajuan, karena aktivitas tidak selalu identik dengan dampak.

   Sementara paradigma produktif menggeser fokus pada *outcome* dan dampak jangka panjang. Pertanyaan yang diajukan bukan lagi "berapa yang dibelanjakan?", melainkan "perubahan apa yang dihasilkan?". *Outcome* akan mencerminkan hasil nyata seperti peningkatan

pendapatan, perluasan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, atau naiknya produktivitas sektor unggulan.

Perubahan orientasi ini juga menuntut sistem pengukuran kinerja yang lebih komprehensif. Indikator harus mampu menghubungkan program dengan dampak sosial-ekonomi yang terukur. Dengan demikian, setiap kebijakan memiliki garis sebab-akibat yang jelas antara intervensi pemerintah dan perubahan kondisi masyarakat.

2. Dari Hierarki Kaku ke Organisasi Adaptif

Struktur birokrasi tradisional dibangun atas dasar hierarki yang kuat dan rantai komando yang panjang. Model ini efektif untuk menjaga stabilitas, tetapi sering kali lambat dalam merespons dinamika ekonomi dan sosial yang cepat berubah.

Sementara, dalam organisasi adaptif menuntut fleksibilitas, kolaborasi lintas sektor, serta penggunaan teknologi dan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam model ini, koordinasi horizontal menjadi sama pentingnya dengan komando vertikal. Aparatur didorong untuk berpikir solutif, bukan sekadar menunggu instruksi.

Organisasi adaptif juga membuka ruang inovasi kebijakan secara terukur. Umpan balik dari masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas lokal menjadi sumber pembelajaran berkelanjutan. Artinya, birokrasi ini tidak bersifat statis, tetapi berkembang sesuai kebutuhan publik.

3. Dari Belanja ke Investasi Publik

Paradigma administratif melihat anggaran sebagai kewajiban tahunan yang harus (untuk) direalisasikan. Sebaliknya, paradigma produktif memandang anggaran sebagai investasi publik yang harus menghasilkan nilai tambah sosial dan ekonomi.

Investasi publik berarti setiap pengeluaran dirancang untuk menciptakan dampak berkelanjutan. Misalnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya memperbaiki akses fisik, tetapi juga meningkatkan konektivitas ekonomi. Program pelatihan tidak berhenti pada sertifikat, tetapi berujung pada peningkatan kapasitas dan pendapatan peserta.

Maka pendekatan ini menuntut perencanaan jangka menengah dan panjang, serta integrasi antara kebijakan fiskal, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan sektor produktif. Anggaran tidak lagi dipahami sebagai biaya, melainkan sebagai modal sosial untuk pertumbuhan yang inklusif.

4. Dari Sektoral ke Ekosistemik

Pembangunan sektoral sering menghasilkan fragmentasi kebijakan. Setiap dinas atau unit bekerja berdasarkan target masing-masing tanpa integrasi yang memadai. Akibatnya, potensi sinergi tidak optimal dan dampak pembangunan menjadi terbatas.

Sementara, pendekatan ekosistemik memandang pembangunan sebagai sistem yang saling terhubung. Sektor pertanian, misalnya, tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan industri pengolahan, distribusi logistik,

pembiayaan, pendidikan vokasi, hingga pemasaran digital. Pemerintah berperan sebagai penghubung dan penguat keterkaitan antar unsur tersebut.

Pendekatan ini memungkinkan terciptanya rantai nilai yang utuh, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan membangun ekosistem, pemerintah tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi menciptakan fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Secara singkatnya, Paradigma baru ini bukan sekadar reformasi administratif, melainkan perubahan mendasar dalam cara negara hadir dan bekerja bagi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan bermartabat.

7.2. Pilar Entrepreneurship Government

Tentunya, dalam upaya mewujudkan transformasi menuju pemerintahan yang produktif membutuhkan fondasi yang kokoh dan terstruktur. Dimana *Entrepreneurship Government* bukan sekadar gaya kepemimpinan yang dinamis atau slogan reformasi birokrasi, melainkan arsitektur tata kelola yang dirancang secara sadar, sistematis, dan berorientasi jangka panjang. Ia menuntut penyusunan pilar-pilar strategis yang tidak hanya mendorong inovasi dan produktivitas, tetapi juga menjamin keadilan sosial serta keberlanjutan pembangunan.

1. Pemerintah sebagai Orkestrator Ekosistem

   Konsep pemerintah sebagai orkestrator ekosistem berangkat dari pendekatan tata kelola modern yang melihat pembangunan sebagai proses kolaboratif dan sistemik.

Dalam perspektif *governance theory*, yakni negara tidak lagi dipahami sebagai aktor tunggal yang mengendalikan seluruh proses pembangunan, melainkan sebagai simpul koordinasi dalam jejaring aktor yang saling bergantung (Rhodes, 1996). Pendekatan ini berkembang sebagai kritik terhadap model hierarkis tradisional dan menekankan pergeseran dari *government* menuju *governance*, yakni tata kelola berbasis interaksi multi-aktor (Kooiman, 1993).

Selain itu, pendekatan itu juga selaras dengan teori *network governance* dan *collaborative governance*, yang menekankan pentingnya interaksi horizontal antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menghasilkan nilai publik (Sørensen, & Torfing, 2007) Dalam kerangka ini, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh otoritas formal negara, tetapi oleh kualitas koordinasi, kepercayaan, dan kolaborasi antar aktor.

Secara ekonomi, gagasan ini juga berakar pada teori *innovation ecosystem*, yang menempatkan interaksi antara institusi, pasar, teknologi, dan komunitas sebagai faktor kunci pertumbuhan produktif (Nelson, 1993). Perspektif ini melihat inovasi bukan sebagai hasil kerja individu atau organisasi tunggal, melainkan sebagai produk dari sistem yang saling terhubung. Negara, dalam hal ini, berperan menciptakan lingkungan yang memungkinkan interaksi tersebut berkembang secara dinamis.

Artinya dalam hal ini pemerintah tidak lagi sekadar regulator, tetapi bertindak sebagai *enabler* dan *catalyst* yang memastikan keterhubungan antar elemen berjalan efektif dan berorientasi pada penciptaan nilai publik (Mariana,

2013). Peran orkestrasi ini menuntut kapasitas strategis negara dalam membangun visi bersama, menyediakan infrastruktur pendukung, serta menjaga stabilitas dan legitimasi sistem ekonomi secara keseluruhan.

a) Regulasi Pro-Inovasi

Pemerintah harus menciptakan regulasi yang adaptif dan mendukung pertumbuhan sektor produktif. Regulasi tidak boleh menjadi hambatan struktural, tetapi menjadi instrumen yang memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan insentif inovasi.

b) Integrator Rantai Nilai

Sebagai orkestrator, pemerintah memetakan potensi daerah dan menghubungkannya dalam satu ekosistem produktif. Misalnya, sektor pertanian diintegrasikan dengan industri pengolahan, pembiayaan mikro, logistik, dan platform pemasaran digital.

c) Fasilitator Akses Modal dan Pasar

Pemerintah memediasi hubungan antara pelaku usaha kecil dan lembaga keuangan, serta membuka akses pasar domestik maupun ekspor. Intervensi ini bersifat katalitik, bukan substitutif terhadap mekanisme pasar.

d) Penyedia Infrastruktur Strategis

Infrastruktur fisik (jalan, pelabuhan, irigasi) dan digital (internet, sistem data) merupakan fondasi

ekosistem produktif. Pemerintah memastikan infrastruktur tersebut tersedia dan terintegrasi.

e) Penjamin Tata Kelola dan Kepercayaan Publik

Kepercayaan adalah modal utama dalam ekosistem ekonomi. Pemerintah menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas untuk menciptakan stabilitas serta kepastian usaha.

2. Kepemimpinan Visioner dan Berintegritas

Jika pemerintah diposisikan sebagai orkestrator ekosistem, maka kepemimpinan adalah dirigen yang akan menentukan arah, tempo, dan harmoni pembangunan. Artinya *Entrepreneurship Government* tidak mungkin berjalan tanpa kepemimpinan yang visioner sekaligus berintegritas. Visi ini memberikan arah strategis jangka panjang, sementara integritas menjaga legitimasi dan kepercayaan publik.

Adaoun dalam literatur administrasi publik, kepemimpinan transformasional dipandang sebagai model yang mampu/dapat mendorong perubahan institusional secara mendalam. Model ini menekankan kemampuan pemimpin dalam membangun visi kolektif, menginspirasi perubahan, serta mendorong inovasi organisasi (Burn,1978).

Sementara itu, dalam konteks tata kelola publik modern, kepemimpinan tidak lagi dipahami sebagai otoritas hierarkis (kaku) semata, melainkan sebagai kemampuan membangun koalisi dan memobilisasi aktor lintas sektor (Moore, 1995). Artinya pemimpin publik

bertindak sebagai *boundary spanner,* yang menjembatani berbagai perbedaan kepentingan dan menciptakan ruang kolaborasi.

Di sisi lain, integritas merupakan fondasi moral kepemimpinan. Tanpa integritas, visi dapat berubah menjadi ambisi personal dan inovasi berisiko terdistorsi oleh kepentingan sempit. Oleh karena itu, literatur etika publik menegaskan bahwa legitimasi pemerintahan sangat bergantung pada konsistensi antara nilai, tindakan, dan kebijakan (Cooper, 2006).

a) Orientasi Jangka Panjang

Pemimpin mampu melihat potensi struktural daerah dan merumuskan arah pembangunan lintas periode. Visi tidak berhenti pada masa jabatan, tetapi dirancang untuk keberlanjutan.

b) Kepekaan terhadap Peluang dan Risiko

Dalam konteks ekonomi daerah, pemimpin harus mampu membaca tren pasar, perubahan teknologi, dan dinamika global. Keputusan strategis diambil berdasarkan analisis, bukan intuisi semata.

c) Keberanian Inovatif

Kepemimpinan visioner berani mengubah pola lama yang tidak produktif. Reformasi regulasi, digitalisasi layanan, atau penguatan koperasi membutuhkan keberanian politik yang terukur.

d) Kemampuan Menggerakkan Energi Kolektif

Visi menjadi efektif apabila mampu diterjemahkan ke dalam narasi bersama yang dipahami dan didukung masyarakat.

3. APBD sebagai Instrumen Inovasi dan Investasi

Dalam paradigma administratif, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering diposisikan sebagai dokumen fiskal tahunan yang berorientasi pada kepatuhan prosedural dan serapan anggaran. Sehingga keberhasilan kerap diukur dari persentase realisasi belanja, bukan dari dampak yang dihasilkan.

Menurut Musgrave (1989) anggaran negara pada dasarnya memiliki tiga fungsi utama, yakni: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dimana fungsi alokasi mengarahkan sumber daya ke sektor prioritas; fungsi distribusi memastikan pemerataan; sementara fungsi stabilisasi menjaga keseimbangan ekonomi.

Namun, dalam *Entrepreneurship Government* konsep anggaran diperluas menjadi penciptaan nilai publik (*public value creation*). Anggaran tidak hanya mendanai program, tetapi mengorkestrasi perubahan struktural yang meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan kolektif (Moore, 1995).

Pendekatan ini sejalan dengan *entrepreneurial state*, yang menempatkan pemerintah sebagai investor strategis dalam sektor-sektor yang memiliki potensi inovasi dan nilai tambah tinggi (Mariana, 2013) Negara bukan sekadar pengoreksi kegagalan pasar (*market failure*), tetapi aktor

yang berani mengambil risiko awal untuk membuka peluang pertumbuhan baru.

a) Penguatan Belanja Modal Produktif

Infrastruktur pertanian, pelabuhan perikanan, kawasan industri kecil, dan jaringan digital harus dirancang sebagai pengungkit produktivitas jangka panjang.

b) Dukungan Hilirisasi dan Nilai Tambah

APBD dapat digunakan untuk mendorong pengolahan komoditas lokal agar tidak berhenti pada bahan mentah, tetapi berkembang menjadi produk olahan bernilai lebih tinggi.

c) Skema Pembiayaan Inovatif

Dana bergulir, kemitraan publik-swasta, dan insentif fiskal lokal dapat dirancang untuk memperkuat UMKM dan koperasi.

d) Investasi pada Sumber Daya Manusia

Pendidikan vokasi, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, serta penguatan kapasitas aparatur merupakan investasi non-fisik yang berdampak jangka panjang.

Adapun agar APBD benar-benar berfungsi sebagai instrumen inovasi dan investasi, diperlukan beberapa prinsip strategis:

a) Berbasis Prioritas Sektor Unggulan

Alokasi anggaran harus selaras dengan potensi ekonomi daerah, sehingga tidak tersebar tanpa fokus.

b) Berorientasi Multiplier Effect

Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memicu aktivitas ekonomi lanjutan.

c) Terintegrasi Antar-Program

Program antar-organisasi perangkat daerah harus saling mendukung, bukan berjalan sendiri.

d) Akuntabel dan Transparan

Transparansi atas pengelolaan anggaran memperkuat kepercayaan publik dan mengurangi risiko inefisiensi.

4. Kolaborasi Tripartit: Negara–Pasar–Komunitas

Paradigma ini lahir dari kesadaran bahwa tidak ada satu aktor pun yang mampu/dapat menyelesaikan persoalan pembangunan secara mandiri. Negara memiliki otoritas dan legitimasi; pasar memiliki efisiensi dan inovasi; komunitas memiliki akar sosial dan nilai kolektif. Ketiganya harus bergerak dalam satu kerangka sinergis. Artinya hal ini merupakan sebuah respons atas keterbatasan model hierarkis negara dan model pasar murni (Rhodes, 1996). Konsep *collaborative governance* ini menekankan proses pengambilan keputusan bersama yang melibatkan aktor publik dan non-publik dalam forum yang bersifat deliberatif dan konsensus (Ansell & Gash, 2008).

Di sisi lain, ekonomi kelembagaan baru (*new institutional economics*) menegaskan interaksi ekonomi dipengaruhi oleh aturan formal dan norma sosial (North, 1990). Artinya, bahwa keberhasilan pasar tidak hanya ditentukan oleh mekanisme harga, tetapi juga oleh kualitas institusi dan kepercayaan sosial. Dalam konteks ini, komunitas berperan sebagai penjaga norma dan kohesi sosial yang memperkuat stabilitas sistem ekonomi.

a) Negara berfungsi sebagai penentu arah, penyedia regulasi, dan penjamin keadilan. Ia memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menciptakan ketimpangan struktural. Negara juga menyediakan infrastruktur publik dan kerangka hukum yang stabil.

b) Pasar mendorong efisiensi, inovasi, dan kompetisi sehat. Melalui mekanisme harga dan insentif, pasar mengalokasikan sumber daya secara dinamis. Namun, pasar memerlukan regulasi agar tidak menghasilkan monopoli atau eksploitasi.

c) Komunitas menjaga nilai sosial, solidaritas, dan keberlanjutan. Modal sosial seperti kepercayaan dan gotong royong memperkecil biaya transaksi dan memperkuat kemitraan ekonomi. Komunitas juga menjadi ruang partisipasi dan kontrol sosial terhadap kebijakan publik.

5. Sistem Pengukuran Nilai Publik

Telah dijelaskan bahwa paradigma administratif menekankan kepatuhan prosedur dan serapan anggaran,

sementara paradigma produktif menuntut evaluasi berbasis nilai publik. Maka dari itu, pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif harus mampu membuktikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar menciptakan manfaat kolektif yang terukur dan berkelanjutan.

a) *Key Performance Indicators* (KPI) berbasis *Outcome*

Indikator kinerja dirancang berdasarkan hasil dan dampak, bukan hanya *output* kegiatan.

b) *Balanced Scorecard* Sektor Publik

Mengintegrasikan perspektif keuangan, pelanggan (masyarakat), proses internal, serta pembelajaran organisasi (Kaplan & Norton , 2001).

c) Evaluasi Dampak (*Impact Evaluation*)

Menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menilai perubahan sebelum dan sesudah intervensi kebijakan.

d) Sistem Data Terintegrasi dan Digitalisasi

Pengumpulan dan analisis data real-time memungkinkan respons kebijakan yang adaptif.

7.3. Koperasi sebagai Mesin Kesejahteraan

Secara konstitusional, koperasi memiliki legitimasi kuat dalam sistem ekonomi Indonesia melalui prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, koperasi merupakan bentuk organisasi yang memadukan tujuan ekonomi dengan nilai sosial. Ia beroperasi dalam logika efisiensi, tetapi tetap berorientasi pada kesejahteraan anggota.

Berbeda dengan korporasi berbasis pemegang saham, koperasi menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan. Struktur ini menciptakan keseimbangan antara produktivitas dan distribusi, sehingga pertumbuhan tidak terlepas dari pemerataan.

Sejarah koperasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjuangan sosial-ekonomi masyarakat menghadapi ketimpangan pada masa kolonial. Cikal bakal gerakan koperasi muncul pada akhir abad ke-19 sebagai respons terhadap praktik rentenir yang menjerat petani dan pegawai pribumi. Pada tahun 1896, Raden Aria Wiriaatmadja di Purwokerto mendirikan lembaga simpan pinjam untuk membantu pegawai negeri pribumi keluar dari lilitan utang. Inisiatif ini sering disebut sebagai embrio koperasi modern di Indonesia.

Memasuki awal abad ke-20, gagasan koperasi semakin berkembang seiring munculnya kesadaran kebangsaan. Organisasi pergerakan seperti Budi Utomo dan Sarekat Dagang Islam turut mendorong semangat ekonomi kolektif. Namun, regulasi kolonial saat itu masih membatasi perkembangan koperasi melalui pengawasan ketat dan persyaratan administratif yang berat.

Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), koperasi diarahkan untuk mendukung kepentingan ekonomi perang, sehingga kehilangan otonomi gerakan. Setelah kemerdekaan, koperasi memperoleh pengakuan formal sebagai sokoguru perekonomian nasional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan sebagai landasan

normatif yang menempatkan koperasi sebagai bentuk ideal kelembagaan ekonomi Indonesia.

Selanjutnya, tonggak penting lainnya adalah Kongres Koperasi Indonesia pertama pada 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, yang kemudian diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional. Momentum ini menandai konsolidasi gerakan koperasi sebagai bagian integral pembangunan nasional.

Pada era Orde Lama, koperasi diposisikan sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat, meskipun sering kali menghadapi kendala manajerial dan politisasi. Pada masa Orde Baru, koperasi berkembang secara kuantitatif melalui program pemerintah, tetapi tidak selalu tumbuh secara kualitatif karena ketergantungan pada subsidi dan pendekatan top-down.

Pada era Reformasi, koperasi menghadapi tantangan liberalisasi ekonomi dan kompetisi pasar global. Transformasi kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak agar koperasi tidak hanya bertahan, tetapi mampu bersaing secara profesional dan adaptif.

Sejarah panjang ini menunjukkan bahwa koperasi di Indonesia bukanlah konsep impor semata, melainkan hasil dialektika antara kebutuhan sosial-ekonomi rakyat dan cita-cita konstitusional bangsa, yang ahir dari semangat kemandirian, tumbuh dalam perjuangan kolektif, dan tetap relevan sebagai instrumen pemerataan dalam kerangka pembangunan yang bermartabat.

Maka agar koperasi benar-benar dapat menjadi mesin kesejahteraan, diperlukan desain kelembagaan yang modern dan profesional:

1. Koperasi Berbasis Klaster Komoditas

   Pengembangan koperasi disesuaikan dengan potensi wilayah, seperti pertanian, peternakan, kelautan, atau pariwisata. Pendekatan klaster meningkatkan efisiensi dan konsolidasi pasar.

2. Integrasi Hilirisasi

   Koperasi tidak berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi mengembangkan pengolahan dan branding. Nilai tambah diciptakan dan dipertahankan di tingkat lokal.

3. Tata Kelola Transparan dan Digital

   Penggunaan sistem pencatatan digital meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan anggota, dan efisiensi operasional.

4. Kemitraan Multi-Aktor

   Koperasi bermitra dengan perguruan tinggi, industri, dan lembaga keuangan untuk memperkuat inovasi, akses teknologi, dan pasar

7.4. Sektor Prioritas Entrepreneurial Government

Paradigma *Entrepreneurial Government* menuntut fokus strategis. Pemerintah tidak dapat mengintervensi seluruh sektor secara merata tanpa risiko fragmentasi sumber daya dan inefisiensi anggaran. Karena itu, diperlukan penetapan sektor prioritas yang memiliki keunggulan komparatif, potensi nilai tambah tinggi, serta daya ungkit terhadap pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Adapun penetapan sektor prioritas harus berbasis tiga pertimbangan utama, yakni :

1. Keunggulan komparatif daerah (sumber daya alam dan sosial).

Merujuk pada kemampuan wilayah memproduksi barang atau jasa dengan biaya relatif lebih rendah atau kualitas relatif lebih baik dibanding wilayah lain. Dalam konteks daerah, keunggulan ini tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam, tetapi juga oleh sumber daya sosial dan budaya.

a) Sumber Daya Alam

Daerah yang memiliki lahan subur, garis pantai panjang, cadangan perikanan, atau potensi energi terbarukan memiliki modal dasar untuk mengembangkan sektor primer dan turunannya. Namun, sumber daya alam semata tidak cukup; yang lebih penting adalah kemampuan mengelolanya secara produktif dan berkelanjutan. Meliputi:

- Kondisi agroklimat yang mendukung komoditas tertentu
- Kekayaan laut dan pesisir
- Potensi energi surya, angin, atau biomassa
- Keindahan alam sebagai daya tarik wisata

b) Sumber Daya Sosial dan Budaya

Selain faktor alam, modal sosial merupakan keunggulan yang sering kali tidak terukur secara statistik, tetapi sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Kepercayaan, gotong royong,

solidaritas komunitas, dan jaringan sosial memperkecil biaya transaksi serta memperkuat kolaborasi ekonomi. Meliputi :

- Tradisi kerja kolektif
- Struktur komunitas desa yang solid
- Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya
- Identitas budaya yang dapat dikapitalisasi secara positif dalam ekonomi kreatif dan pariwisata

2. Potensi hilirisasi dan nilai tambah.

Hilirisasi adalah upaya mengolah komoditas mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

a) Rasional Ekonomi Hilirisasi

Tanpa hilirisasi, daerah hanya menjadi pemasok bahan mentah dengan margin keuntungan rendah. Nilai tambah justru dinikmati oleh wilayah atau negara lain yang memiliki industri pengolahan. Sebagai contoh, komoditas pertanian dapat diolah menjadi produk makanan olahan, pakan ternak, atau bahan baku industri lainnya. Produk kelautan dapat dikembangkan menjadi komoditas ekspor dengan branding daerah.

Maka hilirisasi akan memberikan manfaat, sebagaimana berikut :

- Peningkatan harga jual produk
- Penyerapan tenaga kerja lokal
- Penguatan industri kecil dan menengah
- Diversifikasi produk

b) Ekosistem Pendukung Nilai Tambah

Merupakan keseluruhan sistem yang memungkinkan suatu komoditas atau sektor ekonomi bergerak dari tahap produksi mentah menuju produk bernilai lebih tinggi secara berkelanjutan. Ia bukan hanya kumpulan fasilitas fisik, melainkan jaringan terintegrasi antara infrastruktur, kelembagaan, pembiayaan, teknologi, regulasi, dan pasar yang bekerja secara sinergis untuk menciptakan peningkatan nilai ekonomi.

Nilai tambah tidak tercipta secara otomatis hanya karena adanya sumber daya alam. Namun, lahir dari proses transformasi, baik transformasi fisik (pengolahan), transformasi fungsional (distribusi dan branding), maupun transformasi simbolik (identitas dan reputasi produk). Agar proses tersebut berjalan efektif, diperlukan ekosistem yang mendukung setiap tahapan rantai nilai.

Secara umum, ekosistem pendukung nilai tambah mencakup beberapa komponen utama:

- Infrastruktur Produktif. Infrastruktur menjadi fondasi awal nilai tambah. Tanpa

akses jalan, pelabuhan, listrik, irigasi, atau jaringan internet, proses produksi dan distribusi akan terhambat.

- Teknologi dan Inovasi.

  Nilai tambah meningkat ketika terjadi proses pengolahan berbasis teknologi. Teknologi memungkinkan diferensiasi produk, peningkatan kualitas, serta efisiensi produksi.

- Akses Pembiayaan.

  Proses hilirisasi membutuhkan modal kerja dan investasi awal. Banyak pelaku usaha lokal gagal naik kelas karena keterbatasan akses pembiayaan.

- Kelembagaan dan Tata Kelola.

  Kelembagaan yang kuat memastikan koordinasi antar pelaku berjalan efektif. Koperasi, BUMDes, asosiasi produsen, dan kemitraan publik-swasta menjadi simpul penghubung dalam rantai nilai.

- Akses Pasar dan Branding.

  Nilai tambah tidak berarti tanpa pasar. Produk olahan memerlukan jaringan distribusi, promosi, dan identitas yang kuat.

- Modal Sosial dan Kepercayaan.

Kepercayaan antar pelaku usaha, antara masyarakat dan pemerintah, serta antara produsen dan konsumen, memperkecil biaya transaksi dan meningkatkan stabilitas kerja sama.

3. Dampak langsung kepada masyarakat.

Sektor prioritas tidak boleh dipilih hanya karena potensinya besar, tetapi juga karena kemampuannya memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

a) Penciptaan Lapangan Kerja

Sektor yang padat karya memiliki kontribusi besar terhadap penurunan pengangguran. Pertanian terintegrasi, industri pengolahan, dan pariwisata komunitas adalah contoh sektor dengan daya serap tenaga kerja tinggi.

b) Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga

Kebijakan haruslah dirancang agar peningkatan nilai tambah benar-benar dirasakan produsen lokal (baik petani, nelayan, dan pelaku UMKM) , bukan hanya investor besar.

c) Pemerataan Wilayah

Sektor prioritas harus mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan pedesaan.

d) Penguatan Martabat Sosial

Kesejahteraan tidak hanya bersifat material semata. Ketika masyarakat memiliki akses kerja, pendapatan layak, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, martabat sosial turut meningkat

BAB VIII MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA

8.1. Gambaran Umum Ketenagakerjaan di NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan dinamika pasar tenaga kerja yang cukup kompleks pada periode pasca-pandemi. Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB memperlihatkan adanya tren pertumbuhan angkatan kerja yang konsisten dari tahun ke tahun, disertai perubahan dalam tingkat penyerapan tenaga kerja serta fluktuasi tingkat pengangguran terbuka (TPT). Perkembangan ini menandakan bahwa struktur pasar kerja NTB sedang berada dalam fase transisi menuju pemulihan dan ekspansi yang lebih luas.

Dalam empat tahun terakhir, ekspansi jumlah angkatan kerja terlihat cukup signifikan. Pada Februari 2022, jumlah angkatan kerja tercatat sekitar 2,78 juta orang. Angka ini menjadi titik awal konsolidasi ekonomi setelah periode tekanan global yang memengaruhi aktivitas produksi dan kesempatan kerja di berbagai sektor.

Memasuki Februari 2023, jumlah angkatan kerja meningkat menjadi sekitar 2,87 juta orang, atau bertambah sekitar 85,74 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan semakin banyaknya penduduk usia produktif yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun sebagai pencari kerja baru.

Tren pertumbuhan tersebut berlanjut pada Februari 2024, ketika angkatan kerja kembali meningkat menjadi sekitar 3,03 juta orang. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa struktur demografi NTB masih didominasi oleh kelompok usia produktif, yang secara alami mendorong peningkatan pasokan tenaga kerja setiap tahunnya.

Perkembangan terbaru pada Februari 2025 memperlihatkan jumlah angkatan kerja telah mencapai sekitar 3,19 juta orang, bertambah sekitar 160,28 ribu orang dibanding Februari 2024. Lonjakan yang relatif lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya ini menjadi indikator penting bahwa tekanan terhadap penciptaan lapangan kerja semakin meningkat. Dengan pertumbuhan angkatan kerja yang cukup cepat, tantangan pembangunan ke depan bukan hanya menyediakan pekerjaan dalam jumlah memadai, tetapi juga memastikan bahwa pekerjaan tersebut produktif, formal, stabil, dan memiliki nilai tambah tinggi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 8.1 Perkembangan Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat (Februari 2022–2025)

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	Jumlah Angkatan Kerja (Juta Orang)	Pertambahan Tahunan (Orang)	Pertumbuhan (%)
2022	2.780.000*	2,78	–	–
2023	2.865.740	2,87	85.740	3,08
2024	3.030.000*	3,03	164.260	5,73
2025	3.190.280	3,19	160.280	5,29

*Angka disajikan mengikuti publikasi resmi BPS dan pembulatan pada dua digit desimal juta orang.
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi NTB Februari 2022–2025 (Sakernas Februari), diolah.

Dalam tabel diatas terlihat bahwa selama periode 2022–2025 terjadi tren pertumbuhan pasokan tenaga kerja yang konsisten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peningkatan jumlah angkatan kerja setiap tahun terutama berasal dari penduduk usia produktif (15 tahun ke atas) yang terus bertambah dan memasuki pasar kerja. Kondisi ini mencerminkan struktur demografi NTB yang masih berada dalam fase bonus demografi, di mana proporsi usia kerja relatif besar dibanding kelompok usia nonproduktif.

Namun, pertumbuhan angkatan kerja saja belum cukup untuk menilai kesehatan pasar kerja. Indikator yang lebih komprehensif adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. TPAK menunjukkan seberapa besar mobilisasi tenaga kerja dalam aktivitas ekonomi.

Dalam beberapa tahun terakhir, TPAK NTB menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja aktif. Peningkatan ini sekaligus menjadi indikator pemulihan ekonomi dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap peluang kerja yang tersedia.

Tabel 8.2 Perkembangan Penduduk Bekerja dan TPAK Provinsi Nusa Tenggara Barat (Februari 2022–2025)

Tahun	Angkatan Kerja (Orang)	Penduduk Bekerja (Orang)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT, %)	TPAK (%)
2022	2.780.000	2.670.000*	3,92	69,8*
2023	2.865.740	2.760.000	3,73	70,9
2024	3.030.000	2.930.000	3,30	72,1
2025	3.190.280	3.090.000	3,22	73,0*

*Angka mengikuti publikasi BPS dan pembulatan dua digit desimal.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi NTB Februari 2022–2025 (Sakernas Februari), diolah.

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat beberapa kecenderungan penting dalam dinamika ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama, jumlah penduduk yang bekerja menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada Februari 2022, jumlah penduduk bekerja tercatat sekitar 2,67 juta orang, dan pada Februari 2025 meningkat menjadi sekitar 3,09 juta orang. Dengan demikian, dalam kurun waktu empat tahun terjadi penambahan lebih dari 400 ribu orang yang terserap dalam kegiatan ekonomi. Kenaikan ini mencerminkan adanya kapasitas ekonomi daerah yang masih mampu menyerap tambahan tenaga kerja baru.

Kedua, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga memperlihatkan tren meningkat. Jika pada 2022 TPAK berada pada kisaran 69–70 persen, maka pada 2025 angkanya telah

mendekati 73 persen. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Secara struktural, hal ini mengindikasikan meningkatnya mobilisasi tenaga kerja dan membaiknya iklim partisipasi ekonomi masyarakat.

Ketiga, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) relatif mengalami penurunan dalam periode yang sama, meskipun jumlah angkatan kerja meningkat cukup signifikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB masih memiliki daya serap terhadap tambahan pasokan tenaga kerja. Namun demikian, rendahnya TPT tidak serta-merta mencerminkan tingginya kualitas pekerjaan, karena sebagian besar tenaga kerja masih berada pada sektor informal dan pekerjaan berproduktivitas rendah.

Secara keseluruhan, kondisi ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini dapat ditempatkan pada fase ekspansi partisipasi tenaga kerja dengan tingkat pengangguran yang relatif terkendali. Pertumbuhan angkatan kerja yang konsisten diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih memiliki daya serap terhadap tambahan tenaga kerja baru. Namun demikian, tantangan pembangunan ke depan tidak lagi semata-mata berfokus pada kuantitas pekerjaan, melainkan pada kualitasnya. Pekerjaan yang tercipta harus semakin formal, produktif, memberikan pendapatan yang layak, serta memiliki perlindungan sosial yang memadai agar benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi indikator penting untuk menilai keseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan kapasitas ekonomi dalam menyediakan lapangan kerja. TPT menggambarkan persentase angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan dan secara aktif mencari kerja. Oleh karena itu, perubahan TPT mencerminkan dinamika riil pasar tenaga kerja di daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, tren TPT di Nusa Tenggara Barat menunjukkan pola fluktuatif namun cenderung menurun. Pada Februari 2022, TPT tercatat sekitar 3,92 persen, yang masih berada dalam konteks pemulihan pasca tekanan ekonomi global dan proses adaptasi sektor usaha terhadap kondisi baru. Pada Februari 2023, angka tersebut menurun menjadi sekitar 3,73 persen, mengindikasikan perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja. Tren penurunan berlanjut pada Februari 2024 dengan TPT sebesar sekitar 3,30 persen, mencerminkan stabilisasi pasar kerja yang semakin baik. Perkembangan terbaru pada Februari 2025 menunjukkan TPT berada di kisaran 3,22 persen. Meskipun jumlah angkatan kerja meningkat signifikan, tingkat pengangguran relatif tetap terkendali, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB masih mampu mengimbangi tambahan pasokan tenaga kerja.

Kendati demikian, rendahnya TPT tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai keberhasilan mutlak. Tantangan yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa penyerapan tenaga kerja tersebut terjadi pada sektor-sektor yang produktif dan bernilai tambah tinggi, sehingga pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya menekan angka pengangguran, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Tabel 8.3 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Nusa Tenggara Barat (Februari 2022–2025)

Tahun	Angkatan Kerja (Orang)	Penganggur (Orang)*	TPT (%)
2022	2.780.000	±109.000	3,92
2023	2.865.740	±106.900	3,73
2024	3.030.000	±100.000	3,30
2025	3.190.280	±102.700	3,22

*Perkiraan jumlah penganggur dihitung berdasarkan persentase TPT dikalikan jumlah angkatan kerja (pembulatan).

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi NTB Februari 2022–2025 (Sakernas Februari), diolah.

8.2. Struktur Lapangan Kerja Berdasarkan Sektor

Struktur lapangan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga saat ini masih memperlihatkan karakter ekonomi berbasis sektor primer. Dominasi pertanian sebagai penyerap tenaga kerja utama menunjukkan bahwa fondasi ekonomi daerah bertumpu pada aktivitas agraris dan sumber daya alam. Di saat yang sama, proporsi pekerja sektor informal yang masih besar memperlihatkan bahwa sebagian besar kegiatan ekonomi berlangsung dalam skala kecil, berbasis keluarga, dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem produksi modern.

Komposisi ini penting untuk dianalisis karena struktur ketenagakerjaan tidak hanya menggambarkan di mana masyarakat bekerja, tetapi juga menentukan tingkat produktivitas, stabilitas pendapatan, serta kapasitas transformasi ekonomi daerah. Struktur tenaga kerja yang terkonsentrasi pada

sektor primer umumnya identik dengan produktivitas rendah, pendapatan fluktuatif, dan ketergantungan pada faktor eksternal seperti cuaca dan harga komoditas. Sebaliknya, sektor sekunder dan tersier yang kuat biasanya menjadi indikator kemajuan industrialisasi dan diversifikasi ekonomi.

Berdasarkan data Sakernas Februari 2025, distribusi penduduk bekerja menurut lapangan usaha memperlihatkan bahwa sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Setelah itu, tenaga kerja terserap pada sektor perdagangan, jasa kemasyarakatan, industri pengolahan, dan konstruksi. Komposisi ini menggambarkan bahwa ekonomi NTB mulai bergerak menuju sektor jasa, namun belum sepenuhnya bertransformasi menuju struktur ekonomi berbasis industri.

Sementara itu, sektor pertambangan yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) justru menyerap tenaga kerja dalam proporsi yang relatif kecil. Fenomena ini menunjukkan karakter sektor pertambangan yang padat modal dan berbasis teknologi tinggi, sehingga tidak menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Ketimpangan antara kontribusi terhadap output ekonomi dan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu ciri struktural ekonomi NTB.

Struktur seperti ini mengindikasikan adanya dualisme ekonomi: di satu sisi terdapat sektor-sektor modern dengan nilai tambah tinggi namun padat modal, dan di sisi lain terdapat sektor-sektor tradisional yang padat karya tetapi berproduktivitas rendah. Sektor-sektor bernilai tambah tinggi belum sepenuhnya menjadi sektor padat karya, sementara sektor

padat karya masih didominasi aktivitas dengan produktivitas terbatas.

Implikasinya, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan PDRB, tetapi memerlukan transformasi struktural. Transformasi tersebut mencakup penguatan industri pengolahan berbasis komoditas lokal, peningkatan keterkaitan antar sektor (linkages), serta perluasan sektor formal. Tanpa perubahan struktur ini, pertumbuhan ekonomi berisiko tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Tabel 8.5 Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha di NTB (Februari 2023–2025, Persentase %)

Lapangan Usaha	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	38,2	37,5	37,0
Perdagangan Besar & Eceran	15,4	15,8	16,0
Jasa Kemasyarakatan & Sosial	10,5	10,8	11,0
Industri Pengolahan	8,5	8,8	9,0
Konstruksi	6,8	6,9	7,0
Akomodasi & Makan Minum	5,5	5,8	6,0
Transportasi & Pergudangan	3,8	3,9	4,0
Pertambangan & Penggalian	2,1	2,0	2,0
Lainnya	9,2	8,5	8,0
Total	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Provinsi NTB, Sakernas Februari 2023–2025 (diolah).

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terlihat beberapa kecenderungan struktural yang penting bagi arah transformasi ekonomi NTB.

Pertama, terjadi penurunan bertahap proporsi tenaga kerja di sektor pertanian. Jika pada 2023 sektor ini menyerap sekitar 38,2 persen tenaga kerja, maka pada 2025 angkanya turun menjadi sekitar 37,0 persen. Penurunan ini berlangsung secara gradual dan tidak menunjukkan pelemahan sektor pertanian secara substansial. Sebaliknya, hal ini mencerminkan proses diversifikasi ekonomi yang mulai berjalan, di mana sebagian tenaga kerja secara perlahan bergeser ke sektor-sektor non-pertanian. Dengan kata lain, struktur ekonomi NTB mulai mengalami pergeseran meskipun masih dalam tahap awal.

Kedua, sektor perdagangan dan jasa kemasyarakatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Kenaikan proporsi tenaga kerja pada sektor ini mengindikasikan berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis distribusi barang, konsumsi rumah tangga, serta layanan publik dan sosial. Pertumbuhan sektor jasa biasanya berkorelasi dengan peningkatan aktivitas perkotaan, ekspansi UMKM, serta membaiknya konektivitas dan mobilitas masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa perekonomian NTB tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sektor primer, tetapi mulai memperkuat sektor tersier.

Ketiga, sektor industri pengolahan mengalami penguatan meskipun masih dalam skala terbatas. Kenaikan proporsinya dari 8,5 persen menjadi 9,0 persen merupakan sinyal positif menuju transformasi ekonomi berbasis nilai tambah. Industri pengolahan memiliki potensi besar untuk meningkatkan

produktivitas tenaga kerja karena mampu mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai lebih tinggi. Namun demikian, kontribusi yang masih di bawah 10 persen menunjukkan bahwa industrialisasi di NTB belum menjadi pilar utama struktur ketenagakerjaan. Upaya hilirisasi komoditas lokal menjadi kunci untuk mempercepat pergeseran ini.

Keempat, sektor pertambangan tetap stabil pada kisaran 2 persen dalam penyerapan tenaga kerja. Stabilitas ini menegaskan karakter sektor pertambangan yang padat modal dan berbasis teknologi, sehingga tidak menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Meskipun kontribusinya terhadap PDRB signifikan, sektor ini tidak menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan struktural antara sektor yang menghasilkan output ekonomi tinggi dan sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Secara keseluruhan, perkembangan struktur lapangan kerja NTB menunjukkan arah transisi yang perlahan dari ekonomi primer menuju ekonomi jasa dan industri. Namun transformasi tersebut masih bersifat gradual dan belum cukup kuat untuk secara signifikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. Oleh karena itu, strategi pembangunan ke depan perlu diarahkan pada percepatan industrialisasi berbasis komoditas lokal, penguatan sektor jasa produktif, serta peningkatan keterkaitan antar-sektor agar pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.

8.2.1. Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan

Sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan merupakan tulang punggung struktur ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan proporsi penyerapan tenaga kerja sekitar 37 persen pada 2025, sektor ini menjadi penyedia lapangan kerja terbesar di daerah. Secara absolut, lebih dari satu juta penduduk NTB menggantungkan penghidupannya pada aktivitas agraris.

Karakter utama sektor ini adalah berbasis rumah tangga dan skala kecil. Sebagian besar petani dan peternak beroperasi pada lahan terbatas dengan teknologi produksi yang masih sederhana. Komoditas unggulan NTB meliputi jagung, padi, bawang merah, serta sapi potong, terutama di wilayah Pulau Sumbawa dan Bima. Selain itu, subsektor perkebunan rakyat seperti kelapa dan hortikultura juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga perdesaan.

Namun demikian, tantangan utama sektor ini terletak pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah. Pola produksi masih dominan pada tahap hulu, sementara kegiatan hilir seperti pengolahan, pengemasan, dan distribusi modern belum berkembang optimal. Ketergantungan pada harga pasar dan faktor cuaca menyebabkan pendapatan petani relatif fluktuatif. Selain itu, keterbatasan akses modal, teknologi, serta pasar memperkuat posisi sektor ini sebagai padat karya namun berproduktivitas rendah.

Transformasi sektor pertanian ke depan harus ditempatkan sebagai agenda strategis pembangunan daerah, bukan sekadar kebijakan sektoral yang berdiri sendiri. Mengingat besarnya proporsi tenaga kerja NTB yang bergantung pada sektor ini,

setiap peningkatan produktivitas dan perluasan nilai tambah akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat perdesaan sekaligus memperkuat stabilitas sosial-ekonomi daerah secara keseluruhan. Pertanian bukan hanya urusan produksi pangan, tetapi fondasi struktur ekonomi dan ketenagakerjaan NTB.

Agenda pertama adalah peningkatan produktivitas yang terintegrasi dengan arah kebijakan peningkatan produksi sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Modernisasi sistem produksi perlu dilakukan melalui mekanisasi yang tepat guna, perbaikan dan perluasan jaringan irigasi, serta penggunaan varietas dan bibit unggul yang adaptif terhadap kondisi agroklimat lokal. Mekanisasi dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai pengurangan tenaga kerja, melainkan sebagai peningkatan efisiensi, kualitas hasil, dan stabilitas produksi. Sistem irigasi yang lebih andal akan mengurangi ketergantungan pada pola hujan, sementara benih unggul mampu meningkatkan hasil panen per hektare secara berkelanjutan. Di samping itu, penerapan teknologi digital pertanian, seperti sistem informasi harga, pemetaan lahan, dan manajemen produksi berbasis data akan memperkuat kapasitas petani dalam mengambil keputusan ekonomi secara lebih rasional dan responsif terhadap pasar.

Agenda kedua adalah penguatan hilirisasi komoditas pertanian. Selama ini sebagian besar hasil produksi NTB dijual dalam bentuk bahan mentah dengan margin keuntungan yang terbatas. Hilirisasi berarti mendorong proses pengolahan di dalam daerah sebelum produk dipasarkan. Jagung dapat dikembangkan menjadi pakan ternak atau produk olahan pangan; bawang merah dapat dipasarkan dalam bentuk kemasan modern atau produk turunan; komoditas peternakan dapat

diarahkan pada industri pengolahan daging dan susu. Dengan memperpanjang rantai nilai di dalam wilayah NTB, manfaat ekonomi tidak berhenti di tingkat produksi primer, tetapi menyebar ke sektor industri, distribusi, dan pemasaran. Strategi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga membuka peluang lapangan kerja baru di sektor sekunder dan tersier.

Agenda ketiga adalah penguatan kelembagaan ekonomi petani. Struktur usaha yang kecil dan tersebar menyebabkan posisi tawar petani relatif lemah dalam sistem pasar. Oleh karena itu, penguatan koperasi, kelompok tani modern, atau badan usaha milik petani menjadi prasyarat penting. Kelembagaan yang kuat memungkinkan konsolidasi produksi, efisiensi dalam pengadaan sarana produksi, akses pembiayaan yang lebih luas, serta pemasaran kolektif yang lebih kompetitif. Selain itu, kelembagaan ekonomi yang sehat dapat berfungsi sebagai penghubung antara petani dan industri pengolahan, sehingga tercipta ekosistem agribisnis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Melalui pendekatan yang terintegrasi antara peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan penguatan kelembagaan, sektor pertanian tidak lagi diposisikan sekadar sebagai penyerap tenaga kerja tradisional. Ia dapat berkembang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, dengan produktivitas yang meningkat, nilai tambah yang meluas, dan struktur usaha yang lebih kokoh. Jika transformasi ini dijalankan secara konsisten, pertanian NTB akan beralih dari sektor padat karya berproduktivitas rendah menjadi sektor strategis yang modern, kompetitif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi basis penciptaan lapangan kerja yang lebih bermartabat.

8.2.2. Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan memegang peran strategis dalam proses transformasi ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Walaupun pada 2025 sektor ini baru menyerap sekitar 9 persen tenaga kerja, posisinya sangat menentukan arah perubahan struktur ekonomi daerah. Industri pengolahan merupakan sektor yang mampu mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas, stabilitas pendapatan, dan perluasan lapangan kerja formal.

Di wilayah NTB, industri pengolahan masih didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aktivitas yang berkembang antara lain pengolahan pangan lokal, hasil perikanan, rumput laut, serta kerajinan berbasis sumber daya lokal. Karakter ini menunjukkan bahwa industri pengolahan NTB tumbuh dari basis ekonomi rakyat. Namun demikian, sebagian besar pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan dalam hal skala produksi, standarisasi mutu, teknologi pengolahan, sertifikasi produk, hingga akses terhadap pasar yang lebih luas.

Padahal, NTB memiliki keunggulan komparatif yang kuat dalam ketersediaan bahan baku. Komoditas pertanian seperti jagung dan bawang merah, serta komoditas kelautan seperti ikan dan rumput laut, menyediakan fondasi yang kokoh bagi pengembangan agroindustri dan industri berbasis kelautan. Tantangannya terletak pada bagaimana memastikan bahwa bahan baku tersebut tidak langsung keluar daerah dalam bentuk mentah, melainkan diolah terlebih dahulu sehingga nilai tambahnya dinikmati di dalam wilayah NTB.

Secara struktural, penguatan industri pengolahan sangat penting karena sektor ini berfungsi sebagai jembatan antara sektor primer dan pasar akhir. Hilirisasi jagung menjadi pakan ternak atau produk olahan pangan, pengemasan bawang merah dengan standar modern, serta pengembangan industri olahan hasil laut seperti ikan beku, abon ikan, atau produk berbasis rumput laut merupakan contoh konkret strategi peningkatan nilai tambah. Setiap tahapan pengolahan tambahan menciptakan aktivitas ekonomi baru mulai dari tenaga produksi, pengemasan, distribusi, hingga pemasaran.

Lebih jauh, penguatan industri pengolahan juga memiliki implikasi terhadap struktur ketenagakerjaan. Jika sektor ini tumbuh secara signifikan, maka pergeseran tenaga kerja dari sektor primer berproduktivitas rendah menuju sektor sekunder bernilai tambah tinggi akan berlangsung lebih cepat. Pergeseran tersebut penting untuk meningkatkan rata-rata pendapatan pekerja serta memperluas sektor formal yang memberikan perlindungan sosial dan kepastian kerja.

Selain itu, perkembangan industri pengolahan mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih terintegrasi. Pertanian dan perikanan sebagai penyedia bahan baku akan memiliki pasar yang lebih stabil, sementara sektor jasa seperti logistik, transportasi, pembiayaan, dan perdagangan turut berkembang mengikuti rantai nilai industri. Dengan demikian, efek pengganda (*multiplier effect*) dari sektor ini relatif lebih besar dibanding sektor primer yang berdiri sendiri.

Untuk mewujudkan transformasi tersebut, diperlukan kebijakan yang mendorong investasi pada industri berbasis komoditas lokal, peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM,

penguatan standar mutu dan sertifikasi, serta pembangunan kawasan industri skala menengah yang terhubung dengan sentra produksi. Tanpa intervensi yang terarah, sektor industri pengolahan akan sulit tumbuh melampaui skala mikro.

Dengan demikian, industri pengolahan bukan sekadar pelengkap struktur ekonomi NTB, melainkan sebagai kunci dalam memperbaiki struktur ketenagakerjaan, meningkatkan produktivitas, serta mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih stabil dan bermartabat. Transformasi ekonomi daerah pada akhirnya sangat ditentukan oleh kemampuan mengembangkan sektor ini sebagai penggerak nilai tambah dan modernisasi ekonomi.

8.2.3. Pariwisata dan Jasa

Sektor pariwisata dan jasa merupakan salah satu penggerak utama transformasi ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam satu dekade terakhir. Berbeda dengan sektor pertanian yang berbasis produksi primer, sektor ini tumbuh melalui aktivitas pelayanan, distribusi, dan ekonomi berbasis pengalaman atau *experience-based economy*. Dalam struktur ketenagakerjaan, sektor jasa menjadi penyerap tenaga kerja terbesar kedua setelah pertanian.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami percepatan yang cukup signifikan, terutama sejak pembangunan kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Pengembangan kawasan ini, yang dilengkapi dengan infrastruktur jalan, sirkuit internasional, hotel berbintang, dan fasilitas pendukung lainnya, menjadi katalis pertumbuhan sektor pariwisata NTB secara lebih luas. Selain Mandalika, destinasi

unggulan seperti Gili Trawangan, Sembalun, serta kawasan wisata bahari di Pulau Sumbawa juga mengalami peningkatan aktivitas kunjungan dan investasi.

Secara statistik, jumlah kunjungan wisatawan ke NTB menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan pasca-pandemi. Jika pada masa pandemi kunjungan sempat mengalami kontraksi tajam, maka dalam periode 2022–2024 jumlah wisatawan domestik dan mancanegara kembali meningkat hingga mencapai jutaan kunjungan per tahun. Peningkatan ini berdampak langsung pada pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yang dalam struktur ketenagakerjaan NTB menyerap sekitar 6–7 persen tenaga kerja pada 2024–2025. Jika digabungkan dengan sektor perdagangan dan transportasi yang sangat terkait dengan aktivitas wisata, kontribusi sektor berbasis pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi jauh lebih besar.

Pertumbuhan pariwisata ini mendorong berkembangnya usaha perhotelan, homestay, restoran, kafe, jasa transportasi lokal, agen perjalanan, serta perdagangan cinderamata dan produk ekonomi kreatif. UMKM berbasis budaya lokal, seperti kerajinan tenun, mutiara, kuliner khas daerah, dan produk kriya yang ikut terdorong oleh meningkatnya permintaan wisatawan. Dengan demikian, sektor ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja langsung, tetapi juga memberikan efek pengganda terhadap sektor pertanian, industri pengolahan pangan, dan kerajinan rakyat.

Dalam perspektif ketenagakerjaan, sektor pariwisata memiliki karakter padat karya. Subsektor perhotelan, rumah makan, perdagangan suvenir, dan jasa transportasi menyerap

tenaga kerja dalam jumlah relatif besar dengan tingkat hambatan masuk (*entry barrier*) yang tidak terlalu tinggi. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu sektor yang cepat menyerap tenaga kerja baru, terutama generasi muda yang memasuki pasar kerja serta perempuan yang banyak terlibat pada subsektor perhotelan, kuliner, dan ekonomi kreatif. Struktur ini berkontribusi terhadap meningkatnya partisipasi tenaga kerja perempuan dalam kegiatan ekonomi daerah.

Di sisi lain, sektor jasa kemasyarakatan yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial juga menunjukkan peran yang semakin penting dalam struktur pekerjaan NTB. Dalam beberapa tahun terakhir, proporsi tenaga kerja pada sektor ini berada di kisaran 10–11 persen. Pertumbuhan jumlah sekolah, perguruan tinggi, fasilitas kesehatan, dan lembaga pelatihan mendorong peningkatan kebutuhan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta tenaga administrasi. Sektor ini relatif lebih formal dan memberikan stabilitas pekerjaan yang lebih baik dibanding sebagian subsektor jasa lainnya

Namun demikian, sektor pariwisata dan jasa juga memiliki tantangan struktural. Pertama, ketergantungan pada kondisi eksternal seperti stabilitas ekonomi global, kebijakan perjalanan, dan faktor keamanan membuat sektor ini rentan terhadap guncangan. Kedua, sebagian besar pekerjaan di sektor ini masih berada pada level keterampilan menengah ke bawah dengan produktivitas dan upah yang relatif terbatas. Ketiga, distribusi manfaat ekonomi pariwisata belum merata, karena aktivitasnya masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama di Pulau Lombok.

Oleh karena itu, penguatan sektor pariwisata perlu diarahkan pada model yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan desa wisata berbasis komunitas, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan *hospitality* dan bahasa asing, serta integrasi produk lokal ke dalam rantai pasok pariwisata menjadi strategi penting. Jika sektor pariwisata mampu terhubung dengan pertanian dan industri pengolahan lokal misalnya melalui penggunaan produk pangan lokal oleh hotel dan restoran maka efek penggandanya terhadap penciptaan lapangan kerja akan semakin besar.

Secara struktural, sektor jasa berperan sebagai indikator pergeseran ekonomi NTB menuju struktur yang lebih modern. Pertumbuhan sektor ini menunjukkan adanya diversifikasi ekonomi di luar sektor primer. Namun, agar benar-benar menjadi pilar transformasi, sektor jasa harus ditopang oleh peningkatan kualitas layanan, profesionalisme tenaga kerja, serta integrasi dengan sektor produktif lainnya.

8.2.4. Pertambangan

Sektor pertambangan memiliki posisi yang unik dalam struktur ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di satu sisi, kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sangat signifikan, terutama pada periode produksi dan ekspor mineral yang tinggi. Di sisi lain, kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja relatif kecil dibanding sektor-sektor lain seperti pertanian dan jasa.

Aktivitas pertambangan di NTB terutama terpusat di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat melalui operasional perusahaan tambang besar seperti PT Amman Mineral Nusa Tenggara, yang mengelola tambang tembaga dan emas berskala

internasional. Sektor ini bersifat padat modal dan berbasis teknologi tinggi, sehingga membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur, peralatan, dan sistem pengolahan modern. Konsekuensinya, kebutuhan tenaga kerja langsung relatif terbatas jika dibandingkan dengan besarnya nilai produksi yang dihasilkan.

Secara statistik, sektor pertambangan dan penggalian menyerap sekitar 2 persen tenaga kerja NTB dalam beberapa tahun terakhir. Artinya, dari lebih dari tiga juta penduduk bekerja, hanya sekitar puluhan ribu orang yang bekerja secara langsung di sektor ini. Namun demikian, kontribusi sektor ini terhadap PDRB dapat mencapai dua digit persen, bahkan lebih dari 20 persen pada tahun-tahun dengan ekspor tinggi. Perbandingan ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kontribusi terhadap output ekonomi dan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.

Meski demikian, dampak sektor pertambangan tidak hanya terbatas pada tenaga kerja langsung. Efek tidak langsung (indirect effect) dan efek turunan (*induced effect*) juga perlu diperhitungkan. Aktivitas pertambangan mendorong tumbuhnya sektor pendukung seperti konstruksi, transportasi, jasa logistik, penyediaan makanan dan akomodasi, serta usaha kecil di sekitar wilayah tambang. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga berpotensi memperkuat ekonomi lokal melalui pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan infrastruktur sosial.

Tantangan utama sektor ini adalah bagaimana memastikan bahwa manfaat ekonomi yang besar dapat terdistribusi secara lebih luas dan berkelanjutan. Ketergantungan berlebihan pada

sektor pertambangan berisiko menimbulkan gejala "enklave ekonomi", di mana pertumbuhan tinggi tidak sepenuhnya terintegrasi dengan struktur ekonomi lokal. Selain itu, sifat sumber daya yang tidak terbarukan menuntut strategi diversifikasi ekonomi jangka panjang agar NTB tidak bergantung pada satu sektor saja.

Oleh karena itu, kebijakan ke depan perlu diarahkan pada penguatan keterkaitan (*linkages*) antara pertambangan dan sektor lain. Hilirisasi mineral di dalam negeri, peningkatan kandungan lokal dalam rantai pasok, serta investasi pada pendidikan dan pelatihan teknis menjadi langkah penting untuk memperluas dampak ketenagakerjaan. Dengan pendekatan tersebut, sektor pertambangan tidak hanya menjadi sumber penerimaan daerah, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat struktur ekonomi dan menciptakan peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat NTB

8.3. Tantangan Ketenagakerjaan di NTB

Meskipun indikator makro ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren yang relatif positif yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja dan terkendalinya Tingkat Pengangguran Terbuka, namun tantangan struktural masih cukup besar. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah lapangan kerja, tetapi juga kualitas, produktivitas, pemerataan wilayah, dan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi ekonomi.

Peningkatan jumlah penduduk bekerja dari 2,67 juta orang pada 2022 menjadi 3,09 juta orang pada 2025 menunjukkan bahwa perekonomian NTB masih memiliki daya serap terhadap tambahan angkatan kerja baru. Namun demikian, sebagian besar

tambahan pekerjaan tersebut masih berada pada sektor-sektor berproduktivitas menengah ke bawah dan dalam kategori informal.

Tabel 8.6 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan NTB (Februari 2022–2025)

Tahun	Penduduk Bekerja (Orang)	Pertumbuhan (%)	TPT (%)
2022	2.670.000	–	3,92
2023	2.760.000	3,37	3,73
2024	2.930.000	6,16	3,30
2025	3.090.000	5,46	3,22

Sumber: BPS Provinsi NTB, Sakernas Februari 2022–2025 (diolah).

8.3.1. Pendidikan dan Keterampilan

Kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam transformasi struktur ketenagakerjaan. Di NTB, rata-rata lama sekolah penduduk usia kerja masih berada di kisaran 7–8 tahun, yang berarti sebagian besar tenaga kerja hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP. Komposisi tenaga kerja berpendidikan dasar dan menengah pertama masih cukup dominan, sementara proporsi lulusan pendidikan tinggi relatif lebih kecil dibandingkan daerah-daerah dengan basis industri maju.

Kondisi ini berdampak langsung pada struktur pekerjaan yang tersedia. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah cenderung terserap pada sektor pertanian tradisional, perdagangan informal, atau pekerjaan jasa berupah rendah. Sementara itu, sektor industri pengolahan modern, pariwisata berstandar internasional, dan jasa profesional membutuhkan

tenaga kerja dengan keterampilan teknis dan manajerial yang lebih tinggi.

Selain persoalan tingkat pendidikan formal, terdapat pula tantangan mismatch atau ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan pendidikan menengah kejuruan (SMK) dan kebutuhan industri lokal. Banyak lulusan yang belum memiliki kompetensi praktis yang sesuai dengan standar dunia usaha, baik dalam bidang teknologi, hospitality, pengolahan hasil pertanian, maupun keterampilan digital.

Dalam konteks pariwisata misalnya, kemampuan bahasa asing, standar pelayanan (*hospitality*), serta literasi digital menjadi prasyarat penting. Di sektor industri pengolahan, penguasaan teknologi produksi, manajemen mutu, dan sertifikasi produk menjadi kebutuhan utama. Sementara di sektor pertanian modern, keterampilan manajemen agribisnis dan pemanfaatan teknologi pertanian presisi semakin dibutuhkan.

Oleh karena itu, penguatan pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan daerah menjadi agenda mendesak. Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain:

1. Penyesuaian kurikulum SMK dan balai latihan kerja dengan potensi unggulan daerah (pertanian, perikanan, pariwisata, industri pengolahan).
2. Pengembangan program pelatihan vokasional jangka pendek yang responsif terhadap kebutuhan pasar kerja.
3. Peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam sistem link and match.

4. Penguatan literasi digital dan kewirausahaan bagi generasi muda.

Tanpa peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, transformasi ekonomi NTB akan berjalan lambat dan berisiko memperbesar kesenjangan produktivitas. Sebaliknya, jika investasi pada SDM dilakukan secara konsisten, maka bonus demografi yang dimiliki NTB dapat menjadi kekuatan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

8.3.2. Urbanisasi dan Migrasi

Selain persoalan kualitas pendidikan dan keterampilan, dinamika ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga dipengaruhi oleh arus urbanisasi dan migrasi tenaga kerja. Kedua fenomena ini mencerminkan adanya ketimpangan kesempatan kerja antarwilayah serta keterbatasan daya serap ekonomi lokal di beberapa daerah.

1. Urbanisasi Internal

   Urbanisasi di NTB terutama terjadi dari wilayah perdesaan menuju pusat-pusat pertumbuhan seperti Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Tengah sangatlah tinggi. Perpindahan ini didorong oleh beberapa faktor:

   a) Keterbatasan lapangan kerja non-pertanian di desa.

   b) Harapan memperoleh pekerjaan di sektor jasa dan perdagangan.

   c) Akses pendidikan dan layanan publik yang lebih baik di kota.

Secara ketenagakerjaan, urbanisasi menciptakan dua dampak sekaligus. Di satu sisi, kota memperoleh tambahan tenaga kerja yang memperkuat sektor perdagangan, jasa, dan konstruksi. Di sisi lain, peningkatan jumlah pencari kerja di wilayah perkotaan dapat memperbesar tekanan pada sektor informal jika pertumbuhan ekonomi tidak cukup cepat menyerap tenaga kerja baru.

Selain itu, fenomena ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor informal perkotaan, seperti pedagang kaki lima, jasa transportasi informal, dan usaha mikro skala kecil. Artinya, urbanisasi tidak selalu identik dengan peningkatan kualitas pekerjaan.

2. Migrasi Antarprovinsi dan Luar Negeri

Selain urbanisasi internal, NTB juga memiliki tradisi migrasi tenaga kerja antarprovinsi dan ke luar negeri. Banyak tenaga kerja NTB bekerja di sektor konstruksi, perkebunan, manufaktur, serta jasa domestik di luar daerah. Migrasi ini sering kali menjadi strategi rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan.

Migrasi tenaga kerja memberikan dampak positif berupa remitansi (kiriman uang) yang membantu perekonomian keluarga di daerah asal. Namun, migrasi juga menunjukkan bahwa sebagian angkatan kerja belum sepenuhnya terserap oleh ekonomi lokal. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada migrasi berisiko mengurangi potensi pengembangan ekonomi daerah jika tenaga kerja produktif lebih memilih bekerja di luar NTB.

3. Ketimpangan Wilayah

Urbanisasi dan migrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat memperlihatkan adanya konsentrasi peluang kerja di wilayah tertentu, khususnya di Pulau Lombok yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata. Kota Mataram dan wilayah sekitarnya berkembang sebagai simpul utama aktivitas ekonomi jasa dan perdagangan, sehingga menyerap tenaga kerja dalam jumlah lebih besar dibanding wilayah lainnya.

Sebaliknya, sebagian wilayah di Pulau Sumbawa serta daerah-daerah perdesaan masih menghadapi keterbatasan diversifikasi ekonomi. Struktur lapangan kerja di wilayah tersebut cenderung lebih bertumpu pada sektor primer dengan tingkat produktivitas yang relatif lebih rendah. Keterbatasan akses infrastruktur, konektivitas pasar, investasi industri, dan layanan pendidikan vokasional turut memperlambat transformasi ekonomi di wilayah tersebut.

Ketimpangan ini berdampak pada perbedaan tingkat pendapatan antarwilayah. Daerah yang memiliki akses terhadap sektor jasa modern dan industri pengolahan cenderung menunjukkan dinamika ekonomi yang lebih cepat, sementara wilayah yang masih bergantung pada produksi primer menghadapi fluktuasi pendapatan akibat faktor harga komoditas dan kondisi iklim. Dalam jangka panjang, ketimpangan kesempatan kerja ini berpotensi memperbesar kesenjangan sosial dan mendorong arus migrasi yang semakin tinggi menuju pusat-pusat pertumbuhan.

Selain itu, konsentrasi ekonomi di satu wilayah juga dapat menimbulkan tekanan sosial dan infrastruktur,

seperti meningkatnya kepadatan penduduk, pertumbuhan kawasan permukiman informal, serta kompetisi yang semakin ketat di sektor informal perkotaan. Dengan kata lain, ketimpangan wilayah tidak hanya menjadi persoalan daerah yang tertinggal, tetapi juga menimbulkan beban tambahan bagi daerah yang menjadi tujuan urbanisasi.

Oleh karena itu, perlu adanya strategi pembangunan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pengembangan kawasan industri skala menengah di luar Lombok, penguatan hilirisasi pertanian dan perikanan di Pulau Sumbawa, serta peningkatan konektivitas antarwilayah menjadi langkah penting untuk memperluas kesempatan kerja secara lebih merata. Selain itu, investasi pada pendidikan vokasional dan pelatihan berbasis potensi lokal dapat memperkuat daya saing tenaga kerja di daerah yang selama ini relatif tertinggal.

Dengan pendekatan seimbang, ketimpangan wilayah dapat dikurangi secara bertahap. Tujuannya bukan menyeragamkan struktur ekonomi setiap daerah, melainkan memastikan bahwa setiap wilayah memiliki basis ekonomi produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja layak bagi penduduknya. Pemerataan kesempatan kerja inilah yang akan memperkuat kohesi sosial sekaligus menopang pembangunan NTB yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Implikasi Kebijakan

Ketimpangan wilayah, urbanisasi, dan migrasi tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat menuntut respons

kebijakan yang tidak bersifat parsial, melainkan terintegrasi dan berjangka panjang. Tantangan ketenagakerjaan tidak cukup dijawab dengan penciptaan lapangan kerja secara agregat, tetapi memerlukan pendekatan spasial (kewilayahan), sektoral, dan kualitas sumber daya manusia secara bersamaan.

Pertama, kebijakan perlu diarahkan pada penguatan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar wilayah yang telah maju. Pengembangan kawasan industri berbasis komoditas lokal di Pulau Sumbawa, penguatan sentra perikanan dan kelautan, serta pembangunan klaster agribisnis di wilayah perdesaan menjadi strategi penting untuk memperluas distribusi kesempatan kerja. Pendekatan ini bertujuan mengurangi tekanan urbanisasi sekaligus menciptakan ekonomi lokal yang lebih mandiri.

Kedua, integrasi infrastruktur dan konektivitas antarwilayah harus menjadi prioritas. Akses jalan, pelabuhan, jaringan logistik, serta konektivitas digital berperan besar dalam membuka isolasi ekonomi daerah. Tanpa konektivitas yang memadai, potensi produksi lokal sulit terhubung dengan pasar yang lebih luas. Infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi instrumen pemerataan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Ketiga, kebijakan pendidikan dan pelatihan vokasional perlu disesuaikan dengan potensi unggulan masing-masing wilayah. SMK dan balai latihan kerja sebaiknya tidak menggunakan pendekatan seragam, melainkan berbasis kebutuhan daerah, misalnya pelatihan agroindustri di sentra pertanian, teknologi kelautan di

wilayah pesisir, serta *hospitality* di daerah pariwisata. Pendekatan ini akan memperkuat *link and match* antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja lokal.

Keempat, pengelolaan migrasi tenaga kerja perlu dilihat sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar fenomena sosial. Pemerintah daerah dapat memperkuat pelatihan keterampilan bagi calon pekerja migran agar memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan terlindungi secara hukum. Di sisi lain, remitansi dari pekerja migran perlu diarahkan pada investasi produktif di daerah asal, seperti pengembangan usaha mikro atau koperasi lokal.

Kelima, penguatan sektor formal harus menjadi agenda prioritas. Banyak tenaga kerja NTB masih berada pada sektor informal dengan perlindungan sosial yang terbatas. Insentif bagi pelaku usaha untuk melakukan formalisasi usaha, penyederhanaan perizinan, serta perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pekerjaan.

Dengan demikian, implikasi kebijakan dari dinamika urbanisasi dan ketimpangan wilayah akan menuntut pendekatan pembangunan yang inklusif dan terintegrasi. Pemerataan kesempatan kerja antarwilayah, penguatan kapasitas SDM, serta diversifikasi ekonomi menjadi fondasi untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi NTB tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga keadilan dan keberlanjutan.

8.4. Proyeksi Kebutuhan Lapangan Kerja

Pertumbuhan angkatan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terus meningkat hingga mencapai sekitar 3,19 juta

orang pada Februari 2025 menjadi dasar penting dalam menyusun Proyeksi Kebutuhan Lapangan Kerja Baru 2026–2030. Dengan laju pertumbuhan penduduk usia kerja yang berkisar antara 1,2–1,5 persen per tahun, tambahan angkatan kerja dalam lima tahun ke depan hampir pasti akan terus bertambah secara signifikan.

Jika digunakan asumsi moderat pertumbuhan angkatan kerja sebesar 1,3 persen per tahun, maka NTB diperkirakan akan menerima tambahan sekitar 40–45 ribu angkatan kerja baru setiap tahun. Dalam periode 2026–2030, akumulasi tambahan angkatan kerja dapat mencapai lebih dari 210 ribu orang. Artinya, minimal sebanyak itu pula lapangan kerja baru harus tersedia agar tingkat pengangguran tetap stabil dan tidak meningkat.

Tabel 8.7 Proyeksi Kebutuhan Lapangan Kerja Baru di NTB (2026–2030)

Tahun	Proyeksi Angkatan Kerja (Orang)	Tambahan Tahunan (Orang)	Kebutuhan Lapangan Kerja Baru (Minimal)
2026	3.230.000	40.000	40.000
2027	3.272.000	42.000	42.000
2028	3.315.000	43.000	43.000
2029	3.358.000	43.000	43.000
2030	3.402.000	44.000	44.000

Catatan: Proyeksi menggunakan asumsi pertumbuhan rata-rata ±1,3% per tahun (simulasi berbasis tren 2022–2025).

Namun, proyeksi kebutuhan ini pada dasarnya merupakan skenario dasar (*baseline scenario*). Dalam praktiknya, kebutuhan

riil lapangan kerja akan lebih besar karena mempertimbangkan beberapa faktor tambahan, yaitu:

1. Upaya menurunkan tingkat setengah pengangguran yang masih cukup signifikan.
2. Transformasi pekerja dari sektor informal ke sektor formal.
3. Peningkatan kualitas pekerjaan agar lebih produktif dan berupah layak.

Jika NTB tidak hanya menargetkan stabilitas TPT, tetapi juga peningkatan kualitas ketenagakerjaan, maka kebutuhan penciptaan kerja bisa melampaui 250 ribu lapangan kerja baru dalam lima tahun.

Dengan demikian, periode 2026–2030 dapat dikategorikan sebagai fase krusial dalam pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam rentang waktu tersebut, perekonomian daerah dituntut untuk mampu menciptakan sedikitnya 40 ribu pekerjaan produktif setiap tahun hanya untuk mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja baru. Angka ini bukan sekadar target kuantitatif, melainkan ambang batas minimum untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Namun, tantangan yang sesungguhnya bukan hanya terletak pada jumlah pekerjaan yang tercipta, melainkan pada kualitas dan struktur sektor penyerapannya. Jika penciptaan lapangan kerja terkonsentrasi pada sektor-sektor yang berproduktivitas rendah, seperti perdagangan informal skala kecil atau pekerjaan musiman, maka tekanan struktural tetap akan terjadi. Produktivitas tenaga kerja tidak meningkat secara signifikan, pendapatan riil stagnan, dan ketimpangan wilayah

berpotensi melebar meskipun angka pengangguran secara statistik terkendali.

Oleh karena itu, proyeksi kebutuhan lapangan kerja baru harus dibarengi dengan strategi sektoral yang terarah dan terintegrasi.

Pertama, penguatan hilirisasi pertanian menjadi kunci untuk mentransformasikan sektor primer menjadi basis nilai tambah. Peningkatan produksi tanpa pengolahan hanya akan memperbesar volume, bukan kesejahteraan. Hilirisasi akan memperpanjang rantai nilai, menciptakan lapangan kerja baru di sektor industri dan logistik, serta meningkatkan stabilitas pendapatan petani.

Kedua, percepatan pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal harus menjadi prioritas. Industri skala menengah yang terhubung dengan sentra produksi pertanian dan perikanan dapat menjadi penyerap tenaga kerja formal dengan produktivitas lebih tinggi. Sektor ini berpotensi meningkatkan upah rata-rata dan memperkuat basis ekonomi daerah.

Ketiga, ekspansi jasa produktif, terutama pariwisata berkualitas, jasa pendidikan, kesehatan, dan layanan berbasis digital, perlu diarahkan pada peningkatan keterampilan tenaga kerja. Jasa yang berorientasi kualitas dan inovasi akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap PDRB sekaligus memperluas peluang kerja profesional.

Keempat, pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi antarwilayah menjadi syarat penting untuk mengurangi tekanan urbanisasi dan migrasi. Pengembangan klaster ekonomi di Pulau

Sumbawa, penguatan kawasan agroindustri perdesaan, serta pembangunan infrastruktur konektivitas akan memperluas distribusi kesempatan kerja secara lebih adil.

Dengan pendekatan tersebut, periode 2026–2030 bukan sekadar fase penyesuaian terhadap pertumbuhan angkatan kerja, melainkan momentum transformasi struktural. Jika strategi sektoral dijalankan secara konsisten, tambahan 40 ribu pekerjaan per tahun tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi menjadi langkah nyata menuju ekonomi NTB yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

8.5. Strategi Terstruktur Penciptaan Kerja

Strategi terstruktur pada dasarnya memerlukan koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator kebijakan, penyedia infrastruktur, dan penggerak kolaborasi antara dunia usaha, lembaga pendidikan, koperasi, serta masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa penciptaan kerja bukan sekadar program ketenagakerjaan, melainkan hasil dari transformasi ekonomi secara menyeluruh. Setiap kebijakan produksi, investasi, pendidikan, dan infrastruktur harus diukur berdasarkan kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja produktif.

Artinya Provinsi Nusa Tenggara Barat memerlukan strategi penciptaan kerja yang terstruktur, terintegrasi, dan berorientasi jangka menengah–panjang, yang setidaknya bertumpu pada lima pilar utama, yakni :

1. Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Komoditas Lokal

   Hilirisasi dan industrialisasi berbasis komoditas lokal merupakan strategi kunci dalam penciptaan lapangan kerja

produktif di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengingat struktur ekonomi NTB yang masih didominasi sektor primer, nilai tambah terbesar selama ini justru dinikmati di luar daerah karena sebagian besar komoditas dijual dalam bentuk mentah. Transformasi menuju pengolahan di dalam wilayah menjadi prasyarat untuk memperkuat struktur ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja formal.

Saat ini NTB memiliki keunggulan komparatif yang jelas pada komoditas jagung, bawang merah, hortikultura, sapi potong, hasil perikanan, dan rumput laut. Jika komoditas-komoditas tersebut dikembangkan melalui hilirisasi, maka rantai nilai ekonomi akan semakin panjang dan menyerap tenaga kerja pada berbagai tahapan dari produksi, pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga pemasaran.

Sebagai contoh, jagung yang selama ini dijual sebagai bahan baku dapat diolah menjadi pakan ternak, tepung jagung, atau produk olahan pangan. Bawang merah dapat diproses menjadi produk kemasan siap jual dengan standar modern. Komoditas sapi potong dapat diarahkan pada pengembangan industri pengolahan daging, sementara hasil perikanan dan rumput laut dapat dikembangkan menjadi produk olahan beku, makanan kemasan, atau bahan baku industri kosmetik dan farmasi. Setiap tahapan pengolahan tambahan menciptakan kebutuhan tenaga kerja baru dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan pekerjaan primer.

Dari sisi ketenagakerjaan, hilirisasi memiliki beberapa dampak strategis:

a) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja formal di sektor industri pengolahan.

b) Mendorong peningkatan upah rata-rata, karena sektor sekunder umumnya memiliki produktivitas lebih tinggi.

c) Mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas mentah, sehingga pendapatan petani dan nelayan menjadi lebih stabil.

d) Menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap sektor logistik, transportasi, jasa keuangan, dan perdagangan.

Agar hilirisasi berjalan efektif, diperlukan dukungan kebijakan yang komprehensif. Pertama, pembangunan kawasan industri skala menengah yang terhubung langsung dengan sentra produksi bahan baku. Kedua, insentif investasi bagi industri berbasis komoditas lokal. Ketiga, penyediaan pembiayaan yang terjangkau bagi UMKM pengolahan. Keempat, penguatan standar mutu dan sertifikasi agar produk mampu bersaing di pasar nasional dan internasional.

Selain itu, sinergi antara lembaga penelitian, dunia usaha, dan pemerintah daerah menjadi faktor penentu. Inovasi teknologi pengolahan, diversifikasi produk, dan efisiensi rantai pasok akan meningkatkan daya saing industri lokal. Tanpa inovasi, hilirisasi hanya akan menghasilkan pengolahan sederhana dengan margin terbatas.

Dalam perspektif jangka menengah, hilirisasi bukan sekadar strategi ekonomi, tetapi strategi ketenagakerjaan. Jika NTB mampu meningkatkan kontribusi industri pengolahan secara signifikan, maka kebutuhan penciptaan minimal 40 ribu pekerjaan per tahun dapat dicapai melalui sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, industrialisasi berbasis komoditas lokal menjadi fondasi utama dalam memperbaiki struktur ekonomi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Penguatan UMKM dan Ekonomi Lokal

Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan strategi fundamental dalam penciptaan lapangan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Struktur ketenagakerjaan NTB menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja berada pada usaha berskala mikro dan kecil, baik di sektor perdagangan, jasa, pertanian olahan, maupun ekonomi kreatif. Oleh karena itu, memperkuat UMKM berarti memperkuat basis utama penyerap tenaga kerja daerah.

UMKM di NTB memiliki karakter berbasis komunitas dan keluarga. Banyak usaha tumbuh dari kebutuhan lokal dan potensi budaya setempat, seperti kuliner khas, kerajinan tenun, mutiara, produk olahan pangan, serta jasa perdagangan skala kecil. Dalam konteks ini, ekonomi lokal tidak hanya menjadi ruang aktivitas ekonomi, tetapi juga ruang sosial yang menopang stabilitas masyarakat.

Namun demikian, sebagian besar UMKM masih menghadapi sejumlah kendala struktural, antara lain:

a) Keterbatasan akses pembiayaan formal.

b) Skala usaha kecil dengan kapasitas produksi terbatas.

c) Manajemen usaha yang belum profesional.

d) Rendahnya literasi digital dan pemasaran daring.

e) Minimnya sertifikasi dan standarisasi produk.

Jika hambatan-hambatan tersebut tidak diatasi, UMKM akan sulit berkembang menjadi penyerap tenaga kerja yang lebih besar dan produktif.

Maka penguatan UMKM harus diarahkan pada tiga dimensi utama:

Pertama, akses pembiayaan dan kelembagaan. Kredit usaha berbunga rendah, penguatan koperasi, dan skema pembiayaan berbasis komunitas menjadi penting untuk memperluas kapasitas produksi. Perbankan daerah dan lembaga keuangan mikro perlu dilibatkan secara aktif dalam mendukung ekspansi usaha kecil.

Kedua, peningkatan kapasitas dan profesionalisasi usaha. Pelatihan manajemen, pencatatan keuangan, pengemasan produk, serta sertifikasi halal dan standar mutu akan meningkatkan daya saing UMKM. Pendampingan berkelanjutan, bukan sekadar pelatihan sesaat, menjadi kunci keberhasilan.

Ketiga, digitalisasi dan integrasi pasar. Pemanfaatan platform digital, pemasaran daring, serta integrasi ke rantai pasok sektor pariwisata dan industri pengolahan akan memperluas jangkauan pasar. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan volume penjualan, tetapi juga membuka peluang kerja baru dalam bidang distribusi, logistik, dan layanan digital.

Secara ketenagakerjaan, UMKM memiliki keunggulan karena fleksibel dan cepat menyerap tenaga kerja. Jika setiap UMKM yang berkembang mampu menambah dua hingga tiga pekerja tambahan, maka secara agregat kontribusinya terhadap target penciptaan 40 ribu pekerjaan per tahun akan sangat signifikan. Bahkan, transformasi 5–10 persen UMKM menuju skala kecil dan menengah yang lebih mapan dapat menciptakan ribuan lapangan kerja baru setiap tahun.

Lebih jauh, penguatan ekonomi lokal juga berperan dalam mengurangi ketimpangan wilayah. UMKM berbasis desa dan kecamatan memungkinkan penciptaan kerja tanpa harus bergantung pada pusat kota. Dengan demikian, strategi ini sekaligus menahan laju urbanisasi berlebihan dan memperkuat ekonomi perdesaan.

Dalam jangka panjang, UMKM yang kuat akan menjadi fondasi ekonomi NTB yang tangguh dan inklusif. Penciptaan lapangan kerja tidak hanya bergantung pada investasi besar, tetapi juga pada dinamika ekonomi rakyat yang tumbuh dari bawah. Oleh karena itu, penguatan UMKM dan ekonomi lokal bukan sekadar kebijakan pendukung, melainkan pilar utama dalam strategi

terstruktur penciptaan kerja yang berkelanjutan dan bermartabat.

3. Ekspansi Sektor Jasa Produktif

Ekspansi sektor jasa produktif merupakan salah satu strategi penting dalam menjawab kebutuhan penciptaan lapangan kerja baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jika sektor pertanian menjadi fondasi tradisional dan industri pengolahan menjadi motor nilai tambah, maka sektor jasa produktif berperan sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi modern yang lebih dinamis dan adaptif.

Sektor jasa produktif tidak dimaknai sebagai jasa konsumtif semata, tetapi jasa yang memiliki produktivitas tinggi, berbasis keterampilan, dan berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi. Sektor ini mencakup pariwisata berkualitas, pendidikan dan pelatihan, layanan kesehatan, jasa profesional, ekonomi kreatif, serta layanan berbasis digital.

Pertama, penguatan pariwisata berkualitas harus diarahkan pada peningkatan standar layanan dan diferensiasi produk. Artinya pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan jumlah kunjungan, akan tetapi perlu adanya meningkatkan atas nilai ekonomi per wisatawan. Pengembangan desa wisata, wisata budaya, wisata bahari, serta integrasi produk lokal ke dalam rantai pasok hotel dan restoran akan memperluas dampak ekonomi terhadap masyarakat. Sektor ini memiliki karakter padat karya, sehingga mampu menyerap tenaga kerja muda dalam jumlah besar, terutama jika didukung pelatihan *hospitality*, bahasa asing, dan manajemen layanan.

Kedua, sektor pendidikan dan pelatihan vokasional memiliki potensi besar sebagai penyerap tenaga kerja profesional sekaligus penggerak kualitas SDM. Pertumbuhan lembaga pendidikan, kursus keterampilan, serta balai latihan kerja dapat menciptakan lapangan kerja bagi tenaga pendidik dan instruktur. Lebih jauh, sektor ini berperan strategis dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan jasa modern.

Ketiga, layanan kesehatan dan sosial juga akan menunjukkan tren peningkatan kebutuhan tenaga kerja seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas hidup. Pengembangan fasilitas kesehatan di luar pusat kota akan memperluas kesempatan kerja formal bagi tenaga medis dan tenaga pendukung lainnya, sekaligus mengurangi ketimpangan wilayah.

Keempat, ekonomi kreatif dan jasa berbasis digital menjadi peluang baru yang semakin relevan. Generasi muda NTB memiliki potensi besar dalam bidang desain grafis, produksi konten digital, pemasaran daring, dan pengembangan aplikasi. Dengan dukungan infrastruktur internet dan pelatihan keterampilan digital, sektor ini dapat tumbuh tanpa memerlukan investasi fisik besar, namun memiliki potensi nilai tambah yang tinggi.

Ekspansi sektor jasa produktif memiliki beberapa implikasi strategis terhadap ketenagakerjaan. Pertama, sektor ini relatif cepat menyerap tenaga kerja baru, terutama lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi. Kedua, produktivitas dan upah cenderung lebih tinggi dibanding

sektor informal tradisional. Ketiga, jasa modern memiliki potensi ekspor jasa dan integrasi dengan ekonomi nasional maupun global.

Namun, ekspansi ini harus disertai peningkatan kualitas SDM dan standarisasi layanan. Tanpa peningkatan kompetensi, pertumbuhan sektor jasa berisiko stagnan pada level keterampilan rendah dan upah minimum. Oleh karena itu, investasi pada pelatihan, sertifikasi profesi, serta kemitraan dengan dunia usaha menjadi faktor penentu keberhasilan.

Artinya bahwa sektor jasa produktif dapat menjadi penyumbang signifikan apabila dikembangkan secara terarah. Ekspansi jasa bukan sekadar diversifikasi ekonomi, tetapi bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan layanan bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, sektor ini berpotensi menjadi pilar penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi NTB yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

4. Pemerataan Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat penting dalam strategi penciptaan lapangan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selama ini, aktivitas ekonomi modern, khususnya jasa, perdagangan, dan pariwisata masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama di Pulau Lombok. Konsentrasi ini mendorong urbanisasi yang tinggi, sekaligus memperlebar kesenjangan kesempatan kerja antara pusat dan pinggiran.

Jika penciptaan kerja hanya bertumpu pada satu atau dua kawasan utama, maka beban infrastruktur, kompetisi tenaga kerja, serta tekanan sosial di wilayah tersebut akan meningkat. Sementara itu, wilayah lain berisiko tertinggal dan kehilangan potensi demografisnya akibat migrasi keluar daerah. Oleh karena itu, strategi pemerataan bukan sekadar kebijakan pembangunan wilayah, tetapi bagian integral dari kebijakan ketenagakerjaan.

Pemerataan pusat pertumbuhan dapat dilakukan melalui pengembangan klaster ekonomi berbasis potensi lokal di berbagai kabupaten/kota. Misalnya, kawasan agroindustri di sentra produksi jagung dan bawang merah, sentra pengolahan hasil laut di wilayah pesisir, serta penguatan industri peternakan terpadu di Pulau Sumbawa. Dengan membangun rantai nilai di dekat sumber bahan baku, lapangan kerja tercipta tanpa harus memindahkan tenaga kerja ke pusat kota.

Selain itu, pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dapat menjadi pusat pertumbuhan baru di tingkat kecamatan dan desa. Model ini tidak hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga menjaga keberlanjutan sosial dan budaya setempat. Pemerataan semacam ini memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berbasis komunitas.

Dilain pihak, infrastruktur tetap menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Konektivitas jalan, pelabuhan, akses listrik, air bersih, serta jaringan internet yang memadai akan menentukan kemampuan suatu wilayah untuk menarik investasi dan mengembangkan usaha.

Tanpa infrastruktur yang merata, potensi ekonomi lokal sulit berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru.

Di samping itu, kebijakan insentif investasi perlu diarahkan ke wilayah yang selama ini kurang berkembang. Insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan dukungan teknis dapat mendorong pelaku usaha untuk membuka unit produksi atau layanan di luar pusat kota utama. Dengan demikian, distribusi lapangan kerja menjadi lebih merata dan tekanan urbanisasi dapat dikurangi.

Pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi juga berkontribusi terhadap stabilitas sosial. Ketika masyarakat memiliki kesempatan kerja yang layak di wilayahnya sendiri, migrasi yang bersifat terpaksa dapat ditekan. Hal ini memperkuat kohesi sosial, menjaga struktur keluarga, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Artinya tanpa adanya distribusi ekonomi yang lebih seimbang, target penciptaan kerja akan sulit tercapai secara merata dan berkeadilan. Oleh karena itu, pembangunan NTB ke depan perlu memastikan bahwa setiap wilayah memiliki basis ekonomi produktif yang mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan, sehingga pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi, tetapi menyebar dan dirasakan oleh seluruh masyarakat

5. Transformasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasional

Transformasi pendidikan dan pelatihan vokasional merupakan fondasi jangka panjang dalam strategi penciptaan lapangan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat

menuntut kesiapan sumber daya manusia yang tidak hanya cukup secara jumlah, tetapi juga relevan secara kompetensi. Tanpa reformasi sistem pendidikan dan pelatihan, transformasi sektoral akan berjalan lambat karena keterbatasan tenaga kerja terampil.

Selama ini, tantangan utama terletak pada kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia usaha (*mismatch*). Banyak lulusan pendidikan menengah dan bahkan perguruan tinggi belum memiliki keterampilan praktis yang sesuai dengan standar industri. Oleh karena itu, transformasi vokasional harus diarahkan pada pendekatan berbasis kebutuhan daerah dan dinamika pasar kerja.

Pertama, penyesuaian kurikulum SMK dan lembaga pelatihan kerja perlu dilakukan secara kontekstual. Daerah dengan basis pertanian kuat harus memperkuat kompetensi agroindustri, manajemen agribisnis, dan teknologi pascapanen. Sementara itu, wilayah pesisir perlu mengembangkan keahlian pengolahan hasil laut dan teknologi perikanan. Sementara, kawasan pariwisata harus menekankan *hospitality*, bahasa asing, manajemen destinasi, dan layanan berbasis digital. Dengan demikian, sistem pendidikan tidak bersifat seragam, melainkan adaptif terhadap potensi ekonomi lokal.

Kedua, penguatan model *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia usaha menjadi keharusan. Kemitraan dengan industri melalui program magang, pelatihan berbasis proyek, serta sertifikasi profesi akan meningkatkan kesiapan kerja lulusan. Dunia usaha perlu

dilibatkan dalam perancangan kurikulum agar kompetensi yang diajarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Ketiga, pengembangan pelatihan vokasional jangka pendek dan fleksibel sangat penting untuk menjangkau tenaga kerja yang sudah berada di pasar kerja, termasuk pekerja informal. Program peningkatan keterampilan (*upskilling*) dan alih keterampilan (*reskilling*) dapat membantu pekerja beralih dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor bernilai tambah lebih tinggi. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks percepatan hilirisasi dan industrialisasi.

Keempat, literasi digital dan kewirausahaan harus menjadi bagian integral dari sistem vokasional. Transformasi ekonomi modern menuntut kemampuan adaptasi terhadap teknologi, pemasaran daring, manajemen keuangan digital, serta pemanfaatan platform ekonomi berbasis internet.

Kelima, pemerataan akses pendidikan vokasional antarwilayah juga menjadi perhatian penting. Pusat pelatihan dan balai latihan kerja tidak boleh terpusat hanya di kota utama, tetapi harus menjangkau kabupaten dan kecamatan agar kesempatan peningkatan keterampilan lebih merata.

Artinya bahwa transformasi pendidikan dan pelatihan vokasional bukan sekadar pendukung, melainkan penentu keberhasilan. Tanpa tenaga kerja terampil, peluang investasi dan ekspansi sektor produktif tidak akan optimal. Sebaliknya, jika SDM NTB mampu

memenuhi standar kompetensi industri dan jasa modern, maka pertumbuhan lapangan kerja tidak hanya tercapai secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas dan berdaya saing.

Dengan demikian, investasi pada pendidikan vokasional adalah investasi pada masa depan ekonomi NTB. Transformasi ini akan memastikan bahwa bonus demografi yang dimiliki daerah benar-benar menjadi kekuatan produktif yang mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

BAB IX MENINGKATKAN PRODUKSI PERTANIAN

Pertanian merupakan fondasi utama kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Sektor pertanian memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi ini, yaitu sekitar 22,23 % dari total PDRB NTB, atau setara dengan sekitar Rp 37 triliun pada data tahun 2024. Kontribusi tersebut menunjukkan peran pertanian sebagai salah satu penggerak utama roda ekonomi daerah di samping sektor lain seperti pertambangan dan perdagangan (https://suarantb.com).

Sementara komoditas pertanian utama di NTB adalah padi dan jagung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, luas panen padi pada tahun 2024 mencapai sekitar 281,72 ribu hektare, dengan produksi padi mencapai sekitar 1,45 juta ton gabah kering giling (GKG). Produksi beras setara konsumsi masyarakat pada tahun tersebut diperkirakan sekitar 827,79 ribu ton, meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk jagung, data BPS NTB menunjukkan bahwa luas panen jagung pipilan pada 2024 mencapai sekitar 173,76 ribu hektare, dan produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 % mencapai sekitar 1,21 juta ton. Jagung merupakan komoditas pangan penting lainnya yang menyokong ketahanan pangan dan kebutuhan pakan ternak di daerah.

Selain kontribusi terhadap PDRB dan produksi tanaman pangan utama, sektor pertanian juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di NTB, dengan sekitar 1 juta orang bekerja di sektor ini, menunjukkan bahwa hampir separuh dari total angkatan kerja provinsi menggantungkan hidupnya pada aktivitas pertanian dan aktivitas terkaitnya. Adapun data Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) di NTB mencapai sekitar 756.168 unit, dan jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) sebesar 768.765 unit, yang mencerminkan besarnya proporsi warga yang bergantung pada sektor pertanian secara langsung sebagai sumber penghidupan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan dengan pencacahan sebelumnya, menunjukkan bahwa pertanian tetap menjadi basis ekonomi pedesaan yang dominan di NTB.

Dari total petani tersebut, juga tercatat sekitar 225.483 orang adalah petani milenial (usia 19–39 tahun) atau sekitar 30,37% dari total jumlah petani di provinsi ini, yang menunjukkan potensi tenaga kerja produktif yang dapat menjadi penggerak inovasi dan perubahan dalam sektor pertanian. Sehingga dari data ini menggambarkan bahwa mayoritas penduduk NTB masih hidup dari sektor pertanian, baik sebagai pengelola usaha pertanian maupun sebagai pelaku produksi pangan pokok. Karena itu, upaya peningkatan produksi pertanian tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis budidaya, tetapi juga menyangkut keberlanjutan kehidupan sosial, stabilitas ekonomi daerah, dan ketahanan pangan untuk masa kini maupun masa depan.

9.1 Pertanian dan Tantangan Perubahan Iklim

Kontribusi sektor pertanian di Nusa Tenggara Barat terhadap kehidupan sosial, ekonomi daerah, dan ketahanan pangan sangat signifikan. Sektor ini setidaknya menyumbang sekitar 22 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB, atau setara dengan lebih dari Rp37 triliun per tahun, sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi ratusan ribu rumah tangga petani di wilayah pedesaan. Namun, di balik peran strategis tersebut, sektor pertanian NTB kini berada pada posisi yang semakin rentan akibat perubahan iklim yang berlangsung cepat dan tidak menentu. Sebagai wilayah yang sebagian besar sistem pertaniannya masih bergantung pada pola musim alami, perubahan iklim telah mengganggu siklus tanam, menurunkan kepastian produksi, serta meningkatkan risiko gagal panen. Ketidakpastian ini tidak lagi bersifat insidental, melainkan telah menjadi tantangan struktural yang sulit diatasi melalui pendekatan pertanian konvensional semata.

Perubahan pola curah hujan merupakan salah satu dampak paling nyata. Musim hujan yang semakin pendek namun berintensitas tinggi, serta musim kemarau yang cenderung lebih panjang dan kering, menyebabkan ketidaksesuaian antara kalender tanam dan ketersediaan air. Di berbagai wilayah NTB, kondisi ini memicu keterlambatan tanam, penurunan produktivitas padi dan jagung, serta meningkatnya ketergantungan pada sumber air yang terbatas. Kekeringan berkepanjangan berdampak langsung pada lahan tadah hujan, sementara hujan ekstrem dalam waktu singkat meningkatkan risiko banjir dan kerusakan tanaman.

Selain faktor curah hujan, kenaikan suhu juga berpengaruh signifikan terhadap produktivitas pertanian. Suhu yang lebih tinggi mempercepat penguapan air tanah, meningkatkan stres tanaman, serta memengaruhi siklus hidup hama dan penyakit. Serangan organisme pengganggu tanaman cenderung meningkat dan sulit diprediksi, sehingga memperbesar biaya produksi dan menurunkan hasil panen. Dalam jangka panjang, kondisi ini mengancam stabilitas produksi pangan dan pendapatan petani.

Dampak perubahan iklim terhadap pertanian tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga meluas ke ranah sosial dan ekonomi. Perubahan pola curah hujan, suhu ekstrem, serta kejadian cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan telah terbukti menurunkan produktivitas pangan dan meningkatkan risiko gagal panen di berbagai wilayah agraris. Penelitian menunjukkan bahwa fenomena variabilitas iklim, *seperti El Niño Southern Oscillation* (ENSO), berkorelasi dengan penurunan hasil padi dan jagung melalui gangguan ketersediaan air selama musim tanam, yang akhirnya mengurangi hasil dan luas panen tanaman pangan utama jika tidak diantisipasi secara ilmiah dan teknologi.

Dalam skala nasional, sektor pertanian Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim karena ketergantungan kuat pada pola iklim tropis yang stabil. Ketidakpastian curah hujan dan suhu yang lebih tinggi meningkatkan stres tanaman, memperbesar peluang serangan hama dan penyakit, serta mengurangi hasil panen, yang pada gilirannya berdampak pada pendapatan petani, ketersediaan pangan, serta harga di pasar domestik.

Data Pemerintah Provinsi NTB menunjukkan bahwa luas pertanaman yang terkena dampak iklim (termasuk luasan

tanaman yang puso/diprediksi gagal panen) mencapai ratusan hektare setiap tahun dalam tiga tahun terakhir (2022–2024), yang menjadi indikator bahwa ketidakpastian iklim telah menyebabkan kerugian produksi fisik pada tanaman pangan tertentu. Konsekuensinya terjadinya gagal panen yang pada akhirnya petani menghadapi penurunan pendapatan secara signifikan, meningkatnya kebutuhan pendanaan (utang), serta kerentanan ekonomi keluarga yang lebih tinggi karena hilangnya hasil panen yang seharusnya dapat dijual atau disimpan sebagai cadangan pangan. Dampak ini juga berpotensi mendorong migrasi sementara atau pergeseran mata pencaharian. Pada skala yang lebih luas, fluktuasi produksi pangan dapat mengganggu stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah, karena pasokan menjadi tidak menentu dan respons stok lokal menjadi lemah terhadap lonjakan permintaan. Kondisi ini dapat memperlemah keseluruhan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat apabila tidak ditangani secara sistemik melalui kebijakan adaptif dan dukungan teknologi.

Tabel 9.1. Tren Gagal Panen Akibat Faktor Iklim di Nusa Tenggara Barat Periode 2020–2025

Tahun	Faktor Iklim Dominan	Luas Terdampak (ha)*	Luas Puso/Gagal Panen (ha)*	Komoditas Utama	Keterangan Utama
2020	Kekeringan (El Niño Lemah)	±4.200	±680	Padi, Jagung	Musim kemarau panjang, keterlambatan tanam
2021	Hujan Ekstrem &	±5.100	±920	Padi	Curah hujan

Tahun	Faktor Iklim Dominan	Luas Terdampak (ha)*	Luas Puso/Gagal Panen (ha)*	Komoditas Utama	Keterangan Utama
	Banjir				tinggi merusak lahan sawah
2022	Variabilitas Hujan Tinggi	±3.800	±610	Jagung	Pola hujan tidak menentu
2023	El Niño Kuat	±6.400	±1.250	Padi, Jagung	Kekeringan luas, krisis air irigasi
2024	Kemarau Panjang + Suhu Tinggi	±5.900	±1.100	Padi	Stres tanaman & gagal pembungaan
2025**	Transisi Iklim Tidak Stabil	±4.500	±850	Padi, Hortikultura	Risiko masih tinggi

* estimasi agregat provinsi dari laporan DPI dan rekap dinas
** 2025 berbasis data sementara & proyeksi awal

Dengan jumlah petani yang besar serta kontribusi signifikan sektor pertanian terhadap PDRB NTB, risiko ini memiliki implikasi serius bagi pembangunan daerah secara menyeluruh; artinya, pertanian yang tidak adaptif terhadap perubahan iklim bukan hanya akan merugikan pemangku usaha tani, tetapi juga menurunkan kontribusi ekonomi daerah dan

memperbesar ketidakpastian terhadap ketersediaan pangan lokal di masa depan.

Kerentanan sektor pertanian juga diperparah dengan adanya keterbatasan sistem pendukung, seperti minimnya data iklim yang mudah diakses petani, lemahnya sistem peringatan dini gagal panen, serta keterbatasan inovasi teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal. Banyak petani masih mengandalkan pengetahuan empiris tanpa dukungan riset terkini, sehingga kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan menjadi terbatas.

Kondisi tersebut menunjukkan tantangan perubahan iklim bukan lagi persoalan jangka panjang, melainkan realitas yang sedang dihadapi petani NTB saat ini. Oleh karena itu, peningkatan produksi pertanian tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun sistem pertanian yang adaptif, berbasis pengetahuan, dan responsif terhadap dinamika iklim. Tantangan inilah yang menegaskan pentingnya peran lembaga penelitian pertanian sebagai pilar inovasi, sekaligus jembatan antara ilmu pengetahuan, dan kebijakan publik, serta praktik pertanian di lapangan.

9.2 Lembaga Penelitian sebagai Pilar Inovasi

Tantangan perubahan iklim yang dihadapi sektor pertanian di Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa peningkatan produksi pertanian tidak lagi dapat bergantung pada pola kerja tradisional dan pendekatan jangka pendek. Ketidakpastian musim, meningkatnya risiko gagal panen, serta tekanan terhadap sumber daya alam menuntut kehadiran sistem pertanian yang lebih adaptif, berbasis pengetahuan, dan mampu merespons perubahan secara cepat dan tepat. Dalam konteks inilah, lembaga

penelitian pertanian menjadi pilar strategis dalam transformasi sektor pertanian.

Maka dengan itu, lembaga penelitian berperan sebagai sumber utama pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang relevan dengan kondisi lokal. Melalui riset yang terarah, lembaga penelitian mampu menghasilkan varietas tanaman yang adaptif terhadap cekaman iklim, teknologi budidaya yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta sistem peringatan dini yang membantu petani mengantisipasi risiko iklim. Tanpa dukungan riset yang kuat, kebijakan pertanian berisiko bersifat reaktif dan tidak berbasis bukti ilmiah.

Lebih dari sekadar pusat penghasil pengetahuan, lembaga penelitian juga berfungsi sebagai penghubung antara ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan praktik pertanian di lapangan. Inovasi hanya akan bermakna apabila dapat diterjemahkan ke dalam praktik yang mudah diadopsi oleh petani dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi serta kesejahteraan. Oleh karena itu, lembaga penelitian harus dirancang sebagai institusi yang terbuka, kolaboratif, dan berorientasi pada pemecahan masalah riil yang dihadapi petani.

Dalam kerangka pembangunan pertanian yang adaptif dan berdaya saing, penguatan lembaga penelitian tidak dapat dipisahkan dari investasi pada sumber daya manusia dan mekanisme hilirisasi inovasi. Pusat penelitian yang kuat memerlukan peneliti dan ilmuwan yang kompeten, sementara hasil riset membutuhkan jalur jelas untuk diimplementasikan melalui inovasi teknologi dan kebijakan. Ketiga elemen ini harus berjalan secara terpadu.

9.2.1. Pembangunan Pusat Penelitian Pertanian Terpadu

Pembangunan Pusat Penelitian Pertanian Terpadu merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi inovasi pertanian di Nusa Tenggara Barat. Pusat penelitian ini diposisikan sebagai institusi kunci yang mengintegrasikan riset ilmiah, pengembangan teknologi, dan kebutuhan nyata petani dalam satu ekosistem pengetahuan yang berkelanjutan. Dalam konteks perubahan iklim dan meningkatnya risiko gagal panen, keberadaan pusat penelitian bukan lagi pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas produksi dan ketahanan pangan daerah.

Secara konseptual, pusat penelitian pertanian terpadu dirancang sebagai mesin inovasi pertanian daerah. Fungsinya tidak terbatas pada penelitian dasar, tetapi mencakup riset terapan yang langsung menjawab tantangan agroekologis lokal. Fokus utama diarahkan pada pengembangan varietas tanaman pangan yang adaptif terhadap cekaman iklim, seperti : kekeringan, suhu tinggi, dan variabilitas curah hujan, serta teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan pertanian NTB beralih dari pola reaktif menuju sistem yang lebih antisipatif dan berbasis pengetahuan.

Adapun pengalaman internasional menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi pertanian sangat ditentukan oleh kekuatan lembaga riset. India, misalnya, membangun Indian *Council of Agricultural Research* (ICAR) sebagai jaringan nasional riset pertanian yang terhubung langsung dengan universitas dan petani. Melalui ICAR, India berhasil mengembangkan varietas tahan kekeringan dan banjir serta sistem peringatan dini gagal

panen, sehingga mampu menjaga produksi pangan di tengah variabilitas iklim yang tinggi. Sementar, di Brasil memberikan pelajaran serupa melalui EMBRAPA (*Brazilian Agricultural Research Corporation*) yang berhasil mentransformasi wilayah Cerrado (yang semula dianggap kurang produktif) menjadi salah satu lumbung pangan dunia melalui riset varietas adaptif, pengelolaan tanah, dan integrasi kebijakan dengan inovasi. Keberhasilan ini menegaskan bahwa keterbatasan alam dapat diatasi melalui riset yang konsisten dan terarah, sebuah pembelajaran penting bagi NTB yang memiliki keragaman agroekologi dan tantangan iklim serupa.

Di negara maju dengan keterbatasan lahan seperti Jepang dan Belanda, peran riset bahkan menjadi lebih krusial. Jepang mengembangkan *National Agriculture and Food Research Organization* (NARO) untuk mendorong pertanian presisi, efisiensi air, dan teknologi adaptif iklim. Sementara itu, Belanda melalui *Wageningen University & Research* membuktikan bahwa daya saing pertanian tidak ditentukan oleh luas lahan, melainkan oleh kualitas riset, inovasi, dan tata kelola pengetahuan. Kedua contoh ini menegaskan bahwa pusat penelitian yang kuat mampu menghasilkan pertanian berproduktivitas tinggi sekaligus berkelanjutan.

Artinya bagi Nusa Tenggara Barat, pembelajaran global tersebut menegaskan pentingnya membangun pusat penelitian pertanian terpadu yang kontekstual, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Pusat penelitian harus terhubung erat dengan perguruan tinggi, lembaga riset nasional (seperti: BRIN), pemerintah daerah, dan komunitas petani. Kolaborasi ini memastikan bahwa riset tidak berhenti pada laboratorium, melainkan diuji di lapangan dan diadopsi secara luas. Selain itu, pusat penelitian perlu

mengembangkan sistem peringatan dini risiko pertanian berbasis data iklim dan kondisi lahan untuk membantu petani mengambil keputusan tanam yang tepat. Lebih jauh, pusat penelitian pertanian terpadu juga berfungsi sebagai jembatan antara riset dan kebijakan publik. Temuan ilmiah dapat menjadi dasar perencanaan tanam daerah, pengelolaan irigasi, serta alokasi sumber daya yang lebih efektif. Dengan demikian, kebijakan pertanian tidak lagi bergantung pada asumsi, tetapi pada bukti ilmiah yang teruji.

Sementara, dalam perspektif jangka panjang, dengan pembangunan Pusat Penelitian Pertanian Terpadu merupakan investasi strategis bagi kemandirian dan daya saing pertanian NTB. Keberadaan pusat ini memungkinkan daerah memiliki kapasitas internal untuk menghasilkan inovasi, mengurangi ketergantungan pada teknologi eksternal, dan membangun sistem pertanian yang tangguh terhadap perubahan iklim. Seperti ditunjukkan oleh pengalaman India, Brasil, Jepang, dan Belanda, riset yang kuat adalah fondasi utama ketahanan pangan. Dengan arah kebijakan yang serupa, NTB memiliki peluang besar untuk membangun pertanian yang adaptif, produktif, dan berkelanjutan di masa depan.

9.2.2. Beasiswa Keilmuan Bioteknologi dan Sains Pertanian Adaptif

Keberhasilan pembangunan Pusat Penelitian Pertanian Terpadu sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Infrastruktur riset yang memadai tanpa dukungan ilmuwan dan peneliti yang kompeten akan sulit menghasilkan inovasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, beasiswa keilmuan di bidang bioteknologi dan sains pertanian

adaptif diposisikan sebagai investasi strategis jangka panjang untuk membangun fondasi pengetahuan dan kapasitas riset pertanian di Nusa Tenggara Barat.

Perubahan iklim menuntut pendekatan keilmuan pertanian yang semakin kompleks dan lintas disiplin. Tantangan seperti kekeringan, suhu ekstrem, degradasi tanah, serta dinamika organisme pengganggu tanaman tidak dapat dijawab hanya dengan teknik budidaya konvensional. Diperlukan penguasaan ilmu bioteknologi, pemuliaan tanaman, agroklimatologi, ilmu tanah dan air, serta analisis data pertanian untuk menghasilkan solusi yang adaptif dan kontekstual. Program beasiswa diarahkan untuk mencetak generasi ilmuwan pertanian yang mampu mengintegrasikan ilmu dasar dengan kebutuhan praktis di lapangan.

Dalam kerangka ini, beasiswa keilmuan tidak semata dimaknai sebagai bantuan pendidikan, tetapi sebagai instrumen pembangunan kapasitas daerah. Dimana penerima beasiswa diprioritaskan untuk menempuh pendidikan dan penelitian pada bidang-bidang strategis yang relevan dengan tantangan pertanian NTB, seperti pengembangan varietas tahan cekaman iklim, teknologi efisiensi air, sistem pertanian ramah lingkungan, serta pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam pertanian. Dengan pendekatan ini, beasiswa menjadi bagian integral dari strategi inovasi pertanian daerah.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem pertanian tangguh menempatkan pengembangan sumber daya manusia riset sebagai prioritas utama. Brasil, India, dan Belanda, misalnya, secara konsisten mengirimkan mahasiswa dan peneliti muda ke pusat-pusat riset

unggulan untuk kemudian kembali memperkuat lembaga riset nasional. Pendekatan serupa dapat diadaptasi di NTB dengan mendorong skema beasiswa ikatan dinas atau *return-of-service*, sehingga ilmu dan keterampilan yang diperoleh benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.

Selain pendidikan formal, beasiswa keilmuan juga dapat mencakup dukungan untuk riset terapan, magang penelitian, dan kolaborasi internasional. Skema ini memungkinkan peneliti muda NTB terlibat langsung dalam proyek-proyek riset adaptasi iklim, pertanian presisi, dan bioteknologi tanaman yang relevan dengan kondisi tropis kering. Dengan demikian, transfer pengetahuan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan aplikatif.

Dalam perspektif jangka panjang, program beasiswa keilmuan bioteknologi dan sains pertanian adaptif berperan dalam menciptakan ekosistem pengetahuan pertanian daerah yang berkelanjutan. Ilmuwan dan peneliti yang dihasilkan menjadi penggerak utama inovasi, penghubung antara riset dan kebijakan, serta mentor bagi generasi petani dan peneliti berikutnya. Dengan basis sumber daya manusia yang kuat, Pusat Penelitian Pertanian Terpadu dapat berfungsi secara optimal sebagai motor transformasi pertanian NTB.

Dengan demikian, beasiswa keilmuan bukan sekadar program pendidikan, melainkan strategi pembangunan jangka panjang untuk memastikan bahwa inovasi pertanian di Nusa Tenggara Barat memiliki fondasi ilmiah yang kokoh, adaptif terhadap perubahan iklim, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

9.2.3. Kompetisi Inovasi sebagai Instrumen Hilirisasi Riset Pertanian

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan pertanian berbasis riset adalah kesenjangan antara hasil penelitian dan praktik di lapangan. Banyak inovasi pertanian berhenti pada laporan ilmiah, prototipe laboratorium, atau publikasi akademik, tanpa pernah benar-benar diadopsi oleh petani. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, diperlukan mekanisme hilirisasi yang sistematis. Dalam konteks inilah, kompetisi inovasi diposisikan bukan sebagai ajang lomba sesaat, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat hilirisasi riset pertanian.

Kompetisi inovasi dirancang sebagai ruang temu antara peneliti, petani, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Inovasi yang dilombakan harus berangkat dari persoalan nyata di lapangan, seperti adaptasi terhadap perubahan iklim, efisiensi penggunaan air dan input pertanian, peningkatan produktivitas komoditas unggulan, serta pengendalian risiko gagal panen. Dengan pendekatan berbasis masalah (*problem-based innovation*), kompetisi menjadi sarana untuk memastikan bahwa riset yang dihasilkan relevan dan aplikatif.

Berbeda dari kompetisi konvensional, kompetisi inovasi dalam kerangka ini bersifat berkelanjutan dan berjenjang. Tahap awal difokuskan pada seleksi ide dan prototipe berbasis riset, diikuti dengan fase inkubasi dan uji coba lapangan (*pilot project*) bersama petani. Inovasi yang terbukti efektif kemudian didorong untuk direplikasi dan diintegrasikan ke dalam program pertanian daerah. Dengan demikian, kompetisi berfungsi sebagai

pintu masuk menuju implementasi nyata, bukan sekadar penilaian satu kali.

Pusat Penelitian Pertanian Terpadu berperan sebagai pengelola utama kompetisi inovasi. Lembaga ini memastikan bahwa inovasi yang terpilih memperoleh pendampingan ilmiah, akses fasilitas riset, serta dukungan pengujian di berbagai kondisi agroekologi NTB. Keterlibatan petani sejak tahap awal menjadi kunci keberhasilan, karena adopsi teknologi sangat bergantung pada kesesuaian inovasi dengan kebutuhan dan kapasitas pengguna di lapangan.

Selain mendorong adopsi teknologi, kompetisi inovasi juga berfungsi sebagai sarana pembentukan ekosistem inovasi pertanian daerah. Melalui kompetisi, peneliti muda, penerima beasiswa, mahasiswa, startup pertanian, dan kelompok tani dapat berkolaborasi dalam mengembangkan solusi inovatif. Sinergi ini mempercepat aliran pengetahuan dari pusat riset ke masyarakat, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha berbasis inovasi pertanian.

Dalam perspektif kebijakan, kompetisi inovasi juga menjadi instrumen seleksi kebijakan berbasis bukti. Inovasi yang berhasil diuji dan diadopsi dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan pertanian daerah, perencanaan program, serta pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, kebijakan pertanian tidak hanya didasarkan pada asumsi, tetapi pada solusi yang telah terbukti efektif di lapangan. Lebih jauh, kompetisi inovasi berperan dalam menumbuhkan budaya riset dan inovasi di sektor pertanian. Ia mendorong pergeseran dari pola kerja individual dan sektoral menuju kolaborasi lintas disiplin dan aktor. Dalam jangka panjang, budaya ini memperkuat daya saing

pertanian NTB, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim, dan mempercepat transformasi sistem pertanian menuju keberlanjutan.

Dengan demikian, kompetisi inovasi sebagai instrumen hilirisasi riset pertanian menjadi elemen penting dalam arsitektur inovasi pertanian daerah. Bersama pembangunan pusat penelitian dan penguatan sumber daya manusia, kompetisi inovasi memastikan bahwa riset pertanian di Nusa Tenggara Barat tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi hadir sebagai solusi nyata yang meningkatkan produksi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

9.3 Pertanian Adaptif

Pertanian adaptif merupakan pendekatan strategis yang menempatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim sebagai inti dari sistem produksi pangan. Dalam konteks Nusa Tenggara Barat, pertanian adaptif menjadi kebutuhan mendesak mengingat meningkatnya variabilitas iklim, ketidakpastian musim tanam, serta risiko gagal panen yang semakin sering terjadi. Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma dari pertanian yang bersifat reaktif menuju sistem pertanian yang antisipatif, berbasis pengetahuan, dan berorientasi pada ketahanan jangka panjang.

Secara konseptual, pertanian adaptif sejalan dengan kerangka *climate-smart agriculture* yang menekankan tiga tujuan utama, yakni peningkatan produktivitas, penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan keberlanjutan lingkungan. Lipper et al (2014) menegaskan bahwa adaptasi pertanian yang efektif hanya dapat dicapai apabila teknologi, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan publik berjalan secara terintegrasi, bukan berdiri

sendiri. Dalam perspektif ini, adaptasi bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan transformasi sistemik dalam cara bertani dan mengelola risiko iklim.

Selain itu, berbagai studi menunjukkan bahwa petani kecil merupakan kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Thornton et al (2018) menekankan bahwa ketergantungan pada pola musim tradisional, keterbatasan akses terhadap informasi iklim, serta minimnya dukungan kelembagaan membuat petani sulit beradaptasi secara mandiri. Kondisi ini relevan dengan situasi NTB, di mana sebagian besar pertanian masih berbasis lahan tadah hujan dan bergantung pada variabilitas cuaca. Oleh karena itu, pertanian adaptif harus didukung oleh sistem pengetahuan dan kelembagaan yang kuat.

Dalam praktiknya, pertanian adaptif di NTB mencakup beberapa strategi kunci. Pertama, penggunaan varietas dan komoditas yang adaptif terhadap cekaman iklim, seperti varietas tahan kekeringan, genangan, dan suhu tinggi. Adapun penelitian Lobell dan Gourdji (2012) menunjukkan bahwa tanpa adaptasi varietas dan teknologi, variabilitas suhu dan curah hujan dapat menurunkan produktivitas tanaman pangan utama secara signifikan. Kedua, pengelolaan air dan tanah berkelanjutan, termasuk efisiensi irigasi, konservasi tanah, serta pemanenan air hujan, yang berperan penting dalam menjaga stabilitas produksi pada kondisi iklim ekstrem.

Ketiga, pertanian adaptif menuntut pemanfaatan informasi iklim dan sistem peringatan dini dalam pengambilan keputusan. Studi nasional, hal ini sejalan dengan penelitian Surmaini et al (2018) yang menunjukkan bahwa kalender tanam dinamis berbasis iklim dan informasi cuaca mampu menekan risiko gagal

panen secara signifikan di berbagai wilayah Indonesia. Dalam konteks NTB, akses terhadap informasi iklim yang akurat menjadi faktor penentu keberhasilan adaptasi, terutama bagi petani di wilayah rawan kekeringan dan banjir.

Selain itu, Folke et al (2010) menekankan bahwa resiliensi sistem pertanian tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kapasitas sosial untuk belajar, berkolaborasi, dan bertransformasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas petani melalui pelatihan, pendampingan, dan pembelajaran berbasis praktik menjadi bagian integral dari strategi adaptasi. Adaptasi yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila petani diposisikan sebagai subjek aktif, bukan sekadar penerima teknologi.

Dalam jangka panjang, pertanian adaptif tidak hanya bertujuan mempertahankan tingkat produksi pada kondisi iklim yang semakin tidak menentu, tetapi membangun resiliensi sistem pertanian secara menyeluruh. Resiliensi dalam konteks ini dimaknai sebagai kemampuan sistem pertanian untuk bertahan menghadapi guncangan iklim, pulih setelah mengalami gangguan, serta bertransformasi menuju pola produksi yang lebih sesuai dengan realitas lingkungan baru. Dengan pendekatan ini, pertanian tidak lagi semata-mata bereaksi terhadap krisis, melainkan memiliki kapasitas internal untuk belajar dan beradaptasi secara berkelanjutan.

Resiliensi pertanian ini mencakup dimensi ekologis, sosial, dan ekonomi yang saling terkait. Dari sisi ekologis, sistem pertanian yang adaptif mampu menjaga keseimbangan sumber daya tanah dan air, mempertahankan keanekaragaman hayati, serta mengurangi kerentanan terhadap degradasi lingkungan.

Dari sisi sosial, yang tercermin pada meningkatnya kapasitas petani dalam mengelola risiko, mengambil keputusan berbasis informasi, serta membangun solidaritas dan kerja sama dalam komunitas pertanian. Sementara itu, dari sisi ekonomi, sistem pertanian yang resilien mampu menjaga stabilitas pendapatan petani dan mengurangi fluktuasi produksi yang berdampak pada ketahanan pangan daerah.

Pendekatan pertanian adaptif ini juga membuka ruang bagi transformasi struktural sektor pertanian di Nusa Tenggara Barat. Transformasi ini mencakup pergeseran dari ketergantungan pada pola tanam tradisional menuju sistem produksi yang lebih fleksibel, berbasis data iklim, dan didukung oleh inovasi teknologi. Dengan demikian, sektor pertanian NTB dapat bergerak dari pola bertahan jangka pendek (*coping strategies*) menuju strategi adaptasi dan transformasi jangka panjang yang lebih kokoh. Sistem pertanian yang mampu berproduksi secara stabil di tengah ketidakpastian iklim memiliki keunggulan strategis dalam menjaga pasokan pangan, memenuhi kebutuhan pasar, dan menarik investasi di sektor pertanian berkelanjutan. Dalam konteks ini, adaptasi terhadap perubahan iklim tidak hanya dipahami sebagai upaya mitigasi risiko, tetapi juga sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan nilai tambah produk pertanian.

Dengan demikian, pertanian adaptif memungkinkan sektor pertanian Nusa Tenggara Barat bergerak melampaui logika bertahan hidup jangka pendek menuju sistem produksi yang tangguh, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

9.4.Tata Kelola Pertanian Berbasis Riset

Peningkatan produksi pertanian yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari kualitas tata kelola yang mendasarinya. Sebelumnya dipaparkan tentang adanya tantangan perubahan iklim, kerentanan petani, serta keterbatasan sumber daya menuntut tata kelola pertanian yang tidak lagi berbasis intuisi semata, melainkan bertumpu pada pengetahuan ilmiah dan bukti empiris. Tata kelola pertanian berbasis riset menjadi kerangka strategis untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan intervensi pertanian dirancang secara tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan.

Secara konseptual, tata kelola berbasis riset menempatkan ilmu pengetahuan sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan publik. Pendekatan ini mengintegrasikan hasil penelitian, data iklim, informasi agroekologi, serta evaluasi kebijakan ke dalam seluruh siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian. Dengan demikian, kebijakan pertanian tidak lagi bersifat reaktif terhadap krisis, tetapi proaktif dalam mengantisipasi risiko dan peluang yang muncul akibat dinamika iklim dan pasar.

Dalam praktiknya, tata kelola pertanian berbasis riset menuntut adanya mekanisme kelembagaan yang jelas dan berfungsi secara efektif. Pusat Penelitian Pertanian Terpadu berperan sebagai penyedia utama pengetahuan dan inovasi, sementara pemerintah daerah bertugas menerjemahkan temuan riset ke dalam kebijakan dan program yang aplikatif. Sinergi antara lembaga riset, perangkat daerah, penyuluh pertanian, dan komunitas petani menjadi prasyarat utama agar pengetahuan ilmiah dapat diimplementasikan secara luas dan konsisten di

lapangan. Juga menekankan pentingnya sistem data dan informasi pertanian yang terintegrasi. Data mengenai iklim, tanah, air, produksi, dan sosial-ekonomi petani harus dikelola secara sistematis dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Dengan dukungan data yang akurat dan mutakhir, perencanaan tanam, penentuan komoditas unggulan, serta pengelolaan risiko dapat dilakukan secara lebih presisi dan adaptif.

Selain itu, juga menuntut evaluasi kebijakan yang berkelanjutan., dimana setiap program dan intervensi pertanian perlu dievaluasi berdasarkan indikator kinerja yang terukur, baik dari sisi produktivitas, keberlanjutan lingkungan, maupun dampak sosial-ekonomi. Hasil evaluasi tersebut menjadi umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan di masa depan, sehingga pembangunan pertanian berjalan sebagai proses pembelajaran yang berkelanjutan (*learning governance*).

Dimensi partisipasi juga menjadi elemen penting dalam tata kelola berbasis riset. Petani tidak hanya diposisikan sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai mitra pengetahuan yang memiliki pengalaman empiris berharga. Integrasi pengetahuan lokal petani dengan temuan ilmiah memperkaya kualitas kebijakan dan meningkatkan tingkat adopsi inovasi di lapangan. Pendekatan partisipatif ini memastikan bahwa kebijakan pertanian tetap kontekstual dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam perspektif jangka panjang, tata kelola pertanian berbasis riset memungkinkan pembangunan pertanian yang lebih konsisten, adaptif, dan berdaya saing. Kebijakan yang dirancang berdasarkan bukti ilmiah memiliki peluang lebih besar

untuk bertahan menghadapi perubahan iklim, dinamika pasar, dan tekanan lingkungan. Dengan demikian, tata kelola berbasis riset menjadi fondasi bagi terwujudnya sistem pertanian NTB yang tangguh, berkelanjutan, dan mampu menopang ketahanan pangan serta kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Sehingga dapat ditegaskan bahwa peningkatan produksi pertanian di Nusa Tenggara Barat tidak hanya bergantung pada faktor teknis budidaya, tetapi pada arsitektur tata kelola yang cerdas dan berbasis pengetahuan. Melalui penguatan lembaga penelitian, pengembangan sumber daya manusia, inovasi adaptif, dan tata kelola berbasis riset, sektor pertanian NTB memiliki landasan kuat untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan pertanian yang bermartabat dan berkelanjutan.

BAB X SUMBER DAYA ALAM DAN PERTAMBANGAN

Sumber daya alam merupakan salah satu fondasi utama pembangunan Nusa Tenggara Barat. Kekayaan alam berupa hutan, laut, mineral, dan bentang alam tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai ekologis, sosial, dan kultural yang menentukan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, cara suatu daerah mengelola sumber daya alam (SDA) sesungguhnya mencerminkan pilihan politik, pembangunan, serta tingkat keberadaban dalam memaknai hubungan antara manusia dan alam.

Dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan sering kali dihadapkan pada ketegangan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Pertambangan diposisikan sebagai penggerak investasi dan pertumbuhan, namun pada saat yang sama membawa risiko kerusakan ekologi, konflik sosial, dan ketimpangan manfaat apabila tidak dikelola secara adil dan bertanggung jawab. Ketegangan inilah yang menjadikan isu sumber daya alam bukan semata persoalan teknis, melainkan persoalan politik, etika, dan tata kelola. Artinya bahwa sumber daya alam tidak dapat diperlakukan sebagai objek eksploitasi semata, melainkan sebagai amanah pembangunan yang harus dijaga untuk generasi kini dan mendatang. Prinsip ini sejalan dengan mandat konstitusi yang menegaskan bahwa

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam menuntut kebijakan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik.

Bab ini secara khusus mengkaji kondisi aktual tata kelola lingkungan dan pertambangan di Nusa Tenggara Barat, dengan pendekatan kritis terhadap berbagai praktik ekstraktif yang berlangsung. Kritik tersebut tidak dimaksudkan untuk menolak pembangunan atau investasi, melainkan untuk menempatkan investasi dalam kerangka politik hijau, yaitu politik yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan tanggung jawab antargenerasi.

10.1 Tata Kelola Lingkungan

1. Deforestasi dan Kerusakan Hutan di NTB

Nusa Tenggara Barat memiliki hutan yang beragam secara ekologis, termasuk hutan tropis di pegunungan, hutan sekunder, serta vegetasi semak yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mulai dari pengaturan hidrologi hingga penyediaan habitat keanekaragaman hayati. Berdasarkan data citra satelit dan inventarisasi tutupan lahan, sekitar 45 % dari total tutupan lahan di NTB merupakan hutan alam pada tahun 2020, yang mencapai sekitar 880 ribu hektare *(natural forest*). Ini menunjukkan sebaran hutan yang masih signifikan di provinsi ini, meskipun dalam tekanan kuat dari berbagai aktivitas manusia dan perubahan penggunaan lahan (https://www.globalforestwatch.org).

Selain hutan alam, sejumlah kawasan hutan formal juga tercatat dalam statistik kehutanan yang lebih luas untuk NTB. Data dari dinas kehutanan provinsi menyebutkan bahwa total kawasan hutan (termasuk hutan daratan dan perairan) pernah diperkirakan mencapai lebih dari 1.070.000 hektare pada awal dekade 2020-an, sebelum tekanan eksternal semakin meningkat. Di samping itu, terdapat juga luas perhutanan sosial sekitar 60 160 hektare di NTB yang dikelola masyarakat melalui program kehutanan sosial, yang memberikan ruang bagi pengelolaan hutan berbasis komunitas serta mendukung ketahanan ekonomi lokal dan konservasi lahan (https://ekbisntb.com).

Namun, meskipun angka luas hutan ini menunjukkan ekosistem yang masih ada, penting dicatat bahwa sebagian besar hutan di NTB berada dalam kondisi terfragmentasi dan menghadapi tekanan dari perambahan lahan, praktik pertanian yang merambah kawasan hutan, dan ekspansi pertambangan. Laju kerusakan hutan dan deforestasi tahunan, meskipun tidak seragam setiap tahun, tetap menjadi perhatian utama dalam pengelolaan sumber daya alam provinsi ini.

Global Forest Watch menunjukkan tren penurunan yang terus berlangsung. Antara tahun 2000 hingga 2020, NTB mengalami perubahan tutupan pohon bersih sekitar 59 ribu hektare akibat deforestasi dan degradasi hutan oleh berbagai faktor seperti alih fungsi lahan, pertambangan, dan pembukaan lahan pertanian. Beberapa sumber lokal juga mencatat bahwa laju kerusakan hutan di NTB mencapai 150–200 hektare per tahun di awal dekade 2020-an, terutama di kawasan yang rawan alih fungsi lahan dan eksploitasi besar-besaran. Selain itu, investigasi organisasi lingkungan memperkirakan bahwa sekitar 60 % dari hutan NTB telah rusak akibat kegiatan pertambangan,

perambahan, dan alih guna untuk pembangunan lain (termasuk pariwisata dan pertanian).

Sementara itu studi terkini (2025) juga menunjukkan bahwa meskipun angka absolut kerusakan hutan kecil jika dibandingkan provinsi lain, tekanan terus berlangsung. Misalnya, estimasi dari penelitian lokal mencatat total deforestasi tahunan mencapai ratusan hektare hingga ribuan hektare, dengan Kabupaten Dompu sebagai salah satu wilayah yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam kehilangan tutupan hutan.

Tabel 10.1. Tren Perubahan Luas Hutan di Nusa Tengga Barat tahun 2000-2025 (Estimasi kompilatif GFW & BPS)

Tahun	Estimasi Luas Hutan (ha)	Perubahan Bersih (ha/tahun)	Keterangan Utama
2000	±1.195.000	—	Kondisi awal tutupan hutan relatif utuh
2005	±1.170.000	−5.000	Perambahan & pembukaan lahan
2010	±1.140.000	−6.000	Ekspansi pertanian & izin tambang
2015	±1.100.000	−8.000	Tekanan tambang & infrastruktur
2020	±1.050.000	−10.000	Deforestasi bersih tertinggi
2021	±1.045.000	−5.000	Penurunan laju, masih defisit
2022	±1.040.000	−5.000	Alih fungsi & degradasi

Tahun	Estimasi Luas Hutan (ha)	Perubahan Bersih (ha/tahun)	Keterangan Utama
2023	±1.035.000	−5.000	Fragmentasi kawasan hutan
2024	±1.030.000	−5.000	Kehilangan pohon berlanjut
2025*	±1.025.000	−4.000	Estimasi berbasis tren

*2025 = proyeksi konservatif berbasis tren 3–5 tahun terakhir.

Berdasarkan kompilasi data Global Forest Watch (GFW) dan Badan Pusat Statistik (BPS), luas hutan di Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren penurunan yang bertahap namun konsisten sejak awal tahun 2000-an. Pada tahun 2000, luas tutupan hutan yang mencakup hutan alam (*natural forest*) dan tutupan pohon (*tree cover*) yang diperkirakan masih berada pada kisaran ±1,18–1,20 juta hektare. Sejak periode tersebut, tekanan yang berasal dari alih fungsi lahan, perambahan kawasan hutan, kebakaran berskala lokal, serta aktivitas pertambangan secara kumulatif mendorong terjadinya kehilangan hutan bersih (*net forest loss*) yang berkelanjutan hingga tahun 2025.

Data Global Forest Watch mencatat bahwa sepanjang 2001–2024, Nusa Tenggara Barat kehilangan sekitar ±95.000–100.000 hektare tutupan pohon, dengan rata-rata kehilangan bersih tahunan berkisar antara 3.800-4.200 hektare. Temuan ini sejalan dengan data BPS dan Dinas Kehutanan NTB yang menunjukkan arah penurunan serupa, meskipun dengan angka administratif yang relatif lebih rendah akibat perbedaan definisi kawasan hutan dan metodologi pengukuran.

Secara keseluruhan, dalam kurun waktu 2000–2025, luas hutan di Nusa Tenggara Barat diperkirakan telah berkurang sekitar 170.000 hektare, atau setara dengan 14–15 persen dari luas hutan awal. Pola kehilangan ini tidak bersifat fluktuatif atau insidental, melainkan struktural dan berlangsung secara sistematis. Kondisi tersebut mencerminkan masih lemahnya tata kelola lingkungan, tingginya tekanan alih fungsi lahan, serta ekspansi kegiatan ekstraktif yang belum sepenuhnya dikendalikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Penurunan luas hutan tersebut tidak hanya berdampak pada hilangnya tutupan vegetasi, tetapi juga memicu gangguan serius terhadap fungsi ekologis dasar wilayah Nusa Tenggara Barat. Hutan yang berperan sebagai pengatur tata air (*hydrological regulator*) mengalami degradasi, sehingga kemampuan kawasan tangkapan air untuk menyerap, menyimpan, dan melepaskan air secara alami semakin menurun. Akibatnya, keseimbangan siklus air terganggu dan memunculkan dua gejala ekstrem yang semakin sering terjadi secara bersamaan, yaitu banjir di musim hujan dan krisis air pada musim kemarau.

Dalam beberapa tahun terakhir, NTB mencatat peningkatan kejadian banjir dan banjir bandang, terutama di wilayah yang mengalami tekanan deforestasi dan alih fungsi lahan. Hilangnya tutupan hutan di daerah hulu menyebabkan air hujan tidak lagi tertahan oleh sistem akar dan lapisan tanah hutan, melainkan langsung mengalir ke wilayah hilir dalam waktu singkat. Kondisi ini memperbesar limpasan permukaan (*run-off*), mempercepat sedimentasi sungai, dan meningkatkan risiko banjir di kawasan permukiman serta lahan pertanian. Banjir yang berulang tidak lagi dapat dipandang sebagai fenomena alam semata, melainkan

sebagai konsekuensi langsung dari kerusakan ekosistem hutan dan lemahnya pengendalian tata ruang.

Pada saat yang sama, degradasi hutan juga berkontribusi terhadap krisis air bersih yang semakin terasa di berbagai wilayah NTB. Berkurangnya fungsi resapan air menyebabkan cadangan air tanah dan mata air mengalami penurunan debit, terutama pada musim kemarau. Sejumlah daerah menghadapi kesulitan pasokan air untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan peternakan, yang pada gilirannya memperlemah ketahanan pangan dan meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat. Ironisnya, wilayah yang sama dapat mengalami banjir pada satu waktu dan kekeringan pada waktu lainnya, mencerminkan rusaknya keseimbangan ekologis secara struktural.

Keterkaitan antara deforestasi, banjir, dan krisis air ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan di NTB tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dalam satu sistem ekologis yang terdegradasi. Dengan demikian, masalah banjir dan kekeringan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan teknis jangka pendek, seperti normalisasi sungai atau pembangunan infrastruktur air semata. Tanpa pembenahan tata kelola hutan dan pengendalian alih fungsi lahan secara serius, upaya penanggulangan bencana dan penyediaan air bersih akan terus bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan.

Artinya bahwa kerusakan hutan yang berlangsung secara sistematis mencerminkan kegagalan kebijakan dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan fungsi ekologis. Dampak banjir dan krisis air yang semakin meluas menjadi indikator nyata bahwa pembangunan

yang mengabaikan daya dukung lingkungan pada akhirnya akan menimbulkan biaya sosial dan ekologis yang jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi jangka pendek yang diperoleh.

2. Kualitas Lingkungan Hidup

Penurunan kualitas lingkungan hidup di Nusa Tenggara Barat merupakan konsekuensi langsung dari tekanan berlapis terhadap ekosistem alam, khususnya akibat degradasi hutan, alih fungsi lahan, aktivitas pertambangan, serta pertumbuhan kawasan permukiman dan infrastruktur yang tidak selalu diimbangi dengan perlindungan lingkungan yang memadai. Kualitas lingkungan hidup tidak hanya mencerminkan kondisi alam semata, tetapi juga mencerminkan efektivitas kebijakan publik dan kapasitas tata kelola dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan.

Secara agregat, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di NTB menunjukkan ketimpangan antar komponennya. Di satu sisi, kualitas udara relatif masih berada pada kategori baik, terutama karena belum masifnya industri berat dan masih terbatasnya kawasan urban padat. Namun di sisi lain, kualitas air dan kualitas lahan menunjukkan tekanan yang signifikan. Penurunan kualitas air sungai, danau, serta sumber air tanah semakin terlihat, terutama di wilayah yang mengalami deforestasi di hulu dan aktivitas ekstraktif di sekitarnya.

Kualitas air permukaan di berbagai daerah NTB mengalami degradasi akibat meningkatnya sedimentasi, pencemaran limbah domestik, serta limpasan material dari kawasan pertambangan dan pertanian intensif. Sungai-sungai yang sebelumnya berfungsi sebagai sumber air bersih, irigasi, dan ekosistem kini menghadapi penurunan daya dukung. Tingginya kekeruhan air,

menurunnya debit pada musim kemarau, serta meningkatnya kandungan pencemar menjadi indikator bahwa sistem tata air alami tidak lagi bekerja secara optimal.

Pada aspek kualitas lahan, degradasi tanah menjadi persoalan serius yang kerap luput dari perhatian. Alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan terbuka, pertambangan terbuka, dan permukiman menyebabkan erosi tanah meningkat tajam. Lapisan tanah atas yang subur hilang, sementara daya serap tanah terhadap air menurun. Kondisi ini mempercepat proses degradasi lingkungan sekaligus menurunkan produktivitas lahan pertanian, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap ketahanan pangan masyarakat.

Penurunan kualitas lingkungan hidup juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, daerah aliran sungai, dan wilayah pertambangan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan. Krisis air bersih, banjir musiman, penurunan hasil pertanian, serta meningkatnya risiko kesehatan menjadi beban nyata yang harus ditanggung masyarakat, sering kali tanpa kompensasi yang memadai. Dalam konteks ini, kualitas lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial dan perlindungan hak-hak warga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kualitas lingkungan hidup di NTB bukan semata akibat faktor alam atau perubahan iklim global, melainkan juga merupakan cerminan dari lemahnya integrasi kebijakan lingkungan dalam perencanaan pembangunan. Pembangunan yang menempatkan lingkungan sebagai variabel sekunder cenderung menghasilkan pertumbuhan yang rapuh dan berbiaya tinggi di masa depan.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas lingkungan hidup harus dipahami sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan, bukan sebagai hambatan bagi pertumbuhan ekonomi.

Dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup di NTB menegaskan perlunya perubahan paradigma pembangunan. Tanpa penguatan regulasi, pengawasan yang konsisten, serta komitmen politik yang berpihak pada keberlanjutan, degradasi lingkungan akan terus berlangsung dan memperbesar risiko ekologis, sosial, dan ekonomi. Dari titik inilah, pembahasan mengenai sumber daya alam sebagai amanah pembangunan menjadi relevan, sebagai upaya mengembalikan lingkungan hidup ke posisi sentral dalam arah kebijakan pembangunan daerah.

3. Tekanan dari Kegiatan Pertambangan

Kegiatan pertambangan merupakan salah satu sumber tekanan terbesar terhadap lingkungan hidup di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data pemerintah daerah dan organisasi pemantau lingkungan, hingga tahun 2024–2025 tercatat ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang pernah dan/atau masih aktif di wilayah NTB, dengan total luas konsesi diperkirakan mencapai ±219.000 hektare. Luasan ini mencakup wilayah daratan yang signifikan, sebagian di antaranya berada pada kawasan berhutan, daerah aliran sungai (DAS), serta wilayah yang secara ekologis berfungsi sebagai daerah tangkapan air dan penyangga kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menempatkan NTB sebagai wilayah strategis bagi investasi pertambangan, sekaligus sebagai wilayah dengan tingkat kerentanan ekologis yang tinggi.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan sektor pertambangan masih menyisakan persoalan struktural yang serius. Data dan temuan lapangan menunjukkan bahwa ekspansi pertambangan tidak selalu diimbangi dengan perencanaan lingkungan yang memadai, pengawasan yang ketat, serta penegakan hukum yang konsisten. Akibatnya, manfaat ekonomi yang dihasilkan sering kali tidak sebanding dengan biaya ekologis dan sosial yang harus ditanggung masyarakat dan pemerintah daerah dalam jangka panjang. Tekanan utama dari kegiatan pertambangan muncul sejak tahap pembukaan lahan. Pertambangan, khususnya pertambangan terbuka (*open pit mining*), membutuhkan pembukaan kawasan dalam skala luas. Di NTB, pembukaan lahan tambang telah berkontribusi pada hilangnya puluhan ribu hektare tutupan vegetasi dalam dua dekade terakhir, baik secara langsung maupun melalui degradasi kawasan penyangga. Praktik ini mempercepat erosi tanah, merusak lapisan tanah atas yang subur, serta mengganggu stabilitas lereng dan struktur ekologis kawasan.

Tabel 10.2. Tekanan Pertambangan di NTB tahun 2024–2025

Aspek	Data Utama	Keterangan
Jumlah IUP (aktif & nonaktif)	±300–400 IUP	Mineral logam & non-logam
Luas total konsesi tambang	±219.000 hektare	Sebagian tumpang tindih DAS & kawasan hutan
Jenis tambang dominan	Emas, tembaga, batu gamping, pasir besi	Mayoritas tambang terbuka (*open pit*)
Kawasan ekologis	Hutan lindung, DAS, lahan pertanian	Risiko banjir & krisis air

Aspek	Data Utama	Keterangan
terdampak		
Lahan pertanian terdampak	±25.000 hektare	Dampak langsung & tidak langsung
Kabupaten terdampak utama	Sumbawa Barat, Dompu, Lombok Timur, Lombok Tengah	Tekanan ekologis tinggi

Cacatan: Berdasarkan kompilasi data pemerintah daerah, kementerian teknis, dan organisasi pemantau lingkungan, kegiatan pertambangan di Nusa Tenggara Barat melibatkan ratusan izin usaha pertambangan (IUP) dengan sebaran wilayah yang luas dan berdampak langsung pada kawasan hutan, daerah aliran sungai, serta ruang hidup masyarakat.

Namun, pada dasarnya tekanan kegiatan pertambangan di Nusa Tenggara Barat tidak berlangsung secara homogen, melainkan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki potensi mineral dan bahan galian. Setiap wilayah menunjukkan karakter tekanan yang berbeda, baik dari sisi skala aktivitas, dampak ekologis, maupun konsekuensi sosial yang menyertainya. Dengan menelaah contoh wilayah secara spesifik, gambaran mengenai kompleksitas persoalan pertambangan di NTB menjadi lebih konkret dan terukur.

Di Kabupaten Sumbawa Barat, pertambangan logam skala besar telah membentuk lanskap ekonomi dan ekologis wilayah secara signifikan. Aktivitas pertambangan emas dan tembaga berlangsung dalam skala luas dengan metode pertambangan terbuka, yang menuntut pembukaan kawasan dalam jumlah besar. Perubahan bentang alam yang drastis berdampak pada degradasi daerah aliran sungai, perubahan tata air, serta

meningkatnya risiko pencemaran lingkungan. Meskipun sektor ini memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan kesempatan kerja, persoalan reklamasi pasca-tambang, keberlanjutan lingkungan, dan ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif masih menjadi tantangan serius.

Sementara itu, Kabupaten Dompu menghadapi tekanan pertambangan yang berkelindan dengan deforestasi dan alih fungsi lahan di wilayah hulu. Aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan telah mengurangi tutupan vegetasi yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem. Dampaknya terasa hingga ke wilayah hilir dalam bentuk peningkatan sedimentasi sungai dan banjir musiman yang berulang. Dompu menjadi contoh nyata bagaimana lemahnya perlindungan kawasan hulu dan daerah tangkapan air dapat memperbesar kerentanan wilayah terhadap bencana ekologis.

Di Kabupaten Lombok Timur, tekanan pertambangan terutama berasal dari kegiatan penambangan bahan galian non-logam seperti batuan dan pasir yang beririsan langsung dengan kawasan pertanian dan sumber air. Wilayah ini memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi dan ketergantungan besar pada sektor pertanian dan irigasi. Oleh karena itu, degradasi kualitas lahan dan air akibat aktivitas pertambangan berdampak langsung pada produktivitas pertanian, ketersediaan air bersih, serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.

Adapun Kabupaten Lombok Tengah menghadapi dinamika yang lebih kompleks akibat pertemuan antara pertambangan, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan kawasan pariwisata. Ekspansi penambangan bahan galian untuk kebutuhan konstruksi telah mempersempit ruang ekologis dan

meningkatkan tekanan terhadap lahan produktif. Konflik kepentingan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kebutuhan masyarakat lokal menjadi semakin nyata di wilayah ini, menunjukkan pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor dalam tata kelola sumber daya alam.

Artinya bahwa setiap kawasan menghadapi tantangan spesifik yang menuntut pendekatan kebijakan yang kontekstual, berbasis data, dan berpihak pada keberlanjutan. Tanpa diferensiasi kebijakan dan penguatan tata kelola lokal, tekanan pertambangan berpotensi terus memperbesar kerusakan ekologis dan ketimpangan sosial.

4. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan tantangan struktural yang semakin nyata dan berdampak langsung terhadap keberlanjutan lingkungan hidup di Nusa Tenggara Barat. Fenomena ini tidak dapat lagi dipahami sebagai isu global yang abstrak dan jauh dari kehidupan sehari-hari, melainkan sebagai realitas yang telah hadir dalam bentuk perubahan pola cuaca, meningkatnya variabilitas curah hujan, kecenderungan kenaikan suhu, serta semakin seringnya kejadian iklim ekstrem di wilayah NTB. Perubahan-perubahan tersebut secara langsung memengaruhi daya dukung lingkungan dan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.

Secara klimatologis, NTB berada dalam pola iklim muson dengan dua musim utama, yakni musim hujan pada periode November hingga Maret dan musim kemarau pada April hingga Oktober. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, batas dan karakter kedua musim tersebut semakin kabur. Data klimatologi menunjukkan bahwa pola curah hujan menjadi semakin tidak

menentu, ditandai oleh periode kemarau yang lebih panjang dengan curah hujan sangat rendah, bahkan mencapai 0–50 mm per dasarian serta musim hujan yang cenderung lebih singkat namun disertai intensitas hujan yang tinggi. Dalam kondisi tertentu, curah hujan bulanan dapat mencapai kisaran 101–500 mm, dengan variasi spasial dan temporal yang sangat tinggi antarwilayah di NTB. Pola ini mencerminkan meningkatnya variabilitas iklim yang menjadi ciri utama perubahan iklim regional.

Selain perubahan pola hujan, tren suhu di wilayah NTB juga menunjukkan kecenderungan pemanasan. Analisis data historis dari stasiun-stasiun meteorologi di kawasan Nusa Tenggara memperlihatkan peningkatan suhu maksimum harian dan suhu minimum malam hari dalam beberapa dekade terakhir. Kenaikan suhu ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan termal, tetapi juga memperbesar tekanan terhadap sistem hidrologi, pertanian, dan kesehatan masyarakat. Proyeksi iklim jangka menengah dan panjang mengindikasikan bahwa kecenderungan kenaikan suhu ekstrem akan terus berlanjut seiring dengan perubahan iklim global, sehingga meningkatkan risiko kekeringan, stres panas, dan penurunan produktivitas ekosistem.

Variabilitas curah hujan dan kenaikan suhu tersebut berkontribusi langsung pada meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian iklim ekstrem. Banjir bandang, kekeringan berkepanjangan, serta risiko kebakaran hutan dan lahan kini tercatat semakin sering terjadi, baik secara nasional maupun di NTB. Data kebencanaan menunjukkan bahwa kejadian banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir, dan sebagian besar diperburuk oleh

kombinasi antara perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Dalam konteks ini, perubahan iklim berfungsi sebagai faktor pengganda risiko (*risk multiplier*) yang memperbesar dampak dari kerusakan ekosistem yang telah ada.

Dampak perubahan iklim tersebut terasa langsung pada aspek ekologis dan bahkan sosial. Ketidakpastian pola hujan mengganggu sistem pertanian yang masih sangat bergantung pada musim, meningkatkan risiko gagal panen, dan menekan ketahanan pangan lokal. Bagi masyarakat NTB yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan peternakan, kondisi ini memperbesar kerentanan ekonomi dan sosial. Di sisi lain, hujan berintensitas tinggi mempercepat proses erosi dan sedimentasi sungai, meningkatkan risiko banjir, serta memperburuk kualitas air akibat masuknya limbah dari lahan pertanian, permukiman, dan kawasan pertambangan.

Meskipun perubahan iklim merupakan persoalan global yang dipicu oleh dinamika sistem iklim dunia dan emisi gas rumah kaca lintas negara, dampaknya selalu bersifat lokal dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan serta tata kelola wilayah masing-masing. Dalam konteks Nusa Tenggara Barat, perubahan iklim bertemu dengan kerusakan ekosistem yang telah berlangsung sebelumnya, sehingga dampaknya menjadi lebih berat dan kompleks. Dengan kata lain, perubahan iklim tidak berdiri sendiri, tetapi memperbesar konsekuensi dari degradasi lingkungan yang sudah ada.

Interaksi antara perubahan iklim dan degradasi lingkungan memperlihatkan bahwa kerusakan ekologis di NTB telah secara nyata melemahkan kapasitas wilayah untuk beradaptasi terhadap variabilitas iklim. Deforestasi, alih fungsi lahan, dan

aktivitas pertambangan telah menghilangkan tutupan vegetasi di kawasan hulu dan daerah aliran sungai yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga alami. Akibatnya, ketika hujan ekstrem terjadi, air tidak lagi tertahan dan diserap secara optimal, melainkan mengalir cepat sebagai limpasan permukaan yang memicu banjir dengan dampak sosial-ekonomi yang luas.

Sebaliknya, pada musim kemarau, berkurangnya vegetasi dan menurunnya fungsi resapan menyebabkan cadangan air tanah tidak terisi secara memadai. Mata air dan sungai mengalami penurunan debit, sementara kebutuhan air masyarakat tetap tinggi. Kondisi ini memperparah krisis air bersih, memperlemah produktivitas pertanian dan peternakan, serta meningkatkan potensi konflik sosial terkait akses terhadap sumber daya air.

Dengan demikian, perubahan iklim di Nusa Tenggara Barat harus dipahami sebagai tantangan multidimensional yang menuntut respons kebijakan yang terintegrasi. Menghadapi perubahan iklim tidak cukup dengan pendekatan adaptasi teknis semata, tetapi memerlukan pembenahan tata kelola lingkungan secara menyeluruh, bahkan mulai dari perlindungan hutan, pengendalian alih fungsi lahan, hingga penataan kegiatan pertambangan. Pemahaman inilah yang menjadi dasar penting untuk menempatkan sumber daya alam sebagai amanah pembangunan, sekaligus sebagai landasan bagi transformasi menuju politik hijau dan pembangunan berkelanjutan di NTB.

Dengan demikian, perubahan iklim di Nusa Tenggara Barat tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola sumber daya alam dan arah pembangunan. Krisis iklim bukan sekadar tantangan eksternal, tetapi cermin dari pilihan kebijakan yang

belum sepenuhnya memperhitungkan batas ekologis dan ketahanan jangka panjang. Pemahaman ini menegaskan bahwa respons terhadap perubahan iklim harus terintegrasi dengan upaya perlindungan hutan, pengendalian alih fungsi lahan, dan penataan pertambangan, sebagai bagian dari transformasi menuju pembangunan yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan.

10.2 SDA sebagai Amanah Pembangunan

Sumber daya alam tidak dapat dipahami semata sebagai aset ekonomi atau cadangan material yang siap dieksploitasi untuk mengejar pertumbuhan jangka pendek. Dalam kerangka pembangunan yang bermartabat, sumber daya alam harus diposisikan sebagai amanah pembangunan, yakni titipan yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, ekologis, dan antargenerasi. Cara suatu daerah mengelola sumber daya alam mencerminkan orientasi nilai pembangunan yang dianut: apakah berpusat pada keberlanjutan kehidupan bersama, atau semata pada akumulasi keuntungan ekonomi sesaat.

Pemahaman ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi, yakni penjaga dan pengelola alam dengan tanggung jawab, bukan sebagai penguasa yang bebas mengeksploitasi. Allah SWT berfirman :

> *"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.'" (QS. Al-Baqarah [2]: 30)*

Lebih lanjut, Al-Qur'an secara tegas memperingatkan agar manusia tidak melakukan kerusakan di bumi setelah diciptakan dalam keadaan seimbang dan tertata:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya." (QS. Al-A'raf [7]: 56)

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan kebijakan publik dan pertimbangan ekonomi, tetapi juga menyangkut persoalan etika dan tanggung jawab moral yang mendasar. Eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan keseimbangan ekologis dan keadilan sosial tidak hanya bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menyimpang dari amanah yang melekat pada posisi manusia sebagai pengelola bumi. Dalam kerangka ini, pembangunan yang bermartabat menuntut pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara bijaksana, adil, dan bertanggung jawab, dengan memperhitungkan keberlanjutan kehidupan bersama.

Pemahaman tersebut memperoleh legitimasi yang kuat dalam kerangka konstitusional Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa *"bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."* Ketentuan ini menegaskan bahwa sumber daya alam bukanlah komoditas bebas yang sepenuhnya tunduk pada mekanisme pasar atau kepentingan sektoral, melainkan objek penguasaan negara yang harus dikelola dalam kerangka kepentingan publik.

Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, serta berwawasan lingkungan. Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional yang jelas bahwa pengelolaan sumber daya alam

tidak boleh memisahkan pertumbuhan ekonomi dari perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Dengan demikian, negara memegang mandat untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, sekaligus memastikan bahwa kelestarian lingkungan dan hak generasi mendatang tetap terjaga.

Namun demikian, realitas pengelolaan sumber daya alam di Nusa Tenggara Barat menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara mandat normatif tersebut dan praktik kebijakan di lapangan. Deforestasi, degradasi lingkungan, tekanan kegiatan pertambangan, serta meningkatnya kerentanan terhadap perubahan iklim mengindikasikan bahwa sumber daya alam masih kerap diperlakukan sebagai objek eksploitasi, bukan sebagai amanah yang harus dijaga. Kesenjangan inilah yang menuntut perubahan mendasar dalam cara pandang dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Memahami sumber daya alam sebagai amanah berarti mengakui adanya batas-batas ekologis dalam pembangunan. Alam memiliki daya dukung dan daya tampung yang tidak tak terbatas. Ketika batas-batas tersebut dilampaui, biaya yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga krisis sosial, ekonomi, dan kesehatan yang harus ditanggung masyarakat. Dalam perspektif ini, pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan pada hakikatnya memindahkan beban dan risiko kepada generasi berikutnya, suatu praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan antargenerasi.

Pada tingkat daerah, amanah pengelolaan sumber daya alam juga menuntut keberpihakan yang jelas kepada masyarakat lokal. Sumber daya alam bukan sekadar milik negara dalam pengertian abstrak, melainkan bagian dari ruang hidup, identitas budaya, dan mata pencaharian masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus menjamin perlindungan hak-hak masyarakat, mencegah konflik ruang, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak terpusat pada segelintir aktor, melainkan terdistribusi secara adil dan berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, pengelolaan pertambangan menjadi ujian utama dari konsep amanah pembangunan. Pertambangan memang dapat memberikan kontribusi ekonomi, tetapi tanpa tata kelola yang kuat dan berorientasi keberlanjutan, sektor ini berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis yang bersifat permanen serta memperlebar ketimpangan sosial. Memperlakukan sumber daya alam sebagai amanah berarti menempatkan pertambangan dalam kerangka kehati-hatian ekologis, kewajiban pemulihan lingkungan pascatambang, transparansi perizinan, serta akuntabilitas sosial terhadap masyarakat terdampak.

Lebih jauh lagi, amanah pembangunan menuntut integrasi isu perubahan iklim ke dalam seluruh kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Perlindungan hutan, pengendalian alih fungsi lahan, dan penataan kegiatan ekstraktif tidak hanya merupakan agenda konservasi, tetapi juga bagian dari strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dengan perspektif ini, sumber daya alam harus dipandang sebagai bagian dari sistem penyangga kehidupan yang menentukan ketahanan wilayah dalam menghadapi krisis iklim di masa depan

Dengan demikian, menempatkan sumber daya alam sebagai amanah pembangunan merupakan langkah kunci untuk menata ulang arah pembangunan Nusa Tenggara Barat. Amanah ini menuntut kepemimpinan yang beretika, kebijakan yang berbasis data dan daya dukung lingkungan, serta partisipasi masyarakat yang aktif dan sadar nilai.

10.3 Pertambangan dan Tanggung Jawab Sosial

Pertambangan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Keberadaan sumber daya mineral dan bahan galian sering dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan investasi, pendapatan daerah, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pertambangan tidak dapat dinilai semata dari besarnya kontribusi ekonomi yang dihasilkan, melainkan dari sejauh mana kegiatan tersebut dikelola secara bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan generasi mendatang.

Tanggung jawab sosial dalam pertambangan bukan sekadar kewajiban tambahan atau pelengkap, melainkan bagian integral dari izin sosial (*social license to operate*) yang menentukan legitimasi keberlanjutan kegiatan tambang. Pertambangan yang mengabaikan dampak sosial dan ekologis berpotensi menimbulkan konflik, merusak lingkungan secara permanen, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap negara dan pelaku usaha. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial harus dipahami sebagai fondasi etis dan operasional dalam setiap tahapan kegiatan pertambangan, mulai dari perencanaan, eksploitasi, hingga pascatambang.

Dalam praktik pertambangan, tanggung jawab sosial perusahaan selama ini kerap dipahami melalui kerangka *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR menekankan kewajiban perusahaan untuk memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi, seperti pembangunan fasilitas umum, program pendidikan dan kesehatan, bantuan ekonomi, serta berbagai kegiatan sosial lainnya. Dalam banyak kasus, CSR berfungsi sebagai instrumen kompensasi sosial atas dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal.

Kerangka CSR ini memperoleh dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74, mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini menegaskan bahwa CSR bukan lagi bersifat sukarela (*voluntary*), melainkan kewajiban hukum (*mandatory obligation*) bagi perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam.

Selain itu, kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam sektor pertambangan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mewajibkan pemegang izin usaha pertambangan untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari kegiatan usaha pertambangan. Dengan demikian, CSR dalam pertambangan diposisikan sebagai

bagian dari kewajiban operasional perusahaan, bukan sekadar aktivitas filantropi atau pencitraan sosial.

Namun demikian, meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat, implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam praktik pertambangan masih kerap menghadapi berbagai keterbatasan. CSR sering kali dijalankan secara terpisah dari inti proses bisnis, bersifat programatik dan jangka pendek, serta lebih berorientasi pada aktivitas kompensasi sosial. Akibatnya, CSR belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan struktural seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan distribusi manfaat ekonomi, dan lemahnya tata kelola sumber daya alam. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan CSR, meskipun penting, belum cukup untuk menjawab kompleksitas tantangan pembangunan berkelanjutan di sektor pertambangan.

Keterbatasan tersebut mendorong perlunya pendekatan yang lebih komprehensif melalui kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam upaya pengelolaan pertambangan berkelanjutan. ESG menawarkan paradigma yang lebih menyeluruh dan terintegrasi dibandingkan CSR. Berbeda dengan CSR yang sering diposisikan sebagai aktivitas tambahan, ESG merupakan kerangka tata kelola yang melekat pada keseluruhan proses bisnis pertambangan, mulai dari tahap perencanaan dan eksplorasi, proses produksi, hingga penutupan dan pemulihan lahan pascatambang.

Secara konseptual, ESG menuntut perusahaan untuk menginternalisasi tiga dimensi utama. Dimensi lingkungan (*Environmental*) mencakup pengendalian dampak ekologis, pengelolaan limbah dan air, perlindungan keanekaragaman hayati, serta reklamasi dan rehabilitasi lahan. Dimensi sosial

(*Social*) menekankan perlindungan hak masyarakat, keselamatan dan kesehatan kerja, partisipasi publik, serta keadilan distribusi manfaat bagi masyarakat sekitar wilayah tambang. Sementara itu, dimensi tata kelola (*Governance*) mencakup transparansi perizinan, kepatuhan terhadap regulasi, akuntabilitas pengelolaan pendapatan, serta pencegahan konflik kepentingan dan praktik korupsi.

Adapun prinsip-prinsip ESG tidak berdiri di ruang hampa, melainkan telah terinternalisasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Prinsip perlindungan lingkungan dan keberlanjutan tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan setiap kegiatan usaha memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dimensi sosial dan tata kelola juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur kewajiban pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, reklamasi dan pascatambang, serta kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas perizinan.

Selain itu, penguatan kerangka ESG semakin terlihat melalui kebijakan di sektor keuangan dan investasi, seperti penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dan kewajiban pelaporan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola bagi korporasi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ESG telah bertransformasi menjadi standar tata kelola yang tidak hanya bersifat etis dan sukarela, tetapi juga normatif dan institusional dalam sistem hukum serta kebijakan nasional. ESG kini menjadi bagian dari mekanisme pengambilan keputusan investasi, penilaian risiko usaha, dan pengawasan korporasi.

Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut dalam banyak hal masih berada pada tataran normatif dan administratif. Dalam praktik di lapangan, implementasi prinsip ESG sering kali belum sejalan dengan tujuan yang diharapkan. Kegiatan pertambangan masih menunjukkan kesenjangan antara komitmen yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan dan realitas operasional, terutama dalam hal perlindungan lingkungan, pelibatan masyarakat, dan transparansi tata kelola. Kondisi ini mencerminkan bahwa penguatan regulasi saja tidak otomatis menjamin perubahan praktik, apabila tidak disertai dengan penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan publik yang efektif.

Kesenjangan antara norma dan praktik tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak dapat dipahami semata sebagai kewajiban administratif atau kepatuhan formal terhadap regulasi. Pada tingkat yang lebih mendasar, tanggung jawab sosial membutuhkan landasan ideologis dan kultural yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai nilai bersama. Pandangan universal tentang tanggung jawab sosial menekankan bahwa relasi manusia dengan alam harus didasarkan pada prinsip keharmonisan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap batas-batas ekologis.

Dalam perspektif ini, budaya yang pro-lingkungan menjadi prasyarat penting bagi efektivitas CSR maupun ESG. Tanpa internalisasi nilai-nilai keberlanjutan dalam budaya organisasi, praktik bisnis, dan kesadaran masyarakat, kebijakan ESG berisiko tereduksi menjadi sekadar instrumen pelaporan dan kepatuhan simbolik. Sebaliknya, ketika nilai-nilai pro-lingkungan menjadi bagian dari etos bersama tanggung jawab

sosial dapat berkembang menjadi praktik nyata yang konsisten dan berkelanjutan.

Landasan ideologis bagi etos pro-lingkungan tersebut dalam konteks Indonesia berakar kuat pada Pancasila. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut penghormatan terhadap kehidupan dalam seluruh dimensinya, termasuk kehidupan ekologis yang menopang keberadaan manusia. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara adil, tidak eksploitatif, dan tidak menimbulkan beban ekologis yang timpang bagi kelompok masyarakat tertentu atau generasi mendatang. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar etika sosial-politik, tetapi juga sumber nilai bagi pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Nilai-nilai Pancasila tersebut menemukan resonansi yang kuat dalam kearifan lokal masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dalam tradisi Sasak, Samawa, dan Mbojo, relasi manusia dengan alam tidak dipahami sebagai relasi dominasi, melainkan relasi timbal balik yang sarat tanggung jawab moral. Alam dipandang sebagai ruang hidup bersama yang harus dijaga keseimbangannya, karena kerusakan alam diyakini akan berbalik menjadi penderitaan sosial. Tradisi musyawarah dalam pengelolaan sumber daya, rasa malu (siri' dan nilai kehormatan), serta solidaritas komunal berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk membatasi perilaku eksploitatif dan menjaga harmoni antara manusia dan lingkungannya. Dalam kerangka nilai lokal tersebut, eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak ekologis dan sosial dipandang tidak hanya sebagai kesalahan teknis, tetapi sebagai pelanggaran etika dan budaya.

Oleh karena itu, penguatan CSR dan ESG di NTB tidak dapat dilepaskan dari revitalisasi nilai-nilai lokal yang menempatkan keberlanjutan dan keharmonisan sebagai prinsip hidup bersama. Integrasi antara ideologi Pancasila, kearifan lokal NTB, dan kerangka ESG membuka ruang bagi lahirnya model tanggung jawab sosial yang tidak bersifat administratif semata, melainkan berakar pada kesadaran nilai dan budaya.

Dengan pendekatan ini, tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak lagi dipahami sebagai kewajiban eksternal yang dipaksakan oleh regulasi, melainkan sebagai ekspresi etis dari identitas kolektif. Tanggung jawab tersebut tumbuh dari kesadaran nilai yang hidup dalam masyarakat, negara, dan pelaku usaha. Inilah fondasi yang memungkinkan pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam berjalan seiring dengan pembangunan berkelanjutan, pemuliaan martabat manusia, serta pelestarian lingkungan hidup di Nusa Tenggara Barat.

Lebih jauh lagi, fondasi nilai tersebut beriringan dengan gerakan hijau (*green movement*) yang berkembang secara global. Gerakan hijau lahir dari kesadaran internasional akan keterbatasan sumber daya alam, krisis iklim, dan ketimpangan ekologis yang ditimbulkan oleh model pembangunan ekstraktif. Di tingkat global, gerakan ini mendorong perubahan paradigma dari eksploitasi menuju keberlanjutan, dari pertumbuhan ekonomi semata menuju pembangunan yang berkeadilan secara sosial dan ekologis. Prinsip-prinsip seperti pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, dan keadilan antargenerasi menjadi pijakan bersama dalam merumuskan kebijakan lingkungan dan investasi.

Dalam kerangka global tersebut, ESG, keuangan berkelanjutan, serta komitmen internasional terhadap pengendalian perubahan iklim merupakan manifestasi kelembagaan dari nilai-nilai hijau. Namun, kekuatan sejati gerakan hijau tidak hanya terletak pada kesepakatan internasional atau standar teknis, melainkan pada kemampuannya berakar dalam konteks lokal. Tanpa dukungan budaya dan nilai yang hidup di masyarakat, agenda hijau berisiko menjadi sekadar wacana global yang tidak membumi.

Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam dan pertambangan di Nusa Tenggara Barat memiliki peluang strategis untuk menjembatani nilai global dan kearifan lokal. Integrasi antara ideologi Pancasila, nilai budaya Sasak, Samawa, dan Mbojo, serta prinsip-prinsip gerakan hijau global memungkinkan lahirnya model pembangunan yang kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan. Model ini tidak hanya menjawab tuntutan pasar dan regulasi global, tetapi juga selaras dengan kebutuhan ekologis dan sosial masyarakat NTB.

10.4 Tata Kelola SDA Menuju Pembangunan Hijau

Transformasi tata kelola sumber daya alam menuju pembangunan hijau merupakan respons strategis atas krisis lingkungan, tekanan kegiatan ekstraktif, dan tantangan perubahan iklim yang dihadapi Nusa Tenggara Barat. Pembangunan hijau menempatkan keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi dalam satu kerangka kebijakan yang saling terintegrasi. Dalam kerangka ini, tata kelola sumber daya alam tidak lagi berorientasi pada eksploitasi jangka pendek, melainkan pada perlindungan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan kehidupan bersama.

Salah satu landasan utama pembangunan hijau adalah prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Dimana prinsip ini berkembang dalam teori dan praktik hukum lingkungan internasional sebagai respons atas keterbatasan ilmu pengetahuan dalam memprediksi secara pasti dampak jangka panjang suatu aktivitas manusia terhadap lingkungan hidup. Prinsip kehati-hatian menegaskan bahwa ketidakpastian ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan, terutama ketika suatu kegiatan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius atau bersifat tidak dapat dipulihkan (*irreversible harm*) (United Nations, 1992).

Secara konseptual, prinsip kehati-hatian berangkat dari kritik terhadap pendekatan pembangunan konvensional yang bersifat reaktif, yakni baru mengambil tindakan setelah kerusakan terjadi dan dampaknya nyata. Dalam banyak kasus lingkungan, pendekatan semacam ini terbukti tidak efektif karena kerusakan ekologis sering kali bersifat permanen atau membutuhkan biaya pemulihan yang sangat besar. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian mendorong pergeseran paradigma dari "mengelola dampak" menjadi "mencegah risiko" sejak tahap awal pengambilan keputusan (Raffensperger & Tickner, 1999).

Adapun dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, prinsip kehati-hatian menuntut agar setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan harus didahului oleh penilaian risiko (menejemen resiko) lingkungan dan sosial yang komprehensif, termasuk analisis mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak kumulatif, serta kerentanan sosial masyarakat terdampak. Prinsip ini menegaskan bahwa beban pembuktian tidak sepenuhnya berada pada masyarakat atau negara, melainkan juga pada pelaku usaha untuk menunjukkan

bahwa kegiatannya tidak menimbulkan risiko ekologis yang serius (Sands & Peel, 2018). Ketika terdapat indikasi potensi dampak yang besar, sistemik, atau tidak dapat dipulihkan prinsip kehati-hatian mengharuskan pengambil kebijakan untuk berpihak pada perlindungan lingkungan dan kepentingan publik, meskipun bukti ilmiah yang tersedia belum sepenuhnya konklusif. Artinya kehati-hatian bukanlah penghambat pembangunan, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan tidak menciptakan risiko ekologis dan sosial yang jauh lebih besar di masa depan (Gollier et al ,2000).

Prinsip kehati-hatian juga memiliki dimensi etis dan antargenerasi. Dengan mencegah kerusakan yang berpotensi irreversibel, prinsip ini melindungi hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan produktif. Oleh karena itu, dalam kerangka pembangunan hijau, prinsip kehati-hatian menjadi fondasi normatif yang menghubungkan perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan dalam satu kerangka kebijakan yang utuh.

Selain prinsip kehati-hatian, tata kelola pembangunan hijau juga berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Konsep ini menekankan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Gagasan ini lahir dari kesadaran global bahwa model pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan telah menimbulkan krisis lingkungan, ketimpangan sosial, dan kerentanan ekonomi jangka panjang.

Secara historis, konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali dipopulerkan secara luas melalui laporan *World*

Commission on Environment and Development (WCED) yang berjudul *Our Common Future* pada tahun 1987, yang lebih dikenal sebagai Laporan Brundtland yang mengintegrasikan tentang isu lingkungan, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial dalam satu kerangka konseptual yang utuh.

Menurut Barbier (1987) pembangunan keberlanjutan ini dipahami melalui tiga dimensi utama yang tidak dapat dipisahkan: (1) keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*): (2) keberlanjutan sosial (*social sustainability*); dan (3) keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*).

Keberlanjutan lingkungan menekankan perlindungan ekosistem, daya dukung alam, serta pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Keberlanjutan sosial berkaitan dengan keadilan, pemerataan manfaat pembangunan, perlindungan hak masyarakat, dan kohesi sosial. Sementara itu, keberlanjutan ekonomi menekankan pertumbuhan yang stabil, efisien, dan tidak merusak fondasi ekologis serta sosial. Ketiga dimensi tersebut harus berjalan secara seimbang dan saling memperkuat. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial akan menghasilkan pertumbuhan yang rapuh dan berbiaya tinggi di masa depan. Sebaliknya, perlindungan lingkungan yang mengabaikan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat juga berpotensi menimbulkan ketimpangan dan konflik. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan menuntut integrasi kebijakan lintas sektor serta pengambilan keputusan yang berbasis pada kepentingan jangka panjang.

Dalam perspektif ekonomi lingkungan, pembangunan hijau juga bertumpu pada pengakuan terhadap nilai ekonomi

jasa ekosistem. Hutan, air, tanah, dan keanekaragaman hayati menyediakan layanan ekologis yang menopang kehidupan dan kegiatan ekonomi. Ketika jasa ekosistem ini terdegradasi, biaya pemulihan yang harus ditanggung masyarakat dan negara sering kali jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi jangka pendek yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, tata kelola sumber daya alam harus memasukkan nilai ekologis ke dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan kebijakan publik.

Prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan juga menuntut penguatan kelembagaan dan tata kelola. Negara memiliki peran kunci sebagai pengatur, pengawas, dan penjamin kepentingan publik. Penataan perizinan yang transparan, penegakan hukum lingkungan yang konsisten, serta integrasi kebijakan lintas sektor menjadi prasyarat bagi terwujudnya pembangunan hijau. Tanpa tata kelola yang kuat, prinsip-prinsip keberlanjutan berisiko berhenti pada tataran normatif.

Dalam konteks Nusa Tenggara Barat, tata kelola sumber daya alam menuju pembangunan hijau juga harus berakar pada nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. Prinsip keadilan sosial, musyawarah, dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan memberikan landasan etis bagi pengambilan keputusan publik. Integrasi nilai global pembangunan hijau dengan konteks lokal memungkinkan kebijakan yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan budaya.

Lebih jauh, pembangunan hijau menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam. Partisipasi publik memperkuat akuntabilitas dan mencegah dominasi kepentingan

ekonomi jangka pendek. Dalam teori tata kelola lingkungan, keterlibatan masyarakat merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dengan demikian, tata kelola sumber daya alam menuju pembangunan hijau merupakan upaya menyeluruh untuk menata ulang hubungan antara manusia, alam, dan pembangunan. Prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan menjadi pijakan utama agar pembangunan di Nusa Tenggara Barat tidak lagi menghasilkan krisis ekologis, melainkan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Inilah arah kebijakan yang memungkinkan sumber daya alam benar-benar berfungsi sebagai amanah pembangunan dan fondasi kehidupan bersama yang bermartabat.

BAB XI MENGATASI KEMISKINAN

Pembangunan yang bermartabat pada dasarnya tidak hanya berhenti pada pertumbuhan ekonomi atau peningkatan investasi, akan tetapi diukur dari kemampuannya mengurangi kemiskinan secara nyata dan berkelanjutan. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, agenda pengentasan kemiskinan menempati posisi sentral dalam keseluruhan strategi pembangunan. Hal ini bukan hanya karena tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi dibanding rata-rata nasional, tetapi juga karena karakter kemiskinan yang bersifat struktural dan multidimensional.

Adapun, data pada beberapa tahun terakhir, dinamika ekonomi di NTB menunjukkan telah cukup positif. Hal ini dapa dilihat dari pertumbuhan sektor pariwisata, pertambangan, pertanian, dan jasa memberikan kontribusi terhadap peningkatan output regional. Indikator ketenagakerjaan juga memperlihatkan perbaikan, dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja dan terkendalinya tingkat pengangguran terbuka. Namun demikian, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi pengurangan kemiskinan secara cepat dan merata. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan.

Dalam melihat kemiskinan di NTB sebagian besar terkonsentrasi di wilayah perdesaan, terutama pada rumah

tangga yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian skala kecil dan usaha informal. Pendapatan mereka sangat dipengaruhi oleh musim, harga komoditas, serta akses terhadap modal dan teknologi. Ketika terjadi guncangan, baik berupa kenaikan harga kebutuhan pokok, gagal panen, maupun perlambatan ekonomi, sehingga kelompok ini menjadi yang paling rentan terdampak.

Selain dimensi ekonomi, kemiskinan di NTB juga terkait erat dengan kualitas pendidikan dan kesehatan. Rendahnya tingkat pendidikan membatasi akses terhadap pekerjaan yang lebih produktif dan berupah layak. Sementara itu, keterbatasan akses layanan kesehatan dan gizi berdampak pada kualitas sumber daya manusia jangka panjang. Dalam konteks ini, kemiskinan tidak hanya menjadi persoalan generasi saat ini, tetapi juga berpotensi diwariskan antar generasi apabila tidak ditangani secara komprehensif.

Lebih jauh, kemiskinan ini memiliki karakter kerentanan (*vulnerability*). Tidak sedikit rumah tangga berada sedikit di atas garis kemiskinan, sehingga mudah tergelincir kembali ke dalam kemiskinan ketika menghadapi tekanan ekonomi. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan dengan pendekatan bantuan sesaat, tetapi memerlukan penguatan fondasi ekonomi rumah tangga agar memiliki daya tahan yang lebih kuat.

Dalam kerangka pembangunan NTB yang bermartabat, kemiskinan dipandang sebagai keterbatasan akses terhadap peluang (bekerja secara produktif, memperoleh pendidikan yang layak, mengakses layanan kesehatan, serta berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi secara adil). Oleh karena itu, strategi

pengentasan kemiskinan harus terintegrasi dengan kebijakan penciptaan lapangan kerja, hilirisasi ekonomi, penguatan UMKM, perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta pemberdayaan perdesaan. Pada akhirnya bukan hanya sekadar untuk menekan angka kemiskinan, tetapi membangun fondasi kesejahteraan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat NTB. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial dan peningkatan kualitas hidup yang nyata.

11.1. Dinamika Kemiskinan di NTB

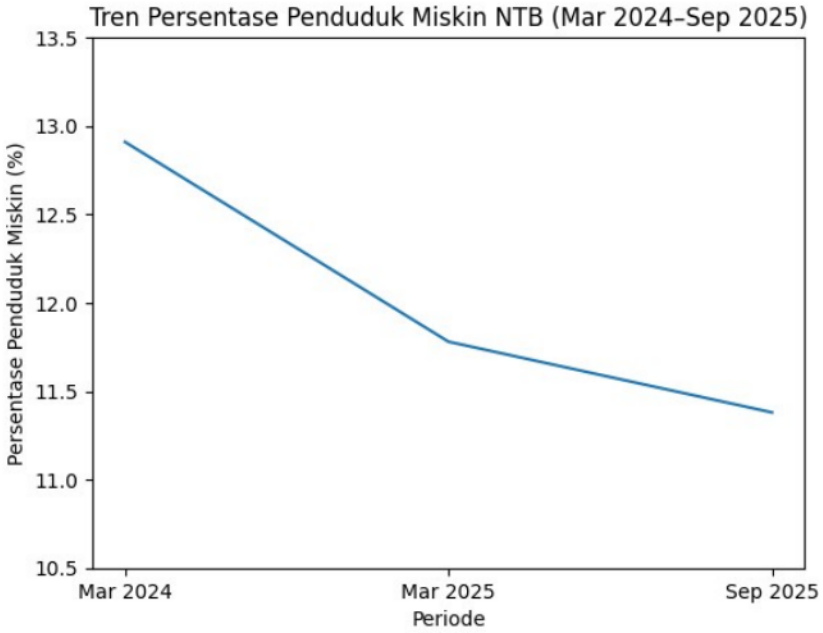
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, dinamika kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren penurunan yang relatif konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan masih berada pada angka yang cukup signifikan baik secara persentase maupun jumlah penduduk terdampak.

Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 11,78 persen. Jumlah penduduk miskin pada periode ini mencapai sekitar 654,57 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan September 2024, angka tersebut menurun sekitar 4,03 ribu jiwa, dan jika dibandingkan dengan Maret 2024 terjadi penurunan yang lebih besar, yakni sekitar 54,44 ribu jiwa. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat dalam satu tahun terakhir.

Perkembangan positif tersebut berlanjut pada September 2025. Persentase penduduk miskin kembali turun menjadi 11,38 persen, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 637,18 ribu jiwa. Artinya, dalam kurun waktu enam bulan terjadi penurunan

sekitar 17,39 ribu jiwa dibandingkan Maret 2025, serta penurunan sekitar 21,42 ribu jiwa dibandingkan September 2024.

Grafik 11.1. Tren Persentase Penduduk Miskin NTB (Mar 2024–Sep 2025)



Sumber : BPS Prov. NTB, 2024 & 2025

Secara spasial, penurunan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Namun, karakter dan laju penurunannya menunjukkan perbedaan yang cukup penting. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, pada Maret 2025

persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan tercatat sekitar 10,41 persen, sedangkan di wilayah perdesaan mencapai sekitar 12,69 persen. Pada periode September 2025, angka tersebut kembali menurun menjadi sekitar 10,05 persen di perkotaan dan 12,26 persen di perdesaan.

Data ini menunjukkan dua hal utama. Pertama, secara absolut dan proporsional, tingkat kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Kesenjangan ini mencerminkan perbedaan struktur ekonomi, akses infrastruktur, dan peluang kerja antara desa dan kota. Kedua, dalam periode Maret–September 2025 terjadi penurunan yang relatif lebih nyata di wilayah perdesaan, yang selama ini menjadi kantong utama kemiskinan NTB.

Adapun penurunan yang lebih terasa di perdesaan dapat ditafsirkan sebagai sinyal positif bahwa intervensi berbasis desa mulai memberikan dampak. Program bantuan sosial yang lebih terintegrasi, stabilisasi harga bahan pokok, pembangunan infrastruktur desa, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar kemungkinan berkontribusi terhadap perbaikan tersebut. Selain itu, pemulihan aktivitas ekonomi pasca-perlambatan global turut mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga pertanian dan usaha kecil di desa.

Namun demikian, secara struktural, dominasi sektor pertanian tradisional di perdesaan tetap menjadi faktor utama tingginya kemiskinan. Sebagian besar rumah tangga miskin menggantungkan penghidupan pada lahan sempit, usaha tani skala kecil, atau pekerjaan informal musiman dengan produktivitas rendah. Pendapatan yang diperoleh sering kali

tidak stabil dan sangat bergantung pada musim serta harga komoditas.

Kerentanan terhadap fluktuasi harga dan perubahan iklim memperbesar risiko jatuhnya rumah tangga ke bawah garis kemiskinan. Ketika harga hasil panen turun atau terjadi gagal panen akibat cuaca ekstrem, pendapatan petani kecil dapat menurun drastis. Selain itu, keterbatasan akses pembiayaan formal menyebabkan rumah tangga miskin sulit melakukan investasi produktif untuk meningkatkan skala usaha atau mengadopsi teknologi yang lebih efisien.

Di sisi lain, kemiskinan perkotaan memiliki karakter berbeda. Di kota, kemiskinan lebih banyak berkaitan dengan keterbatasan akses pekerjaan formal, persaingan ketat di sektor informal, serta tingginya biaya hidup. Walaupun persentasenya lebih rendah dibanding perdesaan, kemiskinan perkotaan sering kali bersifat lebih kompleks karena terkait dengan kepadatan penduduk, keterbatasan hunian layak, dan pekerjaan berupah rendah di sektor jasa informal.

Dari perbedaan karakter kemiskinan antara desa dan kota itulah akan menuntut pendekatan kebijakan yang tidak seragam. Maka strategi yang efektif harus mempertimbangkan struktur ekonomi, pola pekerjaan, serta kerentanan yang khas pada masing-masing wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada wilayah perdesaan, akar persoalan utama terletak pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian serta terbatasnya diversifikasi ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan harus diarahkan pada:

Pertama, peningkatan produktivitas pertanian. Dimana modernisasi budidaya, perbaikan irigasi, penggunaan benih unggul, serta akses terhadap teknologi pascapanen akan meningkatkan hasil per hektare dan stabilitas produksi. Produktivitas yang lebih tinggi berarti peningkatan pendapatan rumah tangga tani secara langsung.

Kedua, hilirisasi dan nilai tambah. Pertanian tidak boleh berhenti pada produksi bahan mentah. Pengolahan hasil pertanian di tingkat lokal, baik melalui industri kecil, koperasi desa, maupun kemitraan dengan industri pengolahan, hal ini akan memperpanjang rantai nilai dan menciptakan lapangan kerja tambahan di desa.

Ketiga, diversifikasi usaha non-pertanian. Pengembangan UMKM, kerajinan, ekonomi kreatif, dan desa wisata menjadi alternatif sumber pendapatan yang mengurangi ketergantungan pada musim dan harga komoditas. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi risiko kemiskinan akibat guncangan ekonomi atau iklim.

Keempat, penguatan kelembagaan ekonomi desa. Koperasi, BUMDes, dan kelompok usaha bersama dapat meningkatkan posisi tawar petani dan pelaku usaha kecil, mempermudah akses pembiayaan, serta memperkuat pemasaran kolektif. Kelembagaan yang kuat menjadi fondasi ekonomi desa yang lebih resilien.

Sedangkan, kemiskinan perkotaan lebih banyak terkait dengan keterbatasan akses pekerjaan formal dan tingginya biaya hidup. Oleh karena itu, kebijakan di wilayah kota perlu menitikberatkan pada:

Pertama, perluasan sektor formal. Investasi pada industri pengolahan, jasa produktif, dan sektor konstruksi dapat menyerap tenaga kerja dengan perlindungan sosial yang lebih baik. Simplifikasi perizinan usaha dan insentif bagi pelaku usaha untuk melakukan formalisasi akan meningkatkan kualitas pekerjaan.

Kedua, peningkatan keterampilan tenaga kerja. Pelatihan vokasional berbasis kebutuhan industri, literasi digital, dan sertifikasi profesi menjadi kunci agar tenaga kerja miskin kota dapat beralih dari sektor informal berupah rendah ke pekerjaan yang lebih produktif.

Ketiga, penguatan jaring pengaman sosial. Pekerja sektor informal perkotaan, seperti pedagang kecil, buruh harian, dan pekerja jasa sederhana, memerlukan perlindungan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, subsidi kesehatan, serta bantuan sementara ketika terjadi guncangan ekonomi.

11.2. Kemiskinan Struktural dan Faktor Penyebab

Seperti yang telah diterangkan, bahwa kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki karakter yang tidak sepenuhnya bersifat sementara (*transien)*, tetapi juga struktural. Artinya, kemiskinan tidak hanya dipicu oleh penurunan pendapatan sesaat, melainkan berakar pada sistem ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang membatasi mobilitas masyarakat untuk keluar dari kondisi miskin secara berkelanjutan.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, sebagian besar penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan dan menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian skala kecil. Kondisi ini memperlihatkan adanya hubungan yang kuat

antara struktur ekonomi daerah dan pola kemiskinan yang terbentuk.

Secara struktural, perekonomian perdesaan NTB masih bertumpu pada pertanian tradisional dengan karakteristik lahan sempit, teknologi yang sederhana, produktivitas rendah, serta ketergantungan pada musim. Skala usaha yang kecil menyebabkan pendapatan rumah tangga tani relatif terbatas dan sulit berkembang. Sebagian besar hasil produksi dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa proses hilirisasi, sehingga nilai tambah yang dinikmati petani relatif rendah.

Keterkaitan antara struktur ekonomi dan kemiskinan terlihat dari fakta bahwa sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar, tetapi kontribusi pendapatan per kapita dari sektor ini relatif lebih rendah dibanding sektor industri atau jasa modern. Artinya, dominasi sektor berproduktivitas rendah dalam struktur ekonomi daerah berimplikasi langsung pada tingginya tingkat kemiskinan perdesaan.

Selain faktor produktivitas, akses terhadap pasar dan infrastruktur juga menjadi pembatas. Keterbatasan jalan produksi, irigasi, fasilitas penyimpanan, dan akses informasi harga mempersempit peluang petani untuk meningkatkan pendapatan. Dalam situasi demikian, rumah tangga perdesaan menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi harga dan perubahan iklim, yang pada akhirnya memperbesar risiko jatuh atau kembali ke dalam kemiskinan.

Lebih jauh, keterbatasan diversifikasi usaha non-pertanian di desa menyebabkan sumber pendapatan rumah tangga tidak cukup beragam. Ketika hasil panen menurun atau harga komoditas turun, tidak banyak alternatif ekonomi yang tersedia.

Hal ini memperlihatkan bahwa kemiskinan di NTB tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dengan sempitnya struktur kesempatan ekonomi.

1. Struktur Ekonomi Berbasis Produktivitas Rendah

Struktur ekonomi NTB masih didominasi sektor primer, khususnya pertanian, peternakan, dan perikanan skala kecil. Meskipun sektor ini menyerap tenaga kerja terbesar, tingkat produktivitas dan nilai tambahnya relatif rendah. Banyak rumah tangga tani mengelola lahan sempit dengan teknologi sederhana serta ketergantungan tinggi pada musim hujan.

Berdasarkan data dari Sakernas pada Februari 2025 (BPS Provinsi NTB), distribusi penduduk bekerja menurut lapangan usaha menunjukkan komposisi sebagai berikut:

Tabel 11.1 Struktur Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha di NTB Tahun 2025

Sektor Lapangan Usaha	Persentase Tenaga Kerja (%)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan	±37,0
Perdagangan Besar & Eceran	±17,5
Jasa Kemasyarakatan (pendidikan, kesehatan, dll.)	±10,8
Industri Pengolahan	±9,0
Konstruksi	±8,3
Akomodasi & Makan Minum	±6,5

Sektor Lapangan Usaha	Persentase Tenaga Kerja (%)
Transportasi & Pergudangan	±4,2
Pertambangan & Penggalian	±2,0
Lainnya	±4,7

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2025

Data diatas menunjukkan bahwa dominasi sektor berbasis sumber daya alam. Sektor primer penyerap tenaga kerja terbesar, dengan kontribusi sekitar 37 persen dari total penduduk bekerja. Angka ini menegaskan bahwa lebih dari sepertiga angkatan kerja masih bergantung pada aktivitas ekonomi tradisional yang umumnya berproduktivitas relatif rendah dan sangat dipengaruhi faktor musim serta harga komoditas. Sementara, sektor pertambangan menyerap sekitar 2 persen tenaga kerja, apabila hal ini ikut diperhitungkan, maka total sektor berbasis sumber daya alam mencapai hampir 40 persen dari keseluruhan struktur tenaga kerja daerah. Komposisi ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi NTB masih bertumpu pada ekstraksi dan produksi primer, sementara sektor pengolahan dan industri hilir belum berkembang secara signifikan sebagai penyerap tenaga kerja utama.

Di sisi lain, sektor industri pengolahan baru menyerap sekitar 9 persen tenaga kerja. Proporsi ini mencerminkan bahwa proses transformasi menuju ekonomi berbasis industri bernilai tambah masih berjalan terbatas. Padahal, sektor industri pengolahan memiliki potensi besar dalam

meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperluas lapangan kerja formal, serta mendorong stabilitas pendapatan masyarakat.

Pada sektor jasa memang mengalami perkembangan, terutama pada perdagangan, akomodasi, dan layanan kemasyarakatan. Namun, sebagian besar pekerjaan di sektor jasa masih berada pada kategori perdagangan kecil dan jasa sederhana dengan tingkat produktivitas menengah ke bawah.

Kondisi struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer berproduktivitas rendah menimbulkan sejumlah konsekuensi ekonomi yang saling berkaitan.

Pertama, pendapatan rumah tangga menjadi tidak stabil, karena sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas dan hasil panen yang dipengaruhi musim maupun kondisi cuaca. Ketika harga turun atau terjadi gagal panen, pendapatan petani dan nelayan dapat menurun drastis dalam waktu singkat.

Kedua, nilai tambah yang dihasilkan relatif rendah, karena sebagian besar produk dijual dalam bentuk mentah tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut. Akibatnya, margin keuntungan yang dinikmati produsen di tingkat desa sangat terbatas, sementara keuntungan lebih besar justru diperoleh pada tahapan distribusi dan pengolahan di luar daerah.

Ketiga, keterbatasan pendapatan tersebut akan menyebabkan akumulasi modal berjalan lambat. Rumah tangga sulit melakukan investasi untuk memperluas lahan,

membeli peralatan yang lebih modern, atau mengembangkan usaha alternatif. Siklus ini memperkuat ketergantungan pada pola produksi tradisional dengan produktivitas yang stagnan.

Rangkaian kondisi tersebut menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Selama transformasi menuju sektor bernilai tambah tinggi berjalan lambat, maka dominasi sektor berproduktivitas rendah akan terus mempertahankan kemiskinan dalam bentuk struktural. Oleh karena itu, percepatan transformasi ekonomi menjadi kunci untuk memutus lingkaran tersebut dan mendorong peningkatan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan.

2. Rendahnya Pendidikan dan Keterampilan

Selain struktur ekonomi yang berproduktivitas rendah, faktor lain memperkuat kemiskinan struktural di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang masih terbatas.

Berdasarkan publikasi BPS Provinsi NTB 2025, rata-rata lama sekolah penduduk NTB masih berada di kisaran 7–8 tahun, yang berarti secara umum penduduk hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP. Sehigga komposisi angkatan kerja juga menunjukkan bahwa lulusan pendidikan dasar dan menengah pertama masih mendominasi, sementara proporsi lulusan pendidikan tinggi relatif kecil dibanding rata-rata nasional.

Tabel 11.2 Komposisi Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di NTB (2024–2025)

Indikator Pendidikan	Persentase / Tahun
Belum Tamat SD	16,9 %
Tamat SD	24,3 %
Tamat SMP	23,1 %
Tamat SMA	26,3 %
Perguruan Tinggi	9,4 %

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2025

Kondisi ini memiliki implikasi langsung terhadap struktur pekerjaan. Tenaga kerja dengan pendidikan rendah cenderung terserap pada sektor informal, pertanian tradisional, perdagangan kecil, atau pekerjaan jasa sederhana dengan tingkat produktivitas dan upah yang terbatas. Sebaliknya, sektor industri pengolahan modern, jasa profesional, dan ekonomi digital memerlukan keterampilan teknis, manajerial, serta literasi teknologi yang lebih tinggi.

Rendahnya pendidikan juga mempersempit mobilitas sosial. Individu dengan keterampilan terbatas memiliki peluang lebih kecil untuk berpindah ke sektor bernilai tambah tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan fenomena *intergenerational poverty*, yaitu kemiskinan diwariskan antar generasi karena keterbatasan akses pendidikan yang berkualitas.

Selain tingkat pendidikan formal, persoalan lain adalah kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja (*skills mismatch*). Banyak lulusan sekolah menengah kejuruan belum sepenuhnya memiliki keterampilan praktis sesuai standar industri. Tanpa penguatan pendidikan vokasional berbasis kebutuhan sektor unggulan, maka tenaga kerja lokal sulit bersaing dan beralih ke pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi.

3. Akses Terbatas terhadap Modal dan Aset Produktif

Faktor struktural lain yang memperkuat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap modal dan aset produktif. Dalam banyak kasus, rumah tangga miskin tidak hanya memiliki pendapatan rendah, tetapi juga minim kepemilikan aset yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi atau mengembangkan usaha.

Di sektor pertanian misalnya, sebagian besar petani mengelola lahan dalam skala kecil dengan kepemilikan terbatas. Hal ini tentunya menyebabkan produktivitas dan pendapatan sulit meningkat secara signifikan. Tanpa perluasan lahan, mekanisasi, atau diversifikasi usaha, potensi peningkatan pendapatan menjadi terbatas.

Selain lahan, kepemilikan alat produksi seperti mesin pertanian, alat pengolahan, maupun sarana penyimpanan juga masih rendah. Akibatnya, petani dan pelaku usaha kecil akan sulit meningkatkan kualitas serta daya saing produknya.

Selain itu, keterbatasan akses ke pembiayaan formal menjadi hambatan utama. Banyak rumah tangga miskin tidak memiliki agunan, legalitas usaha, atau rekam jejak kredit yang memadai untuk memperoleh pinjaman dari lembaga perbankan.

Meskipun program kredit mikro dan pembiayaan UMKM telah tersedia, pemanfaatannya belum merata, terutama di wilayah perdesaan. Keterbatasan literasi keuangan dan jarak geografis terhadap lembaga keuangan formal turut mempersempit akses tersebut.

Akibatnya, sebagian pelaku usaha kecil terpaksa bergantung pada pinjaman informal dengan bunga relatif tinggi, yang justru memiliki berisiko memperburuk kondisi keuangan rumah tangga.

4. Ketimpangan Wilayah dan Infrastruktur

Kemiskinan struktural di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan antarwilayah dan keterbatasan infrastruktur dasar. Perbedaan tingkat perkembangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara kawasan yang telah berkembang dan yang relatif tertinggal, menciptakan kesenjangan kesempatan ekonomi yang nyata.

Saat ini aktivitas ekonomi modern (seperti : industri pengolahan, jasa keuangan, perdagangan skala besar) lebih terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan tertentu, terutama di kawasan perkotaan dan wilayah yang memiliki konektivitas lebih baik. Sementara itu, sebagian wilayah perdesaan dan daerah yang jauh dari pusat kota masih

sangat bergantung pada sektor primer. Konsentrasi ini menyebabkan distribusi peluang kerja formal tidak merata. Penduduk di wilayah dengan infrastruktur terbatas memiliki akses yang lebih kecil terhadap pekerjaan produktif dan berupah layak.

Selain itu, kesenjangan infrastruktur fisik seperti jalan produksi, jaringan irigasi, fasilitas penyimpanan hasil pertanian, serta akses transportasi meningkatkan biaya distribusi dan menurunkan efisiensi ekonomi. Di beberapa wilayah perdesaan, akses ke pasar utama memerlukan biaya logistik yang relatif tinggi. Hal ini mengurangi margin keuntungan produsen lokal dan mempersempit daya saing produk. Tanpa infrastruktur memadai, potensi ekonomi lokal sulit berkembang secara optimal.

Selain infrastruktur fisik, kesenjangan juga terlihat pada akses digital dan layanan publik. Keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah menghambat akses terhadap informasi harga, pemasaran daring, serta layanan keuangan digital. Dalam era ekonomi berbasis teknologi, ketertinggalan digital berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi.

Demikian pula, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas belum sepenuhnya merata. Wilayah dengan fasilitas pendidikan terbatas cenderung menghasilkan sumber daya manusia dengan kompetensi lebih rendah, yang pada akhirnya memperkuat kemiskinan struktural.

Artinya, ketimpangan antar wilayah menciptakan hambatan mobilitas ekonomi. Penduduk dari wilayah

tertinggal sering kali harus bermigrasi ke pusat kota untuk mencari pekerjaan, yang berisiko menimbulkan tekanan sosial baru seperti urbanisasi tidak terencana dan pertumbuhan sektor informal perkotaan.

11.3. Peningkatan Pendapatan Berbasis Produktivitas

Pengentasan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat bertumpu semata pada bantuan sosial atau transfer tunai semata. Namun, ada pendekatan yang lebih berkelanjutan adalah peningkatan pendapatan berbasis produktivitas, yaitu memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat agar mampu/dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi secara mandiri dan berkesinambungan.

Dalam hal ini strategi peningkatan pendapatan berbasis produktivitas menempatkan produktivitas sebagai inti kebijakan pembangunan. Dalam teori pertumbuhan neoklasik, yang dimaksud dengan peningkatan produktivitas (*Total Factor Productivity/TFP*) merupakan determinan utama pertumbuhan jangka panjang, karena akumulasi modal semata tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan (Solow, 1956). Sementara itu, teori transformasi struktural menjelaskan bahwa perpindahan tenaga kerja dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor berproduktivitas tinggi setidaknya menjadi kunci peningkatan pendapatan nasional (Lewis, 1954).

Artinya, dengan adanya peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui modernisasi teknologi, hilirisasi, dan integrasi rantai nilai akan menghasilkan *multiplier effect* yang signifikan terhadap pendapatan rumah tangga perdesaan. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan berbasis kapabilitas (*capability approach*) yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas

manusia sebagai fondasi pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan (Sen, 1999).

1. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja mencerminkan besarnya *output* yang dihasilkan per pekerja. Dalam konteks NTB, peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat terkait dengan kualitas pendidikan, keterampilan teknis, dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi.

Sebagian besar tenaga kerja di NTB masih terserap pada sektor berproduktivitas menengah ke bawah. Tanpa peningkatan keterampilan, pekerja cenderung terjebak pada pekerjaan informal dengan pendapatan rendah. Oleh karena itu, strategi peningkatan produktivitas tenaga kerja harus mencakup:

a) Penguatan pendidikan vokasional berbasis kebutuhan sektor unggulan (agroindustri, perikanan, pariwisata, konstruksi).

b) Program *upskilling* dan *reskilling* bagi pekerja informal.

c) Sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.

d) Literasi digital dan kewirausahaan untuk menghadapi ekonomi berbasis teknologi.

Sehingga dalam hal ini, peningkatan produktivitas tenaga kerja tidak hanya meningkatkan upah individu, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi daerah secara keseluruhan.

2. Produktivitas Lahan dan Sumber Daya Alam

Sebagai daerah dengan basis agraris dan maritim, peningkatan produktivitas lahan dan sumber daya alam menjadi krusial. Produktivitas lahan yang rendah sering kali disebabkan oleh:

a) Penggunaan teknologi tradisional.

b) Irigasi yang belum optimal.

c) Akses terbatas terhadap benih unggul dan pupuk berkualitas.

Maka, strategi peningkatan produktivitas mencakup modernisasi pertanian, penerapan teknologi presisi (smart farming), perbaikan manajemen air, serta penguatan sistem pascapanen. Pada sektor kelautan dan perikanan juga memiliki potensi besar. Pengolahan hasil laut, *cold storage*, dan sistem distribusi modern akan meningkatkan nilai tambah dan mengurangi kehilangan hasil (*post-harvest loss*).

Produktivitas lahan yang meningkat, pendapatan rumah tangga perdesaan dapat meningkat tanpa perlu ekspansi lahan yang berisiko terhadap keberlanjutan lingkungan.

3. Produktivitas Usaha Mikro dan UMKM

UMKM merupakan tulang punggung ekonomi lokal NTB. Namun banyak UMKM masih beroperasi pada skala subsisten dengan manajemen sederhana dan akses pasar terbatas. Dalam upaya peningkatan produktivitas UMKM dapat dilakukan melalui:

a) Akses pembiayaan inklusif dan pendampingan manajemen usaha.

b) Digitalisasi pemasaran dan pencatatan keuangan.

c) Standarisasi produk dan peningkatan kualitas kemasan.

d) Integrasi UMKM dalam rantai pasok industri dan pariwisata.

Ketika produktivitas UMKM meningkat, nilai *output* per pelaku usaha bertambah, skala usaha membesar, dan lapangan kerja baru tercipta. Transformasi UMKM dari usaha mikro subsisten menjadi usaha kecil-menengah produktif akan mempercepat pengurangan kemiskinan.

4. Produktivitas Sektor Unggulan Daerah

Setiap daerah memiliki sektor unggulan yang menjadi lokomotif pertumbuhan. Di NTB, sektor unggulan meliputi pertanian komoditas tertentu, perikanan, pariwisata, serta pertambangan. Maka, produktivitas sektor unggulan harus ditingkatkan melalui:

a) Hilirisasi dan industrialisasi berbasis komoditas lokal.

b) Peningkatan standar kualitas dan sertifikasi produk.

c) Investasi pada infrastruktur pendukung (logistik, pelabuhan, konektivitas digital).

d) Penguatan ekosistem investasi dan kemitraan usaha.

Produktivitas sektor unggulan yang tinggi akan menghasilkan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap sektor lain, seperti perdagangan, jasa transportasi, dan industri pendukung.

11.4. Perlindungan Sosial yang Tepat Sasaran

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, strategi peningkatan produktivitas harus berjalan beriringan dengan sistem perlindungan sosial yang efektif dan adaptif. Transformasi ekonomi memang menjadi fondasi jangka panjang dalam pengurangan kemiskinan, namun tanpa perlindungan sosial yang memadai, kelompok rentan akan tetap terpapar risiko guncangan ekonomi yang dapat menghapus kemajuan yang telah dicapai. Oleh karena itu, perlindungan sosial berfungsi sebagai penyangga stabilitas sekaligus jembatan menuju kemandirian ekonomi.

Perlindungan sosial memiliki tiga fungsi utama:

1. Protektif, yaitu melindungi rumah tangga miskin dari guncangan ekonomi seperti kenaikan harga pangan, gagal panen, bencana alam, atau kehilangan pekerjaan. Dalam konteks NTB yang sebagian wilayahnya bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, risiko fluktuasi harga dan faktor cuaca sangat tinggi. Bantuan sosial tunai, subsidi kebutuhan pokok, dan jaminan kesehatan menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi rumah tangga.
2. Preventif, yaitu mencegah kelompok rentan (seperti: pekerja informal, buruh harian, dan rumah tangga hampir miskin) jatuh ke dalam kemiskinan. Perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, asuransi

pertanian, serta program perlindungan berbasis komunitas dapat mengurangi risiko penurunan kesejahteraan akibat kejadian tak terduga.

3. Promotif, yaitu mendorong mobilitas sosial melalui dukungan terhadap pendidikan, kesehatan, dan akses modal usaha. Program beasiswa bagi anak dari keluarga miskin, intervensi penurunan stunting, serta bantuan modal produktif untuk UMKM merupakan contoh kebijakan yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga meningkatkan kapasitas jangka panjang penerima manfaat.

Adapun perlindungan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dijabarkan dalam dua kerangka utama:

1. Penguatan Tata Kelola dan Akurasi Sasaran

    a) Basis Data Terpadu dan Pemutakhiran Berkala

        Efektivitas perlindungan sosial sangat bergantung pada kualitas data. Oleh karena itu, diperlukan sistem data kesejahteraan sosial yang terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Pemutakhiran berkala dengan verifikasi lapangan setidaknya akan mengurangi kesalahan sasaran, baik penerima yang tidak layak (*inclusion error*) maupun warga rentan yang belum terdaftar (*exclusion error*).

    b) Integrasi Antar-Program

        Sinkronisasi antara berbagai program, perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih atau

kekosongan perlindungan. Integrasi ini juga memungkinkan pemetaan kebutuhan rumah tangga secara lebih komprehensif.

c) Digitalisasi dan Transparansi

Digitalisasi penyaluran melalui sistem non-tunai meningkatkan efisiensi, mempercepat distribusi, serta mengurangi potensi kebocoran. Selain itu, sistem pelaporan berbasis daring dan mekanisme pengaduan masyarakat akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

d) Pengawasan Partisipatif

Pelibatan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga lokal dalam proses verifikasi serta monitoring distribusi bantuan akan memperkuat legitimasi program. Pengawasan partisipatif juga meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan sosial.

2. Integrasi Perlindungan Sosial dengan Pemberdayaan Produktif

Perlindungan sosial tidak boleh berhenti pada fungsi protektif semata. Ia harus dirancang sebagai mekanisme transisi menuju kemandirian ekonomi.

a) Bantuan sebagai Titik Masuk Pemberdayaan

Rumah tangga penerima bantuan dapat dipetakan untuk diikutsertakan dalam program peningkatan keterampilan, pelatihan vokasional, atau program padat karya produktif. Dengan

demikian, bantuan menjadi pintu masuk menuju peningkatan kapasitas.

b) Keterhubungan dengan UMKM dan Pembiayaan Mikro

Penerima bantuan yang memiliki usaha kecil dapat diarahkan pada akses pembiayaan mikro, pendampingan usaha, serta integrasi ke dalam rantai pasok lokal. Pendekatan ini mendorong transformasi dari ketergantungan menjadi produktivitas.

c) Perlindungan Sosial Adaptif

Dalam konteks NTB yang rentan terhadap fluktuasi harga dan faktor iklim, sistem perlindungan sosial harus adaptif terhadap krisis. Skema bantuan yang dapat diperluas secara cepat saat terjadi guncangan ekonomi akan menjaga stabilitas sosial sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, pada akhirnya perlindungan sosial memiliki peran ganda, yakni:

1. Menjaga stabilitas jangka pendek, dengan melindungi kelompok rentan dari guncangan.
2. Mendorong mobilitas jangka panjang, melalui integrasi dengan strategi peningkatan produktivitas.

11.5. Pemberdayaan Perdesaan

Pemberdayaan perdesaan merupakan strategi kunci dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat,

mengingat sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah desa dan menggantungkan hidup pada sektor pertanian serta usaha mikro skala kecil. Tanpa transformasi ekonomi desa, penurunan kemiskinan akan berjalan lambat dan rentan terhadap guncangan. Pemberdayaan perdesaan yang dimaksud tidak hanya berarti pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kapasitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan masyarakat desa agar mampu menjadi pusat pertumbuhan baru.

Adapun lima pilar Pemberdayaan Perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana berikut:

1. Transformasi Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal

   Transformasi ekonomi desa harus dimulai dari identifikasi potensi unggulan masing-masing wilayah. Dimana setiap desa memiliki karakteristik sumber daya yang berbeda, seperti: pertanian lahan kering, hortikultura, peternakan, perikanan tangkap, budidaya rumput laut, kerajinan, maupun wisata alam dan budaya.

   Maka hal tersebut diperlukan sebuah transformasi melalui:

   - Pemetaan komoditas unggulan desa secara berbasis data.
   - Pengembangan klaster produksi agar usaha tidak berjalan sendiri-sendiri.
   - Hilirisasi skala desa, seperti pengolahan hasil pertanian, pengemasan modern, dan sertifikasi produk.

- Kemitraan dengan sektor swasta untuk memperluas akses pasar.

Dengan pendekatan ini, desa tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga penghasil produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan.

2. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa

Kelembagaan merupakan fondasi keberlanjutan ekonomi desa. Tanpa organisasi yang kuat, usaha masyarakat akan cenderung terfragmentasi dan sulit berkembang.

Adapun penguatan kelembagaan tersebut dapat dilakukan melalui:

- Revitalisasi koperasi dan BUMDes sebagai agregator produksi dan pemasaran.
- Peningkatan kapasitas manajerial pengurus melalui pelatihan tata kelola dan akuntabilitas.
- Konsolidasi produksi untuk meningkatkan skala ekonomi.
- Peningkatan akses pembiayaan kolektif melalui lembaga keuangan formal.

Artinya dalam hal ini, bahwa kelembagaan yang sehat memungkinkan petani dan pelaku UMKM memperoleh posisi tawar lebih baik, mengurangi biaya produksi, serta meningkatkan efisiensi distribusi.

3. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Desa

Produktivitas desa sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur. Tanpa jalan produksi yang memadai, irigasi yang stabil, dan akses pasar yang lancar, potensi ekonomi desa tidak dapat berkembang optimal.

Adapun langkah strategis guna meningkatkan dan memaksimalkan infrastruktur dan konektivitas desa dapat meliputi:

- Percepatan pembangunan jalan produksi dan irigasi pertanian.
- Penyediaan fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil.
- Perluasan konektivitas digital hingga tingkat desa.
- Penguatan transportasi dan logistik antarwilayah.
- Konektivitas digital yang dapat membuka akses ke pemasaran daring, informasi harga, serta layanan keuangan digital yang mendukung UMKM desa.

4. Diversifikasi Sumber Pendapatan

Ketergantungan pada satu komoditas atau satu sektor meningkatkan risiko ekonomi. Oleh karena itu, desa perlu mendorong diversifikasi usaha. Adapun diversifikasi dapat dilakukan melalui:

- Pengembangan usaha-usaha non-pertanian, seperti: kerajinan, perdagangan lokal, dan jasa.
- Integrasi sektor pertanian dengan pariwisata desa (agrowisata).

- Pengembangan industri rumah tangga berbasis komoditas lokal.
- Pemanfaatan ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal.

Dengan hal tersebut, diversifikasi akan memperluas kesempatan kerja, terutama bagi perempuan dan generasi muda, serta mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga dan musim.

5. Integrasi dengan Strategi Pengurangan Kemiskinan

Pemberdayaan perdesaan harus terhubung langsung dengan kebijakan pengurangan kemiskinan. Rumah tangga miskin dapat diprioritaskan dalam program peningkatan produktivitas, pelatihan keterampilan, serta akses pembiayaan mikro. Pendekatan integratif ini mencakup:

- Sinkronisasi data kemiskinan dengan program pemberdayaan desa.
- Integrasi bantuan sosial dengan pelatihan dan pendampingan usaha.
- Pengembangan program padat karya produktif berbasis kebutuhan desa.

Dengan pendekatan ini, desa tidak hanya menjadi lokasi implementasi program sosial, tetapi menjadi pusat transformasi ekonomi yang berorientasi pada kemandirian.

11.6. Dimensi Multidimensional Kemiskinan

Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kekurangan pendapatan di bawah garis kemiskinan. Pendekatan modern dalam ekonomi

pembangunan menegaskan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional, hal ini mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perumahan layak, sanitasi, air bersih, perlindungan sosial, hingga partisipasi dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Dengan demikian, kemiskinan bukan hanya persoalan "berapa besar pendapatan", tetapi "seberapa luas kesempatan hidup yang tersedia".

Pendekatan ini sejalan dengan kerangka *capability approach* yang menekankan bahwa kesejahteraan ditentukan oleh kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai dan produktif. Dalam konteks NTB, rumah tangga yang secara nominal berada sedikit di atas garis kemiskinan bisa saja tetap mengalami deprivasi dalam aspek pendidikan, kesehatan, atau akses layanan dasar. Sebaliknya, peningkatan pendapatan tanpa perbaikan kualitas hidup tidak otomatis menghapus kerentanan.

Melihat kemiskinan melalui kacamata multidimensional berarti hanya mengakui bahwa indikator tunggal tidaklah cukup menggambarkan atas kompleksitas kondisi sosial ekonomi masyarakat. Misalnya, anak dari keluarga berpendapatan rendah yang mengalami stunting berisiko memiliki produktivitas lebih rendah saat dewasa. Rumah tangga yang tinggal di hunian tidak layak dan tanpa sanitasi memadai menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi. Masyarakat yang tidak memiliki akses air bersih atau listrik akan tertinggal dalam pemanfaatan teknologi dan peluang ekonomi modern. Karena itu, pengurangan kemiskinan di NTB harus mengintegrasikan berbagai kebijakan dalam satu kerangka pembangunan terpadu. Strategi tersebut mencakup:

1. Pendidikan, untuk meningkatkan kapabilitas dan mobilitas sosial jangka panjang.
2. Kesehatan dan gizi, untuk memastikan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
3. Perumahan dan layanan dasar, untuk menjamin kualitas hidup yang layak.
4. Perlindungan sosial, untuk mengurangi kerentanan terhadap guncangan ekonomi.
5. Transformasi ekonomi dan peningkatan produktivitas, untuk menciptakan pendapatan yang berkelanjutan.

Pendekatan terpadu ini memastikan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan tidak berjalan secara parsial atau sektoral, melainkan saling menguatkan satu dengan yang lain. Peningkatan pendapatan tanpa pendidikan tidak cukup; bantuan sosial tanpa pemberdayaan tidak berkelanjutan; pembangunan infrastruktur tanpa peningkatan kualitas manusia tidak optimal.

Dengan memahami kemiskinan sebagai fenomena multidimensional, maka proyeksi pembangunan NTB diarahkan tidak hanya untuk menurunkan angka statistik kemiskinan, tetapi untuk memperluas akses masyarakat terhadap kehidupan yang lebih sehat, produktif, dan bermartabat. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB XII BUDAYA POLITIK BERMARTABAT

"Eksistensi biologis manusia telah menjadi politis dengan cara-cara baru. Objek, target, dan taruhan dari politik 'vital' baru ini adalah kehidupan itu sendiri." (Nikolas Rose, 2007)

12.1 Fondasi Budaya Politik Bermartabat

Politik pada hakikatnya adalah proses pengelolaan kehidupan bersama melalui pengambilan keputusan yang mengikat masyarakat secara luas. Secara etimologis, politik berakar dari istilah *polis* dalam tradisi Yunani Kuno, yang menunjuk pada ruang hidup bersama warga negara. Dalam makna awal ini, politik tidak sekadar menyangkut kekuasaan negara, melainkan mencakup seluruh upaya manusia untuk mengatur, menjaga, dan mengarahkan kehidupan kolektif agar berlangsung tertib, adil, dan bermakna (Aristotle, 1998).

Dalam perkembangan ilmu politik modern, secara idealis politik telah dipahami sebagai aktivitas yang berkaitan dengan distribusi nilai-nilai yang bersifat mengikat secara otoritatif dalam masyarakat. Politik menentukan siapa memperoleh apa, dengan cara bagaimana, dan untuk tujuan apa. Kekuasaan menjadi instrumen utama, namun kekuasaan tersebut tidak pernah netral; ia selalu beroperasi dalam kerangka norma, legitimasi, dan relasi sosial. Ketika kekuasaan dilepaskan dari

etika, politik cenderung menyempit menjadi arena dominasi, manipulasi, dan transaksi kepentingan jangka pendek.

Pemahaman politik kontemporer semakin menegaskan bahwa politik tidak hanya bekerja pada tingkat institusi negara, tetapi juga menyentuh dimensi terdalam kehidupan manusia. Nikolas Rose dalam *Politics of Life Itself* (2007) menjelaskan bahwa politik modern telah bergerak ke ranah pengelolaan kehidupan itu sendiri, yakni tubuh, kesehatan, kapasitas mental, emosi, risiko, dan harapan hidup manusia. Dalam konteks ini, politik tidak lagi sekadar mengatur warga sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagaimana makhluk hidup yang harus dioptimalkan, dilindungi, dan diarahkan. Kekuasaan bekerja melalui kebijakan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, hingga pembentukan cara berpikir dan berperilaku warga.

Perspektif ini memperluas pemahaman bahwa politik selalu memiliki dimensi moral dan juga kemanusiaan yang mendalam. Keputusan politik tidak pernah netral, karena ia membentuk kualitas hidup manusia, menentukan siapa yang dilindungi dan siapa yang terpinggirkan. Oleh karena itu, politik yang kehilangan orientasi etis pada akhirnya akan mereduksi manusia menjadi sekadar objek pengelolaan, bukan subjek bermartabat. Dari sinilah konsep budaya politik memperoleh signifikansinya. Budaya politik merujuk pada pola nilai, sikap, orientasi, dan penilaian masyarakat terhadap politik dan kekuasaan. Ia membentuk cara warga memahami negara, menilai pemimpin, merespons kebijakan, serta menentukan batas moral dalam praktik politik. Budaya politik bekerja sebagai fondasi tak terlihat yang menentukan apakah politik dijalankan secara beradab atau sebaliknya.

Budaya politik bermartabat merupakan pengembangan normatif dari konsep tersebut. Ia menegaskan bahwa politik harus dijalankan dengan penghormatan penuh terhadap martabat manusia. Martabat di sini mencakup pengakuan atas nilai kemanusiaan, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah sosial. Budaya politik bermartabat menolak normalisasi politik uang, eksploitasi identitas, kekerasan simbolik, dan praktik manipulatif yang merusak kepercayaan publik.

Secara teoritik, bahwa budaya politik mencakup tiga dimensi utama (Poespowardojo, 1993), dimana: kognitif, afektif, dan evaluatif. Dimensi kognitif berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman politik; dimensi afektif menyangkut sikap emosional dan rasa keterikatan terhadap sistem politik; sementara dimensi evaluatif berhubungan dengan penilaian moral dan normatif atas praktik kekuasaan. Budaya politik bermartabat menuntut ketiganya berjalan selaras, sehingga pengetahuan politik diarahkan oleh etika, dan partisipasi politik didorong oleh tanggung jawab moral.

Dalam konteks Indonesia, fondasi budaya politik bermartabat berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila menyediakan kerangka etika politik yang menempatkan kemanusiaan, musyawarah, keadilan sosial, dan persatuan sebagai prinsip utama dalam kehidupan bernegara. Politik, dalam kerangka ini, tidak dipahami semata sebagai mekanisme kekuasaan, melainkan sebagai sarana pengabdian untuk memuliakan kehidupan bersama dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif.

Nilai-nilai dasar tersebut kemudian menemukan penguatan dan ekspresi kontekstualnya dalam budaya-budaya lokal di berbagai daerah, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Dalam masyarakat Sasak, Samawa, dan Mbojo, tradisi musyawarah, rasa malu sebagai kontrol sosial, kehormatan diri dan keluarga, serta solidaritas komunal telah lama membentuk etika sosial dan politik masyarakat. Nilai-nilai ini tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga membingkai harapan kolektif mengenai bagaimana kekuasaan seharusnya (secara idealisme) dijalankan dan dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks tersebut, kepemimpinan tidak dipahami sebagai kedudukan formal dalam struktur pemerintahan, melainkan sebagai amanah sosial dan kultural. Seorang pemimpin diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab moral, antara legitimasi hukum dan penerimaan sosial. Kekuasaan memperoleh maknanya bukan dari sejauh mana ia dapat memerintah, melainkan dari kemampuannya merawat kepercayaan, menjaga kehormatan, serta memelihara kebersamaan dalam masyarakat.

Tradisi musyawarah setidaknya mendorong lahirnya kepemimpinan yang dialogis dan inklusif, rasa malu menuntut integritas dan pengendalian diri, sementara nilai kehormatan dan solidaritas komunal mengikat kekuasaan pada konsekuensi moral yang melampaui batas jabatan dan kepentingan jangka pendek. Dalam bingkai budaya ini, tindakan seorang pemimpin selalu dinilai tidak hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang hidup dan diakui oleh masyarakat.

Oleh karena itu, pembahasan tersebut secara alamiah mengarah pada persoalan kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi ruang konkret tempat nilai budaya, praktik politik, dan tanggung jawab publik saling bertemu dan diuji. Dari titik inilah penting untuk melihat lebih jauh bagaimana kepemimpinan bermartabat dipahami, dibentuk, dan dijalankan sebagai perwujudan nyata dari budaya politik bermartabat di NTB.

Kepemimpinan bermartabat itu berangkat dari sebuah kesadaran bahwa kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mengabdi pada kehidupan bersama. Seorang pemimpin dipandang sebagai penjaga nilai, pengarah arah kolektif, sekaligus penanggung jawab moral atas setiap kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan kepemimpinan tidak semata-mata ditentukan oleh capaian administratif atau pertumbuhan indikator teknokratis, tetapi oleh sejauh mana kepemimpinan tersebut mampu menjaga kepercayaan publik, memperkuat kohesi sosial, dan memuliakan martabat manusia.

Artinya bahwa kepemimpinan yang bermartabat menuntut keselarasan antara kewenangan formal dan etika kultural. Sehingga pemimpin diharapkan mampu menerjemahkan nilai musyawarah ke dalam proses pengambilan keputusan yang inklusif, menjadikan rasa malu sebagai pengendalian diri dalam penggunaan kekuasaan, serta menempatkan kehormatan dan solidaritas komunal sebagai rambu moral dalam menjalankan amanah publik. Dengan demikian, kekuasaan tidak dijalankan secara sepihak, melainkan selalu ditempatkan dalam relasi tanggung jawab sosial.

Kepemimpinan bermartabat meniscayakan keteladanan. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial dan

kultural, perilaku pemimpin memiliki daya pengaruh yang kuat terhadap kualitas budaya politik secara keseluruhan. Ketika pemimpin menunjukkan integritas, kejujuran, dan keberpihakan pada kepentingan umum, nilai-nilai tersebut akan mengalir dan direproduksi dalam kehidupan politik masyarakat. Sebaliknya, penyimpangan etika di tingkat kepemimpinan berpotensi merusak kepercayaan publik dan melemahkan fondasi budaya politik bermartabat.

Oleh sebab itu, upaya membangun budaya politik bermartabat meniscayakan hadirnya tata kelola politik yang adil, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Tata kelola semacam ini menjadi prasyarat agar kekuasaan dijalankan dalam batas etika dan hukum, sekaligus tetap peka terhadap nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kerangka tersebut, kepemimpinan memegang peran kunci sebagai penggerak utama yang menentukan arah dan kualitas praktik politik.

Kepemimpinan menjadi faktor penentu dalam memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal dan prinsip-prinsip konstitusional tidak berhenti sebagai norma ideal, tetapi terwujud secara nyata dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kepemimpinan yang berintegritas, berorientasi pada pelayanan, nilai musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab sosial dapat diterjemahkan ke dalam praktik politik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Namun, budaya politik bermartabat tidak hanya bergantung pada figur pemimpin semata. Kepemimpinan yang bermartabat memerlukan dukungan partisipasi warga yang sadar, kritis, dan beretika, serta lingkungan politik yang

menghargai dialog dan perbedaan. Hubungan yang saling menguatkan antara pemimpin dan warga inilah yang membentuk ekosistem politik yang sehat, di mana kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab dan diawasi secara kolektif.

Dengan demikian, kepemimpinan bermartabat dapat dipahami sebagai jantung dari budaya politik bermartabat di Nusa Tenggara Barat, yang memompa nilai-nilai etis ke seluruh sistem politik. Dari pusat inilah politik berbasis kearifan lokal, partisipasi politik warga, dan orientasi politik beradab menuju Indonesia Emas 2045 saling terhubung dan saling menguatkan. Atas dasar pemahaman ini, pembahasan selanjutnya akan menguraikan secara lebih mendalam bagaimana kepemimpinan bermartabat dibangun, peran warga dalam menjaga kualitas politik, serta arah transformasi budaya politik NTB ke masa depan.

12.2 Politik Berbasis Kearifan Lokal

Politik berbasis kearifan lokal dimaksud merupakan sebuah pendekatan yang menempatkan nilai-nilai budaya sebagai fondasi etis dalam penyelenggaraan kekuasaan dan pengambilan keputusan publik. Pendekatan ini berpijak pada pandangan bahwa politik tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa, melainkan selalu beroperasi dalam konteks makna, nilai, dan simbol yang hidup dalam masyarakat. Menurut Clifford Geertz (1973) menegaskan bahwa kebudayaan adalah sistem makna yang memberi arah bagi tindakan sosial dan politik, sehingga praktik kekuasaan hanya dapat dipahami secara utuh jika dilihat dalam kerangka budaya tempat ia tumbuh

Kearifan lokal disini tidak dipahami sebagai tradisi statis atau simbol budaya semata, melainkan sebagai sistem nilai hidup

yang dinamis dan adaptif. Nilai-nilai tersebut telah teruji dalam mengatur relasi sosial, menyelesaikan konflik, serta menjaga keseimbangan antara individu dan komunitas. Hal ini seperti pandangan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat bahwa kebudayaan berfungsi sebagai pedoman hidup yang membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat, termasuk dalam ranah kekuasaan dan kepemimpinan (Koentjaraningrat, 2009).

Sementara Elinor Ostrom dalam *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action* (1990) menunjukkan bahwa komunitas lokal mampu mengelola kepentingan bersama melalui norma-norma yang mereka bangun sendiri, tanpa harus selalu bergantung pada kontrol negara yang bersifat sentralistik. Dalam praktik politik lokal, norma budaya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang melengkapi hukum formal, sekaligus memperkuat legitimasi kekuasaan. Hal ini diperkuat pula oleh Robert D. Putnam dalam *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (1993) menegaskan bahwa kepercayaan, jaringan sosial, dan norma bersama merupakan prasyarat utama bagi berfungsinya demokrasi yang sehat.

Sehingga jelas bahwa Nilai-nilai lokal seperti musyawarah, rasa malu, kehormatan, dan solidaritas komunal membentuk modal sosial yang mendorong partisipasi politik, mengurangi konflik destruktif, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan publik. Menurut Poespowardojo (1993) bahwa Pancasila bukan sekadar ideologi negara, melainkan sumber etika publik yang menuntut agar kekuasaan dijalankan secara beradab, manusiawi, dan berkeadilan. Nilai musyawarah dan keadilan sosial dalam Pancasila menemukan resonansi langsung

terhadap praktik-praktik kearifan lokal di berbagai daerah, termasuk di Nusa Tenggara Barat.

Dengan demikian, politik berbasis kearifan lokal bertujuan menjadikan praktik politik lebih manusiawi, kontekstual, dan berakar pada realitas sosial masyarakat. Ia tidak menolak modernitas politik, tetapi memperkaya demokrasi dengan dimensi etis dan kultural yang memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bermartabat, diterima secara sosial, dan berkelanjutan.

12.3 Kepemimpinan Bermartabat

12.3.1 Kerangka Teoretik Kepemimpinan

Pemahaman tentang kepemimpinan pada dasarnya tidak bersifat tunggal maupun statis, melainkan berkembang seiring dengan perubahan struktur sosial, sistem politik, serta cara manusia memaknai kekuasaan dan tanggung jawab publik. Dalam kajian ilmu politik dan ilmu sosial, teori kepemimpinan menunjukkan pergeseran penting: dari penekanan pada kualitas personal pemimpin menuju pemahaman kepemimpinan sebagai proses sosial, etis, dan relasional yang selalu terikat pada konteks budaya dan nilai masyarakat (Northouse, 2019)

Dalam tradisi pemikiran klasik, kepemimpinan dipahami sebagai perwujudan kebajikan moral dan intelektual individu. Plato memandang pemimpin ideal sebagai *philosopher king*, yakni sosok yang memiliki pengetahuan tentang kebaikan dan keadilan sehingga layak memimpin kehidupan bersama (Plato, 2004). Kepemimpinan dalam pandangan ini bersifat normatif, dengan penekanan kuat pada etika, kebijaksanaan, dan kemampuan moral pemimpin untuk mengarahkan masyarakat menuju

tatanan yang adil. Sementara itu, Aristotle, menekankan bahwa tujuan utama kepemimpinan adalah mewujudkan kebaikan bersama (*common good*) yakni melalui kebajikan (*virtue*) dan keseimbangan antara kepentingan individu dan komunitas (Aristotle, 1998).

Pada era modern awal, pemikiran tentang kepemimpinan mulai bergeser untuk merespons realitas politik yang penuh konflik dan ketidakpastian. Pemikir seperti Niccolò Machiavelli melihat kepemimpinan sebagai kemampuan mengelola dan mempertahankan kekuasaan demi stabilitas negara (Machiavelli, 1998). Meskipun sering ditafsirkan sebagai pemisahan etika dari politik, pemikiran Machiavelli justru menyingkap ketegangan mendasar antara ideal moral dan tuntutan pragmatis dalam praktik kepemimpinan. Sejak titik ini, kepemimpinan tidak lagi dipahami semata sebagai kebajikan pribadi, tetapi juga sebagai kemampuan membaca realitas dan mengambil keputusan strategis.

Selanjutnya perkembangan ilmu sosial pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 melahirkan teori *great man* dan *trait theory*, yang memandang kepemimpinan sebagai hasil dari sifat-sifat bawaan seperti karisma, keberanian, kecerdasan, dan ketegasan. Teori ini bahwa kepemimpinan dipersepsikan sebagai atribut individual yang akhirnya membedakan pemimpin dari pengikutnya. Namun, pendekatan ini kemudian menuai kritik karena terlalu menekankan faktor personal dan mengabaikan peran konteks sosial, budaya, serta struktur organisasi. Kritik tersebut mendorong lahirnya teori perilaku (*behavioral theories*) dan teori situasional. Dalam pendekatan ini, kepemimpinan tidak ditentukan oleh siapa pemimpin itu semata, melainkan oleh bagaimana bertindak serta kemampuannya menyesuaikan gaya

kepemimpinan dengan situasi dan karakter pengikut (Hersey & Blanchard, 1982). Artinya kepemimpinan dipahami sebagai sebuah proses interaksi dinamis antara pemimpin, pengikut, dan lingkungan sosial-politik.

Semententara itu, dalam teori kepemimpinan kontemporer, perhatian terhadap dimensi etika dan nilai kembali menguat. Teori *transformational leadership* memandang pemimpin sebagai agen perubahan yang mampu membangun visi bersama, menginspirasi, dan meningkatkan kapasitas moral serta kinerja pengikut (Burns, 1978). Pada teori ini kepemimpinan tidak lagi bersifat instruktif dan hierarkis, melainkan transformatif, dengan tujuan membentuk kesadaran kolektif dan komitmen terhadap tujuan bersama. Sejalan dengan itu, konsep *servant leadership* menempatkan pemimpin sebagai pelayan kepentingan publik. Kepemimpinan diukur dari sejauh mana pemimpin mampu melayani, memberdayakan, dan melindungi martabat manusia (Greenleaf, 1977), yang menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan justru tumbuh ketika kekuasaan digunakan untuk memperkuat kesejahteraan dan kapasitas warga, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok sempit.

Lebih lanjut, teori kepemimpinan etis dan kepemimpinan berbasis nilai menegaskan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak hanya bersumber dari prosedur formal, tetapi juga dari konsistensi moral, transparansi, dan akuntabilitas (Bass, 1985), dimana kepemimpinan dipahami sebagai praktik sosial yang terus-menerus diuji oleh publik dan harus mampu menjawab tuntutan keadilan, kepercayaan, serta keberlanjutan kehidupan bersama.

12.3.2 Kepemimpinan sebagai Amanah

Dalam kerangka kepemimpinan bermartabat, konsep amanah menempati posisi sentral sebagai landasan etis kekuasaan. Disini kepemimpinan tidak dipahami sebagai hak istimewa atau sekadar hasil kompetisi politik, melainkan sebagai kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk dikelola demi kepentingan bersama. Amanah menempatkan pemimpin dalam relasi tanggung jawab yang bersifat moral, sosial, dan institusional sekaligus, sehingga kekuasaan selalu terikat pada nilai dan tujuan publik.

Pemahaman ini sejalan dengan prinsip moral dalam Al-Qur'an yang menegaskan kewajiban menunaikan amanah secara adil dan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisā' ayat 58:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ
أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."

Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan selalu mengandung dimensi amanah dan keadilan, serta menempatkan pemimpin sebagai pihak yang wajib menjaga kepercayaan publik dengan penuh tanggung jawab.

Lebih jauh, Al-Qur'an juga mengingatkan bahwa amanah bukan sekadar beban administratif, melainkan tanggung jawab moral yang berat. Dalam Surah Al-Aḥzāb ayat 72 digambarkan bahwa amanah merupakan tanggung jawab besar yang hanya

dapat dipikul oleh manusia dengan kesadaran etis dan keberanian moral. Perspektif ini memperkuat pandangan bahwa kepemimpinan bukan ruang pemuasan kepentingan pribadi, melainkan medan pengabdian yang menuntut integritas, kejujuran, dan kesungguhan.

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا
وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ۗاِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًاۙ ﴿٧٢﴾

"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh"

Adapun secara teoritik, maksud kepemimpinan sebagai amanah berakar pada pandangan klasik bahwa kekuasaan harus diarahkan pada kebaikan bersama. Aristotle menegaskan bahwa kepemimpinan politik hanya memperoleh legitimasi moral ketika diarahkan pada *common good,* bukan pada kepentingan pribadi/kelompok (Aristotle,1998). Kekuasaan yang kehilangan orientasi etis pada kebaikan bersama, meskipun sah secara prosedural, pada hakikatnya kehilangan martabatnya.

Sementara, tradisi pemikiran modern, konsep amanah menemukan relevansinya dalam teori legitimasi kekuasaan. Max Weber membedakan legitimasi legal-rasional dengan legitimasi yang bersumber dari kepercayaan dan nilai-nilai yang diakui masyarakat (Weber, 1978). Dimana kepemimpinan sebagai amanah berfungsi sebagai jembatan antara keduanya: kekuasaan

tidak hanya sah karena aturan hukum, tetapi juga diterima karena dijalankan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab.

Adapun dalam konteks Indonesia, kepemimpinan sebagai amanah memperoleh dasar normatif yang kuat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip kedaulatan rakyat menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, setiap pemimpin memikul kewajiban konstitusional untuk melindungi martabat manusia, menjamin keadilan sosial, serta menjaga persatuan nasional. Poespowardojo (1993) menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar ideologi negara, melainkan sumber etika yang menuntut kekuasaan dijalankan secara beradab, manusiawi, dan bertanggung jawab. Artinya kepemimpinan bermartabat dalam perspektif ini tidak cukup hanya taat hukum, tetapi juga harus setia pada nilai kemanusiaan dan keadilan.

Penguatan konseptual terhadap kepemimpinan sebagai amanah juga dapat ditemukan dalam teori Spiritual Leadership. (Fry, 2003 ; Ikhwan, 2023) memandang kepemimpinan spiritual sebagai proses yang menumbuhkan makna, nilai, dan tujuan transendental dalam kepemimpinan, sehingga pemimpin dan pengikut terdorong oleh panggilan moral, bukan sekadar insentif material atau kekuasaan formal. Dalam kerangka ini, kepemimpinan dapat dipahami sebagai panggilan (*calling*) dan pengabdian (*service*), yang selaras dengan konsep amanah dalam tradisi sosial dan budaya Indonesia. Dalam teori ini menekankan bahwa pemimpin yang efektif dan bermartabat adalah mereka yang mampu mengintegrasikan visi, nilai luhur, dan keteladanan dalam praktik kepemimpinan. Kepemimpinan semacam ini menumbuhkan kepercayaan, komitmen, dan integritas kolektif,

karena kekuasaan dijalankan dengan kesadaran moral yang mendalam. Perspektif ini memperkuat pandangan bahwa amanah bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab batiniah yang menuntut akan kejujuran, pengendalian diri, dan orientasi makna kehidupan bersama.

Adapun dalam budaya Nusa Tenggara Barat yang ada, kepemimpinan sebagai amanah diperteguh oleh nilai-nilai budaya lokal. Rasa malu berfungsi sebagai kontrol moral agar pemimpin tidak menyalahgunakan kepercayaan publik; kehormatan diri dan keluarga mengikat pemimpin pada tanggung jawab sosial jangka panjang; sementara solidaritas komunal menuntut agar kekuasaan digunakan untuk melindungi kepentingan bersama. Dalam budaya ini, pelanggaran amanah tidak hanya berimplikasi hukum, tetapi juga berdampak pada hilangnya kepercayaan dan kehormatan sosial.

Kepemimpinan sebagai amanah juga meniscayakan praktik akuntabilitas dan transparansi. Pemimpin yang memegang amanah harus bersedia diawasi, dikritik, dan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kebijakan yang diambil. Akuntabilitas dipahami bukan sebagai ancaman terhadap kewibawaan pemimpin, melainkan sebagai mekanisme etis untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam koridor pelayanan. Dengan demikian, kepemimpinan sebagai amanah merupakan fondasi kepemimpinan bermartabat. Amanah mengikat kekuasaan pada nilai, memperkuat dimensi spiritual dan moral kepemimpinan, serta memastikan bahwa politik haruslah tetap berorientasi pada pelayanan publik serta tidak bisa ditinggalkan atas pemuliaan kehidupan bersama.

12.3.3 Kepemimpinan dalam Perspektif Pancasila

Pancasila merupakan landasan filosofis, ideologis, dan etis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam perspektif kepemimpinan, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar konstitusional, tetapi juga sebagai sumber nilai yang membimbing cara-cara kekuasaan dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Kepemimpinan bermartabat dalam kerangka Pancasila menuntut agar kekuasaan dijalankan secara beradab, manusiawi, dan berorientasi pada kepentingan bersama, bukan semata-mata pada kepentingan kekuasaan itu sendiri.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan fondasi spiritual dan moral bagi kepemimpinan. Dimana Kepemimpinan dipahami sebagai amanah yang mengandung pertanggungjawaban etis, tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada nilai-nilai transenden yang diyakini bersama. Prinsip ini menuntut kejujuran, integritas, dan pengendalian diri dalam penggunaan kekuasaan. Kepemimpinan yang bermartabat, dengan demikian, tidak boleh dilepaskan dari kesadaran moral yang dapat membatasi kecenderungan penyalahgunaan wewenang (Poespowardojo, 1993).

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan bahwa tujuan utama kepemimpinan adalah pemuliaan martabat manusia. Sehingga pemimpin dituntut untuk menghormati hak asasi, memperlakukan setiap warga secara adil, dan menolak segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun kebijakan yang merendahkan nilai kemanusiaan. Dalam perspektif ini, keberhasilan kepemimpinan tidak diukur semata dari capaian material, tetapi dari sejauh mana kebijakan publik

meningkatkan kualitas hidup manusia dan keadilan sosial (Kaelan, 2013).

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memberikan arah bagi kepemimpinan untuk menjaga keutuhan sosial dan kebangsaan di tengah keberagaman. Kepemimpinan bermartabat menuntut kemampuan merajut perbedaan, mengelola konflik secara adil, serta menghindari politik yang memecah belah masyarakat. Dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, pemimpin dituntut untuk menempatkan kepentingan nasional dan kebersamaan di atas kepentingan kelompok atau golongan.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, secara langsung memberikan kerangka kepemimpinan demokratis yang beretika. Kepemimpinan tidak dijalankan secara otoriter atau sepihak, melainkan melalui proses musyawarah yang menjunjung kebijaksanaan dan partisipasi. Pemimpin dalam perspektif ini berperan sebagai pengarah dan penjaga proses deliberatif, bukan sebagai penguasa yang memaksakan kehendak. Musyawarah menjadi sarana etis untuk menyatukan rasionalitas, nilai, dan kepentingan publik (Notonagoro, 1975).

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan orientasi akhir kepemimpinan Pancasila, yakni terwujudnya keadilan substantif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Kepemimpinan bermartabat dituntut untuk berpihak pada kelompok yang lemah dan rentan, mengurangi ketimpangan, serta memastikan bahwa hasil pembangunan dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam kerangka ini, kekuasaan dipahami sebagai

instrumen untuk memperluas kesejahteraan dan kesempatan hidup yang layak bagi semua.

Pemikiran filsafat Pancasila menegaskan bahwa kelima sila tersebut membentuk satu kesatuan etika kepemimpinan yang utuh. Adapun menurut Poespowardojo (1993) bahwa Pancasila harus dipahami sebagai sistem nilai yang hidup, bukan sekadar rumusan normatif formal. Artinya kepemimpinan bermartabat, oleh karena itu, menuntut internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam sikap, perilaku, dan keputusan politik sehari-hari.

12.3.4 Tantangan Kepemimpinan di Era Modern

Perkembangan zaman membawa perubahan mendasar dalam cara kekuasaan dijalankan dan kepemimpinan dipraktikkan. Era modern ditandai oleh kompleksitas persoalan publik, percepatan arus informasi, disrupsi teknologi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, kepemimpinan bermartabat menghadapi tantangan yang tidak lagi bersifat sederhana, melainkan multidimensional dan saling terkait. Salah satu tantangan utama kepemimpinan di era modern adalah meningkatnya kompleksitas pengambilan keputusan publik. Persoalan pembangunan tidak lagi dapat diselesaikan dengan intuisi semata atau pendekatan birokratis yang kaku. Pemimpin dituntut mampu membaca data, memahami dinamika sosial, serta merumuskan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Ketidakmampuan memanfaatkan data secara tepat berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak efektif, tidak adil, atau bahkan merugikan masyarakat luas.

Di sisi lain, kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) setidaknya telah mengubah lanskap

kepemimpinan secara fundamental. Teknologi tidak lagi sekadar alat bantu administratif, tetapi telah menjadi bagian dari proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan akan model kepemimpinan yang mampu berkolaborasi dengan teknologi secara cerdas dan etis. Kepemimpinan modern dituntut untuk melek teknologi, memahami potensi dan risiko sistem digital, serta memastikan bahwa penggunaan teknologi benar-benar diarahkan untuk pelayanan publik dan pemuliaan martabat manusia.

Namun demikian, tantangan terbesar kepemimpinan di era modern bukanlah sekadar persoalan adopsi teknologi, melainkan bagaimana teknologi tersebut diintegrasikan secara bijaksana tanpa menghilangkan dimensi kemanusiaan dan budaya. Kepemimpinan yang sepenuhnya teknokratis berisiko menciptakan jarak antara penguasa dan masyarakat, serta mereduksi manusia menjadi sekadar angka, data, dan variabel statistik. Oleh karena itu, kepemimpinan bermartabat di era modern dituntut untuk menjaga keseimbangan yang cermat antara rasionalitas data dan kebijaksanaan nilai, antara kecanggihan teknologi dan kepekaan sosial-budaya.

Dari kebutuhan inilah gagasan *AI Leadership* menemukan relevansinya. AI Leadership tidak dimaknai sebagai penggantian peran pemimpin oleh mesin, melainkan sebagai model kepemimpinan yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memperkuat kapasitas pengambilan keputusan manusia. Teknologi ditempatkan sebagai alat bantu strategis, untuk mengolah data, membaca pola, dan memetakan kemungkinan kebijakan, sementara arah, tujuan, dan pertimbangan etis tetap berada di tangan pemimpin sebagai subjek moral.

Melalui dukungan kecerdasan buatan, pemimpin dapat memahami dinamika sosial secara lebih utuh dan responsif. Kebijakan publik dapat dirumuskan berdasarkan bukti yang lebih akurat, menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, serta dievaluasi secara berkelanjutan. Namun, efektivitas teknologi ini hanya bermakna ketika diiringi oleh kepekaan nilai. Data yang kaya tidak akan menghasilkan kebijakan bermartabat jika dilepaskan dari pemahaman tentang realitas hidup masyarakat, budaya lokal, dan keadilan sosial.

Dalam konteks masyarakat yang memiliki kekayaan nilai dan ikatan sosial yang kuat seperti Nusa Tenggara Barat, *AI Leadership* tetap perlu berakar pada kearifan lokal. Teknologi semestinya digunakan untuk memperkuat praktik musyawarah, membuka ruang partisipasi yang lebih luas, serta meningkatkan transparansi dan serta akuntabilitas pemerintahan. Dengan pendekatan ini, kecerdasan buatan tidak menggantikan dialog sosial, tetapi justru mendukungnya dengan menyediakan informasi jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seiring dengan perkembangan tersebut, *AI Leadership* menuntut terjadinya pergeseran paradigma kepemimpinan secara mendasar. Kepemimpinan tidak lagi berpusat pada kendali tunggal dan hierarki yang kaku, melainkan pada kemampuan mengorkestrasi kolaborasi antara manusia, teknologi, dan institusi. Dalam paradigma ini, pemimpin berperan sebagai pengarah visi dan penjaga nilai, yang memastikan bahwa pemanfaatan teknologi senantiasa diarahkan untuk melayani kepentingan publik dan memperkuat keadilan sosial, bukan sebaliknya. Keberhasilan kepemimpinan tidak lagi diukur semata dari penguasaan alat atau sistem, melainkan dari

kemampuannya memadukan kecerdasan teknologis dengan kebijaksanaan moral.

Perlu dipahami bahwa *AI Leadership* yakni makna lebih luas yang tidak dimaknai sebagai penggantian peran manusia oleh mesin, melainkan sebagai penguatan kualitas kepemimpinan melalui sinergi antara kecerdasan manusia, kecerdasan buatan, dan kebijaksanaan budaya. Kolaborasi ini memungkinkan pemimpin mengambil keputusan yang lebih tepat, responsif, dan berbasis bukti, sekaligus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila, prinsip amanah, dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, teknologi menjadi sarana untuk memperdalam kebijakan yang berkeadilan, bukan alat yang menjauhkan pemimpin dari realitas sosial.

Dalam kerangka ini, kepemimpinan bermartabat dipahami sebagai kepemimpinan yang mampu membaca dan merespons perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri nilai. Ia memadukan rasionalitas data dengan keadilan substantif, efisiensi teknologi dengan empati sosial, serta inovasi digital dengan tanggung jawab publik. Model kepemimpinan inilah yang memungkinkan transformasi politik dan tata kelola pemerintahan berlangsung secara berkelanjutan, seiring dengan upaya memuliakan martabat manusia dan menjaga kehidupan bersama yang adil, harmonis, dan bermakna.

12.4 Partisipasi Politik Warga

Budaya politik bermartabat tidak dapat tumbuh hanya melalui kepemimpinan yang kuat dan beretika, tetapi memerlukan partisipasi politik warga yang sadar, dewasa, dan bertanggung jawab. Partisipasi warga merupakan fondasi utama demokrasi, karena melalui keterlibatan aktif masyarakatlah nilai-

nilai politik diuji dan kehidupan bersama dijaga. Dalam kerangka ini, warga tidak diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek politik yang memiliki hak, suara, dan tanggung jawab moral dalam menentukan arah kehidupan publik.

Secara konseptual, makna partisipasi politik tidak dapat dipersempit hanya pada keterlibatan warga hanya dalam pemilihan umum atau proses elektoral semata. Partisipasi politik mencerminkan keterlibatan aktif warga negara dalam keseluruhan siklus kehidupan politik, mulai dari perumusan masalah publik, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, hingga pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan. Dengan demikian, partisipasi merupakan ekspresi dari kesadaran warga sebagai subjek politik yang memiliki hak sekaligus tanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Artinya partisipasi politik mencakup berbagai bentuk keterlibatan warga, seperti keikutsertaan dalam forum musyawarah, dialog publik, advokasi kebijakan, penyampaian aspirasi melalui organisasi masyarakat sipil, hingga kontrol sosial terhadap penyelenggara negara. Partisipasi juga dapat terwujud melalui keterlibatan warga dalam proses perencanaan pembangunan, pengawasan anggaran, serta evaluasi kebijakan publik. Bentuk-bentuk partisipasi ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak berhenti pada momen pemilu, melainkan berlangsung secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Perspektif demokrasi deliberatif memberikan kerangka teoritik yang memperdalam pemahaman tersebut. Dalam pandangan ini, kualitas demokrasi tidak semata-mata diukur dari keberadaan prosedur formal dan mekanisme representasi, tetapi dari kualitas proses komunikasi publik yang berlangsung di dalamnya. Demokrasi dinilai sehat apabila warga memiliki

ruang yang setara untuk menyampaikan pandangan, berdialog secara rasional, dan membangun kesepahaman berdasarkan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Pandangan ini menekankan bahwa legitimasi politik lahir dari proses diskursus yang inklusif dan beradab, bukan hanya dari hasil voting mayoritas.

Sehingga partisipasi politik yang bermartabat dapat diturunkan mengenai keterlibatan warga yang didasarkan pada rasionalitas, kejujuran, dan penghormatan terhadap perbedaan. Partisipasi tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas untuk menekan atau mendominasi pihak lain, melainkan sebagai tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas ruang publik. Oleh karena itu, etika berpendapat, kesediaan mendengar, serta komitmen pada kepentingan bersama menjadi elemen penting dalam partisipasi politik yang dewasa. Artinya hal ini juga berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap kekuasaan. Keterlibatan aktif warga dalam pengawasan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memperkuat akuntabilitas publik. Dalam budaya politik bermartabat, kontrol sosial tidak dijalankan melalui kekerasan atau delegitimasi, tetapi melalui kritik rasional, dialog terbuka, dan mekanisme demokratis yang sah.

Dengan demikian, partisipasi politik tidak hanya berkontribusi pada efektivitas demokrasi, tetapi juga pada kualitas etika politik itu sendiri. Partisipasi yang rasional, inklusif, dan beretika menjadi penopang utama budaya politik bermartabat, karena melalui partisipasi semacam inilah nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan diterjemahkan ke dalam praktik politik yang hidup dan berkelanjutan. Politik tidak

lagi dipahami sebagai arena perebutan kepentingan semata, melainkan sebagai ruang pembentukan makna dan tanggung jawab bersama.

Menurut Hannah Arendt dalam *The Human Condition* (1958), bahwa partisipasi politik memiliki makna eksistensial yakni memahami politik sebagai ruang penampakan *(space of appearance*), yaitu ruang di mana manusia hadir melalui tindakan (*action*) dan tutur kata (*speech*) di hadapan sesama. Sehingga melalui partisipasi di ruang publik inilah individu menegaskan identitas politiknya sebagai subjek yang merdeka, setara, dan bertanggung jawab. Artinya bagi Arendt, politik bukan sekadar instrumen kekuasaan atau administrasi negara, melainkan praktik bersama untuk membangun dunia yang bermakna (*common world*). Ketika warga terlibat secara aktif dan sadar dalam ruang publik, mereka tidak hanya memengaruhi kebijakan, tetapi juga membentuk makna kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Oleh karena itu, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi politik warga sebagai tindakan yang reflektif, komunikatif, dan beretika.

Pandangan ini mempertegas bahwa partisipasi politik yang bermartabat bukanlah partisipasi yang bersifat reaktif, impulsif, atau sekadar luapan emosi sesaat, melainkan partisipasi yang menjaga dan merawat ruang publik sebagai arena dialog yang rasional dan beretika. Partisipasi semacam ini memungkinkan perbedaan pandangan hadir secara setara dan dipertemukan melalui pertukaran gagasan, bukan melalui dominasi atau pemaksaan kehendak. Dalam konteks ini, politik tetap berfungsi sebagai ruang bersama untuk membangun makna dan tanggung jawab kolektif.

Lebih jauh, Hannah Arendt dalam *Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought* (1968) mengingatkan bahwa ketika ruang publik kehilangan sifat deliberatifnya (dan digantikan oleh dominasi massa, propaganda, atau polarisasi ekstrem) politik akan kehilangan martabatnya. Dalam kondisi demikian, politik tidak lagi menjadi praktik kebebasan dan kebersamaan, melainkan berubah menjadi instrumen kekuasaan yang menjauhkan manusia dari tanggung jawab moral dan nalar kritis.

Dalam konteks kontemporer, ruang digital dapat dipahami sebagai bentuk baru dari *space of appearance*, tempat warga hadir dan menampilkan diri secara politik di hadapan publik yang lebih luas. Namun, tanpa kesadaran etis yang memadai, ruang ini berisiko terfragmentasi oleh logika algoritma, arus disinformasi, serta politik identitas yang sempit dan reaktif. Ketika partisipasi politik di ruang digital tidak disertai tanggung jawab moral dan etika dialog, identitas politik warga cenderung direduksi menjadi label dan posisi emosional, bukan hasil refleksi, dialog, dan tindakan bersama.

Oleh karena itu, dalam kerangka budaya politik bermartabat, partisipasi politik warga harus dipahami sebagai praktik pembentukan identitas politik yang dewasa. Partisipasi tidak hanya bertujuan untuk mengekspresikan pendapat, tetapi juga untuk merawat ruang publik sebagai tempat bertemunya kebebasan, tanggung jawab, dan kebersamaan. Dengan cara inilah partisipasi politik dapat berfungsi sebagai kekuatan etis yang menjaga martabat demokrasi di tengah perubahan sosial dan teknologi yang cepat.

Dengan pemahaman tersebut, menjadi jelas bahwa kualitas partisipasi politik warga menentukan arah dan wajah kehidupan politik secara keseluruhan. Partisipasi yang dewasa, rasional, dan beretika tidak hanya menjaga ruang publik tetap bermartabat, tetapi juga membentuk fondasi bagi lahirnya tata politik yang beradab. Ketika warga hadir sebagai subjek politik yang sadar nilai, ruang public dapat berfungsi sebagai arena pembelajaran bersama, pengambilan keputusan yang adil, serta koreksi etis terhadap kekuasaan.

Artinya bahwa **politik beradab tidak lahir secara otomatis dari kemajuan teknologi atau prosedur demokrasi semata, melainkan dari pertemuan antara kepemimpinan yang bermartabat dan partisipasi warga yang bertanggung jawab. Budaya dialog, penghormatan terhadap perbedaan, serta komitmen pada kepentingan bersama** menjadi prasyarat utama agar demokrasi tidak terjebak dalam formalitas, tetapi berkembang secara substantif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai partisipasi politik warga secara alamiah mengantarkan pada pertanyaan yang lebih luas mengenai arah kehidupan politik ke depan. Bagaimana nilai-nilai etika, kemanusiaan, dan kebersamaan dapat dijaga dan dilembagakan dalam praktik politik jangka panjang? Bagaimana politik dapat menjadi sarana peradaban, bukan sekadar arena kompetisi kekuasaan?

12.5 Politik Beradab Menuju Indonesia Emas 2045

Politik beradab merupakan horizon normatif dari seluruh bangunan budaya politik bermartabat. Politik tidak lagi dipahami semata sebagai arena kompetisi kekuasaan, melainkan sebagai sarana membangun peradaban bersama yang

menjunjung martabat manusia, keadilan sosial, dan tanggung jawab antargenerasi. Dalam konteks ini, politik beradab menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang maju secara ekonomi, kuat secara institusional, dan matang secara moral. Yang bertumpu pada kesadaran bahwa kekuasaan harus dijalankan dalam batas etika publik. Kekuasaan yang beradab adalah kekuasaan yang tunduk pada nilai, dikontrol oleh hukum, dan diarahkan untuk melayani kehidupan bersama. Artinya keberhasilan tidak hanya diukur dari stabilitas atau pertumbuhan, tetapi dari kualitas relasi antara negara dan warga, dari tingkat kepercayaan publik, serta dari kemampuan sistem politik menjaga keadilan dan kohesi sosial di tengah keberagaman.

Dalam kerangka Indonesia Emas 2045, hal ini menuntut transformasi budaya politik dari sekadar prosedural menuju substantif. Demokrasi tidak cukup hanya berjalan melalui pemilu yang rutin, tetapi harus dihidupi melalui kepemimpinan bermartabat, partisipasi warga yang dewasa, dan ruang publik yang sehat. Politik beradab adalah politik yang mampu mengelola perbedaan tanpa kekerasan, memanfaatkan kemajuan teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan, serta mengarahkan inovasi untuk kesejahteraan bersama.

Adapun bagi Nusa Tenggara Barat, politik beradab ini memiliki makna yang sangat kontekstual. Dimana nilai-nilai lokal seperti musyawarah, rasa malu sebagai kontrol sosial, kehormatan, dan solidaritas komunal merupakan modal kultural yang kuat untuk membangun politik yang beretika. Ketika nilai-nilai ini dipadukan dengan prinsip Pancasila, tata kelola yang baik, serta kepemimpinan yang peka terhadap zaman. NTB

memiliki potensi untuk menjadi contoh daerah yang matang secara politik dan bermartabat secara sosial.

Dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan, politik beradab juga menuntut kebijaksanaan baru. Teknologi harus ditempatkan sebagai alat untuk memperkuat demokrasi, bukan menggantikannya. Data dan kecerdasan buatan perlu digunakan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas kebijakan, dan partisipasi publik, sambil tetap menjaga etika, perlindungan martabat manusia, dan keadilan sosial. Politik beradab menolak reduksi manusia menjadi sekadar objek algoritma, dan menegaskan kembali peran manusia sebagai subjek moral dalam kehidupan politik.

Artinya politik beradab adalah politik yang memadukan tiga pilar utama: nilai, institusi, dan budaya. Nilai memberikan arah moral, institusi menyediakan kerangka hukum dan tata kelola, sementara budaya memastikan bahwa politik dijalankan secara hidup dan diterima oleh masyarakat. Tanpa ketiganya, kemajuan politik berisiko kehilangan makna dan keberlanjutan.

Dengan demikian, melalui politik berbasis kearifan lokal, kepemimpinan bermartabat, dan partisipasi politik warga yang dewasa menjadi fondasi strategis menuju Indonesia Emas 2045. Ini merupakan proses berkelanjutan yang harus dirawat lintas generasi dan komitmen kolektif untuk menjadikan kekuasaan sebagai sarana pengabdian, dan demokrasi sebagai ruang pembelajaran bersama, serta masa depan adalah tanggung jawab moral yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

BAB XIII KEGOTONGROYONGAN
PILAR SOSIAL

"Kalau saya peras yang lima menjadi tiga, yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan Gotong Royong !" (Ir. Soekarno, 1945)

Gotong royong merupakan fondasi sosial yang telah lama menghidupi masyarakat Nusantara. Ia bukan sekadar praktik kerja bersama, melainkan nilai peradaban yang membentuk cara manusia berelasi, memecahkan masalah, dan menjaga keseimbangan hidup bersama. Dalam kerangka pembangunan yang bermartabat, gotong royong berfungsi sebagai pilar sosial yang memastikan bahwa kemajuan tidak dibangun di atas kompetisi yang menyingkirkan, melainkan di atas solidaritas yang menguatkan.

Secara filosofis, gotong royong menegaskan pandangan bahwa manusia adalah makhluk relasional. Ia tidak hidup dan berkembang secara terpisah, tetapi selalu berada dalam jalinan sosial. Karena itu, pembangunan yang mengabaikan dimensi kolektif berisiko melahirkan pertumbuhan yang rapuh, yakni maju secara material, namun miskin kohesi sosial. Gotong royong hadir sebagai penyangga agar pembangunan tetap berpihak pada kebersamaan, keadilan, dan saling peduli.

Dalam Nusa Tenggara Barat, nilai gotong royong hidup kuat dalam praktik dan falsafah masyarakat Sasak, Samawa, dan Mbojo. Berbagai tradisi lokal, mulai dari kerja bersama di sawah, pembangunan rumah, hingga solidaritas dalam peristiwa sosialmenunjukkan bahwa gotong royong bukan konsep abstrak, melainkan modal sosial nyata. Nilai-nilai seperti saling menghormati, tanggung jawab kolektif, dan kepedulian terhadap sesama menjadi perekat kehidupan sosial yang memungkinkan masyarakat bertahan menghadapi krisis dan perubahan.

Namun, perubahan zaman membawa tantangan serius bagi keberlanjutan gotong royong. Urbanisasi, individualisme ekonomi, dan logika pasar yang kompetitif cenderung menggerus praktik kebersamaan. Teknologi dan modernisasi (jika tidak dikelola secara bijak) dapat mempercepat fragmentasi sosial, dan menggantikan interaksi langsung dengan relasi transaksional. Di sinilah pentingnya memperbarui gotong royong, bukan dengan nostalgia, tetapi dengan adaptasi kreatif terhadap konteks kontemporer.

Dalam konteks ini, pemikiran Soekarno menjadi sangat penting untuk dibaca kembali secara kritis. Bagi Soekarno, gotong royong bukan sekadar kebiasaan sosial tradisional, melainkan jiwa dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Dalam pidato 1 Juni 1945, ia bahkan menegaskan bahwa seluruh sila dalam Pancasila dapat "diperas" menjadi satu nilai utama, yaitu gotong royong (Soekarno, 1945). Pernyataan ini menunjukkan bahwa gotong royong, dalam pandangan Soekarno, adalah prinsip dasar yang menopang bangunan negara dan kehidupan berbangsa.

Soekarno menolak dua ekstrem sekaligus: individualisme liberal yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang terpisah dan saling bersaing, serta kolektivisme yang meniadakan kebebasan dan martabat individu. Negara yang ia bayangkan negara "semua untuk semua", di mana kepentingan individu dan kepentingan bersama tidak dipertentangkan, tetapi dipadukan dalam semangat kebersamaan (Ibid). Dengan demikian, gotong royong bagi Soekarno bukan hanya praktik sosial, melainkan asas politik, ekonomi, dan moral dalam membangun masyarakat yang adil.

Walaupun kritik Soekarno terhadap individualisme dan logika pasar, dimana relasi antarmanusia direduksi menjadi relasi untung–rugi, sementara solidaritas dipandang sebagai beban, bukan kekuatan. Namun, Soekarno tidak pernah memaknai gotong royong sebagai penolakan terhadap kemajuan dan modernitas. Artinya Soekarno bukan anti-perubahan (karena tidak ada satupun yang abadi di dunia, kecuali perubahan itu sendiri), melainkan menolak modernitas yang terlepas dari kepribadian bangsa. Maka dalam kerangka ini, gotong royong harus hadir dan bekerja di dalam struktur modern, seperti: dalam kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, ekonomi kerakyatan, dan pemanfaatan teknologi. Gotong royong tidak boleh berhenti sebagai simbol budaya, tetapi harus menjadi mekanisme nyata penyelesaian masalah kolektif.

Dengan demikian, pembaruan gotong royong di era kontemporer menuntut transformasi bentuk tanpa kehilangan ruh nilai. Gotong royong hari ini tidak lagi terbatas pada kerja fisik bersama sebagaimana dikenal dalam masyarakat agraris, tetapi berkembang menjadi kolaborasi sosial, intelektual, dan bahkan digital. Ia hadir dalam proses perencanaan pembangunan

yang partisipatif, dalam ekonomi berbasis komunitas dan koperasi, dalam platform kolaboratif berbasis teknologi, serta dalam jejaring solidaritas yang memperkuat ketahanan sosial masyarakat di tengah perubahan yang cepat.

Sehingga gotong royong pada dasarnya bukanlah warisan yang membeku dalam masa lalu, melainkan nilai dinamis yang hidup dan terus menuntut pemaknaan ulang sesuai dengan tantangan zaman. Ia bukan sekadar simbol kebudayaan, tetapi prinsip kerja sosial yang dapat dan harus beradaptasi dengan modernitas.

Dalam kerangka pembangunan yang bermartabat, gotong royong berfungsi sebagai kompas moral. Ia memastikan bahwa modernisasi tidak berujung pada keterasingan sosial, bahwa efisiensi ekonomi tidak melahirkan eksklusi, dan bahwa kemajuan tidak menjelma menjadi ketimpangan. Gotong royong menjaga agar pembangunan tetap berakar pada kemanusiaan, memperkuat kebersamaan, dan mengarahkan pertumbuhan menuju keadilan sosial yang nyata. Namun, agar nilai ini tidak berhenti sebagai etos atau semboyan, gotong royong harus diterjemahkan ke dalam sistem, kebijakan, dan struktur ekonomi yang konkret.

Pada titik inilah Ekonomi Pancasila hadir dan memperoleh relevansinya. Ekonomi Pancasila merupakan upaya institusional untuk mewujudkan semangat gotong royong dalam praktik ekonomi dan kebijakan publik. Ia lahir dari kesadaran bahwa aktivitas ekonomi tidak bersifat netral secara nilai, melainkan selalu mencerminkan pandangan tentang manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi yang berjiwa Pancasila menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan dan

kesejahteraan bersama sebagai tujuan akhir, bukan sekadar akumulasi keuntungan atau pertumbuhan statistik.

Dalam pemikiran Soekarno, ekonomi Pancasila merupakan ekonomi "semua untuk semua", yakni ekonomi yang menolak individualisme ekstrem sekaligus menolak kolektivisme yang meniadakan martabat individu. Gotong royong, dalam kerangka ini, menjadi prinsip yang mengatur bagaimana sumber daya dikelola, bagaimana risiko dibagi, dan bagaimana manfaat pembangunan didistribusikan secara adil. Dengan demikian, gotong royong tidak hanya hidup dalam relasi sosial, tetapi juga tertanam dalam struktur ekonomi.

Penerjemahan nilai ini ke dalam kebijakan ekonomi menuntut pergeseran cara pandang: dari ekonomi yang semata-mata berorientasi pasar menuju ekonomi yang berpihak pada rakyat. Bentuk konkretnya tampak dalam penguatan koperasi dan usaha berbasis komunitas, perencanaan pembangunan yang partisipatif, serta kebijakan perlindungan terhadap pelaku ekonomi kecil. Di sini, gotong royong bekerja sebagai mekanisme kolektif yang memperkuat posisi rakyat dalam menghadapi dinamika pasar dan perubahan global.

Lebih jauh, ekonomi Pancasila di era kontemporer sekarang ini, menuntut kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan nilai. Modernisasi dan digitalisasi ekonomi tidak ditolak, tetapi diarahkan agar memperluas partisipasi dan pemerataan. Koperasi modern, ekonomi digital berbasis komunitas, dan kolaborasi usaha rakyat merupakan bentuk-bentuk baru gotong royong yang hidup dalam struktur ekonomi masa kini. Dengan cara ini, efisiensi ekonomi berjalan seiring dengan keadilan sosial, dan inovasi tidak memutus ikatan kebersamaan. Artinya hal ini

memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan martabat manusia, bahwa kemajuan tidak meninggalkan yang lemah, dan bahwa pembangunan benar-benar menjadi proses kolektif menuju kesejahteraan bersama. Inilah wujud nyata dari gotong royong yang bertransformasi menjadi kebijakan ekonomi, bukan sekadar nilai yang diucapkan, tetapi prinsip yang bekerja dalam kehidupan nyata masyarakat.

Dilain pihak, gotong royong pada dasarnya bukan hanya soal prinsip sosial atau kerangka kebijakan modern, melainkan etika hidup yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa ini sejak lama. Jauh sebelum konsep pembangunan, ekonomi, dan negara dirumuskan secara formal, masyarakat Nusantara telah hidup dengan kesadaran bahwa kehidupan hanya dapat dijalani secara layak melalui kebersamaan, saling membantu, dan tanggung jawab kolektif. Gotong royong tumbuh sebagai etika yang mengatur relasi antarmanusia, bagaimana bekerja bersama, berbagi beban, dan menjaga keseimbangan hidup sosial.

Dalam masyarakat Nusa Tenggara Barat sendiri, etika gotong royong ini hidup kuat dalam budaya masyarakat Sasak, Samawa, dan Mbojo. Ia tidak hadir sebagai konsep abstrak, tetapi terwujud dalam praktik sehari-hari: kerja bersama di sawah dan ladang, saling membantu dalam membangun rumah, hingga solidaritas dalam peristiwa sosial seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Melalui praktik-praktik ini, gotong royong diwariskan lintas generasi sebagai nilai moral, bukan sekadar kebiasaan kerja.

Artinya gotong royong menanamkan kesadaran bahwa manusia tidak hidup sendiri. Dalam budaya Sasak, nilai saling menjaga dan menghormati menegaskan bahwa martabat

seseorang terikat pada cara ia memperlakukan sesamanya. Dalam tradisi Samawa, etika kebersamaan mengajarkan tanggung jawab sosial dan kesediaan untuk menanggung beban bersama. Sementara dalam budaya Mbojo, kehormatan individu selalu dikaitkan dengan kehormatan komunitas. Keseluruhan nilai ini menunjukkan bahwa gotong royong di NTB merupakan fondasi etis kehidupan sosial, bukan sekadar pilihan pragmatis.

Selain itu, gotong royong berfungsi juga sebagai pengendali moral dalam kehidupan bersama. Ia mencegah munculnya sikap egoistik, keserakahan, dan ketidakpedulian terhadap sesama. Ketika seseorang berhasil secara ekonomi atau sosial, etika gotong royong menuntutnya untuk tetap terhubung dengan komunitas, berbagi manfaat, dan menjaga keseimbangan. Dengan demikian, keberhasilan pribadi tidak dipahami sebagai pemisahan dari masyarakat, melainkan sebagai bagian dari keberhasilan bersama.

BAB XIV MELINDUNGI BUDAYA DAN IDENTITAS DAERAH

Melindungi budaya bukanlah menahan perubahan ,melainkan memastikan perubahan tidak menghapus jati diri

14.1 Budaya sebagai Benteng Identitas di Era Perubahan

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Bab I, pembangunan yang bermartabat tidak pernah berangkat semata-mata dari angka, grafik, atau indikator teknokratis. Pembangunan yang sejati justru dimulai dari cara manusia memaknai dirinya, relasinya dengan sesama, serta tanggung jawabnya terhadap masa depan. Dalam kerangka inilah budaya menempati posisi yang sangat mendasar. Budaya bukan aksesori atau pelengkap pembangunan, melainkan fondasi nilai yang menentukan apakah kemajuan akan memuliakan martabat manusia atau justru perlahan menggerusnya.

Perubahan adalah keniscayaan sejarah. Setiap zaman menghadirkan dinamika baru, mulai dari revolusi industri, arus globalisasi, hingga percepatan transformasi digital dan hadirnya AI. Namun pengalaman sejarah juga memperlihatkan bahwa perubahan yang bergerak cepat tanpa pijakan nilai yang kokoh kerap melahirkan krisis identitas. Sebuah masyarakat dapat tumbuh maju secara material, tetapi sekaligus mengalami kemiskinan makna dan kehilangan arah. Pada titik inilah budaya

berfungsi sebagai benteng identitas, yakni penyangga nilai yang menjaga agar perubahan tidak menghapus jati diri, melainkan memperkaya dan menguatkannya.

Budaya bekerja secara perlahan, tetapi mendalam. Ia membentuk cara berpikir, cara berbicara, cara menghormati, dan cara mengambil keputusan. Melalui budaya, manusia belajar tentang apa yang dianggap benar dan salah, pantas dan tidak pantas, mulia dan tercela. Karena itu, ketika budaya melemah, yang hilang bukan hanya tradisi atau ritual, melainkan orientasi hidup itu sendiri.

Secara ilmiah, Edward B. Tylor mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kebiasaan manusia sebagai anggota masyarakat. Definisi ini menegaskan bahwa budaya bukan sektor sempit, melainkan kerangka besar kehidupan sosial. Dengan kata lain, membicarakan budaya sama dengan membicarakan manusia itu sendiri bagaimana ia hidup, berpikir, dan bermakna.

Dari pemahaman ini menjadi jelas bahwa budaya tidak boleh diposisikan sebagai residu masa lalu yang ditoleransi, tetapi sebagai sumber nilai yang aktif dan relevan. Dalam konteks pembangunan yang bermartabat, budaya berfungsi sebagai penuntun arah: ia membantu masyarakat menentukan perubahan mana yang patut dirangkul dan mana yang perlu disaring. Dengan demikian, budaya tidak menghambat kemajuan, tetapi justru memastikan bahwa kemajuan tersebut tetap manusiawi, berkeadilan, dan berakar pada identitas yang kokoh.

Lebih jauh, budaya memberikan kriteria moral bagi kemajuan. Ia mengajarkan bahwa tidak semua yang mungkin secara teknis layak dijalankan secara etis, dan tidak semua yang menguntungkan secara ekonomi pantas diterapkan secara sosial. Dengan demikian, budaya menempatkan batas yang sehat bagi ambisi pembangunan, agar kemajuan tidak berubah menjadi dominasi, eksploitasi, atau pengabaian terhadap kelompok yang rentan. Di sinilah budaya berperan sebagai penjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan, antara pertumbuhan dan keberlanjutan.

Adapun dalam kehidupan masyarakat, peran budaya sering kali bekerja secara senyap namun menentukan. Ia hadir dalam cara masyarakat menyelesaikan konflik, membangun solidaritas, serta merawat hubungan antargenerasi. Ketika perubahan sosial dan teknologi berlangsung cepat, budaya menyediakan ruang jeda (refleksi) yang akan memungkinkan masyarakat menimbang dampak jangka panjang dari setiap pilihan. Tanpa ruang ini, pembangunan berisiko terjebak pada logika kecepatan dan hasil instan, kehilangan kedalaman makna dan kepekaan kemanusiaan.

Oleh karena itu, menjadikan budaya sebagai fondasi pembangunan bukanlah langkah mundur, melainkan strategi maju yang berkesadaran. Budaya memastikan bahwa kemajuan tidak hanya diukur dari apa yang dicapai, tetapi juga dari bagaimana pencapaian tersebut diraih dan untuk siapa ia ditujukan. Dengan budaya sebagai kompas, pembangunan dapat bergerak cepat tanpa kehilangan arah, tumbuh tinggi tanpa tercerabut dari akar, dan berubah tanpa kehilangan jati diri.

Pada titik inilah pembahasan tentang budaya dalam era kontemporer menjadi penting. Ketika medium, ekspresi, dan ruang hidup budaya mengalami perubahan drastis akibat digitalisasi dan globalisasi, pertanyaannya bukan lagi apakah budaya akan berubah, melainkan bagaimana perubahan itu dikelola. Dari sinilah pembahasan selanjutnya berangkat: memahami dinamika budaya di era kontemporer sebagai langkah awal untuk merumuskan strategi perlindungan dan penguatan identitas daerah secara berkelanjutan.

14.2 Budaya dalam Era Kontemporer

Dalam memahami budaya pada era kontemporer, penting disadari bahwa kita tidak lagi hidup dalam ruang sosial dan kultural yang sama seperti pada masa lalu. Pada masa sebelumnya, budaya terutama diwariskan melalui jalur-jalur yang relatif stabil dan berlapis: keluarga sebagai ruang pendidikan nilai pertama, komunitas adat sebagai penjaga tradisi, serta lingkungan sosial yang memungkinkan interaksi langsung antargenerasi. Dalam ruang seperti ini, nilai-nilai budaya tidak hanya diajarkan, tetapi dihidupi secara alami melalui kebiasaan sehari-hari, ritus sosial, dan pengalaman bersama.

Namun, lanskap budaya hari ini telah berubah secara mendasar. Budaya kini bergerak dalam ruang yang cair, cepat, dan saling terhubung secara global. Teknologi komunikasi, media digital, dan platform daring telah mengaburkan batas antara lokal dan global, antara tradisi dan modernitas, bahkan antara pencipta dan penikmat budaya. Akibatnya, budaya tidak lagi semata-mata diwariskan dari generasi ke generasi secara

linear, melainkan beredar secara horizontal, lintas ruang dan waktu, dalam arus informasi yang nyaris tanpa henti.

Perubahan ini tidak hanya menyangkut medium ekspresi budaya dari mulai lisan dan praktik langsung menuju teks digital, visual, dan audio-visual, tetapi juga menyentuh cara budaya diproduksi, dipahami, dan dimaknai. Budaya tidak lagi hanya diciptakan oleh komunitas adat atau tokoh budaya, tetapi juga oleh individu-individu yang berinteraksi dengan algoritma, tren global, dan selera pasar. Dalam konteks ini, makna budaya menjadi lebih cair, terbuka untuk interpretasi baru, namun sekaligus rentan terhadap penyederhanaan dan kehilangan kedalaman.

Dampak perubahan ini paling terasa pada generasi muda. Generasi yang tumbuh dalam dunia digital sering kali mengenal budaya melalui layar sebelum mengenalnya melalui pengalaman langsung. Budaya hadir dalam bentuk potongan-potongan visual, simbol, atau narasi singkat yang mudah dibagikan, tetapi tidak selalu disertai pemahaman terhadap nilai dan konteksnya. Di satu sisi, hal ini membuka ruang kreativitas dan partisipasi yang luas; di sisi lain, ia menghadirkan tantangan serius dalam menjaga kesinambungan makna dan identitas budaya.

Oleh karena itu, memahami budaya pada era kontemporer menuntut cara pandang baru yang lebih lentur dan reflektif. Budaya tidak lagi dapat dipahami sebagai sesuatu yang statis, tertutup, dan diwariskan secara linear dari masa lalu ke masa kini. Sebaliknya, budaya harus dipahami sebagai proses hidup, yakni sebuah medan makna yang terus bernegosiasi dengan perubahan zaman, teknologi, serta relasi kekuasaan yang

menyertainya. Dalam konteks ini, budaya bukan hanya "apa yang diwarisi", tetapi juga "apa yang ditafsirkan ulang".

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran posmodern, yang menolak gagasan tentang kebenaran tunggal, narasi besar *(grand narratives*), dan juga identitas yang beku. Jean-François Lyotard menyebut kondisi posmodern sebagai situasi di mana masyarakat tidak lagi sepenuhnya percaya pada narasi besar yang seragam, melainkan hidup dalam pluralitas makna, fragmen identitas, dan perspektif yang beragam (Lyotard, 1984). Dalam konteks budaya, hal ini berarti bahwa makna budaya tidak lagi dimonopoli oleh satu otoritas (seperti : adat, negara, atau institusi tertentu) melainkan diproduksi dan direproduksi melalui berbagai ruang sosial, termasuk media digital.

Semetara itu, Anthony Giddens, melalui konsep *late modernity* (1991), juga menjelaskan bahwa masyarakat modern lanjut hidup dalam kondisi refleksivitas tinggi, di mana individu terus-menerus menafsirkan ulang identitas dan tradisinya[2]. Tradisi tidak lagi diterima begitu saja, tetapi dinegosiasikan ulang agar relevan dengan konteks kehidupan kontemporer. Dengan demikian, budaya pada era ini berada dalam posisi yang paradoks: di satu sisi semakin terbuka dan adaptif, namun di sisi lain semakin rentan terhadap fragmentasi dan kehilangan kedalaman makna.

Dalam kondisi posmodern dan kontemporer ini, tantangan utama bukanlah bagaimana menghentikan perubahan, karena perubahan itu sendiri adalah keniscayaan. Tantangan yang sesungguhnya adalah bagaimana mengelola perubahan agar budaya tidak tereduksi menjadi sekadar komoditas pasar atau hiasan simbolik yang kehilangan substansi nilai. Ketika budaya

hanya diposisikan sebagai estetika permukaan (untuk pariwisata, branding, atau konten media) ini sangatlah berisiko tercerabut dari fungsi dasarnya sebagai penopang identitas dan martabat manusia. Oleh karena itu, pengelolaan budaya di era kontemporer harus diarahkan pada pelestarian makna, bukan sekadar bentuk. Budaya perlu terus diberi ruang untuk berubah, beradaptasi, dan berdialog dengan zaman, tetapi perubahan tersebut harus tetap berpijak pada nilai-nilai dasar yang membentuk identitas kolektif. Dengan cara inilah budaya dapat tetap berfungsi sebagai sumber nilai, penanda identitas, dan penjaga martabat, bukan sekadar produk konsumsi atau ornamen simbolik dalam arus globalisasi. Dimana dunia yang serba cair, cepat, dan fragmentaris, maka budaya yang dikelola haruslah secara sadar menjadi jangkar makna yang menautkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ia memungkinkan masyarakat untuk berubah tanpa kehilangan diri, dan maju tanpa melepaskan martabatnya.

14.3 Perlindungan Budaya

Jika budaya pada era kontemporer dipahami sebagai proses hidup yang terus bernegosiasi dengan perubahan, maka konsekuensi logisnya adalah bahwa perlindungan budaya tidak lagi dapat dilakukan dengan pendekatan lama yang semata-mata bersifat konservatif dan fisik. Perlindungan budaya hari ini menuntut pemahaman yang lebih luas, lebih dinamis, dan lebih strategis yakni perlindungan terhadap makna, pengetahuan, dan nilai yang terkandung di dalam budaya itu sendiri.

Selama ini, perlindungan budaya sering kali direduksi pada upaya menjaga cagar budaya fisik: bangunan bersejarah, situs purbakala, artefak, dan benda-benda warisan. Pendekatan ini

tentu penting dan tidak dapat diabaikan. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa perlindungan fisik semata tidak cukup. Banyak kebudayaan yang secara material masih berdiri, tetapi secara makna telah kehilangan relevansi dalam kehidupan masyarakatnya. Bangunan adat tetap ada, tetapi nilai yang dikandungnya tidak lagi dipahami atau dihayati oleh generasi penerus.

Dalam kajian kebudayaan kontemporer, perlindungan budaya dipahami sebagai upaya menjaga keberlanjutan sistem makna, bukan hanya keberadaan bentuk luarnya. UNESCO, melalui Konvensi 2003 tentang *Intangible Cultural Heritage*, yang menegaskan bahwa warisan budaya takbenda (seperti bahasa, tradisi lisan, praktik sosial, pengetahuan lokal, dan ekspresi budaya) merupakan bagian paling rapuh sekaligus paling esensial dari kebudayaan (UNESCO, 2003). Tanpa perlindungan yang serius terhadap aspek-aspek ini, budaya dapat punah meskipun artefaknya masih tersisa.

Perlindungan budaya, dengan demikian, harus mencakup dimensi pengetahuan dan nilai, bukan semata dimensi bentuk dan simbol. Budaya pada hakikatnya adalah pengetahuan hidup (*living knowledge*), yakni kumpulan pemahaman, kebijaksanaan, dan pengalaman kolektif yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui praktik sehari-hari, cerita lisan, simbol-simbol, bahasa, serta kebiasaan sosial yang terus dipraktikkan. Pengetahuan ini tidak selalu terdokumentasi secara formal, tetapi hidup dalam ingatan kolektif dan tindakan nyata masyarakat.

Ketika rantai pewarisan pengetahuan budaya ini terputus, baik akibat urbanisasi yang memisahkan generasi muda dari

ruang hidup tradisionalnya, perubahan gaya hidup yang semakin individualistik, maupun dominasi budaya global yang masuk melalui media dan teknologi, pada situasi ini yang hilang bukan hanya tradisi atau ekspresi lahiriah budaya, namun sesungguhnya tergerus adalah cara masyarakat memahami/cara pandang dunia (*world view*), memaknai hubungan sosial, serta menempatkan dirinya dalam relasi dengan alam dan sejarahnya sendiri. Kehilangan ini sering kali tidak disadari secara langsung, tetapi dampaknya terasa dalam jangka panjang berupa krisis identitas, melemahnya solidaritas sosial, dan berkurangnya kepekaan moral.

Dalam konteks inilah, perlindungan budaya harus dipahami sebagai proses aktif dan berkelanjutan, bukan sebagai upaya membekukan budaya di masa lalu atau mempertahankan bentuk-bentuk tradisi secara kaku. Budaya yang dibekukan justru berisiko kehilangan relevansinya dan ditinggalkan oleh generasi muda. Perlindungan budaya pada dasarnya tidak bertujuan menghentikan perubahan, karena perubahan adalah bagian alami dari kehidupan sosial. Sebaliknya, perlindungan budaya bertujuan mengelola perubahan agar budaya dapat terus hidup, tumbuh, dan berdialog dengan zaman.

Melindungi budaya berarti memastikan bahwa setiap proses adaptasi dan inovasi tetap berakar pada nilai-nilai dasar yang membentuk identitas kolektif masyarakat. Nilai-nilai tersebut, seperti penghormatan terhadap sesama, keseimbangan relasi dengan alam, tanggung jawab sosial, serta adab dalam kehidupan bersama, harus terus menjadi rujukan, meskipun bentuk-bentuk ekspresi budaya mengalami perubahan. Dengan cara inilah budaya dapat bertransformasi secara kreatif tanpa kehilangan ruhnya, sekaligus memungkinkan generasi baru

menemukan kembali makna budaya dalam konteks kehidupan mereka sendiri.

Lebih jauh, perlindungan budaya juga bermakna menciptakan dan memperluas ruang-ruang pewarisan nilai. Ruang pewarisan ini tidak lagi terbatas pada komunitas adat atau upacara tradisional semata, tetapi mencakup pendidikan formal, ruang publik, media digital, serta ekosistem kreatif yang berkembang dalam masyarakat. Dengan memperluas ruang pewarisan tersebut, budaya tidak hanya bertahan secara pasif, melainkan memperoleh vitalitas baru sebagai sumber inspirasi, identitas, dan martabat yang terus hidup dan relevan.

Dengan demikian, perlindungan budaya bukanlah sikap defensif terhadap perubahan, melainkan strategi cerdas dan visioner untuk menjaga kesinambungan nilai di tengah dinamika zaman. Perlindungan budaya memastikan bahwa perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi tetap berpijak pada orientasi kemanusiaan. Dalam peran ini, budaya menjadi sumber pengetahuan hidup yang menuntun arah pembangunan, memperkuat kohesi sosial, dan memelihara martabat masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam konteks Nusa Tenggara Barat, perlindungan budaya menjadi semakin penting karena kekayaan budaya Sasak, Samawa, dan Mbojo bukan hanya aset identitas, tetapi juga fondasi kohesi dan ketahanan sosial. Nilai-nilai gotong royong, keseimbangan, adab, serta tanggung jawab sosial yang hidup dalam budaya lokal merupakan penyangga utama masyarakat dalam menghadapi perubahan yang cepat dan kompleks. Tanpa perlindungan yang memadai, nilai-nilai tersebut berisiko

tergerus oleh arus homogenisasi budaya global yang cenderung mengabaikan konteks dan kearifan lokal.

Oleh karena itu, perlindungan budaya pada era kontemporer harus bergerak dari paradigma pelestarian pasif menuju penguatan aktif. Budaya perlu dihadirkan secara sadar dan konsisten dalam sistem pendidikan, perumusan kebijakan publik, hingga ruang digital, serta praktik sosial sehari-hari. Artinya perlindungan budaya bukan sekadar urusan institusi kebudayaan, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, komunitas adat, dan generasi muda sebagai pewaris sekaligus pembaharu nilai.

Dengan demikian, perlindungan budaya merupakan upaya strategis untuk menjaga keberlanjutan identitas, nilai, dan martabat masyarakat. Ia bukan nostalgia romantik terhadap masa lalu, melainkan investasi peradaban yang menentukan kualitas masa depan. Dari titik inilah pembahasan selanjutnya menjadi relevan: ketika budaya harus dilindungi dalam dunia yang semakin dikendalikan oleh data dan algoritma, bagaimana strategi perlindungan budaya dirumuskan di era kecerdasan buatan. Pertanyaan inilah yang akan menjadi fokus pada bagian berikutnya.

14.4 Strategi Melindungi Budaya di Era AI

Era kontemporer ditandai oleh sebuah perubahan besar yang bersifat disruptif. Saat ini teknologi digital dan kecerdasan buatan tidak lagi sekadar alat bantu manusia, melainkan telah menjadi struktur baru yang membentuk cara manusia berpikir, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Disrupsi teknologi ini bukan hanya mengubah sektor ekonomi dan industri, tetapi juga

menggeser lanskap sosial, budaya, dan bahkan kesadaran kolektif masyarakat.

Disrupsi teknologi berbeda dari perubahan biasa. Ia bekerja dengan kecepatan tinggi, skala masif, dan daya jangkau global. Inovasi teknologi tidak menunggu kesiapan budaya atau nilai sosial; ia hadir, digunakan, lalu membentuk kebiasaan baru. Kecerdasan buatan, sebagai puncak dari transformasi digital saat ini, mempercepat proses tersebut dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. AI tidak hanya mengolah informasi, tetapi juga memproduksi pengetahuan, merekomendasikan pilihan, dan secara tidak langsung memengaruhi cara manusia memahami dunia.

Pada titik inilah persoalan budaya menjadi sangat krusial. Kecerdasan buatan bekerja berdasarkan data dalam skala besar (*big data*), yakni kumpulan masif teks, gambar, suara, dan jejak perilaku manusia yang diproduksi dan dikurasi secara terus-menerus. Data inilah yang menjadi fondasi pembelajaran mesin yang akan menentukan cara AI mengenali pola, membangun makna, serta menghasilkan pengetahuan. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh banyak pemikir kritis teknologi, data tidak pernah netral. Ia selalu membawa konteks sosial, kepentingan ekonomi, dan relasi kekuasaan dari pihak yang memproduksi dan menguasainya.

Hingga saat ini, sebagian besar sistem AI global saat ini dilatih menggunakan data yang berasal dari budaya dominan, baik dari segi bahasa, geopolitik, maupun nilai. Bahasa global, perspektif urban-industrial, dan cara pandang modern Barat mendominasi lanskap data digital dunia. Akibatnya, budaya lokal yang minim dokumentasi digital, tidak terstruktur secara

data, atau tidak dianggap bernilai secara ekonomi dan politik, berisiko tidak dikenali, disalahpahami, atau tersingkir secara sistemik oleh kecerdasan buatan.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa AI tidak bersifat netral secara budaya, karena ia membawa logika, nilai, dan bias dari data yang membentuknya. Menurut Cathy O'Neil (2016) menyebut kondisi ini sebagai *algorithmic bias*, dimana algoritma saat ini justru mereproduksi ketimpangan sosial kultural yang telah ada, sambil menyamarkannya dalam klaim objektivitas matematis. Dalam konteks budaya, bias ini menimbulkan berpotensi menghapus keberadaan budaya tertentu secara simbolik, bukan melalui pelarangan (kovensional), tetapi melalui ketidakhadiran dalam sistem pengetahuan digital.

Sementara, Safiya Umoja Noble melalui konsep *algorithmic oppression* (2018) menunjukkan bahwa teknologi pencarian dan rekomendasi tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga membentuknya. Ketika budaya lokal tidak hadir atau direpresentasikan secara keliru dalam sistem AI, maka generasi masa depan (baik manusia maupun mesin) akan membangun pemahaman dunia yang timpang. Inilah yang menyebabkan AI tidak dapat dipandang sebagai teknologi yang netral secara budaya, karena ia membawa logika, nilai, dan bias dari data yang melahirkannya.

Dalam perspektif yang lebih luas, beberapa pemikir menyebut kondisi ini sebagai bentuk baru kolonialisme digital (*digital colonialism).* Data dan pengetahuan budaya dari berbagai belahan dunia diekstraksi, diolah, dan dikendalikan oleh segelintir aktor global, sementara komunitas lokal kehilangan kendali atas representasi dan makna budayanya sendiri (Couldry

& Mejias, 2019). Ancaman terhadap budaya, dengan demikian, tidak lagi hadir dalam bentuk pelarangan adat atau penindasan langsung sebagaimana pada masa kolonial klasik, melainkan melalui ketiakhadiran budaya lokal dalam ekosistem data dan algoritma yang membentuk pengetahuan masa depan.

Artinya budaya yang tidak hadir dalam data berisiko menjadi *invisible culture*, tidak dikenali, dan tidak diperhitungkan dalam sistem pengambilan keputusan berbasis AI. Ketika sistem pendidikan digital, mesin pencari, penerjemah otomatis, dan kecerdasan buatan generatif tidak mengenal suatu budaya, maka budaya tersebut perlahan terpinggirkan dari ruang pengetahuan global. Inilah bentuk penghapusan yang halus, tetapi berdampak jangka panjang terhadap identitas dan martabat suatu masyarakat.

Perspektif ini diperkuat secara strategis oleh Hartanto dalam bukunya Geopolitik AI: Puncak Konflik Kekuasaan di Era Digital (2025), yang menegaskan bahwa kecerdasan buatan bukan sekadar teknologi, melainkan instrumen kekuasaan geopolitik. Menurut Hartanto, AI adalah arena baru pertarungan global, di mana data berfungsi sebagai sumber daya strategis yang setara (melampaui) minyak dan senjata konvensional. Siapa yang menguasai data, menentukan standar algoritma, dan membentuk ekosistem AI, pada hakikatnya menguasai arah pengetahuan dan peradaban masa depan.

Dalam kerangka geopolitik AI ini, budaya lokal yang tidak hadir dalam data bukan hanya kehilangan representasi, tetapi juga kehilangan posisi tawar dalam konflik kekuasaan digital global. Hartanto menegaskan bahwa negara atau komunitas yang gagal mengamankan data (termasuk data budaya) akan

terjebak sebagai konsumen teknologi, bukan produsen makna. Mereka akan hidup dalam sistem AI yang dibangun dengan nilai, bahasa, dan logika pihak lain, sehingga secara perlahan mengalami subordinasi kultural.

Memahami kondisi ini merupakan langkah awal yang sangat penting sebelum berbicara tentang strategi perlindungan budaya. Perlindungan budaya di era kecerdasan buatan tidak lagi memadai jika hanya mengandalkan pendekatan lama yang berfokus pada pelestarian fisik, simbolik, atau seremoni semata. Tantangan hari ini menuntut pendekatan strategis yang memahami cara kerja teknologi, logika data, dan relasi kuasa di balik algoritma.

Dengan kata lain, perlindungan budaya di era AI harus bergerak dari paradigma "menjaga warisan" menuju paradigma menghadirkan budaya secara bermartabat dalam sistem pengetahuan digital. Budaya tidak cukup dilindungi dari luar teknologi, tetapi harus dihadirkan dari dalam bahkan menjadi bagian dari data, narasi, dan pengetahuan yang membentuk cara mesin memahami dunia. Dari kesadaran inilah strategi perlindungan budaya di era AI perlu dirumuskan secara lebih konkret, sistematis, dan berdaulat.

Dari kesadaran inilah muncul kebutuhan akan pergeseran strategi perlindungan budaya yang lebih radikal sekaligus adaptif. Ketika kecerdasan buatan belajar dari data, maka persoalan budaya di era AI pada hakikatnya bukan lagi semata soal pelestarian, melainkan soal kehadiran. Budaya yang ingin bertahan, dikenali, dan dihormati di masa depan tidak cukup hanya dijaga sebagai warisan, tetapi harus dihadirkan secara aktif, masif, dan berkelanjutan dalam ekosistem pengetahuan

digital. Dengan kata lain, perlindungan budaya di era AI menuntut pendekatan yang bersifat ofensif-konstruktif, bukan lagi hanya sekadar defensif-preservatif.

Dalam kerangka inilah strategi perlindungan budaya menemukan bentuknya sebagai sebuah gerakan sadar untuk membanjiri ruang digital dengan konten budaya yang bermakna, yang selanjutnya dapat disebut sebagai **Gerakan Banjir Data Budaya**. Gerakan ini bertolak dari pemahaman mendasar tentang cara kerja algoritma: bahwa kecerdasan buatan mengenali realitas melalui kuantitas, keterulangan, dan keterhubungan data. Semakin sering suatu bahasa, narasi, simbol, dan pengetahuan budaya hadir dalam ruang digital, semakin besar kemungkinan ia dikenali, dipelajari, dan direproduksi oleh sistem AI sebagai bagian dari pengetahuan dunia.

Namun, membanjiri ruang digital dengan konten budaya tidak dimaksudkan sebagai produksi konten yang serampangan, dangkal, atau terlepas dari nilai. Sebaliknya, gerakan ini harus dipahami sebagai upaya sistematis dan berkesadaran untuk menghadirkan budaya secara utuh, kontekstual, dan bermartabat. Konten budaya tidak berhenti pada artefak visual seperti tarian, busana adat, atau upacara tradisional, tetapi mencakup cerita rakyat, filosofi hidup, nilai etika, bahasa lokal, sistem pengetahuan tradisional, hingga praktik sosial yang mencerminkan cara masyarakat memahami kehidupan. Inilah yang menjadikan budaya hadir sebagai *living data* (data yang hidup, bermakna, dan berakar), bukan sekadar representasi simbolik yang terpisah dari konteksnya.

Lebih jauh, Gerakan Banjir Data Budaya juga merupakan bentuk perlawanan kultural yang cerdas terhadap bias

algoritmik dan kolonialisme digital. Ketika budaya lokal dihadirkan secara sadar dan masif dalam ruang data, dominasi narasi tunggal yang dibentuk oleh budaya mayoritas global dapat dilunakkan. Keberagaman makna memperoleh ruang yang lebih adil, dan sistem pengetahuan digital menjadi lebih inklusif. Dalam konteks ini, membanjiri konten budaya bukan sekadar aktivitas kreatif, melainkan tindakan politik-kultural untuk mempertahankan kedaulatan identitas di tengah pertarungan geopolitik data global.

Namun, gerakan ini tidak mungkin dijalankan oleh satu aktor saja. Ia menuntut keterlibatan kolektif lintas sektor. Negara dan pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator kebijakan, regulasi, dan infrastruktur data budaya. Lembaga pendidikan menjadi pusat produksi pengetahuan, dokumentasi nilai, dan pembentukan kesadaran generasi muda. Seniman, kreator, dan pelaku industri kreatif berperan sebagai ujung tombak dalam menerjemahkan budaya ke dalam bahasa visual dan digital yang relevan dengan zamannya. Sementara itu, komunitas adat dan masyarakat lokal tetap menjadi penjaga makna, memastikan bahwa setiap representasi budaya tidak kehilangan konteks, nilai, dan ruh yang melahirkannya.

Dengan demikian**, Gerakan Banjir Data Budaya bukanlah upaya memuseumkan budaya di ruang digital, melainkan menghidupkan budaya di jantung teknologi**. Budaya tidak hanya dikenang, tetapi digunakan; tidak hanya ditampilkan, tetapi dipahami; tidak hanya diwariskan, tetapi diperbarui secara sadar. Inilah strategi perlindungan budaya yang selaras dengan logika zaman yang tidak menolak kehadiran kecerdasan buatan, tetapi memanfaatkannya sebagai medium untuk memperkuat identitas, martabat, dan keberlanjutan peradaban.

Dari titik inilah selanjutnya menemukan pijakan yang utuh. Setelah memahami urgensi kehadiran budaya dalam ekosistem data dan algoritma, langkah berikutnya adalah merumuskan secara lebih konkret bentuk, prinsip, dan arah operasional Gerakan Banjir Data Budaya sebagai strategi utama melindungi identitas daerah di era kecerdasan buatan.

14.5 Peran Kreativitas dalam Produksi Data Budaya

Dalam kerangka Gerakan Banjir Data Budaya, kreativitas menempati posisi yang sangat sentral. Jika data adalah bahasa yang dipahami oleh kecerdasan buatan, maka kreativitas adalah mekanisme penerjemah nilai budaya ke dalam bahasa data. Tanpa kreativitas, budaya hanya akan terdokumentasi secara kering dan teknis; dengan kreativitas, budaya dapat hadir sebagai pengetahuan hidup (*living knowledge*) yang bermakna, kontekstual, dan berdaya tahan.

Kreativitas dalam konteks ini tidak dapat dipersempit sebagai aktivitas seni individual semata. Ia harus dipahami sebagai kapasitas kolektif masyarakat untuk mengolah warisan nilai menjadi ekspresi baru yang relevan dengan zamannya. Dalam tradisi pemikiran kontemporer, kreativitas dipandang sebagai proses rekontekstualisasi yakni kemampuan untuk menjaga kontinuitas makna sambil mengubah bentuk ekspresi. Dengan cara ini, budaya tidak terjebak sebagai artefak masa lalu, tetapi hadir sebagai sumber inspirasi yang terus diperbarui.

Artinya produksi data budaya membutuhkan kreativitas karena data budaya yang bermartabat tidak cukup disajikan dalam bentuk mentah. Dokumentasi semata (misalnya berupa foto, video, atau teks deskriptif) sering kali gagal menangkap lapisan makna, nilai, dan filosofi yang melatarinya. Kreativitas

memungkinkan terjadinya pengayaan makna: cerita rakyat diolah menjadi film atau animasi; nilai-nilai adat diterjemahkan menjadi narasi visual, komik, atau permainan digital; bahasa lokal dihidupkan melalui musik, puisi digital, atau aplikasi interaktif. Setiap karya kreatif ini tidak hanya berfungsi sebagai produk budaya, tetapi juga sebagai entitas data yang kaya konteks.

Dalam kajian ekonomi budaya, UNESCO menegaskan bahwa kreativitas merupakan inti dari *cultural value chain*, yakni rantai nilai budaya yang menghubungkan proses penciptaan makna, produksi simbol, distribusi pengetahuan, hingga pembentukan nilai sosial dan ekonomi kreatif. Dalam kerangka ini, kreativitas tidak dipahami sebagai aktivitas individual yang terpisah, melainkan sebagai mekanisme sistemik yang menggerakkan budaya agar terus hidup, relevan, dan bernilai dalam kehidupan masyarakat. Kreativitas memungkinkan nilai-nilai budaya menjelma menjadi pengetahuan bersama, sekaligus menjadi sumber kesejahteraan tanpa kehilangan akar etiknya.

Namun, dalam konteks kecerdasan buatan, rantai nilai budaya tersebut mengalami perluasan dimensi yang signifikan. Kreativitas tidak lagi hanya berfungsi untuk menghasilkan karya dan nilai ekonomi, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk memastikan bahwa budaya lokal terekam, terbaca, dan diinternalisasi dalam sistem pengetahuan digital yang semakin menentukan arah peradaban. Pada titik ini, kreativitas bertransformasi menjadi instrumen epistemologis yakni alat untuk membentuk cara pengetahuan diproduksi, disimpan, dan diwariskan di era digital.

Dengan kata lain, kreativitas tidak hanya bernilai estetis dan ekonomis, tetapi juga bernilai strategis dan epistemik. Ia menentukan budaya mana yang akan hadir dalam memori kolektif digital, dan budaya mana yang akan terpinggirkan. Dalam dunia yang semakin digerakkan oleh data dan algoritma, kreativitas menjadi medium agar budaya lokal tidak sekadar menjadi objek konsumsi, tetapi subjek pengetahuan yang ikut membentuk cara mesin memahami realitas sosial dan kemanusiaan. Artinya kreativitas juga memainkan peran yang sangat penting dalam menghadapi logika algoritma. Algoritma kecerdasan buatan bekerja berdasarkan pola keterulangan, keterhubungan, dan konsistensi data. Sistem AI tidak mengenali makna secara filosofis, melainkan membaca frekuensi, relasi, dan struktur data. Oleh karena itu, budaya yang hadir secara sporadis, terputus-putus, atau tidak berkelanjutan akan sulit dikenali oleh sistem AI sebagai entitas pengetahuan yang signifikan.

Sebaliknya, kreativitas yang berkelanjutan, yakni produksi konten budaya secara terus-menerus, beragam dalam bentuk, dan saling terhubung dalam narasi yang akan membentuk jejak data budaya (*cultural digital footprint*) yang kuat. Jejak inilah yang memungkinkan budaya lokal memperoleh visibilitas, keberlanjutan, dan legitimasi dalam ekosistem digital global. Semakin kaya dan konsisten jejak data budaya yang dihasilkan, semakin besar peluang budaya tersebut untuk dikenali, dipelajari, dan direpresentasikan secara lebih adil oleh sistem kecerdasan buatan.

Dalam konteks ini, kreativitas tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai proses "mencipta karya", melainkan sebagai strategi kehadiran budaya. Kreativitas menjadi cara sadar untuk

memastikan bahwa budaya hadir secara aktif dalam arus data, membentuk pola pengetahuan, dan menegaskan eksistensinya di tengah dominasi narasi global. Kreator budaya (baik seniman, pendidik, penulis, pembuat film, maupun kreator digital) pada hakikatnya berperan sebagai arsitek jejak budaya di ruang digital, yakni pihak yang menentukan bagaimana suatu budaya dikenali, dipahami, dan diingat di masa depan.

Lebih jauh, strategi kreativitas ini menuntut kesadaran akan keterhubungan antar konten. Konten budaya yang berdiri sendiri cenderung mudah tenggelam dalam derasnya arus informasi digital, sementara konten yang saling merujuk, berjejaring, dan membentuk ekosistem narasi akan memiliki daya tahan yang lebih kuat. Oleh karena itu, kreativitas perlu diarahkan bukan hanya pada produksi karya individual, tetapi juga pada pembangunan ekosistem data budaya yang saling terhubung, lintas medium, dan lintas generasi.

Pemahaman ini menjadi sangat relevan dalam konteks Nusa Tenggara Barat. Budaya Sasak, Samawa, dan Mbojo tidak seharusnya diposisikan sebagai entitas yang terpisah dan berdiri sendiri, melainkan sebagai satu ekosistem data budaya NTB yang kaya, beragam, dan saling melengkapi. Kreativitas berperan sebagai pengikat yang menerjemahkan nilai, bahasa, dan filosofi ketiga budaya tersebut ke dalam bentuk-bentuk digital yang saling terhubung dan dapat dibaca sebagai satu kesatuan pengetahuan.

Nilai kebersamaan dan gotong royong dalam budaya Sasak, prinsip keseimbangan dan kepantasan dalam budaya Samawa, serta etika adab dan konsistensi moral dalam budaya Mbojo, jika dihadirkan secara kreatif dan berkelanjutan, akan

membentuk pola data budaya yang kuat dan khas. Pola inilah yang memungkinkan sistem kecerdasan buatan mengenali NTB bukan sekadar sebagai wilayah geografis, tetapi sebagai ruang nilai dan peradaban yang memiliki karakter etis yang jelas.

Dengan membangun ekosistem data (*big data*) budaya Sasak–Samawa–Mbojo dengan secara kreatif, NTB tidak hanya mendokumentasikan budayanya, tetapi juga menegaskan kedaulatan narasi di ruang digital. Budaya lokal hadir bukan sebagai pelengkap folkloris, melainkan sebagai sumber pengetahuan yang ikut membentuk cara teknologi memahami relasi manusia, keadilan sosial, dan kehidupan bersama. Dalam konteks ini, kreativitas berfungsi sebagai alat untuk mengubah keberagaman budaya menjadi kekuatan epistemik.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa kreativitas adalah kunci untuk memastikan budaya lokal tidak sekadar bertahan, tetapi hadir secara berdaulat dalam sistem pengetahuan digital masa depan. Kreativitas memungkinkan budaya berbicara dengan bahasa zaman tanpa kehilangan nilai yang melahirkannya. Inilah peran strategis kreativitas dalam produksi data budaya: bukan hanya menghidupkan tradisi, tetapi menempatkannya secara bermartabat di jantung teknologi dan kecerdasan buatan.

DAFTAR PUSTAKA

Afzali, M.A.(2010). *Human Dignity and Euthanasia in Islamic Ethics*. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 20 (78): 82–95.

Ansell,C. & Gash,A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice.* Journal of Public Administration Research and Theory, 18 (4) : 543–571. Doi: 10.1093/jopart/mum032.

Arendt, H. (1958). *The Human Condition*. Chicago: University of Chicago Press.

Arendt, H. (1968). *Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought*. New York: Viking Press.

Aristotle.(1998). *Politics. Trans*. Benjamin Jowett. Oxford: Oxford University Press.

Barbier, E. B. (1987). *The Concept Of Sustainable Economic Development*. Environmental Conservation, 14(2) : 101–110.

Bass, B. M. (1985). *Leadership and Performance Beyond Expectations*. New York: Free Press.

Becker,G.S.(1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis*.Chicago: University of Chicago Press.

BPS Provinsi NTB. (2022). *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi NTB Februari 2022*. Berita Resmi Statistik. Mataram: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BPS Provinsi NTB. (2023). *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi NTB Februari 2023*. Berita Resmi Statistik. Mataram: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BPS Provinsi NTB. (2024). *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi NTB Februari 2024*. Berita Resmi Statistik. Mataram: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BPS Provinsi NTB.(2025). *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi NTB Februari 2025*. Berita Resmi Statistik. Mataram: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Burke, E. (1999). *Reflections on the Revolution in France*. Oxford: Oxford University Press.

Burns, J. M. (1978) . *Leadership*. New York: Harper & Row.

Burns, J. M. (1978). *Leadership*. New York: Harper & Row.

Carayannis, E. G., & Campbell, D.F. J. (2012).*Mode 3 Knowledge Production in Quadruple Helix Innovation Systems*. New York: Springer.

Carayannis, E. G., & Campbell, D.F. J. (2010).*Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and How Do Knowledge, Innovation and the Environment Relate To Each Other?*. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development 1 (1) : 41–69.

Chambers, R.(1983).*Rural Development: Putting the Last Firs*t. London: Longman.

Cooper, T, L. (2006). *The Responsible Administrator*. San Francisco: Jossey-Bass.

Couldry,N. & Mejias, U.A. (2019). *The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life*. Stanford: Stanford University Press).

Etzkowitz, H., & Leydesdorff.L. (1995). *The Triple Helix – University–Industry–Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development*. EASST Review 14 (1) : 14–19.

Folke, C., et al. (2010). *Resilience Thinking: Integrating Resilience, Adaptability and Transformability*. Ecology and Society, 15(4).

Fry, L. W. (2003). *Toward a Theory of Spiritual Leadership*. The Leadership Quarterly, 14(6): 693–727.

Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.

Giddens, A.(1991). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Cambridge: Polity Press.

Gollier, C.,et al (2000*). Scientific Progress and Irreversibility: An Economic Interpretation of the Precautionary Principle*. Journal of Public Economics, 75(2):229–253.

Greenleaf, R. K. (1977). *Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness*. New York: Paulist Press.

Guilford, J. P. (1950). *Creativity. American Psychologist*, 5(9) : 444–454.

Habermas, J.(1982). *Theorie und Praxis: Sozialphilosophische Studien*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Hamidullah, M. (1968). *The First Written Constitution in the World*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf.

Harnish, D.(2012).*Local Traditions and Governance in Sasak Society*. Indonesia and the Malay World,40 (116).

Hartanto.(2025). *Geopolitik AI: Puncak Konflik Kekuasaan di Era Digital*. Jakarta: LPMI.

Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1982). *Management of Organizational Behavior*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Hood, C.(1991). *A Public Management for All Seasons?*. Public Administration 69 (1) .

Ikhwan, H.S. (2023). *Spiritual Management: Teori, Konsep, dan Penelitian*. Uwais Inspirasi Indonesia

IMF.(2024).*AI Will Transform the Global Economy – Let's Make Sure It Benefits Humanity*.IMF Blog. https://www.imf.org/en/blogs/articles/2024/01/14/ai-will-transform-the-global-economy-lets-make-sure-it-benefits-humanity

Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Kant, I.(1997). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press.

Kaplan, R. S. & Norton, D.P. (2001). *Strategy-Focused Organization*. Boston: Harvard Business School Press.

Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kooiman, J. (1993). *Modern Governance: New Government–Society Interactions*. London: Sage Publications.

Kurniawan, S. & Pulungan, J.J.(2025).*Martabat Kemanusiaan Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Al-Azhar Karya Prof. Hamka*. Ulumuddin, 16 (1): 25 - 48

Lewis,W. A. (1954). *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*. The Manchester School 22 : 139–191.

Lipper, L., et al. (2014). *Climate-Smart Agriculture for Food Security*. Nature Climate Change, 4: 1068–1072.

Lobell, D. B., & Gourdji, S. M. (2012). *The Influence of Climate Change on Global Crop Productivity*. Plant Physiology, 160: 1686–1697.

Lyotard, J.(1984). *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Manchester: Manchester University Press.

Machiavelli, N. (1998). *The Prince* (H. C. Mansfield, Trans.). Chicago: University of Chicago Press.

Madung,O.G.(2012).*Martabat Manusia Sebagai Basis Etis Masyarakat Multikultural*. DISKURSUS, 11(2): 160-173.

Mariana, M. (2013). *The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths* . London: Anthem Press.

McCraw, T. K. (2007). *Prophet of Innovation: Joseph Schumpeter and Creative Destruction*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Moore, M. H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government.* Cambridge, MA: Harvard University Press.

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice (5th ed.)*. New York: McGraw-Hill.

Nastiti,K.T., et al.(2025).*Faktor-Faktor Penentu Prevalensi Stunting di Nusa Tenggara Barat:Analisis Spasial dengan Modifikasi Ketetanggaan*. Jambura Journal of Probability and Statistics, 6 (1): 1–6. doi: 10.3431 2/jjbm.

Nelson, R. R., ed.(1993). *National Innovation Systems: A Comparative Analysis.* New York: Oxford University Press.

Noble,S.U.(2018).*Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism* .New York: NYU Press.

North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* . Cambridge: Cambridge University Press.

Northouse, P. G. (2019). *Leadership: Theory and Practice*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Notonagoro. (1975). *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.

O'Neil, C.(2016). *Weapons of Math Destruction*. New York: Crown.

Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.

Plato. (2004). *The Republic* (C. D. C. Reeve, Trans.). Indianapolis: Hackett Publishing.

Poespowardojo, S. (1993). *Filsafat Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press.

Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.

Raffensperger, C., & Tickner, J. (1999). *Protecting Public Health and the Environment: Implementing the Precautionary Principle*. Washington, DC: Island Press.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

Rhodes, R. A. W.(1996).T*he New Governance: Governing without Government*. Political Studies 44, (4) . Doi: 10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x

Rose, N. (2007). *Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century*. Princeton: Princeton University Press.

Sands, P., & Peel, J. (2018). *Principles of International Environmental Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development*. Cambridge: Harvard University Press.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom* . Oxford: Oxford University Press.

Soedjatmoko.(1983). *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. LP3ES.

Soekarno .(1945).*Lahirnya Pancasila*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Solow, R. M. (1956). *A Contribution to the Theory of Economic Growth*, The Quarterly Journal of Economics 70 (1) : 65–94.

Sørensen, E. & Torfing, J.(2007).T*heories of Democratic Network Governance*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Surmaini, E., et al. (2018). *Strategi Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Pertanian di Indonesia*. Jurnal Sumberdaya Lahan, 12(2).

Thornton, P. K., et al. (2018). *Climate Change Adaptation In Agriculture*. Global Food Security: 17: 1–8.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UNDP .(1990).*Human Development Report*. New York: UNDP.

UNESCO.(2003). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Paris: UNESCO.

United Nations. (1992). *Rio Declaration on Environment and Development*. United Nations Conference on Environment and Development.

WCED. (1987). *Our Common Futur*e. Oxford: Oxford University Press.

WCED.(1987). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.

Weber, M. (1978). *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press.

Weber, M.(1965).*Politics as a Vocation*. Philadelphia: Fortress Press.

WEF.(2023a).*The Future of Jobs Report 2023*.Geneva: WEF.

WEF.(2023b).*Jobs, Skills and the Digital Economy*. Geneva: WEF.

WEF.(2023c).*The Digital Transformation of Business*, Global Survey Report.

Internet

https://ntbprov.go.id

https://www.globalforestwatch.org

https://ekbisntb.com

BIOGRAFI

Dr Ikhwan HS.,SE., MM.,M.Si adalah seorang akademisi, pemikir dan praktisi bidang ilmu manajemen. Lahir di Ngali Bima, 27 Maret 1973, sebagai anak pertama dari H. Sirajuddin dan Hj. Faturiah.

Dr Ikhwan HS.,SE., MM.,M.Si merupakan lulusan Doktor dari Universitas Brawijaya, dengan rekam jejak pengabdian sebagai pendidik selama 25 tahun di perguruan tinggi, dan saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial (FBIS) Universitas Binawan.

Pengalaman Kerja :

- 2024-sekarang : Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial (FBIS) Universitas Binawan
- 2018- 2024 : Wakil Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Gunadarma
- 2016-2021 : Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Islam Attahiriyah Jakarta
- 2016-2018 : Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Attahiriyah
- 2012-2016 : Ketua Program Studi Manajemen FE Universitas Islam Attahiriyah Jakarta
- 2003-2007 : Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Purnama Jakarta

Pengalaman Profesional

- 2012- Sekarang : Direktur Yayasan Al- Kalam Ngali Indonesia

- 2016-2018 : Konsultan & Tenaga Ahli Balitbang Kementrian Dalam Negeri
- 2012-2013 : Menjadi konsultan Ahli project Peningkatan kapasitas pemerintahan
- Kabupaten Pandeglang Provinsi banten "*UNDP Project Governance Capasity Building*"
- 2002- 2016 : Direktur PT. Madani Semesta Indonesia menjabat sebagai tenaga Ahli & Konsultan
- Menjadi Tim perumus materi Debat Bupati Bima NTB periode 2020-2024
- Menjadi Tim perumus materi Debat Bupati Bima NTB periode 2024-2028

Organisasi Sosial dan Asosiasi

- Pengurus Bidang Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Majelis Nasional KAHMI
- Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Indonesia
- Anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI)
- Anggota Asosiasi Pendidikan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI)

Transformasi Pembangunan NTB *Bermatabat*

> NTB memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Buku ini mengajak kita untuk melakukan transformasi pembangunan yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan demi terwujudnya NTB yang bermartabat dan membanggakan.

Buku ini mengupas gagasan, strategi, dan solusi nyata untuk menjawab tantangan pembangunan NTB masa kini dan masa depan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada nilai-nilai lokal, buku ini menjadi panduan penting bagi para pemimpin, akademisi, praktisi, dan seluruh masyarakat yang peduli terhadap kemajuan NTB.

BUKU INI MEMBAHAS:

- Visi dan arah transformasi pembangunan NTB menuju masa depan yang gemilang.
- Strategi pembangunan inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Penguatan kolaborasi dan tata kelola yang baik untuk keberlanjutan daerah.
- Solusi inovatif untuk menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

GAGASAN & SOLUSI

UNTUK NTB YANG LEBIH BAIK

> "Pembangunan bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi membangun manusia, membangun harapan, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk semua."

Lembaga Pembangunan Masyarakat Indonesia

ISBN 978-634-96388-5-2

9 786349 638852